



LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KOTA BONTANG TAHUN 2025

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

KATA PENGANTAR



Puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bontang Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian sasaran strategis pada tahun anggaran 2025. Tahun 2025 merupakan tahun kelima pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Bontang 2021–2026. Kinerja yang telah dilaksanakan berakhir pada triwulan ketiga, sementara pelaksanaan triwulan keempat akan dilanjutkan dengan RPJMD 2026–2029 sesuai dengan kepemimpinan kepala daerah yang baru. Namun demikian, laporan kinerja triwulan keempat tetap mengacu pada RPJMD 2021–2026 sebagaimana arahan Kementerian PANRB melalui surat pemberitahuan penyampaian Laporan Kinerja 2025, yang menegaskan bahwa dasar RPD/RKPD periode sebelumnya masih dapat digunakan hingga akhir tahun 2025. Namun demikian, Pemerintah Kota Bontang selain menyajikan capaian berdasarkan RPJMD 2021–2026 juga menyajikan laporan transisi menuju RPJMD 2026–2029. Meskipun waktu yang tersedia sangat terbatas untuk melaksanakan seluruh sasaran program dan kegiatan pada triwulan keempat sesuai dengan perjanjian kinerja perubahan, Pemerintah Kota Bontang tetap berkomitmen untuk konsisten, taat, dan konsekuen dalam menyelenggarakan apa yang sudah diperjanjikan sebagai bentuk tanggung jawab yang telah diemban.

Laporan Kinerja Pemerintah Kota Bontang Tahun 2025 memiliki peran strategis sebagai instrumen akuntabilitas sekaligus pengendali kinerja. Dokumen ini berfungsi antara lain sebagai **Alat penilaian kinerja**, untuk mengukur sejauh mana perangkat daerah mencapai sasaran yang telah ditetapkan. **Alat kendali**, guna memastikan pelaksanaan program dan kegiatan tetap berada dalam koridor perencanaan pembangunan daerah. **Alat pemacu peningkatan kinerja**, yang mendorong setiap perangkat daerah untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Pengukuran kinerja dilaksanakan berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU), yang menjadi tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran RPJMD. IKU tersebut telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bontang Tahun 2025, sehingga laporan ini sekaligus merepresentasikan wujud pertanggungjawaban atas komitmen yang telah disepakati.



Dengan demikian, Laporan Kinerja tidak hanya berfungsi sebagai dokumen evaluasi, tetapi juga sebagai bukti nyata konsistensi Pemerintah Kota Bontang dalam melaksanakan amanat pembangunan daerah sesuai dengan target yang telah direncanakan.

Secara umum, capaian kinerja sasaran telah berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target sebagaimana diharapkan.

Pencapaian kinerja ini sangat bergantung pada komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif dari seluruh komponen, baik aparatur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, maupun *civil society*. Keseluruhan elemen tersebut merupakan bagian integral dari proses pembaharuan sistem administrasi negara, sehingga sinergi dan kolaborasi menjadi faktor penentu keberhasilan.

Dengan dukungan yang berkesinambungan, diharapkan capaian kinerja yang belum optimal dapat terus ditingkatkan, sehingga tujuan pembangunan daerah dapat terwujud secara lebih merata dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil analisis serta evaluasi objektif yang dilakukan melalui Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Kementerian PANRB Tahun 2025, diharapkan terjadi optimalisasi peran instansi serta peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat maupun pelaksana di lingkungan Pemerintah Kota Bontang pada periode berikutnya.

Upaya ini ditujukan untuk memperkuat kinerja Pemerintah Kota Bontang secara menyeluruh dalam rangka mewujudkan prinsip *Good Governance* dan *Clean Government*. Dengan demikian, evaluasi yang dilakukan tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur capaian, tetapi juga sebagai dasar perbaikan berkelanjutan demi peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.

Bontang, 14 April 2026



WALI KOTA

NENI MOERNIAENI



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA BONTANG TAHUN 2025

BerAKHLAK
Berakhlak Melayani Masyarakat
Harmonis Ulaya Adaptif Inovasi

**#bangga
melayani
bangsa**

SURAT PERNYATAAN SUDAH DIREVIU



PEMERINTAH KOTA BONTANG INSPEKTORAT DAERAH

Graha Taman Praja Blok II Lt.3, Jl. Bessai Berinta, Bontang Lestari,
Bontang, Kalimantan Timur 75324
Laman inspektorat.bontangkota.go.id, Pos-el inspektoratkotabontang@gmail.com

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Nomor: B/700.1.2/25/ITDA/2026

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bontang Tahun Anggaran 2025 telah direviu sesuai pedoman reviu atas Laporan Kinerja, yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Kota Bontang.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan hasil reviu diketahui masih terdapat beberapa kesalahan/kelemahan yang ditemui, namun tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bontang Tahun Anggaran 2025.

Bontang, 14 April 2026
Inspektur,



Enik Ruswati, S.E.,M.M.,Ak.,CA.,CRA.,CGCAE., CFrA., CGRE
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 196810291990032005

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran perangkat daerah. Laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) menjadi bagian penting dari reformasi birokrasi yang saat ini sedang dijalankan pemerintah dan merupakan bentuk penerapan dari praktik pemerintahan yang baik. Penyusunan laporan kinerja bertujuan; (a) memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan (b) sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Dalam upaya pencapaian Visi 2021-2026 “Terwujudnya Kota Bontang Yang Lebih Hebat dan Beradab” maka telah terumuskan tiga misi pembangunan Kota Bontang yakni:

- Misi I: Kota Bontang yang HARMONI melalui pemantapan sinergi dan kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pembangunan
- Misi II: Kota Bontang yang BERKELANJUTAN yang layak huni, cerdas dan berwawasan lingkungan melalui pemantapan ekonomi, sosial budaya, dan infrastruktur serta pelestarian lingkungan hidup.
- Misi III: Kota Bontang yang BERDAYA SAING dan SEJAHTERA melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia

Dalam rangka mencapai ketiga misi pembangunan jangka menengah Kota Bontang, maka dirumuskan tujuan dan sasaran pada masing-masing misi tersebut beserta indikator-indikator dalam pencapaian sasaran strategisnya.

Capaian tujuan dan sasaran Kota Bontang Tahun 2025 berdasarkan target RPJMD 2021-2026

TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	Realisasi				2023						
					2021	2022	2023	2024	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERFORMA KUALITAS			
Misi 1: Kota Bontang yang HARMONI Melalui Pemertapan Sinergi dan Kolaborasi Pemerintah, Masyarakat, dan Dunia Usaha dalam Pembangunan															
T.1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang harmonis, berakhlak, amanah, dan bertanggung jawab	Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah			Indeks	N/A	N/A	N/A	N/A	85	N/A	N/A	N/A		
		S.1	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Profil	65,24	65,38	71,21	71,21	A (82,32)	85,19	103,49%	Tercapai		
					Nilai LPPD	Profil	Tinggi (3,86607)	Sedang (3,370)	Sedang (3,370)	3,000	Tinggi (4,20)	3,000	73,00%	Tidak Tercapai	
					Opini BPK	Profil	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100,00%	Tercapai	
		S.2	Meningkatnya kondusifitas wilayah	Jumlah konflik	Akumulasi	N/A	5	7	5	5	5	100,00%	Tercapai		
					Persentase Penyelesaian Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum	Persentase	N/A	100	100	100	100	100	100,00%	Tercapai	
Misi 2: Kota Bontang yang BERKELANJUTAN yang layak huni, cerdas dan berwawasan lingkungan melalui pemertapan ekonomi, sosial budaya, dan infrastruktur serta pelestarian lingkungan hidup.															
T.2	Meningkatnya pembangunan perkotaan yang layak huni, cerdas dan berwawasan lingkungan	Indeks Kota Berwawasan Lingkungan (IKBL)			Indeks	N/A	66,96	65,49	65,49	71,78	72,69	100,92%	Tercapai		
		S.3	Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang maju dan tangguh	Indeks Kualitas Perkotaan	Indeks	N/A	67,41	64,16	64,16	70,61	69,66	91%	Tidak Tercapai		
					Indeks Kualitas Perkotaan	Indeks	N/A	67,96	66,81	66,81	73,38	75,23	102,52%	Tercapai	
					Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan tata ruang yang lestari	Indeks	N/A	67,96	66,81	66,81	73,38	75,23	102,52%	Tercapai	
Misi 3: Kota Bontang yang BERDAYA SAING dan SELAJUTERA melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia															
T.3	Meningkatnya inovasi dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis potensi ekonomi lokal dan ketangguhan sosial budaya masyarakat	Indeks Gini			Indeks	0,405	0,324	0,299	0,33	0,3	0,399	85,96%	Tidak Tercapai		
		S.5	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Non Migas	Laju Pertumbuhan Ekonomi Non Migas	Persentase	N/A	5,36	4,41	9,4	5	6,33	126,02%	Tidak Tercapai		
Misi 3: Kota Bontang yang BERDAYA SAING dan SELAJUTERA melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia															
T.4	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan sejahtera	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			Indeks	81	81	81,61	82,49	82,49	83,04	100,07%	Tercapai		
		S.6	Meningkatnya akses layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas	Angka harapan lama sekolah	Tahun	13,17	13,18	13,43	13,73	13,73	13,08	95,27%	Tidak Tercapai		
					Rata-rata lama sekolah	Tahun	10,8	10,81	10,92	10,97	11,02	11,03	100,09%	Tercapai	
					Uraian harapan hidup	Tahun	74,55	74,57	74,81	75,03	75,23	75,36	100,17%	Tercapai	
		S.7	Meningkatnya tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase	9,92	7,81	7,74	5,75	6,05	6,30	106,50%	Tercapai		
					Angka kemiskinan	Persentase	4,62	4,45	4,11	3,79	3,35-3,73	3,21	103,12%	Tercapai	

Evaluasi terhadap sasaran strategis pada triwulan 1 sampai 3 tahun 2025 menunjukkan hasil yang beragam, dengan sejumlah indikator berhasil melampaui target, sementara sebagian lainnya masih perlu ditingkatkan:

- Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan partisipatif
 - Indeks Reformasi Birokrasi: Target 82,32 (A), realisasi 85,79 sudah melampaui target.
 - Nilai LPPD: Target 4,20 (Tinggi), realisasi 3,3738 (Sedang) belum tercapai.
 - Opini BPK: Target WTP, realisasi WTP tercapai.
- Kondusifitas wilayah
 - Jumlah konflik: Target 5, realisasi 5 sesuai target.
 - Penyelesaian gangguan keamanan dan ketertiban umum: Target 100 persen, realisasi sebesar 100 persen telah tercapai.
- Kualitas infrastruktur perkotaan yang maju dan tangguh
 - Indeks Kualitas Perkotaan: Target 76,61, realisasi 69,66 masih belum tercapai.
- Kualitas lingkungan hidup dan tata ruang yang lestari
 - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup: Target 73,38, realisasi sebesar 75,23 telah melampaui target.
- Pertumbuhan ekonomi non-migas



- Laju pertumbuhan: Target 5, realisasi 6,33 juga telah melampaui target.
- 6. Akses layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas
 - Harapan Lama Sekolah (HLS): Target 13,73, realisasi 13,80 sudah tercapai.
 - Rata-Rata Lama Sekolah (RLS): Target 11,02, realisasi 11,03 sudah tercapai.
 - Usia Harapan Hidup (UHH): Target 75,23, realisasi 75,36 sudah tercapai.
- 7. Tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing
 - Tingkat Pengangguran Terbuka: Target 6,65, realisasi 6,36 lebih baik dari target.
- 8. Pemberdayaan sosial
 - Angka Kemiskinan: Target 3,31–3,73, realisasi 3,21 juga lebih baik dari target.

Secara keseluruhan, capaian kinerja menunjukkan keberhasilan signifikan pada aspek reformasi birokrasi, pertumbuhan ekonomi, kualitas lingkungan hidup, serta penurunan pengangguran dan kemiskinan. Namun, terdapat tantangan pada kualitas pendidikan dan infrastruktur perkotaan yang masih belum memenuhi target. Hal ini menjadi fokus perbaikan untuk memastikan pembangunan daerah berjalan seimbang dan berkelanjutan.

Perlu kami sampaikan bahwa, pada laporan kali ini Pemerintah Kota Bontang juga menyajikan laporan capaian kinerja Triwulan keempat sebagaimana yang telah diperjanjikan oleh Kepala Daerah Kota Bontang. Mengapa hal ini harus kami laporkan karena, pemilihan kepala perangkat secara serentak di Indonesia dilaksanakan pada tanggal 27 Nopember 2024, hal ini tentu saja berpengaruh terhadap perencanaan yang sudah disusun dan ditetapkan pada RPJMD 2021-2026 Pemerintah Kota Bontang beserta RENSTRA unit kerjanya. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2025 Pemerintah Kota Bontang telah melakukan pengesahan RPJMD 2025-2029 sesuai Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang Tahun 2025-2029, dan menetapkan RENSTRA Perangkat Daerah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 pada tanggal 2 Oktober 2025. Dan sesuai surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan pada tanggal 14 Nopember 2025 perihal Pemberitahuan Penyampaian Laporan Kinerja Tahun 2025 bahwa sesuai point 3 yang menyatakan bahwa Laporan Kinerja Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2025 disusun untuk menjawab Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang mengacu Renstra K/L dan RPJMD 2020–2024/RPD yang digunakan selama masa transisi. PK 2025 dengan dasar RPD/RKPD periode sebelumnya boleh dan dapat digunakan sampai akhir tahun 2025, sehingga Laporan Kinerja yang



disusun adalah berdasarkan perjanjian kinerja periode tersebut.

Menyikapi surat tersebut Pemerintah Kota Bontang dan Unit Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang berkomitmen dan berupaya untuk melakukan hal terbaik dalam melaporkan penyelenggaraan kinerja yang sudah dilakukan, yaitu dengan melaporkan kinerja sesuai RPJMD 2021-2026 dan Renstra Unit Kerja 2021-2026 juga RPJMD 2025-2029. Dengan demikian untuk indikator kinerja utama dan perjanjian kinerja yang kami susun juga mengalami perubahan menyesuaikan dengan kondisi yang ada.

Sesuai Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang Tahun 2025-2029, upaya pencapaian Visi 2025-2029 "Terwujudnya Kota Bontang Sebagai Kota Industri Dan Jasa Yang Maju, Sejahtera Dan Berkelanjutan Sebagai Daerah Mitra IKN" maka telah terumuskan lima misi pembangunan Kota Bontang yakni:

- Misi I : Mewujudkan Transformasi Sosial Menuju Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing
- Misi II : Mewujudkan Transformasi Ekonomi yang Dinamis dan Inklusif.
- Misi III : Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
- Misi IV : Memperkuat Infrastruktur Kewilayahan yang Berkualitas dan Merata
- Misi V : Meningkatkan Pelestarian Lingkungan Hidup

Dalam rangka mencapai kelima misi pembangunan jangka menengah Kota Bontang, maka dirumuskan tujuan dan sasaran pada masing-masing misi tersebut beserta indikator-indikator dalam pencapaian sasaran strategisnya.

Capaian tujuan dan sasaran Kota Bontang Tahun 2025 berdasarkan target RPJMD 2025-2029

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Baseline	2025			
					2024	Target	Realisasi	Capaian	Predikat Capaian
T1. Terwujudnya Kota Bontang yang Maju	IT1.1. LPE			Persen	-2,51	1,00-1,15	3,21	279,13%	Tercapai
	IT1.2. LPE non-Migas			Persen	9,4	5	6,33	126,60%	Tercapai
		S1. Meningkatkan Nilai Investasi	IS1. Pertumbuhan Nilai investasi	Persen	12,97	3	13,84	461,33%	Tercapai



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA BONTANG TAHUN 2025

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten,
Harmonis, Berkeadilan

**#bangga
melayani
bangsa**

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Baseline	2025			
					2024	Target	Realisasi	Capaian	Predikat Capaian
		S2. Meningkatkan Produktivitas Sektor Ekonomi Lokal	IS2.1. Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Perikanan dan Perkebunan	Persen	1,21	1,36	1,21	88,97%	Tidak Tercapai
			IS2.2. Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	Persen	3,7	3,75	3,89	103,73%	Tercapai
			IS2.3. Kontribusi PDRB Sektor Jasa	Persen	4,47	4,51	4,67	103,55%	Tercapai
			IS2.4. Kontribusi PDRB Sektor Pariwisata	Persen	0,67	0,72	0,72	100,00%	Tercapai
		S3. Meningkatkan Produktivitas Sektor Industri Pengolahan	IS3. Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	Persen	-4,99	0,22	2,42	1100,00%	Tercapai
		S4. Meningkatkan kualitas infrastruktur yang maju dan merata	IS4. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	Persen	76,38	77	76,72*	99,66%	Tidak Tercapai
		S5. Terwujudnya Stabilitas harga	IS5. Indeks Perkembangan Harga	Indeks	N/A	1,1± 1	1,04	100,00%	Tercapai
		S6. Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat	IS6. Indeks Ketahanan Pangan	Persen	88,89	89,14	77,94**	-	(Tidak dapat dinilai)



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA BONTANG TAHUN 2025

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten,
Harmonis, dan Adaptif

**#bangga
melayani
bangsa**

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Baseline	2025			
					2024	Target	Realisasi	Capaian	Predikat Capaian
		S7. Meningkatkan Daya Saing Daerah	IS7. Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,58	3,62	3,57	98,62%	Tidak Tercapai
T2. Terwujudnya Kota Bontang yang Sejahtera	IT2.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			Indeks	82,49	82,83 – 83,18	83,04	100,25%	Tercapai
		S8.Meningkatnya kualitas dan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan	IS8.1. Indeks Pendidikan	Indeks	0,75	0,76	0,731	96,18%	Tidak Tercapai
			IS8.2. Indeks Kesehatan	Indeks	0,85	0,85	0,852	100,24%	Tercapai
	IT2.2. Tingkat Kemiskinan			Persen	3,74	3,73-3,4	3,21	105,92%	Tercapai
		S9. Meningkatkan Perlindungan Sosial yang Adaptif	IS9. Persentase Keluarga Miskin Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	Persen	7,78	8,44	2,4	29,62%	Tidak Tercapai
					S10.Meningkatnya Ketahanan Keluarga	IS10. Indeks pembangunan keluarga	Indeks	65.30 (2023)	74,8
	IT2.3. Indeks Gini			Indeks	0,33	0,330 - 0,300	0,349	94,56%	Tidak Tercapai
		S11. Meningkatkan Daya Saing Tenaga Kerja	IS11. Tingkat Pengangguran terbuka	Persen	7,06	6,78-6,65	6,36	104,56%	Tercapai
T3. Terwujudnya Kota Bontang yang Berkelanjutan	IT3. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			Indeks	67,71	73,38	75,23	102,52%	Tercapai
		S12. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan kota	IS12.1. Penurunan Intensitas Emisi GRK	Persen	1,9	15,89	0,80	1.992,16%	Tercapai
			IS12.2. Indeks	Indeks	116,57	115,57 -	85,25** (106,99)	107,08%	Tercapai



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA BONTANG TAHUN 2025

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten,
Harmonis, Berkeadilan

**bangga
melayani
bangsa**

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Baseline	2025			
					2024	Target	Realisasi	Capaian	Predikat Capaian
			Risiko Bencana			114,57			
T4. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	IT4. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)			Indeks	81,49	82,32	85,79	104,22%	Tercapai
		S13. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	IS13.1. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Angka	70,04	70,9	71,42	100,73%	Tercapai
			IS13.2. Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	100,00%	Tercapai
		S14. Meningkatkan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Digitalisasi Pemerintahan yang Inovatif	IS14.1. Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	4,28	4,32	4,53	104,86%	Tercapai
			IS14.2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	90,66	90,85	92,8	102,15%	Tercapai
			IS14.3. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) / Indeks Pemerintahan Digital (Pemdi)	Indeks	3,39	3,59	3,76	104,74%	Tercapai

Sumber: Badan Perencanaan, Riset dan Invoasi Daerah Kota Bontang, 2026



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA BONTANG TAHUN 2025

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten,
Harmonis, dan Berkeadilan

**#bangga
melayani
bangsa**

SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN SASARAN STRATEGIS	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	EFISIENSI (%)
1. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan partisipatif	92,40	911.400.618.999,26	837.398.705.268,00	74.001.913.731,26	0,52
2. Meningkatnya kondusifitas wilayah	100	26.330.293.809,00	25.418.947.107,00	911.346.702,00	3,46
3. Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang maju tangguh	90,93	910.529.031.808,00	847.003.700.799,00	63.525.331.009,00	-2,10
4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan tata ruang yang lestari	102,52	78.599.954.114,00	72.762.492.639,00	5.837.461.475,00	9,95
5. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi non migas	126,60	154.400.958.316,00	142.931.616.487,00	11.469.341.829,00	34,03
6. Meningkatnya akses layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas	100,26	947.076.639.898,00	839.225.527.212,00	107.851.112.686,00	11,65
7. Meningkatnya tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing	104,36	25.039.507.237,00	24.776.205.974,00	263.301.263,00	5,41
8. Meningkatnya pemberdayaan sosial	103,02	119.645.014.485,00	113.394.397.402,00	6.250.617.083,00	8,24

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, 2025

Tabel ini menunjukkan hubungan antara capaian sasaran strategis dengan penggunaan anggaran di berbagai bidang pembangunan Kota Bontang tahun 2025. Secara umum, capaian kinerja berada pada kisaran **90–126 persen**, menandakan sebagian besar target tercapai bahkan melampaui rencana. Dari sisi anggaran, tingkat efisiensi bervariasi antara **0,12 persen hingga 11,65 persen**, mencerminkan adanya perbedaan dalam efektivitas penggunaan dana antar sektor.

Nilai ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Kota Bontang telah memanfaatkan anggaran yang ada secara optimal dalam rangka pencapaian target kinerja yang ditetapkan sebelumnya. Data ini juga menggambarkan bahwasanya Pemerintah Kota Bontang dalam pengelolaan anggaran relatif telah terhindar dari pemborosan dan penyalahgunaan anggaran, serta pengawasan dan kontrol terhadap penggunaan anggaran juga telah dilakukan dengan baik.

Berikut kami sampaikan pula hasil kinerja Pemerintah Kota Bontang selama 5 Tahun (RPJMD 2021-2026). Kinerja tersebut seyogyanya baru dilaporkan pada tahun 2025, namun karena pemilihan kepala daerah dilakukan secara serentak pada



tahun 2024, maka kinerja kepala daerah definitive hanya berjalan selama kurang lebih 5 tahun. Namun demikian untuk pencapaian kinerja selama 5 tahun tetap kami sampaikan pada laporan kinerja ini, sebagai bentuk komitmen selaku Kepala Daerah yang menjalankan pembangunan berkelanjutan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bontang tahun 2025 tercatat sebesar Rp **2.890.864.500.796,00** dimana berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. **384.830.817.025,00** dari pendapatan transfer sebesar Rp**2.477.950.231.195,00** dari pendapatan daerah lain yang sah sebesar Rp **28.083.452.549,00**. Kemudian belanja modal yang meliputi belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan irigasi, dan belanja modal lainnya dialokasikan anggaran sebesar **Rp 1.284.492.598.818,00**

Dari alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar **Rp 3.173.022.018.666,26**, Pemerintah Kota Bontang berhasil merealisasikan anggarannya sebesar **Rp 2.951.281.269.753,89** atau **93,01** persen dari nilai atau pagu APBD

TAHUN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	%
2021	1.287.088.373.928,00	1.206.801.559.080,47	15.443.538.460	93,76
2022	1.566.982.158.682,00	1.797.622.874.064,59	211.862.421.726,00	87,21
2023	2.532.272.667.551,00	2.193.037.806.236,00	339.234.861.315,00	86,60
2024	3.360.998.808.720,00	3.117.016.950.793,71	243.981.857.926,29	92,74
2025	3.173.022.018.666,26	2.951.281.268.573,89	221.740.750.092,37	93,01
Total	11.920.364.027.547,30	11.218.667.321.591,70	1.079.356.566.677,00	94,51

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, 2025

Berikut adalah alokasi anggaran didistribusi sesuai dengan perangkat daerah pengampu dan disesuaikan program dan kegiatan sebagaimana tabel dibawah, serta grafik capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Bontang Tahun 2025:



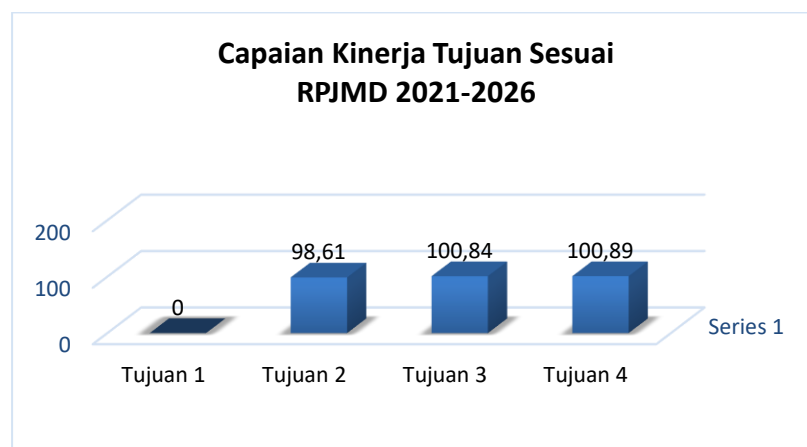
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA BONTANG TAHUN 2025

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten,
Harmonis, Berkeadilan

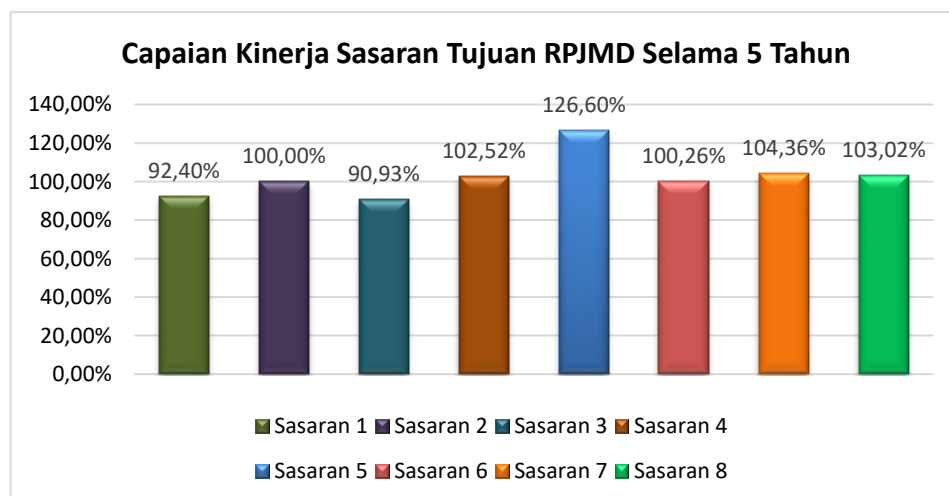
**#bangga
melayani
bangsa**

Bontang dalam Angka	
● SKPD	31
● Unit SKPD	71
● Program	157
● Kegiatan	425
● Sub Kegiatan	1.330
● Rekening	11.449
● PPTK	319

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, 2025



Sumber : Badan Perencanaan, Riset dan Invoasi Daerah Kota Bontang, 2025



Sumber : Badan Perencanaan, Riset dan Invoasi Daerah Kota Bontang, 2025



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Pernyataan Telah Direviu	iii
Ringkasan Eksekutif	iv
Daftar Isi	xiv
Daftar Tabel	xviii
Daftar Gambar	xxi

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang	1
1.1.1 Gambaran Umum Kota Bontang	3
1.1.1.1 Kondisi Geografis	3
1.1.1.2 Luas Wilayah	4
1.1.1.3 Kondisi Demografi	5
1.1.1.4 Kondisi Makro Ekonomi	6
1.2 Tugas dan Wewenang	8
1.2.1 Tugas Wali Kota	8
1.2.2 Wewenang Wali Kota	9
1.3 Struktur Organisasi	9
1.3.1 Perangkat Daerah	10
1.4 Isu Strategis	12
1.5 Sistematika Penulisan Pelaporan	19

BAB II PERENCANAAN KINERJA21

2.1 Uraian Singkat RPJMD Tahun 2021-2026	21
2.1.1 Visi 2021-2026	22
2.1.2 Misi 2021-2026	23
2.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan	25
2.2 Uraian Singkat RPJMD Tahun 2025-2029	27
2.2.1 Visi 2025-2029	27
2.2.2 Misi 2025-2029	28
2.2.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan	31
2.3 Definisi Operasional Indikator	32
2.3.1 Indikator Kinerja Utama 2021-2025	32
2.3.2 Indikator Kinerja Utama 2025-2029	45
2.4 Penetapan Kinerja Tahun 2025	65
2.4.1 Uraian Perubahan Perjanjian Kinerja	66
2.5 Pengukuran Kinerja dan Pengukuran Efisiensi Sumber Daya	77



BAB III CAPAIAN KINERJA80

3.1 CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN RPJMD 2021-2026 80

3.1.1 Tujuan 1 Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Harmoni, Bersih, Adil, Amanah, dan Bertanggung Jawab	83
3.1.1.1 Sasaran 1 Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Yang Efektif, Efisien, Tranparan, Akuntabel dan Partisipatif.....	84
3.1.1.1.1 Indeks Reformasi Birokrasi	84
3.1.1.1.2 Indikator Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	88
3.1.1.1.3 Indikator Opini Badan Pengawas Keuangan (BPK)...	91
3.1.1.2 Sasaran 2 Meningkatnya kondusifitas Wilayah	93
3.1.1.2.1 Indikator Jumlah Konflik.....	94
3.1.1.2.2 Indikator Persentase Penyelesaian Gangguan Kemanan dan Ketertiban Umum	95
3.1.2 Tujuan 2 Mewujudkan Pembangunan Perkotaan Yang Layak Huni, Cerdas Dan Berwawasan Lingkungan.....	97
3.1.2.3 Sasaran 3 meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang maju tangguh	99
3.1.2.3.1 Indikator Indeks Kualitas Perkotaan.....	100
3.1.2.4 Sasaran 4 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan tata ruang yang lestari	102
3.1.2.4.1 Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	103
3.1.3 Tujuan 3 Mewujudkan inklusivitas dan keseimbangan ekonomi daerah berbasis potensi ekonomi lokal dan keragaman sosial budaya masyarakat	106
3.1.3.5 Sasaran 5 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Non Migas	108
3.1.3.5.1 Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi Non Migas	110
3.1.4 Tujuan 4 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing Dan Sejahtera	111
3.1.4.6 Sasaran 6 Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan Dan Kesehatan Yang Berkualitas.....	113
3.1.4.6.1 Indikator Angka Harapan Lama Sekolah.....	114
3.1.4.6.2 Indikator Rata-rata Lama Sekolah.....	116
3.1.4.6.3 Indikator Usia Harapan Hidup.....	119
3.1.4.7 Sasaran 7 Meningkatnya Tenaga Kerja Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	125
3.1.4.7.1 Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka	126
3.1.4.8 Sasaran 8 Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	129
3.1.4.8.1 Indikator Angka Kemiskinan.....	130



3.2 CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN RPJMD 2025-2029	135
3.2.1 Tujuan 1 Terwujudnya Kota Bontang yang Maju.....	139
3.2.1.1 Sasaran 1 Meningkatnya Nilai Investasi	140
3.2.1.1.1 Indikator Pertumbuhan Nilai Investasi	141
3.2.1.2 Sasaran 2 Meningkatnya Produktivitas Sektor Ekonomi Lokal	142
3.2.1.2.1 Indikator Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Perikanan dan Perkebunan	143
3.2.1.2.2 Indikator Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	144
3.2.1.2.3 Indikator Kontribusi PDRB Sektor Jasa	145
3.2.1.2.4 Indikator Kontribusi PDRB Sektor Pariwisata	147
3.2.1.3 Sasaran 3 Meningkatnya Produktivitas Sektor Industri Pengolahan	148
3.2.1.3.1 Indikator Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan..	149
3.2.1.4 Sasaran 4 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Yang Maju Dan Merata.....	150
3.2.1.4.1 Indikator Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	150
3.2.1.5 Sasaran 5 Terwujudnya Stabilitas Harga.....	151
3.2.1.5.1 Indikator Indeks Perkembangan Harga.....	152
3.2.1.6 Sasaran 6 Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat ...	152
3.2.1.6.1 Indikator Indeks Ketahanan Pangan	152
3.2.1.7 Sasaran 7 Meningkatnya Daya Saing Daerah	153
3.2.1.7.1 Indikator Indeks Daya Saing Daerah	154
3.2.2 Tujuan 2 Terwujudnya Kota Bontang yang Sejahtera	157
3.2.2.8 Sasaran 8 Meningkatnya Kualitas Dan Akses Terhadap Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	158
3.2.2.8.1 Indikator Indeks Pendidikan	159
3.2.2.8.2 Indikator Indeks Kesehatan.....	161
3.2.2.9 Sasaran 9 Meningkatnya Perlindungan Sosial yang Adaptif	163
3.2.2.9.1 Indikator Persentase Keluarga Miskin Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	164
3.2.2.10 Sasaran 10 Meningkatnya Ketahanan Keluarga	164
3.2.2.10.1 Indikator Indeks pembangunan keluarga	165
3.2.2.11 Sasaran 11 Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja	168
3.2.2.11.1 Indikator Tingkat Pengangguran terbuka.....	168
3.2.3 Tujuan 3 Terwujudnya Kota Bontang yang Berkelanjutan.....	169
3.2.3.12 Sasaran 12 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan kota	169
3.2.3.12.1 Indikator Penurunan Intensitas Emisi GRK.....	170
3.2.3.12.2 Indikator Indeks Risiko Bencana	172



3.2.4 Tujuan 4 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	173
3.2.4.13 Sasaran 13 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan.....	175
3.2.4.13.1 Indikator Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).....	176
3.2.4.13.2 Indikator Opini BPK	178
3.2.4.14 Sasaran 14 Meningkatkan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Digitalisasi Pemerintahan.....	179
3.2.4.14.1 Indikator Indeks Pelayanan Publik (IPP)	180
3.2.4.14.2 Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	183
3.2.4.14.3 Indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) / Indeks Pemerintahan Digital (Pemdi)	184
3.3 CAPAIAN KINERJA ANGGARAN	186
3.4 CAPAIAN EFISIENSI SUMBER DAYA	190
BAB IV PENUTUP	203
4.1 Hambatan	203
4.2 Strategi Ke Depan	204
4.3 Laporan Hasil Evaluasi dan Tindak Lanjut	205
4.4 Penilaian Kinerja Organisasi.....	210
LAMPIRAN.....	
1. Indikator Kinerja Utama Perubahan 2023	
2. Perjanjian Kinerja 2025	
3. Perjanjian Kinerja Perubahan 2025	
4. Indikator Kinerja Utama 2025-2029	
5. Perjanjian Kinerja 2026	
6. Berita Acara Kesepakatan Perubahan Sistematika Laporan Kinerja Tahun 2025	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Dasar Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	2
Tabel 1.2 Jumlah Pencari Kerja, Lowongan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja Berdasarkan Pendidikan di Kota Bontang Tahun 2025	14
Tabel 2.1 Cascading Tujuan dan Sasaran Pembangunan Serta Target Capaian Misi 1 Kota Bontang	26
Tabel 2.2 Cascading Tujuan dan Sasaran Pembangunan serta target capaian Misi 2 Kota Bontang	26
Tabel 2.3 Cascading Tujuan dan Sasaran Pembangunan Serta Target Capaian Misi 3 Kota Bontang	27
Tabel 2.4 Cascading Tujuan dan Sasaran Pembangunan serta target capaian Kota Bontang 2025-2029	31
Tabel 2.5 Deskripsi operasional IKU 2021-2026 Tujuan 1	32
Tabel 2.6 Deskripsi operasional IKU 2021-2026 Tujuan 2	37
Tabel 2.7 Deskripsi operasional IKU 2021-2026 Tujuan 3	39
Tabel 2.8 Deskripsi operasional IKU 2021-2026 Tujuan 4	41
Tabel 2.9 Deskripsi Operasional IKU 2025-2029.....	46
Tabel 2.10 Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Kota Bontang Tahun 2025	67
Tabel 2.11 Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bontang Tahun 2025 (program)...	70
Tabel 2.12 Kategori Capaian Rata-Rata atas Indikator Kinerja	78
Tabel 3.1 Capaian Kinerja Sasaran kota Bontang Berdasarkan RPJMD 2021-2026	81
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah Tahun 2021-2026	83
Tabel 3.3 Instrumen Indikator Kinerja Tujuan 1	84
Tabel 3.4 Komponen Perhitungan Nilai Reformasi Birokrasi Tahun 2025.....	85
Tabel 3.5 Capaian Indikator Kinerja Opini BPK dalam Kerangka Perencanaan Jangka Menengah Pemerintah Kota Bontang Tahun 2021-2026.....	92



Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Indikator Opini BPK dengan Pemerintah Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025.....	92
Tabel 3.7 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2025	93
Tabel 3.8 Rekapitulasi Kasus Gangguan Trantibum tahun 2025	96
Tabel 3.9 Capaian IKBL Tahun 2021-2025.....	99
Tabel 3.10 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3	99
Tabel 3.11 Capaian IKP Tahun 2021-2025	100
Tabel 3.12 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4	103
Tabel 3.13 Nilai Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Bontang Tahun 2025.....	103
Tabel 3.14 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5	110
Tabel 3.15 Target Realisasi Angka Harapan Lama Sekolah Kota Bontang Tahun 2025	114
Tabel 3.16 Target dan Realisasi Rata-rata Lama Sekolah Kota Bontang Tahun 2025	117
Tabel 3.17 Target dan Realisasi Usia Harapan Hidup Kota Bontang Tahun 2025	119
Tabel 3.18 Target dan Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bontang Tahun 2025	126
Tabel 3.19 Capaian Angka Kemiskinan di Kota Bontang Tahun 2025	132
Tabel 3.20 Capaian Tujuan dan Sasaran Kota Bontang Tahun 2025 berdasarkan target RPJMD 2025-2029.....	136
Tabel 3.21 Perkembangan Investasi Kota Bontang Tahun 2021-2025.....	141
Tabel 3.22 Perkembangan PDRB Sektor Jasa Tahun 2024-2025.....	146
Tabel 3.23 Perkembangan PDRB sektor Pariwisata di Kota Bontang Tahun 2024-2025	147
Tabel 3.24 Perkembangan Industri Pengolahan Kota Bontang Tahun 2024-2025	149
Tabel 3.25 Capaian Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Kota Bontang Tahun 2021-2025	150
Tabel 3.26 Capaian IDSD Kota Bontang Tahun 2024-2025 Berdasarkan Pilar Komponen IDSD	155
Tabel 3.27 Capaian Kinerja indikator Tujuan 2 Tahun 2025	158
Tabel 3.28 Perhitungan Intensitas Emisi GRK Kota Bontang Tahun 2021-2025	170



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA BONTANG TAHUN 2025

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten,
Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

Tabel 3.29 Capaian IPP Kalimantan Timur, Kota Bontang , Kota Samarinda dan Kota Balikpapan Tahun 2025	181
Tabel 3.30 Target IPP Kota Bontang di dalam RPJMD 2025-2029	182
Tabel 3.31 Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 (<i>unaudited</i>)	187
Tabel 3.32 Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2021-2025	189
Tabel 3.33 Efisiensi Sumber Daya Pembangunan Tahun 2025	189
Tabel 4.1 Rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024 dan Tindak Lanjutnya	206
Tabel 4.2 Hasil Evaluasi Komponen Kinerja AKIP Tahun 2025	214
Tabel 4.3 Hasil Evaluasi Capaian Indikator Makro AKIP Tahun 2025	214



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Urgensi Penyusunan Laporan Kinerja	1
Gambar 1.2 Peta Kota Bontang.....	3
Gambar 1.3 Perbandingan Luas Wilayah Kecamatan di Kota Bontang	4
Gambar 1.4 Jumlah Penduduk (Jiwa) dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Bontang Tahun 2025	5
Gambar 1.5 Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa).....	6
Gambar 1.6 Indeks Pembangunan Manusia Kota Bontang 2018-2025	7
Gambar 1.7 Indeks Pembangunan Manusia Kota Bontang Nasional, Provinsi dan Kab/Kota Tahun 2025	7
Gambar 1.8 Kondisi Sumber Daya Aparatur Kota Bontang tahun 2025	9
Gambar 1.9 Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur Nasional dan Kab/Kota Di Kaltim Tahun 2025	13
Gambar 1.10 Perkembangan Indeks Gini Kota Bontang Tahun 2020-2025	14
Gambar 1.11 Hasil LHE Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kota Bontang tahun 2024.....	16
Gambar 1.12 Hasil LHE Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kota Bontang tahun 2025.....	17
Gambar 2.1 Visi RPJPD dan RPJMD Kota Bontang.....	22
Gambar 2.2 Visi Misi Kota Bontang 2021-2025	23
Gambar 2.3 Keselarasan Visi RPJMN, RPJMD Provinsi Kalimantan Timur, RPJPD Kota Bontang dan RPJMD Kota Bontang Tahun 2025-2029.....	28
Gambar 2.4 Visi Misi Kota Bontang 2025-2029	29
Gambar 3.1 Perkembangan Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah dalam Kerangka Perencanaan Jangka Menengah Pemerintah Kota Bontang Tahun 2021-2025.....	85
Gambar 3.2 Perbandingan Capaian Indeks RB Pemerintah Kota Bontang dengan Rata-rata Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2025	88
Gambar 3.3 Grafik Capaian Nilai LPPD dalam RPJMD Kota Bontang Tahun 2021-2025.....	89
Gambar 3.4 Perbandingan Capaian Nilai LPPD Pemerintah Kota Bontang dengan Rata-rata Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2025	90



Gambar 3.5 Grafik Capaian Indikator Kinerja Jumlah Konflik dalam Kerangka Perencanaan Jangka Menengah Pemerintah Kota Bontang Tahun 2022-2025	94
Gambar 3.6 Grafik Capaian Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum dalam Kerangka Perencanaan Jangka Menengah Pemerintah Kota Bontang Tahun 2021-2025	96
Gambar 3.7 Capaian Kinerja IKBL Tahun 2021-2025	98
Gambar 3.8 Grafik Capaian Indikator Kinerja Indeks Kualitas Perkotaan dalam Kerangka Perencanaan Jangka Menengah Pemerintah Kota Bontang Tahun 2022-2025	102
Gambar 3.9 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Bontang Tahun 2021-2025	104
Gambar 3.10 Perbandingan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Bontang, Provinsi Kaltim, dan Nasional Tahun 2021-2025	105
Gambar 3.11 Capaian Indeks Gini Kota Bontang Tahun 2021-2025	107
Gambar 3.12 Pertumbuhan Ekonomi Kota Bontang Tahun 2021-2025	109
Gambar 3.13 Capaian Pertumbuhan Ekonomi Non Migas Kota Bontang Tahun 2021-2025	110
Gambar 3.14 Grafik Realisasi Indikator Kinerja Tujuan 4	112
Gambar 3.15 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bontang dengan Kabupaten/Kota, Provinsi Kalimantan Timur, dan Nasional Tahun 2025	113
Gambar 3.16 Perbandingan Target dan Realisasi Angka Harapan Lama Sekolah Kota Bontang dalam Kerangka Perencanaan Jangka Menengah	115
Gambar 3.17 Perbandingan Angka HLS Kota Bontang dengan Kabupaten/Kota sekitar, Provinsi Kalimantan Timur, dan Nasional Tahun 2025	116
Gambar 3.18 Perbandingan Target dan Realisasi Rata-rata Lama Sekolah dalam Kerangka Perencanaan Jangka Menengah	117
Gambar 3.19 Perbandingan RLS Kota Bontang dengan Kabupaten/Kota sekitar, Provinsi Kalimantan Timur, dan Nasional Tahun 2025	118
Gambar 3.20 Usia Harapan Hidup Kota Bontang Tahun 2020-2025	120
Gambar 3.21 Perbandingan Target dan Realisasi Usia Harapan Hidup Kota Bontang dalam Kerangka Perencanaan Jangka Menengah	121
Gambar 3.22 Perbandingan Usia Harapan Hidup Kota Bontang dengan Kabupaten/Kota sekitar, Provinsi Kalimantan Timur, dan Nasional Tahun 2025	122

Gambar 3.23 Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Bontang dalam Kerangka Perencanaan Jangka Menengah Tahun 2021-2025	126
Gambar 3.24 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bontang Menurut Pendidikan Tahun 2025	127
Gambar 3.25 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Bontang dengan Kabupaten/Kota Sekitar, Provinsi Kalimantan Timur, dan Nasional Tahun 2025	128
Gambar 3.26 Perkembangan Angka Kemiskinan Kota Bontang Tahun 2020-2025	132
Gambar 3.27 Perbandingan Target dan Realisasi Angka Kemiskinan di Kota Bontang dalam kerangka Perencanaan Jangka Menengah	133
Gambar 3.28 Perbandingan Angka Kemiskinan di Kota Bontang dengan kabupaten/Kota Sekitar, Provinsi Kalimantan Timur, dan Nasional Tahun 2025	133
Gambar 3.29 Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin di Kota Bontang dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025	134
Gambar 3.30 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi dengan Migas dan Laju pertumbuhan ekonomi Non Migas Kota Bontang Tahun 2021-2025	140
Gambar 3.31 Perbandingan Pertumbuhan Nilai Investasi Tahun 2025	142
Gambar 3.32 Perbandingan Capaian IDSD Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional Tahun 2023-2025	157
Gambar 3.33 Capaian HLS, RLS dan Indeks Pendidikan Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional Tahun 2025	159
Gambar 3.34 Perbandingan Capaian IHLS, IRLS dan Indeks Pendidikan Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional Tahun 2025	160
Gambar 3.35 Capaian Usia Harapan Hidup dan Indeks Kesehatan Kota Bontang Tahun 2025	161
Gambar 3.36 Perbandingan Usia Harapan Hidup dan Indeks Kesehatan Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional Tahun 2025	163
Gambar 3.37 Capaian Indeks Pembangunan Keluarga Kota Bontang Tahun 2023-2025	165
Gambar 3.38 Perbandingan Capaian Indeks Pembangunan Keluarga Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional Tahun 2025	167
Gambar 3.39 Perkembangan Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca Kota Bontang Tahun 2021-2025	170



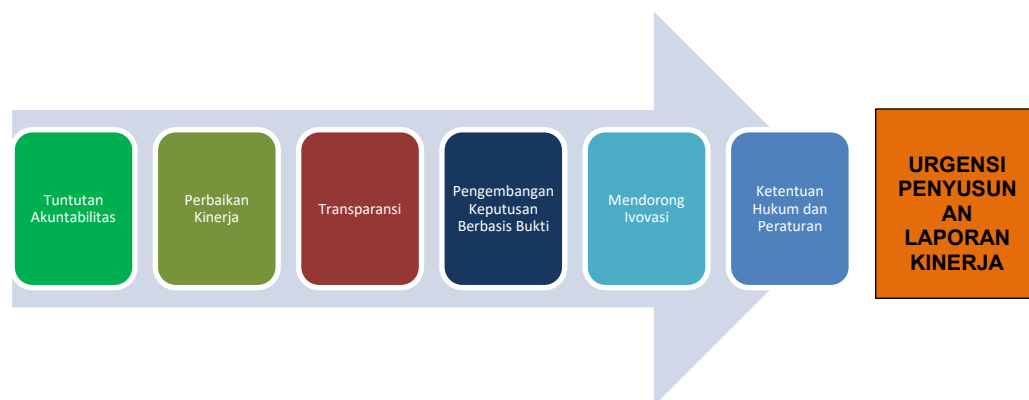
Gambar 3.40 IRB Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur	173
Gambar 3.41 Indeks Reformasi Birokrasi Kota Bontang Tahun 2025	174
Gambar 3.42 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten/Kota dan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025.....	175
Gambar 3.43 Nilai SAKIP Kota Bontang Tahun 2021-2025	176
Gambar 3.44 Capaian SAKIP Kabupaten/Kota, Provinsi Kalimantan Timur dan Rata-rata Nasional Kabupaten/Kota Tahun 2025	178
Gambar 3.45 Capaian IPP Kota Bontang Tahun 2022-2025	180
Gambar 3.46 Capaian IKM Kota Bontang Tahun 2022-2025	183
Gambar 3.47 Capaian Indeks SPBE Kota Bontang Tahun 2020-2025.....	185
Gambar 3.48 Penghargaan Arindama Pemerintah Kota Bontang Tahun 2025 ...	194
Gambar 3.49 Penghargaan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan (LJP) BPK RI dengan Opini “WTP” Tahun 2025	195
Gambar 3.50 Penghargaan Produk Hukum Yang Berkualitas	196
Gambar 3.51 Penghargaan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Tahun 2025	196
Gambar 3.52 Penghargaan Kota Layak Anak Tahun 2025.....	197
Gambar 3.53 Penghargaan Indonesia Smart Nation Award (ISNA) Tahun 2025	198
Gambar 3.54 Penghargaan Pembentukan Pos Bantuan Hukum	199
Gambar 3.55 Penghargaan Kabupaten/Kota sehat Tahun 2025	199
Gambar 3.56 Penghargaan Kota Bontang Piala Adi Pura Kencana.....	200
Gambar 3.57 Penghargaan 3 Puskesmas Bontang menuju Wilayah	201
Gambar 3.58 Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025	202

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) menjadi bagian penting dari reformasi birokrasi yang saat ini sedang dijalankan pemerintah dan merupakan bentuk penerapan dari praktik pemerintahan yang baik. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) berdasarkan Permenpan-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menjelaskan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran perangkat daerah.

Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan tujuan, sasaran, dan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Penyusunan laporan kinerja bertujuan: (a) memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan (b) sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.



Gambar 1.1 Urgensi Penyusunan Laporan Kinerja

Pelaporan kinerja merupakan salah satu sub-sistem dalam SAKIP yang akan menghasilkan suatu laporan akuntabilitas kinerja. Hal terpenting yang diperlukan dalam pelaporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah merupakan suatu proses yang penting untuk memonitor, mengevaluasi, dan melaporkan capaian serta aktivitas sebuah instansi pemerintah.

Adapun latar belakang yang menjadi dasar penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Dasar Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

NO.	DASAR PENYUSUNAN	PENJELASAN
1.	Tuntutan Akuntabilitas	- Laporan kinerja memungkinkan instansi pemerintah bertanggung jawab atas kinerja mereka kepada publik dan <i>stakeholder</i> terkait. - Pemerintah bertanggung jawab kepada publik dan lembaga pengawas untuk menunjukkan bahwa sumber daya yang diberikan digunakan secara efisien dan efektif.
2.	Perbaikan Kinerja	- Laporan kinerja memberikan data capaian instansi pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. - Melalui laporan kinerja, instansi mampu mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan yang dihadapi, sehingga dapat diambil tindakan perbaikan ke depan.
3.	Transparansi	- Laporan kinerja merupakan cerminan transparansi dalam hal penggunaan anggaran dan pelaksanaan program-program pemerintah. - Masyarakat dapat mengetahui capaian keberhasilan instansi pemerintah dalam mencapai tujuannya dan bagaimana pengelolaan keuangan dilakukan.
4.	Pengambilan Keputusan Berbasis Bukti	- Laporan kinerja memberikan data dan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang lebih baik dan efektif oleh pimpinan instansi pemerintah. - Keputusan yang didasarkan pada analisis laporan kinerja dapat lebih terarah dan mendukung pencapaian tujuan organisasi.
5.	Mendorong inovasi	- Laporan kinerja membantu mengukur sejauh mana inovasi yang dimiliki oleh instansi pemerintah telah berjalan khususnya dalam meningkatkan pelayanan publik. - Pemantauan kinerja yang dilaksanakan secara berkesinambungan akan mendorong lahirnya solusi-solusi inovatif dalam peningkatan pelayanan publik.
7.	Ketentuan Hukum	- Undang-undang dan peraturan telah mengharuskan

	dan Peraturan	instansi pemerintah untuk menyusun dan melaporkan laporan kinerja. - Ketentuan ini menggambarkan ruang lingkup yang harus dipenuhi untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi.
--	---------------	--

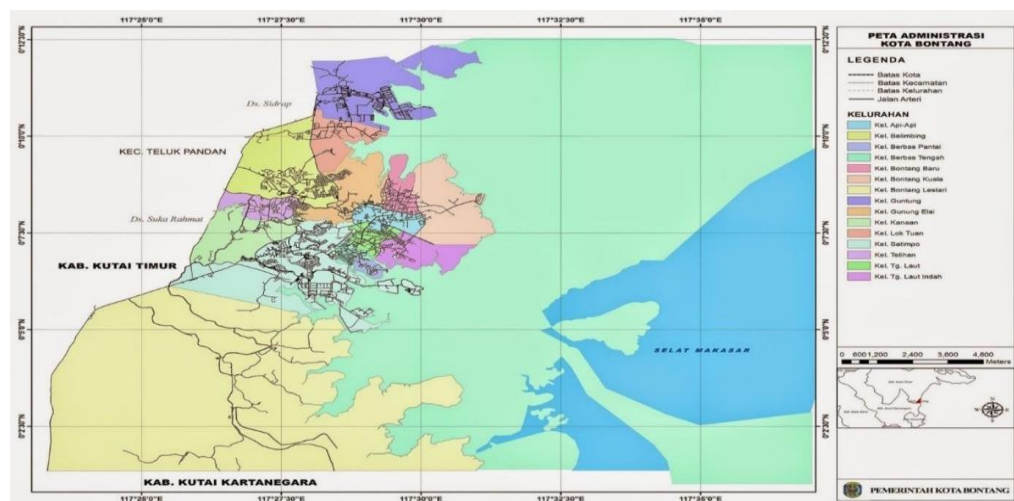
Sumber: KemenpanRB,2021

Dengan latar belakang tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyusunan laporan kinerja merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran guna mendukung tata kelola yang baik, tanggung jawab, dan perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

1.1.1 GAMBARAN UMUM KOTA BONTANG

1.1.1.1 Kondisi Geografis

Kota Bontang merupakan wilayah dengan luasan terkecil di seluruh Provinsi Kalimantan Timur, yaitu 167,87 km². Kota Bontang terletak antara 117°23' 117°38' Bujur Timur dan antara 0°01' – 0°12' Lintang Selatan.



Gambar 1.2. Peta Kota Bontang

Sumber : Disdukcapil Kota Bontang,2025

Kota Bontangada terdiri dari 3 (tiga) kecamatan dan 15 kelurahan. Secara administratif, Kota Bontang berbatasan dengan wilayah lain yaitu:

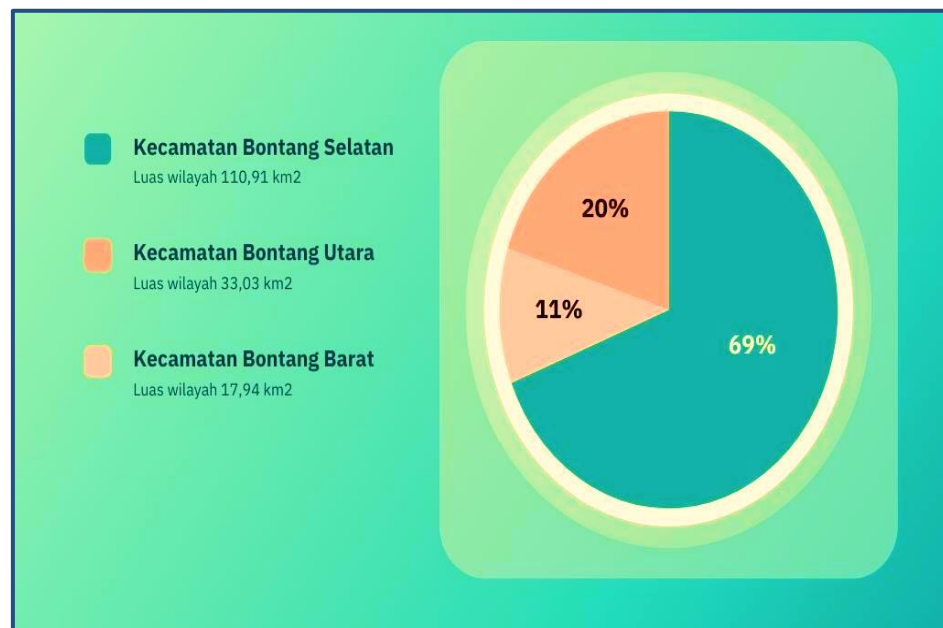
1. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur;
2. Sebelah timur berbatasan dengan Selat Makassar;
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara; dan

4. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur.

Kota Bontang terletak di wilayah pesisir bagian Tengah Provinsi Kalimantan Timur dengan panjang garis Pantai $\pm$ 136 km dan merupakan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menjadikan Kota Bontang berkembang terutama pada industri pengolahan migasnya. Dilihat dari topografinya, wilayah Kota Bontang didominasi oleh permukaan tanah yang datar, landai, dan berbukit pada ketinggian 0-125 mdpl.

1.1.1.2 Luas Wilayah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang terbagi menjadi 3 kecamatan. Ketiga kecamatan tersebut adalah Kecamatan Bontang Utara yang memiliki luas wilayah 33,03 km², Kecamatan Bontang Barat dengan luas wilayah 17,94 km², serta Kecamatan Bontang Selatan yang memiliki wilayah terluas dengan 110,91 km². Ketiga kecamatan tersebut diperkuat oleh 15 kelurahan yang tersebar di Kota Bontang dengan total luas wilayah 161,88 km² atau hanya 0,13% dari luas wilayah Kalimantan Timur (126.981,279 km²).



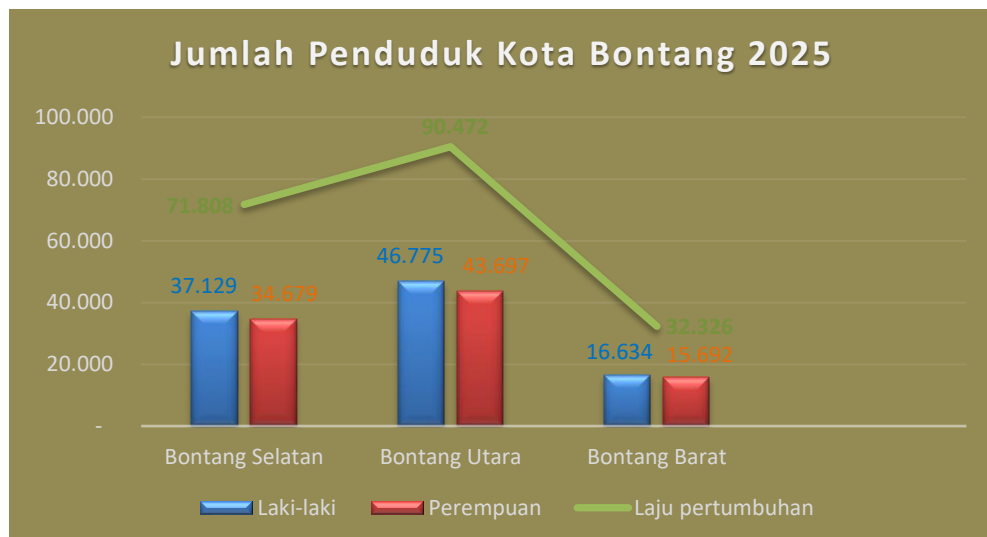
Gambar 1.3. Perbandingan Luas Wilayah Kecamatan di Kota Bontang

Sumber : Disdukcapil Kota Bontang, 2025

1.1.1.3 Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Kota Bontang pada akhir tahun 2025 sebesar 194.606 jiwa yang terdiri dari 100.538 orang laki-laki dan 94.068 orang perempuan, serta jumlah kepala keluarga sebanyak 64.867 KK.

Pada tahun 2025, total penduduk Kota Bontang mencapai 194.606 jiwa dengan distribusi yang terkonsentrasi di tiga wilayah utama, yakni Kecamatan Bontang Utara sebanyak 90.472 jiwa (46,49%), Bontang Selatan sebesar 71.808 jiwa (36,90%), dan Bontang Barat sebanyak 32.326 jiwa (16,61%). Meskipun secara jumlah penduduk Bontang Selatan berada di posisi kedua, namun tingkat kepadatan penduduk tertinggi tetap didominasi oleh Bontang Utara dengan angka 2.739 jiwa/km², disusul oleh Bontang Barat sebesar 1.801 jiwa/km², dan Bontang Selatan yang sebesar 647 jiwa/km².



Gambar 1.4. Jumlah Penduduk (Jiwa) dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Bontang Tahun 2025

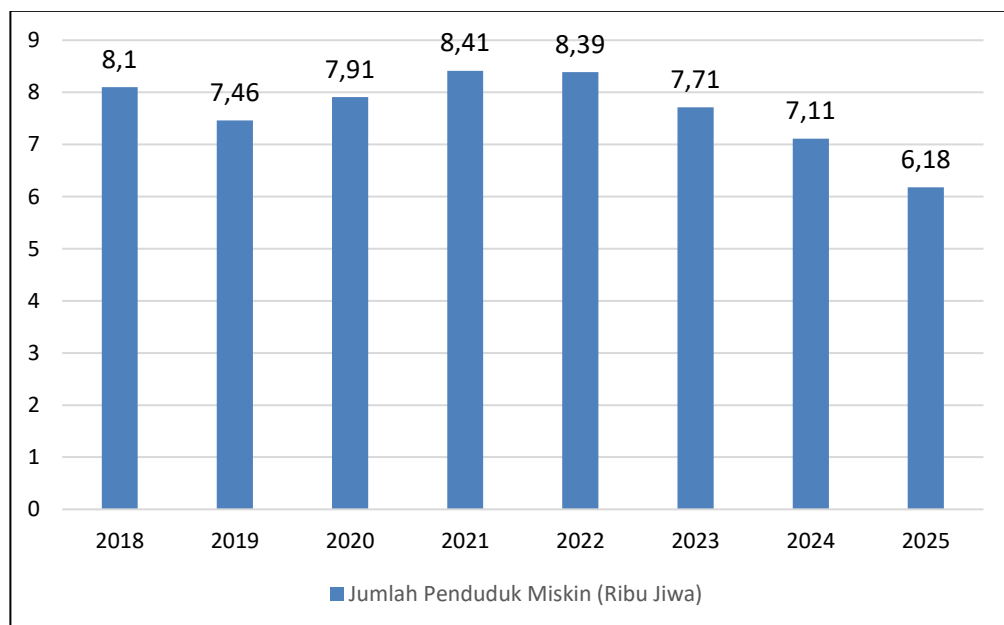
Sumber : Disdukcapil Kota Bontang, 2025

Dari sisi komposisi gender, populasi laki-laki yang berjumlah 100.538 jiwa masih lebih dominan dibandingkan penduduk perempuan yang berjumlah 94.068 jiwa, sehingga menghasilkan rasio jenis kelamin sebesar 106,88. Angka ini menunjukkan bahwa di antara setiap 100 penduduk perempuan di Kota Bontang, terdapat sekitar 106 hingga 107 penduduk laki-laki. Adapun dinamika kependudukan sepanjang tahun 2025 dipengaruhi oleh angka kelahiran sebanyak 1.896 orang, kematian 729 orang, serta mobilitas warga yang mencatat 5.883 orang datang dan 5.544 orang pindah. Adapun persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang melek huruf telah mencapai 99,41%,

dengan angka partisipasi kasar (APK) mencapai 114,18 untuk jenjang SMA atau sederajat.

1.1.1.4 Kondisi Makro Ekonomi

Kota Bontang menunjukkan tren positif laju pertumbuhan ekonomi, ditandai sejak 2021 berada di 1,60 naik menjadi 2,46 di tahun 2022, dan kembali naik pada tahun 2023 menjadi 4,16, pada tahun 2024 menjadi -2,51 (turun) dan tahun 2025 menjadi 3,21. Dari jumlah usia kerja sebesar 68,94% atau sebanyak 99.089 orang merupakan angkatan kerja. Demikian pula dengan angka kemiskinan yang turun dari 4,54% di tahun 2022 menjadi 4,11% di tahun 2023 dan kembali turun menjadi 3,74% pada tahun 2024, dan tahun 2025 menjadi 3,21 turun 0,53 % di bandingkan tahun 2024.



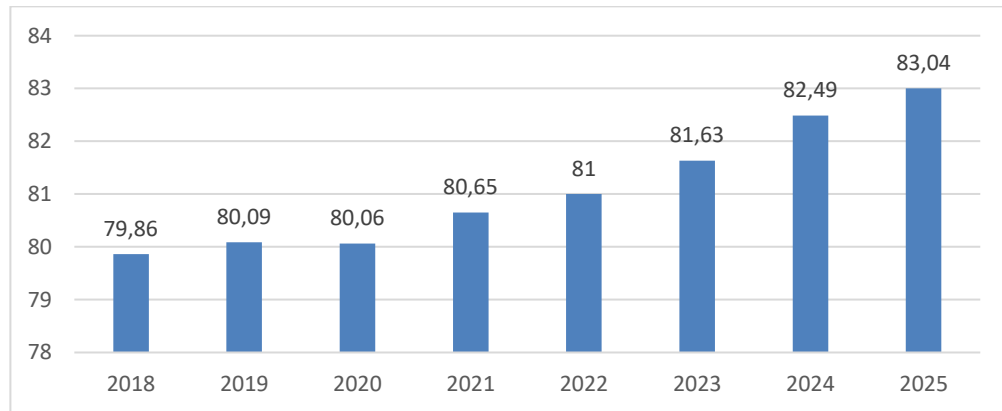
Gambar 1.5. Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa) Kota Bontang

Sumber Data: BPS Kota Bontang, 2025

Jumlah penduduk miskin di Kota Bontang merupakan terendah kedua di Provinsi Kalimantan Timur setelah Kabupaten Mahakam Ulu. Adapun pada tahun 2025, garis kemiskinan di Kota Bontang menyentuh angka 831.247 ribu rupiah/kapita/bulan, dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan (IKK) sebesar 0,35 dan Indeks Keparahan Kemiskinan sebesar 0,06. Kedua indeks mengalami penurunan dari tahun 2021 yang menandakan bahwa upaya menurunkan kemiskinan semakin menunjukkan perbaikan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bontang secara umum terus menunjukkan peningkatan dalam periode 3 tahun terakhir, hal ini terlihat dari

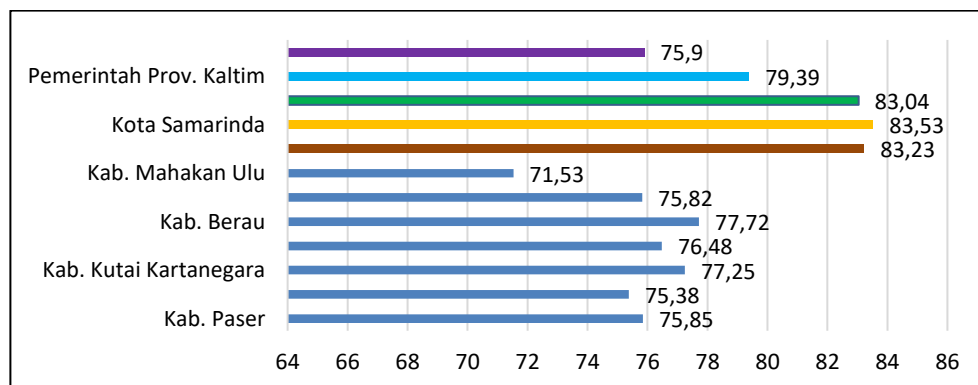
nilai IPM tahun 2023 sebesar 81,63 dan meningkat menjadi 82,49 di tahun 2024. Dan pada tahun 2025 kembali naik menjadi 83,04.



Gambar 1.6. Indeks Pembangunan Manusia Kota Bontang 2018-2025

Sumber Data: BPS Kota Bontang,2025

Grafik menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bontang mengalami tren peningkatan yang positif selama periode 2018 hingga 2025. Dimulai dari angka 79,86 pada tahun 2018, IPM Kota Bontang berhasil menembus angka 80 pada tahun berikutnya dan terus mengalami kenaikan secara konsisten setiap tahunnya, kecuali sedikit fluktuasi pada tahun 2020 (80,06). Akselerasi pertumbuhan yang signifikan terlihat mulai tahun 2021 hingga mencapai puncaknya di angka 83,04 pada tahun 2025. Kenaikan yang stabil ini mengindikasikan adanya peningkatan kualitas hidup masyarakat di Kota Bontang, baik dari aspek kesehatan, pendidikan, maupun standar hidup layak.



Gambar 1.7. Indeks Pembangunan Manusia Kota Bontang Nasional, Provinsi dan Kab/Kota di Kalimantan Timur Tahun 2025

Sumber Data: BPS Kota Bontang,2025

Kota Bontang mencatatkan pencapaian luar biasa dalam pembangunan manusia pada tahun 2025 dengan meraih nilai IPM sebesar 83,04. Angka ini menempatkan Kota Bontang jauh di atas rata-rata capaian Nasional (75,9) maupun rata-rata Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (79,39). Di tingkat regional, meskipun berada sedikit di bawah Kota Samarinda (83,53) dan Kota Balikpapan (83,23), Kota Bontang tetap menjadi salah satu daerah dengan kualitas pembangunan manusia tertinggi, mengungguli seluruh kabupaten lainnya di Kalimantan Timur seperti Kabupaten Berau (77,72) dan Kabupaten Kutai Kartanegara (77,25). Posisi ini menegaskan efektivitas program pembangunan di Kota Bontang dalam meningkatkan standar kesehatan, pendidikan, dan ekonomi masyarakatnya dibandingkan wilayah lain di sekitarnya.

1.2 TUGAS DAN WEWENANG

Berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Wali Kota adalah kepala daerah bagi wilayah kota yang memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah. Secara garis besar, Wali Kota merupakan pemimpin eksekutif di tingkat kota yang bertanggung jawab langsung kepada masyarakat melalui mekanisme yang diatur oleh undang-undang.

1.2.1 TUGAS WALI KOTA

Berdasarkan Pasal 65 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014, Wali Kota memiliki tugas-tugas sebagai berikut:

1. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
2. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
3. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan rancangan peraturan daerah tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
4. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD, rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD, dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
5. mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

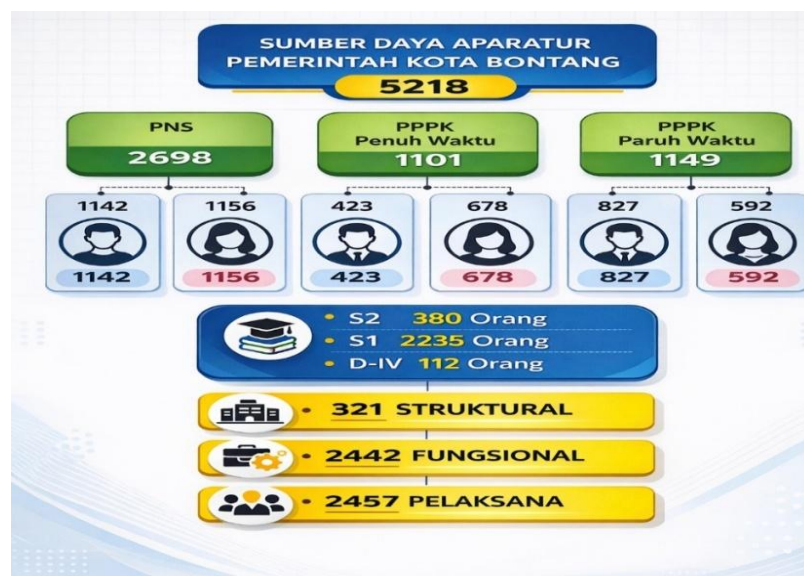
1.2.2 WEWENANG WALI KOTA

Dalam melaksanakan Tugasnya Wali kota mempunyai wewenang:

1. Mengajukan rancangan peraturan daerah;
2. Menetapkan peraturan daerah yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
3. Menetapkan peraturan Kepala Daerah dan keputusan Kepala Daerah;
4. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat; dan
5. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Dalam pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya, sampai dengan akhir Desember 2025 Pemerintah Kota Bontang didukung oleh sumber daya aparatur sebanyak 5.218 pegawai, dimana PNS sebesar 51,71%, PPPK(penuh Waktu) 21,10% dan PPPK(Paruh Waktu) 27,19%. Dari seluruh pegawai tersebut sebagian besar adalah perempuan, yakni sebanyak 2.826 orang, selebihnya 2.392 orang adalah laki-laki. Adapun dari komposisi latar belakang pendidikan, struktur pegawai di Kota Bontang didominasi pegawai dengan tingkat pendidikan S1 sebanyak 2.235 orang , S2 sebanyak 380 orang, dan D-IV sebanyak 112 orang. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia di Lingkungan pemerintah Kota Bontang sudah cukup baik.



Gambar 1.8 Kondisi Sumber Daya Aparatur Kota Bontang tahun 2025
Sumber Data: Badan Kepegawaian Daerah Kota Bontang

Pada tahun 2021 Pemerintah Kota Bontang melaksanakan kebijakan penyederhanaan birokrasi dengan menyederhanakan Struktur Jabatan Manajerial dari 514 Jabatan menjadi 323 Jabatan. Ditindaklanjuti dengan penyetaraan 191 Jabatan Manajerial ke Jabatan Fungsional.

1.3.1 PERANGKAT DAERAH

Untuk melaksanakan urusan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan daerah, Pemerintah Kota Bontang kemudian membentuk perangkat daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang lalu diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Bontang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dengan Peraturan Daerah tersebut dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut

- a. Sekretariat Daerah tipe B;
- b. Sekretariat DPRD tipe C;
- c. Inspektorat Daerah tipe B;
- d. Dinas Daerah terdiri atas:
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A;
 2. Dinas Kesehatan tipe B;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota tipe B;
 4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan tipe B;
 5. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tipe C;
 6. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat tipe A;
 7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 8. Dinas Ketenagakerjaan tipe C;
 9. Dinas Lingkungan Hidup tipe A;
 10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe B;
 11. Dinas Perhubungan tipe C;
 12. Dinas Komunikasi dan Informatika tipe B;
 13. Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata tipe A;
 14. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan tipe B;
 15. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tipe B;
 16. Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, dan Pertanian tipe A; dan
 17. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana tipe A;

- e. Satuan Polisi Pamong Praja tipe C;
- f. Badan Daerah terdiri atas:
 - 1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe C;
 - 2. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah tipe A;
 - 3. Badan Pendapatan Daerah tipe B; dan
 - 4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tipe B;
- g. Kecamatan terdiri atas:
 - 1. Kecamatan Bontang Utara dengan Tipe A;
 - 2. Kecamatan Bontang Selatan dengan Tipe A; dan
 - 3. Kecamatan Bontang Barat dengan Tipe A,

Selain Perangkat Daerah yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tersebut, terdapat pula Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Fungsi, Tugas, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Selain dibentuk perangkat daerah, Pemerintah Kota Bontang juga membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan unit organisasi bersifat khusus (UOBK) sebagai berikut:

- 1. UPTD Laboratorium Kesehatan
- 2. UPTD Laboratorim Lingkungan
- 3. UPTD Tempat Pemrosesan Akhir
- 4. UPTD Tempat Pelelangan Ikan
- 5. UPTD Rumah Pemotongan Hewan
- 6. UPTD Pasar
- 7. UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa
- 8. UPTD Air Limbah Domestik
- 9. UPTD Puskesmas
- 10. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
- 11. UPTD Metrologi Legal
- 12. UPTD Satuan Pendidikan Formal
- 13. UPTD Satuan Pendidikan Non Formal
- 14. UOBK Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada

1.4 ISU STRATEGIS KOTA BONTANG

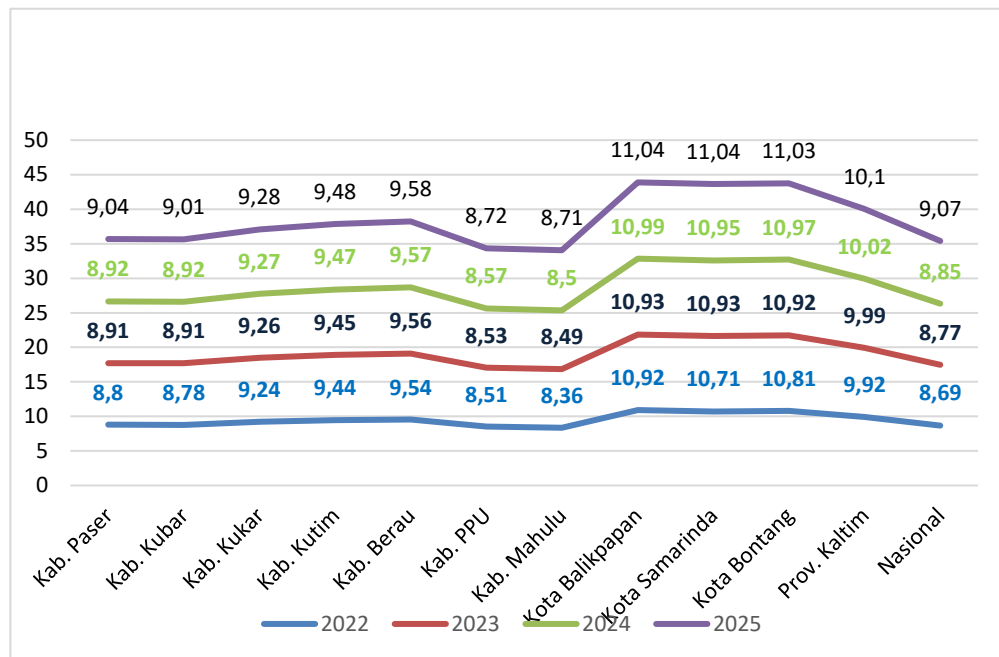
RPJMD 2021-2026, Permasalahan pembangunan daerah pada umumnya disebabkan karena adanya peluang yang belum dimanfaatkan secara optimal serta kelemahan yang belum dapat diatasi. Sebagai bagian dari hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan periode pembangunan yang telah dilalui, di dalam **RPJMD 2025-2029**, permasalahan pembangunan didefinisikan sebagai capaian pembangunan dengan target yang telah direncanakan. Oleh karena itu, identifikasi masalah menjadi langkah krusial dalam merumuskan kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap dinamika daerah. Proses ini bertujuan untuk memetakan faktor penentu keberhasilan maupun kegagalan program sebelumnya. Di sisi lain, isu strategis daerah merupakan kondisi fundamental yang harus diprioritaskan karena pengaruhnya yang signifikan terhadap keberlanjutan pembangunan. Kota Bontang memiliki empat permasalahan pembangunan yang menjadi faktor utama penyebab belum kuatnya kemandirian ekonomi serta relatif tingginya kesenjangan kesejahteraan antar kelompok pendapatan. Adapun empat permasalahan pembangunan yang dimaksud adalah:

1. Belum Optimalnya Daya Saing SDM Kota Bontang Dalam Mendukung Pengembangan Ekonomi Kota Bontang.

Sumber daya manusia yang unggul merupakan aset daerah yang merupakan kunci terciptanya daya saing suatu daerah. Daya saing SDM berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Secara umum kualitas sumber daya manusia Kota Bontang sudah sangat baik. Hal ini ditunjukkan oleh nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bontang tahun 2025 yang termasuk tinggi jika dibandingkan dengan daerah lainnya di Provinsi Kalimantan Timur (Gambar 1.7).

Dari 10 Kabupaten dan Kota yang ada, hanya Kota Samarinda dan Kota Balikpapan yang nilai IPMnya di atas Kota Bontang. Bahkan jika dibandingkan dengan nilai IPM tingkat Provinsi Kalimantan Timur maupun Nasional, IPM Kota Bontang masih lebih baik.

Faktor yang menyebabkan keterbatasan daya saing SDM Kota Bontang dalam komponen penilaian IPM salah satunya dapat dilihat dari Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Bontang, meskipun mengalami peningkatan tetapi masih relatif rendah khususnya untuk daerah perkotaan, yakni 10,92 pada tahun 2023. Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk Kota Bontang yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 10,92 tahun, tahun 2024 menjadi 10,97 dan pada tahun 2025 menjadi 11,03



Gambar 1.9. Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur

Sumber Data: BPS Kota Bontang, 2025

Permasalahan daya saing SDM di Kota Bontang salah satunya juga disebabkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan yang belum memenuhi standar kelayakan. Pada tahun 2024 sarana dan prasarana pendidikan setingkat SD 80,28% dalam kondisi baik, sedangkan untuk setingkat SMP 89,09% dalam kondisi baik. Secara umum pada tahun 2025 sarana pendidikan yang tercatat di kota Bontang terdiri dari 55 sekolah dasar (SD), 6 Madrasah Ibtidaiyah (MI), 30 Sekolah menengah pertama (SMP), 6 Madrasah Tsanawiyah (MTs), 11 Sekolah menengah atas (SMA), 13 Sekolah menengah kejuruan (SMK) dan 2 Madrasah Aliyah (MA).

Selanjutnya, daya saing SDM juga dapat dilihat dari data pemenuhan tenaga kerja di Kota Bontang. Pada tahun 2025 jumlah pencari kerja yang terdaftar adalah sebanyak 10.708 orang, dan didominasi pencari kerja dengan latar belakang pendidikan SMA/ sederajat sebanyak 6.103 diikuti Diploma IV/S1 sebanyak 2.935. Lowongan pekerjaan yang terdaftar bagi semua tingkat Pendidikan tertinggi yang ditamatkan sebesar 5.363. Adapun yang mendapatkan pekerjaan hanya sebesar 4.107 dari total pencari kerja yang terdaftar.

Kondisi ini dapat menjadi gambaran bahwa dengan latar belakang

pendidikan yang dimiliki, sumber daya manusia di Kota Bontang belum begitu mendapat tempat pada sektor formal. Selain itu, karakteristik ekonomi Kota Bontang adalah berbasis pengolahan migas dan industri kimia, sehingga serapan terhadap tenaga kerja menjadi relatif terbatas.

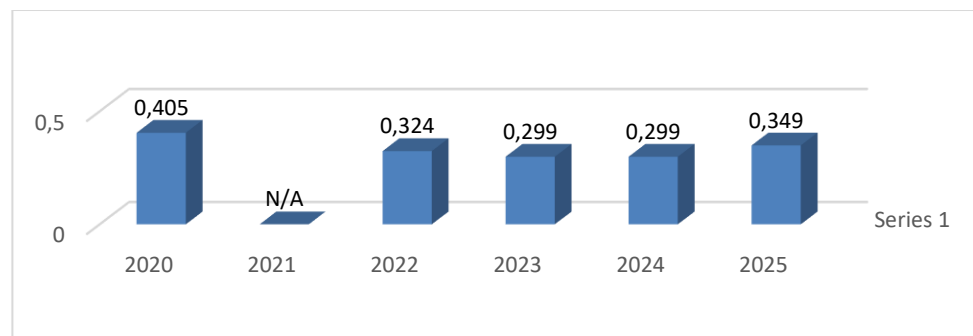
Tabel 1.2 Jumlah Pencari Kerja, Lowongan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja Berdasarkan Pendidikan di Kota Bontang Tahun 2025

No	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Pencari Kerja Terdaftar	Lowongan Kerja Terdaftar	Penempatan/ Pemenuhan Tenaga Kerja
1.	SD	585	98	99
2.	SMP/ sederajat	557	118	125
3.	SMA/ sederajat	6.103	4.294	3.006
4.	Diploma I, II, III	528	260	159
5.	Diploma IV/ S1	2.935	593	718
Jumlah		10.708	5.363	4.107

2. Perekonomian Daerah Yang Masih Sangat Tergantung Pada Sektor Industri Basis.

Permasalahan pokok perekonomian Kota Bontang adalah kualitas ekonomi daerah yang belum inklusif dan berimbang serta masih minimnya diversifikasi sektor ekonomi. Kondisi ini dapat dilihat dari nilai Indeks Gini yang menurun pada tiga tahun terakhir, namun tampak berbeda jika dibandingkan dengan nilai PDRB per kapita ditahun yang sama. Adapun nilai PDRB per kapita (dengan migas) pada tahun 2024 adalah sebesar 363,75 juta rupiah.

Gambar 1.10. Perkembangan Indeks Gini Kota Bontang Tahun 2020-2025



Gambar 1.10. Perkembangan Indeks Gini Kota Bontang Tahun 2020-2025

Sumber Data: BPS Kota Bontang, 2025

Permasalahan pokok ini disebabkan oleh ketidakseimbangan struktur

ekonomi yang didominasi oleh sektor industri pengolahan. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, struktur perekonomian Kota Bontang masih sangat didominasi oleh lapangan usaha industri pengolahan, khususnya industri pengolahan berbasis minyak dan gas bumi. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, industri pengolahan merupakan sektor dengan kontribusi terbesar PDRB Kota Bontang, yang pada Tahun 2025 mencapai 75,29 persen.

3. Lingkungan Hidup, Penataan Ruang dan Prasarana Dasar

Pembangunan infrastruktur permasalahan lingkungan hidup, penataan ruang dan prasarana dasar di Kota Bontang di antaranya adalah penurunan kualitas lingkungan hidup. Kondisi ini salah satunya tercermin dari nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) menurun dari 87,54 pada Tahun 2024 menjadi 85,01 pada Tahun 2025. Permasalahan ini tidak lepas dari status Kota Bontang sebagai kota industri sehingga memiliki kecenderungan mengalami paparan dari proses produksi berupa polusi industri yang berpengaruh pada kualitas udara ambien. Selain itu, pesatnya peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Kota Bontang menjadi salah satu sumber pencemaran udara berupa kebisingan yang melebihi baku mutu dan kadar CO² yang masih relatif tinggi.

Permasalahan pokok di bidang Prasarana Dasar di Kota Bontang adalah kualitas infrastruktur perkotaan belum maju dan tangguh. Aspek infrastruktur yang belum maju tercermin dalam kuantitas dan kualitas layanan infrastruktur yang belum optimal. Beberapa faktor penyebabnya antara lain kuantitas dan kualitas hunian yang masih rendah serta kualitas pengelolaan air minum dan sanitasi lingkungan yang belum maksimal. Pada tahun 2023 setidaknya masih terdapat 1.273 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) serta 36,85 Ha permukiman kumuh. Pada tahun 2024 berhasil membangun sebanyak 217 unit RTLH dari sisa 406 unit RTLH pada tahun 2023, sehingga sisa unit rumah yang belum dibangun pada tahun 2024 berjumlah 189 unit RTHL.

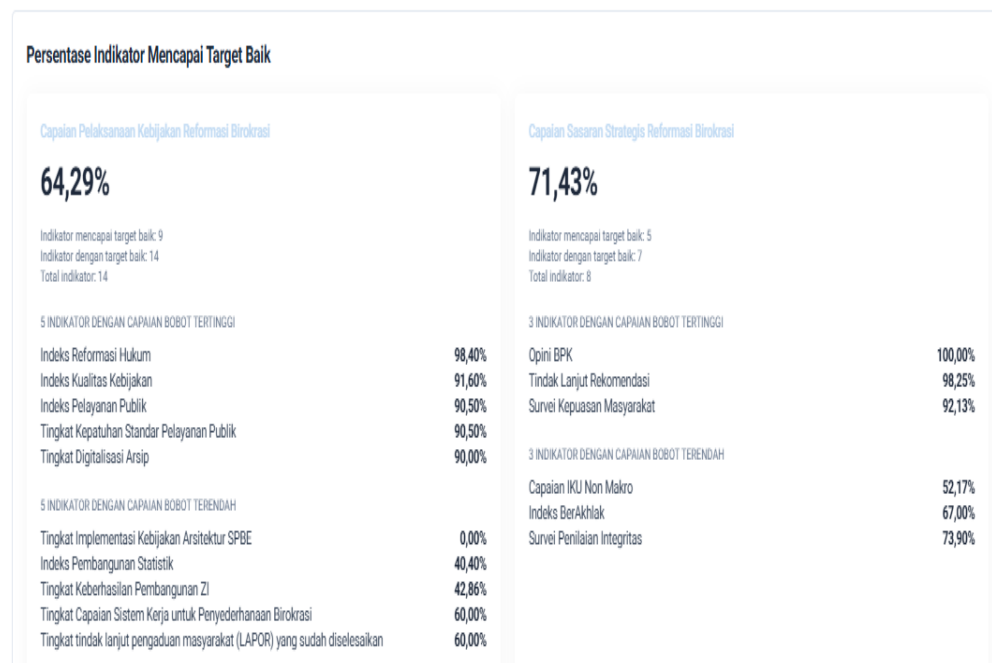
Kemudian untuk Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani atau yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Bontang berhasil ditangani 100% dari target 72,06% sehingga memperoleh capaian kinerja 138,77%. Program untuk melaksanakan kegiatan ini adalah program kawasan permukiman. Setelah melakukan pendataan rumah terpadu pada tahun 2025 Pemerintah Kota Bontang mendapatkan data bahwasannya terdapat 962 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Pada tahun 2025 Pemerintah Kota Bontang telah membangun Unit Rumah Tidak layak huni sebanyak 213 Unit.

4. Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan

Masalah dalam menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih juga dapat dilihat dari pelaksanaan reformasi birokrasi. Indeks reformasi birokrasi

Kota Bontang pada tahun 2020 mencapai 66,2. Dan menurun di tahun 2021 sebesar -1,45%. Dengan nilai tersebut, Indeks RB Pemerintah Kota Bontang mendapatkan kategori B atau Baik. Hasil terakhir dari Laporan Hasil Evaluasi pelaksanaan RB 2022 menyatakan bahwa indeks mengalami peningkatan 0.21% menjadi 65,38. Pada tahun 2023 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, bahwa Indeks Reformasi dan Birokrasi diubah menjadi Indeks Reformasi General dan Tematik, sistem penilaiannya yang dilakukanpun mengalami perubahan.

Sesuai Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Nomor B/355/RB.06/2024 tanggal 1 Februari 2024, nilai Indeks Reformasi Birokrasi General dan Tematik Pemerintah Kota Bontang pada tahun 2023 adalah 71,21 predikat BB, meningkat 5,83 poin atau 0,09%, yang sebelumnya 65,38 (B) kemudian pada tahun 2024 hasil yang dikeluarkan oleh Kementerian PANRB adalah 81,49 dengan predikat A meningkat 10,28 poin atau 14,44 % berdasarkan hasil ekspose di sistem Portal RB Nasional. Dan pada tahun 2025 IRB Kota Bontang kembali naik menjadi 85,79 ada kenaikan 4,3 poin.



Gambar. 1.11 Hasil LHE Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kota Bontang tahun 2024

Sumber Data: KemenpanRB,2026

RB General		
Strategi Pelaksanaan RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi
Total Score Index 8,50 Total Bobot 10,00 Persentase 85,00%	Total Score Index 39,61 Total Bobot 50,00 Persentase 79,22%	Total Score Index 26,67 Total Bobot 40,00 Persentase 66,68%

RB Tematik		
Strategi Pembangunan	Capaian Indikator Dampak	Strategi Pembangunan
Total Score Index 3,27 Total Bobot 5,00 Persentase 65,40%	Total Score Index 7,74 Total Bobot 15,00 Persentase 51,60%	Total Score Index 0,00 Total Bobot 0,04 Persentase 0,00%

Gambar. 1.12 Hasil LHE Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kota Bontang tahun 2025

Sumber Data: KemenpanRB,2026

Setelah adanya penyempurnaan evaluasi reformasi birokrasi melalui Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, nilai RB Kota Bontang di tahun 2024 dan 2025 mengalami kenaikan menjadi 81,49 (A) dan 85,79 (A). Berdasarkan hasil tersebut terlihat bahwa selama 5 tahun terakhir Indeks Reformasi Birokrasi secara umum mengalami peningkatan sebesar 20,55 poin atau naik sebesar 31,50 persen.

Sesuai dengan PemenPANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020 – 2024 bahwa, penyusunan RMRB akan berakhir pada tahun 2024, namun demikian Pemerintah Kota Bontang tetap memberikan perhatian khusus terhadap Reformasi Birokrasi pada tahun selanjutnya, sambil menunggu kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Kementerian PANRB.

Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bontang masih untuk perlu menjadi perhatian, mengingat interpretasi angka tersebut baru memenuhi sebagian kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing. Kondisi ini dikarenakan sebagian pelaksanaan percepatan transformasi digitalisasi

pemerintahan dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan.

Selanjutnya, selain permasalahan yang telah disebutkan di atas, Kota Bontang juga memiliki beberapa peluang yang dapat meningkatkan daya saing daerah. Sebagai kota yang perekonomiannya bersandar pada sektor industri migas, sejatinya Kota Bontang juga memiliki potensi lainnya yang dapat diproyeksikan menjadi potensi unggulan. Potensi unggulan tersebut diharapkan dapat dikembangkan menjadi penggerak ekonomi Kota Bontang. Adapun peluang ekonomi tersebut antara lain:

1. Jasa Kelautan

Sebagai daerah pesisir, Kota Bontang memiliki potensi jasa kelautan yang dapat dikembangkan berupa jasa transportasi laut. Tujuannya adalah untuk memperlancar kegiatan perdagangan lokal, regional dan internasional. Dengan kedalaman alur yang berkisar antara 17-20 meter, perairan Kota Bontang dapat dilalui kapal-kapal besar dengan kapasitas 20.000-40.000 DWT serta dapat melakukan bongkar muat. Saat ini Kota Bontang memiliki beberapa pelabuhan untuk mendukung aktivitas industri dan masyarakat umum, antara lain pelabuhan khusus yang berjumlah 3 unit (PT Pupuk Kaltim, PT Badak NGL, dan PT Indominco Mandiri), Pelabuhan Umum di Loktuan, Pelabuhan Rakyat di Tanjung Laut Indah dan Pelabuhan Pendaratan Ikan di Tanjung Limau.

2. Perikanan

Dengan dukungan perairan yang luasnya mencapai 49,757 Ha atau 70,30% dari luas Kota Bontang, maka perikanan dan kelautan sangat potensial dikembangkan. Pemanfaatan sumber daya ikan dapat dilakukan melalui kegiatan penangkapan dan budidaya. Potensi perikanan yang menjadi unggulan saat ini adalah kepiting, ikan kerapu, kakap, lobster, teripang dan rumput laut. Jenis-jenis ikan tersebut bernilai ekonomi tinggi di pasar domestik dan pasar internasional. Ikan-ikan hasil tangkapan nelayan hanya memenuhi kebutuhan lokal sedangkan kebutuhan pasar regional dan internasional hanya dapat dipenuhi dalam jumlah kecil. Dengan demikian pengembangan kegiatan perikanan mempunyai peluang yang sangat besar mengingat kebutuhan konsumsi ikan, baik dalam negeri maupun luar negeri, terus mengalami peningkatan. Begitupun dengan rumput laut yang sangat menjanjikan karena mempunyai kualitas terbaik di tingkat nasional.

3. Pariwisata

Sebagai kawasan pesisir, Kota Bontang mempunyai potensi wisata yang layak untuk dikembangkan seperti: pemukiman di atas air, wisata kuliner, hutan mangrove dan terumbu karang. Terdapat pula pesta laut sebagai event

tahunan untuk masyarakat pesisir yang diisi dengan acara adat disertai hiburan rakyat. Juga acara pesta adat Erau Pelas Benua yang dilaksanakan di Kelurahan Guntung sebagai ritual tolak bala bagi warga sekitar, yang dirangkai dengan olah raga tradisional berupa permainan sumpit dan gasing. Luas hutan mangrove Kota Bontang adalah 2.105 Ha. Kawasan tersebut potensial untuk dikembangkan menjadi ekowisata karena beberapa faktor pendukung antara lain: mudah dijangkau, memiliki struktur tegakan yang sempurna, serta spesies penyusun tegakannya beraneka ragam. Hutan Mangrove Kota Bontang tersebar di sepanjang pesisir pantai yang membentang mulai dari Guntung, Gunung Elai, Bontang Kuala, Rawa Indah, Teluk Kadere dan Manuk-manukan. Ketebalannya dari garis pantai ke arah darat bervariasi antara 50-710 M. Terumbu karang potensial untuk wisata *snorkeling* dan *diving*. Lokasinya berada di Karang Kiampau, Karang Segajah, Agar-agar, Melahing, Kedindingan, Beras Basah dan Tihi-tihi. Terumbu karang dapat dijumpai sampai kedalaman 15 M dan dihuni oleh ikan-ikan hias maupun komersil.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN PELAPORAN

Kami sampaikan bahwa sistematika penulisan laporan yang disusun oleh Pemerintah Kota Bontang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri PANRB Nomor 58 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Namun demikian, Pemerintah Kota Bontang telah melakukan penyesuaian sistematika penulisan laporan berdasarkan kesepakatan seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bontang melalui Berita Acara Perubahan Sistematika Penyusunan Laporan LKjIP Tahun 2025 (terlampir). Perubahan ini bertujuan untuk memastikan informasi tersaji secara tepat, akurat, dan dapat dijadikan dasar yang andal dalam proses pengambilan keputusan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bontang Tahun 2025 disusun dan disajikan dengan sistematika penulisan laporan yang telah disempurnakan sebagai berikut

Bab I Pendahuluan

Berisi uraian secara singkat mengenai latar belakang penulisan Laporan Kinerja, gambaran umum Kota Bontang, kewenangan penyelenggaraan yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Bontang, perangkat daerah, sumber daya aparatur dan sumber daya keuangan yang dimiliki Pemerintah Kota Bontang, isu-isu strategis Kota Bontang yang sedang berkembang serta sistematika penyusunan Laporan Kinerja.



Bab II Perencanaan Kinerja

Berisi uraian mengenai Rencana Strategis Pemerintah Kota Bontang tahun 2021- 2026, daftar indikator kinerja Pemerintah Kota Bontang tahun 2025 beserta target dan anggarannya yang telah diperjanjikan, serta uraian keterkaitan antara informasi kinerja (sasaran kegiatan dan indikator) pemerintah Kota Bontang dengan informasi kinerja.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Berisi uraian mengenai capaian kinerja Pemerintah Kota Bontang untuk setiap indikator kinerja sesuai dengan hasil pengukuran dilengkapi dengan beberapa analisis yang mendukung, uraian capaian kinerja anggaran yang mengacu pada peraturan terkait, serta uraian upaya penguatan akuntabilitas kinerja yang telah dilakukan selama tahun berjalan.

Bab IV Penutup

Berisi uraian simpulan umum atas capaian kinerja Pemerintah Kota Bontang Tahun 2025 serta langkah-langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Uraian Singkat RPJMD 2021-2026

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang tahun 2021-2026 merupakan landasan perumusan kebijakan pembangunan daerah dalam penentuan program, anggaran serta kegiatan prioritas Kota Bontang yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun. RPJMD Kota Bontang tersebut disahkan melalui Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. RPJMD Kota Bontang Tahun 2021-2026 merupakan tahapan ke IV dari RPJPD Kota Bontang 2005-2025. Periode ke-empat tersebut merupakan Tahapan Pemantapan terhadap capaian tahapan pembangunan pada tiga periode sebelumnya. Pada Tahap Pemantapan RPJPD Kota Bontang ditujukan untuk memantapkan perwujudan masyarakat yang adil dan sejahtera bagi segenap masyarakat Kota Bontang. Struktur perekonomian yang berbasis ekonomi maritim Kota Bontang diharapkan akan semakin mapan dan mengarahkan kepada upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang tahun 2021-2026 merupakan landasan perumusan kebijakan pembangunan daerah dalam penentuan program, anggaran serta kegiatan prioritas Kota Bontang yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun. RPJMD Kota Bontang tersebut disahkan melalui Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. RPJMD Kota Bontang Tahun 2021-2026 merupakan tahapan ke IV dari RPJPD Kota Bontang 2005-2025. Periode ke-empat tersebut merupakan Tahapan Pemantapan terhadap capaian tahapan pembangunan pada tiga periode sebelumnya. Pada Tahap Pemantapan RPJPD Kota Bontang ditujukan untuk memantapkan perwujudan masyarakat yang adil dan sejahtera bagi segenap masyarakat Kota Bontang. Struktur perekonomian yang berbasis ekonomi maritim Kota Bontang diharapkan akan semakin mapan dan mengarahkan kepada upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan.

PERIODE	VISI
RPJPD 2005-2025	KOTA MARITIM BERKEBUDAYAAN INDUSTRI YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN DAN MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT
RPJMD 2021-2026	TERWUJUDNYA KOTA BONTANG YANG LEBIH HEBAT DAN BERADAB
KETERKAITAN RPJPD DENGAN RPJMD	Visi RPJMD merupakan Tahap Pemantapan dalam mewujudkan masyarakat Kota Bontang yang adil dan sejahtera

Gambar 2.1 Visi RPJPD dan RPJMD Kota Bontang

Sumber: Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang, 2021

2.1.1 Visi 2021-2026

Visi RPJMD Kota Bontang dilandasi oleh keinginan bersama untuk mewujudkan Kota Bontang yang lebih progresif dalam segala aspek pembangunan yang dilakukan, sehingga dampak dan manfaat hasil pembangunan terhadap kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Bontang lebih terasa dan tepat sasaran. Makna **“Lebih Hebat”** dalam Visi tersebut menggambarkan harapan dan cita-cita Kota Bontang untuk menjadi Kota yang lebih berkualitas tata kelola pemerintahannya; lebih berkualitas penataan sarana dan prasarana kotanya; lebih meningkat perekonomian, kehidupan sosial dan budaya kotanya; lebih berkelanjutan daya dukung lingkungannya; lebih unggul sumber daya manusianya; serta lebih sejahtera masyarakatnya. Harmonisasi dari pencapaian seluruh cita-cita pembangunan tersebut pada esensinya merupakan tekad untuk mewujudkan Kota Bontang yang Hebat Pemerintahannya, Hebat Kotanya dan Hebat Masyarakatnya.

“Hebat Pemerintahannya” merupakan komitmen Pemerintah Kota Bontang untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Keinginan ini akan diwujudkan melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih, peningkatan dan pengembangan berbagai inovasi untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di beberapa sektor. Selanjutnya, **“Hebat Kotanya”** ditujukan untuk mewujudkan Kota Bontang dengan penataan sarana dan prasarana kota yang mantap dan berkelanjutan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan seluruh aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Kota Bontang yang hebat akan mendorong peningkatan produktivitas kota dan warganya secara berkelanjutan.

Adapun “**Hebat Masyarakatnya**” dimaksudkan untuk mewujudkan masyarakat Kota Bontang yang harmoni dengan keberagamannya, masyarakat yang aktif dan peduli terhadap pembangunan kotanya, dan masyarakat dengan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Kota Bontang yang Beradab merupakan perwujudan kota dengan masyarakat yang beradab, yaitu maju tingkat penghidupannya pada seluruh aspek kehidupan ekonomi, sosial dan budaya. Oleh karena itu mewujudkan Kota Bontang yang Beradab akan sangat berkaitan dengan membangun karakter dan budaya masyarakat yang produktif dan berakhlak mulia sebagai pondasi untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam keberagaman sesuai dengan nilai-nilai luhur agama dan Pancasila.

HEBAT dan **BERADAB** dalam visi Kota Bontang merupakan akronim dari kata **H**armoni, **bE**rkelanjutan, **B**erdaya, **sA**ing, **BE**rsih, **AD**il, **A**manah dan **B**ertanggung jawab yang merupakan nilai-nilai luhur yang diharapkan dapat memberi warna bagi pelaksanaan pembangunan selama lima tahun ke depan.

2.1.2. Misi 2021-2026

Dalam kerangka untuk mewujudkan Visi Kota Bontang, maka agenda pembangunan lima tahun mendatang dirumuskan dalam penetapan tiga misi pembangunan Kota Bontang. Adapun penjabaran ketiga misi pembangunan Kota.

VISI “TERWUJUDNYA KOTA BONTANG YANG LEBIH HEBAT DAN BERADAB”	
M I S I	Kota Bontang yang HARMONI melalui pemantapan sinergi dan kolaborasi pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan.
	Kota Bontang yang BERKELANJUTAN yang layak huni, cerdas dan berwawasan lingkungan melalui pemantapan ekonomi, sosial budaya, dan infrastruktur serta pelestarian lingkungan hidup.
	Kota Bontang yang BERDAYA SAING dan SEJAHTERA melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. ✦

Gambar 2.2 Visi Misi Kota Bontang 2021-2025

Sumber: Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang, 2021

Misi I: Kota Bontang yang HARMONI melalui pemantapan sinergi dan kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pembangunan.

Arahan strategis dari agenda pembangunan yang menjadi fokus utama misi pembangunan ini adalah peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang diharapkan menjadi “Lebih Hebat dan Beradab”. Agenda pembangunan ini harus dapat memastikan kelangsungan pemerintahan dan pembangunan berjalan sesuai dengan tujuan filosofinya yakni ditujukan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka perlu upaya yang progresif melalui pembangunan tata kelola pemerintahan yang harmoni. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan harus mampu secara harmonis, selaras dan serasi mendorong partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha untuk memperkuat sinergi menyatukan potensi dan peran pembangunan serta mempromosikan kolaborasi atau kerjasama agar penyelenggaraan pemerintahan semakin efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Dalam lingkup internal pemerintahan, harmoni dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan elemen penting untuk menyinergikan dan mengharmonisasikan potensi dan peran pemerintahan daerah selaku eksekutif, legislatif dan bersama instansi vertikal sehingga sasaran dan target kinerja pembangunan daerah dapat dicapai secara lebih efektif, efisien dan akuntabel. Semangat dan tekad untuk membangun harmoni dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan pondasi yang kuat untuk menghadapi tantangan dan peluang pembangunan ke depan dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yakni Pemerintahan yang Bersih, Adil, Amanah dan Bertanggung jawab sebagai bagian dari indikator terwujudnya Kota Bontang yang Hebat Pemerintahannya.

Misi II: Kota Bontang yang BERKELANJUTAN yang layak huni, cerdas dan berwawasan lingkungan melalui pemantapan ekonomi, sosial budaya, dan infrastruktur serta pelestarian lingkungan hidup.

Arahan strategik dari agenda Misi pembangunan ini adalah bahwa dalam rangka pencapaian Visi, fokus pembangunan juga perlu diarahkan pada upaya untuk terwujudnya Kota Bontang yang Berkelanjutan. Dengan demikian, pembangunan Kota Bontang yang lebih hebat ke depan dilaksanakan dalam koridor keseimbangan dan keselarasan antara pentingnya mendorong kemajuan dan pertumbuhan kota dengan tetap menjaga keberlanjutan daya dukung lingkungan. Untuk menuju pada perwujudan Kota Bontang yang Lebih

Hebat, agenda pembangunan diarahkan melalui pemantapan pembangunan ekonomi yang merata, pemantapan potensi sosial dan budaya masyarakat yang produktif, pembangunan infrastruktur yang semakin mantap dan pemantapan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan. Melalui pemantapan bidang-bidang utama pembangunan tersebut diharapkan Kota Bontang yang berkelanjutan, layak huni, cerdas, dan berwawasan lingkungan dapat diwujudkan.

Misi III: Kota Bontang yang BERDAYA SAING dan SEJAHTERA melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Arahan strategik agenda Misi pembangunan ini dalam mendukung pencapaian Visi adalah dengan mengarahkan fokus pembangunan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih berdaya saing dan unggul. Keberhasilan membangun SDM berdaya saing dan unggul akan menjadi akselerator bagi Kota Bontang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam rangka mewujudkan Kota Bontang Berdaya Saing dan Sejahtera, peningkatan kualitas SDM sebagai fokus utama pembangunan akan diintervensi melalui bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang ketahanan pangan, bidang kepemudaan dan olahraga, bidang perlindungan perempuan dan anak, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, bidang pariwisata, bidang ketenagakerjaan, bidang perlindungan dan kesejahteraan sosial. SDM yang berdaya saing dan unggul akan dapat diwujudkan dengan memastikan bahwa masyarakat mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, SDM tenaga kerja mendapatkan akses pembinaan dan pelatihan yang tepat sehingga kompetensi tenaga kerja meningkat, dan masyarakat yang rentan dan kurang mampu mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara layak. Implementasi kebijakan dan program yang tepat pada masing-masing bidang intervensi tersebut akan menjadi sarana utama untuk mewujudkan Kota Bontang yang Hebat Masyarakatnya.

2.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Dalam rangka mencapai ketiga misi pembangunan jangka menengah Kota Bontang, maka dirumuskan tujuan dan sasaran pada masing-masing misi tersebut. Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran operasional untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi. Oleh karena itu, misi Kota Bontang diturunkan ke dalam 4 Tujuan serta 8 Sasaran. Adapun *cascading* tujuan dan sasaran pembangunan Kota Bontang beserta target capainnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.1. Cascading Tujuan dan Sasaran Pembangunan
serta target capaian Misi 1 Kota Bontang**

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Baseline	Target				
					2020/ 2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
Misi 1: Kota Bontang yang HARMONI melalui pemantapan dan sinergi, kolaborasi pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan										
T.1	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang harmoni, bersih, adil, Amanah, dan Bertanggung Jawab	Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah		Indeks	n.a	75	79	82	85	89
		S.1.	Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	B (66,20)	B (67,41)	B (68,41)	BB (70,41)	BB (72,41)
				Nilai LPPD	Predikat	Tinggi (3,8607)	Tinggi (3,87)	Tinggi (3,90)	Tinggi (4,00)	Tinggi (4,20)
				Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		S.2.	Meningkatnya kondusifitas wilayah	Jumlah konflik	Kasus	9	8	8	7	7
				Persentase Penyelesaian Gangguan Keamanan dan Keteriban Umum	Persen	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang, 2021

**Tabel 2.2. Cascading Tujuan dan Sasaran Pembangunan
serta target capaian Misi 2 Kota Bontang**

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Baseline	Target				
					2020/ 2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
Misi 2: Kota Bontang yang BERKELANJUTAN yang layak huni, cerdas dan berwawasan lingkungan melalui pemantapan ekonomi, sosial budaya, dan infrastruktur serta pelestarian lingkungan hidup										
T.2.	Mewujudkan pembangunan perkotaan yang layak huni, cerdas dan berwawasan lingkungan	Indeks Kota Berwawasan Lingkungan (IKBL)		Indeks	64,63	66,34	68,02	69,69	71,78	73,45
		S.3	Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang maju tangguh	Indeks Kualitas Perkotaan	Indeks	64,47	67,35	70,16	72,98	76,61
		S.4	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan tata ruang yang lestari	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	64,79	65,33	65,87	66,41	66,95
T.3	Mewujudkan inklusivitas dan keseimbangan ekonomi daerah berbasis potensi ekonomi lokal dan keragaman sosial budaya masyarakat	Indeks Gini		Indeks	0,405	0,330	0,300	0,300	0,300	0,300
		S.5	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Non Migas	Laju Pertumbuhan Ekonomi Non Migas	Persen	2,38	4,2	4,5	5,3	6

Sumber: Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang, 2021

**Tabel 2.3. Cascading Tujuan dan Sasaran Pembangunan
serta target capaian Misi 3 Kota Bontang**

Tujuan		Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Baseline	Target				
						2020/2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3		4	5		6	7	8	9	10
Misi 3: Kota Bontang yang BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia											
T.4	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan sejahtera	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			Indeks	80,02	81,00*	81,00*	81,00	81,29	81,83
		S.6	Meningkatnya akses layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas	Angka harapan lama sekolah	Tahun	13.03	13.3	13.42	13.54	13.66	13.78
				Rata-rata lama sekolah	Tahun	10.79	10.91	10.98	11.64	11.1	11.17
				Usia harapan hidup	Tahun	74.28	74.44	74.51	74.56	74.61	74.65
		S.7	Meningkatnya tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	9.46	8.70*	8.70*	8.50	8.00	7.20
S.8	Meningkatnya pemberdayaan sosial	Angka Kemiskinan	Persen	4.38	4.03*	4.03*	3.90	3.80	3.75		

Sumber: Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang, 2021

2.2 URAIAN SINGKAT RPJMD 2025-2029

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang tahun 2025-2029 merupakan landasan perumusan kebijakan pembangunan daerah dalam penentuan program, anggaran serta kegiatan prioritas Kota Bontang yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun. RPJMD Kota Bontang tersebut disahkan melalui Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. RPJMD Kota Bontang Tahun 2025-2029 merupakan tahapan ke I dari RPJPD Kota Bontang 2025-2045.

2.2.1 Visi Tahun 2025-2029

Sesuai dengan Arah Kebijakan tahap I Pembangunan Daerah dalam RPJPD Kota Bontang Tahun 2025-2045, RPJMD Kota Bontang Tahun 2025– 2029 merupakan tahap awal dari pelaksanaan RPJPD Kota Bontang 2025–2045. Pada tahap ini, arah pembangunan difokuskan pada Penguatan Fondasi Transformasi. Prioritas utama pada tahap ini adalah untuk memastikan terpenuhinya pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial yang merupakan bagian integral dari visi pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Selain itu dalam rangka memberikan landasan yang kuat pada transformasi ekonomi dilakukan persiapan hilirisasi industri untuk memberikan nilai yang lebih tinggi pada suatu produk dengan mengubah produk mentah menjadi produk jadi. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk

mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja baru.



Gambar 2.3 Keselarasan Visi RPJMN, RPJMD Provinsi Kalimantan Timur, RPJPD Kota Bontang dan RPJMD Kota Bontang Tahun 2025 -2029

Sumber: Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang, 2025

RPJMD Kota Bontang Tahun 2025-2029 merupakan bagian integral dari pencapaian visi RPJM Nasional tahun 2025-2029 dan pencapaian visi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029. Visi pembangunan Kota Bontang untuk tahun 2025-2029 yang ditetapkan berdasarkan visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Terpilih adalah :

"TERWUJUDNYA KOTA BONTANG SEBAGAI KOTA INDUSTRI DAN JASA YANG MAJU, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN SEBAGAI DAERAH MITRA IKN"

Visi Kota Bontang tahun 2025–2029 menggambarkan tekad kuat untuk menjadikan Bontang sebagai kota industri dan jasa yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Pelaksanaan Pembangunan di Kota Bontang dilaksanakan dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan rakyat berbasis pada potensi unggul daerah sebagai kota industri dan mengembangkan sektor jasa yang diharapkan akan menjadi katalisator dalam pembangunan yang akan membawa Kota Bontang menjadi kota yang maju sebagai mitra bagi pengembangan IKN.

2.2.2 Misi 2025-2029

Dalam kerangka untuk mewujudkan Visi Kota Bontang, maka agenda pembangunan lima tahun mendatang dirumuskan dalam penetapan lima misi pembangunan Kota Bontang. Adapun penjabaran kelima misi pembangunan

Kota adalah sebagai berikut.



Gambar 2.4 Visi Misi Kota Bontang 2025-2029

Sumber Data : RPJMD Kota Bontang 2021-2026

Misi 1: Mewujudkan Transformasi Sosial Menuju Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing

Pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing merupakan fondasi utama dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera dan berkontribusi terhadap kemajuan daerah. Oleh karena itu, misi ini berfokus pada peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan serta kesehatan sebagai faktor utama dalam pembangunan manusia. Dengan meningkatkan indeks pendidikan, masyarakat diharapkan memperoleh kesempatan pendidikan yang lebih baik, sehingga mampu bersaing dalam dunia kerja. Selain itu, peningkatan indeks kesehatan mencerminkan upaya perbaikan layanan kesehatan yang berkualitas dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Misi 2: Mewujudkan Transformasi Ekonomi yang Dinamis dan Inklusif

Transformasi ekonomi yang dinamis dan inklusif di Kota Bontang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal dengan mengurangi ketergantungan pada sektor migas. Peningkatan nilai investasi menjadi pilar utama dalam memperkuat struktur ekonomi daerah, dengan mendorong masuknya investasi di sektor produktif seperti pertanian, perikanan, perkebunan, perdagangan, jasa, dan pariwisata. Dengan meningkatnya kontribusi sektor-sektor ini terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Kota Bontang dapat membangun ekosistem ekonomi yang lebih beragam, menciptakan lapangan kerja baru, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Misi 3: Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan landasan utama dalam menciptakan pelayanan publik yang berkualitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kota Bontang berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang selaras, transparan, dan berkeadilan, dengan menitikberatkan pada peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini diwujudkan melalui penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan perolehan opini positif dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dengan tata kelola yang akuntabel, setiap kebijakan dan program pembangunan akan lebih efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Misi 4: Memperkuat Infrastruktur Kewilayahan yang Berkualitas dan Merata

Pembangunan infrastruktur yang berkualitas menjadi kunci utama dalam menciptakan Kota Bontang yang layak huni, cerdas, dan berwawasan lingkungan. Pemerintah berkomitmen untuk menghadirkan infrastruktur yang modern dan tangguh, guna mendukung pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur diwujudkan melalui pembangunan dan pemeliharaan fasilitas publik, termasuk jalan, jembatan, sistem transportasi massal, air bersih, air limbah, pengendalian banjir, penyediaan hunian layak, pelayanan kebakaran, dan penyediaan gedung pemerintah. Upaya ini memastikan aksesibilitas yang lebih luas, efisiensi layanan publik, serta meningkatkan konektivitas antar wilayah untuk mempercepat mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Misi 5: Meningkatkan Pelestarian Lingkungan Hidup

Misi ini berorientasi pada peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penguatan ketahanan daerah terhadap dampak perubahan iklim. Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga keseimbangan ekosistem, mengurangi pencemaran, serta menerapkan konsep pembangunan hijau. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah berupaya meningkatkan mutu lingkungan melalui pemantauan dan peningkatan kualitas air, udara, dan lahan. Selain itu, melalui program mitigasi dan adaptasi yang terencana, Pemerintah Kota Bontang berkomitmen untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) secara bertahap, sejalan dengan target yang ditetapkan.

2.2.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Dalam rangka mencapai ketiga misi pembangunan jangka menengah Kota Bontang, maka dirumuskan tujuan dan sasaran pada masing-masing misi tersebut. Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran operasional untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi. Oleh karena itu, misi Kota Bontang diturunkan ke dalam 4 Tujuan serta 13 Sasaran. Adapun *cascading* tujuan dan sasaran pembangunan Kota Bontang beserta target capainnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.4. Cascading Tujuan dan Sasaran Pembangunan
serta target capaian Kota Bontang 2025-2029**

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Baseline	2025	2026	2027	2028	2029	2030
T1. Terwujudnya Kota Bontang yang Maju	IT1. LPE			Persen	-2,51	1,00-	1,15-	2,01-	3,09-	3,93-	4,40-4,70
	IT2. LPE non-Migas			Persen	9,40	5,00	5,50	6,50	7,50	8,00	9,00
		S1. Meningkatnya Nilai Investasi	IS1. Pertumbuhan Nilai investasi	Persen	12,97	3,00	10,00	5,00	5,00	5,00	3,00
			IS2.1. Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Perikanan dan Perkebunan	Persen	1,21	1,36	1,51	1,66	1,81	2,05	2,10
		S2. Meningkatnya Produktivitas Sektor Ekonomi Lokal	IS2.2. Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	Persen	3,17	3,75	3,80	3,85	3,90	4,10	4,21
			IS2.3. Kontribusi PDRB Sektor Jasa	Persen	4,38	4,51	4,64	4,76	4,89	5,02	5,46
			IS2.4. Kontribusi PDRB Sektor Pariwisata	Persen	0,67	0,72	0,77	0,83	0,88	1,05	1,08
		S3. Meningkatnya Produktivitas Sektor Industri Pengolahan	IS3. Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	Persen	-4,99	0,22	0,44	0,60	0,68	0,72	0,76
		S4. Meningkatnya kualitas infrastruktur yang maju dan merata	IS4. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	Persen	76,38	77,00	79,64	82,55	85,48	87,53	88,56
		S5. Terwujudnya Stabilitas harga	IS5. Indeks Perkembangan Harga	Indeks	N/A	1,1± 1	1,1± 1	1,1± 1	1,1± 1	1,1± 1	1,1± 1
T2. Terwujudnya Kota Bontang yang Sejahtera	IT2.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			Indeks	82,49	82,83 - 83,18	83,19 - 83,53	83,53 - 83,87	83,88 - 84,22	84,23 - 84,45	84,46 - 84,58
		S8. Meningkatnya kualitas dan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan	IS8.1. Indeks Pendidikan	Indeks	0,75	0,76	0,76	0,77	0,78	0,79	0,80
			IS8.2. Indeks Kesehatan	Indeks	0,85	0,85	0,85	0,86	0,86	0,86	0,87
	IT2.2. Tingkat Kemiskinan			Persen	3,74	3,73-3,40	3,40-3,15	3,15-2,88	2,88-2,03	2,03-1,61	1,60-0,00
		S9. Meningkatnya Perlindungan Sosial yang Adaptif	IS9. Persentase Keluarga Miskin Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	Persen	7,78	8,44	16,88	25,32	33,76	42,19	50,63
		S10. Meningkatnya Ketahanan Keluarga	IS10. Indeks pembangunan keluarga	Indeks	65,30 (2023)	74,80	75,60	76,50	77,40	78,59	81,71
	IT2.3. Indeks Gini			Indeks	0,330	0,330-0,300	0,323-0,310	0,310-0,300	0,300-0,290	0,290-0,286	0,286-0,281
		S11. Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja	IS11. Tingkat Pengangguran terbuka	Persen	7,06	6,78-6,65	6,60-6,05	6,05-5,25	5,25-5,05	5,05-4,67	4,68-3,95
	T3. Terwujudnya Kota Bontang yang Berkelanjutan	IT3. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		Indeks	67,71	73,38	73,54	73,69	73,84	73,99	74,15
		S12. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan kota	IS12.1. Penurunan Intensitas Emisi GRK	Persen	1,90	15,89	18,54	3,01	3,16	3,23	3,74
T4. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	IT4. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)			Indeks	81,49	82,32	83,89	85,47	87,05	88,62	90,20
		S13. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	IS13.1. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Angka	70,04	70,90	73,00	75,00	80,10	85,00	90,00
		Penyelenggaraan Pemerintahan	IS13.2. Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			IS14.1. Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	4,28	4,32	4,35	4,38	4,41	4,44	4,47
		S14. Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Digitalisasi Pemerintahan yang inovatif	IS14.2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	90,66	90,85	91,00	91,15	91,65	92,15	92,65
			IS14.3. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) / Indeks Pemerintahan Digital (Pemdigi)	Indeks	3,39	3,59	1,70-2,00	1,70-2,00	2,15-2,50	2,15-2,50	2,51-2,75

Sumber: Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang, 2021

2.3. DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR

Indikator Kinerja Utama merupakan acuan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pemerintah Kota Bontang. Indikator kinerja utama menjadi ukuran keberhasilan pemerintah daerah. Tujuan ditetapkannya indikator kinerja utama (1) penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik; (2) untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

2.3.1 Indikator Kinerja Utama 2021 -2025

Manual indikator utama Pemerintah Kota Bontang sesuai Perubahan Keputusan Walikota Bontang Nomor 188/307/BAPELITBANG Tahun 2023 terlampir, secara singkat kami sajikan dalam tabel berikut:

Misi 1: Kota Bontang yang HARMONI melalui pemantapan sinergi dan kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pembangunan

Tabel 2.5. Deskripsi operasional IKU 2021-2026 Tujuan 1

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang harmoni, bersih, adil, amanah, dan bertanggung jawab	Indeks kepemimpinan Kepala Daerah	Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif	Indeks Reformasi Birokrasi
			Nilai LPPD
			Opini BPK
		Meningkatnya kondusifitas wilayah	Jumlah konflik
			Persentasi penyelesaian gangguan keamanan dan ketertiban umum

Kode	Indikator Kinerja Utama/Uraian
IT.1	Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah
	Deskripsi:
	Satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk melakukan pengukuran dan penilaian terhadap kepemimpinan kepala daerah.
	Kepala Daerah memiliki peran penting untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Kepemimpinan Kepala Daerah ikut serta dalam menentukan keberhasilan tujuan pemerintah daerah. Keberhasilan tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain:
	a) Tingkat kemiskinan menurun
	b) Tingkat pendidikan masyarakat meningkat
	c) Tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat
	d) Tingkat kesehatan masyarakat meningkat
	Sumber data:
	LKPJ, LKjIP, LPPD, Evaluasi RKPD, Evaluasi RPJMD
	Cara Menghitung:
	Cara pengukuran sesuai Permendagri Nomor 38 Tahun 2020 tentang Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah
	Unit bertanggung jawab
	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang)
	Penanggung Jawab Data
	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang)
S.S.1	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif
I.K.1.1	Indeks Reformasi Birokrasi
	Deskripsi:
	Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dengan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan atau organisasi, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.
	Nilai pelaksanaan RB yaitu nilai rata-rata hasil evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) di tingkat kabupaten/kota yang dilakukan oleh Kementerian PANRB, berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi.
	Sumber Data:
	Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi yang di susun oleh

Kode	Indikator Kinerja Utama/Uraian
	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bontang
	Cara Menghitung
	A) RB General terbagi menjadi 3 yaitu:
	1) Capaian Sasaran Strategis terbagi menjadi 2 yaitu: a) tata kelola pemerintahan digital yang efektif lincah dan kolaboratif, b) budaya birokrasi berAKHLAK dengan ASN yang profesional
	2) Capaian pelaksanaan kebijakan RB terbagi menjadi 2 yaitu: a) tata kelola pemerintahan digital yang efektif lincah dan kolaboratif, b) budaya birokrasi berAKHLAK dengan ASN yang profesional
	3) Capaian Strategis Pelaksanaan RB General
	Unit bertanggung jawab:
	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
	Penanggung jawab data:
	Sekretariat Daerah Kota Bontang
I.K.1.2	Nilai LPPD
	Deskripsi
	Laporan Penyusunan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. LPPD merupakan salah satu laporan yang wajib yang disusun dan disampaikan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. LPPD disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintah daerah oleh Pemerintah Pusat.
	Sumber Data:
	Laporan Penyusunan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) yang disusun oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bontang
	Cara Menghitung:
	Pengukuran LPPD sesuai dengan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada lampiran pada Bab IV Sistematika ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Kode	Indikator Kinerja Utama/Uraian
	Unit bertanggung jawab
	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
	Penanggung jawab data
	Seluruh Perangkat Daerah
I.K.1.3	Opini BPK
	Deskripsi:
	Opini BPK merupakan opini audit tertinggi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal pengelolaan anggaran di kementerian/lembaga. Entitas yang dapat opini WTP bisa dikatakan laporan keuangannya "Bersih". Opini WTP menyatakan laporan keuangan yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang mterial, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas sesuai prinsip akuntansi. Opini laporan keuangan disusun dengan pertimbangan kesesuaian antara akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.
	Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undana Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
	Sumber Data:
	Hasil Pemeriksaan BPK
	Cara Menghitung:
	Melalui pemeriksaan keuanga yang terdiri dari Neraca, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggarna lebih, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, serta catatan dan laporan keuangan.
	Unit bertanggung jawab:
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Penanggung jawab data:
	Seluruh Perangkat Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
S.S.2	Meningkatnya kondusifitas wilayah
I.K.2.1	Jumlah Konflik
	Deskripsi:
	Konflik merupakan suatu hal yang selalu ada dan sulit untuk dipisahkan dalam kehidupan sosial. Konflik sosial merupakan berdampak baik bagi kemajuan dan perubahan masyarakat, tetapi jika konflik yang terjadi dimasyarkat tidak mampu dikelola dan diatasi dengan baik maka konflik akan menimbulkan dampak buruk hingga timbulnya berbagai kerusakan baik itu fisik maupun non

Kode	Indikator Kinerja Utama/Uraian
	fisik, ketidak-amanan, ketidak harmonisan dan menciptakan ketidak stabilan, bahkan sampai mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Sumber Data: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Cara Menghitung: Dengan cara melihat penurunan konflik yang terjadi pada tahun berjalan dibandingkan dengan tahun sebelumnya Unit bertanggung jawab: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Penanggung jawab data: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
I.K.2.2	Persentase penyelesaian gangguan keamanan dan ketertiban umum
	Deskripsi: Tindakan kejahatan kriminalitas, unjuk rasa, dan mogok kerja merupakan tindakan yang merugikan dan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Kemampuan menurunkan angka kriminalitas dan konflik sosial yang berlatar belakang suku, agama, ras dan antar golongan memiliki peran penting bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat karena mampu mendorong iklim berinvestasi di Kota Bontang. Sumber Data: Olah data tindak kejahatan dari Polres Bontang, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Cara Menghitung: Jumlah pengaduan yang ditegakkan dibagi Pengaduan pelanggaran yang masuk dikali 100% Unit Bertanggung Jawab: Satuan Polisi Pamong Praja Penanggung Jawab Data: Satuan Polisi Pamong Praja

Sumber: Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang, 2021

Misi 2: Kota Bontang yang BERKELANJUTAN yang layak huni, cerdas dan berwawasan lingkungan melalui pemantapan ekonomi, sosial budaya, dan infrastruktur serta pelestarian lingkungan hidup.

Tabel 2.6. Deskripsi operasional IKU 2021-2026 Tujuan 2

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Mewujudkan inklusivitas dan keseimbangan ekonomi daerah berbasis potensi ekonomi lokal dan keragaman sosial budaya masyarakat	Indeks Kota Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang maju tangguh	Indeks Kualitas Perkotaan
		Meningkat kualitas lingkungan hidup dan tata ruang yang	Indeks kualitas lingkungan hidup

Kode	Indikator Kinerja Utama/Uraian
IT.2	Indeks Kota Berwawasan Lingkungan (IKBL)
	Deskripsi
	Pembangunan ini akan berkaitan erat dengan keberhasilan melaksanakan pembangunan kota yang semakin maju perkembangan kotanya namun pada saat yang sama tetap mampu menjaga keseimbangan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan
	Sumber data
	Hasil Indeks Kualitas Perkotaan dan hasil Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
	Cara Menghitung
	Hasil rata-rata dari nilai Indeks Kualitas Perkotaan dan hasil Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
	Unit bertanggung jawab
	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang
	Penanggung Jawab Data
	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang, Dinas Perhubungan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja Utama/Uraian
S.S.3	Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang maju tangguh
I.K.3.1	Indeks Kualitas Perkotaan
	Deskripsi
	Tujuan pembangunan dicapai dengan penetapan pada sasaran pembangunan yang merupakan suatu kondisi yang akan diwujudkan sebagai kinerja utama pelaksanaan pembangunan daerah. Adapun sasaran pembangunan tersebut adalah: 1) meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang maju tangguh; dan 2) meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan tata ruang yang lestari
	Sumber data
	Hasil Indeks Kualitas Infrastruktur dan hasil indeks Ketahanan Daerah
	Cara Menghitung
	Parameter pengukur indeks kualitas perkotaan ada 2 yaitu: 1) Indeks kualitas infrastruktur (IKI) yang terdiri dari: a) tingkat akses hunian b) tingkat kualitas hunian, c) tingkat pelayanan air minum, d) tingkat pelayanan air limbah, e) tingkat pelayanan sampah, f) tingkat pelayanan sumber daya air, g) tingkat pelayanan jalan umum, h) tingkat pelayanan transportasi umum, i) tingkat pelayanan bangunan gedung, j) tingkat pelayanan pemadam kebakaran 2) Indeks Ketahanan Daerah yang komposit pengukurnya ada 71 indikator kapasitas daerah dalam 7 prioritas penanggulangan bencana yang dibuat oleh BNPB
	Unit bertanggung jawab
	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang
S.S.4	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan tata ruang yang lestari
I.K.4.1	Indeks kualitas lingkungan hidup
	Deskripsi
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dapat diketahui seberapa jauh kondisi dan status kualitas lingkungan hidup dari segi kualitas air, kualitas udara, dan tutupan lahan.

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja Utama/Uraian
	Sumber data
	Indeks kualitas udara, indeks kualitas air dan indeks kualitas lahan
	Cara Menghitung
	Mengukur IKLH = $(0.376 \times IKA) + (0.405 \times IKU) + (0.219 \times IKL)$
	Unit bertanggung jawab
	Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Sumber: Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang, 2021

Tabel 2.7. Deskripsi operasional IKU 2021-2026 Tujuan 3

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
		lestari	
Mewujudkan inklusivitas dan keseimbangan ekonomi daerah berbasis potensi ekonomi lokal dan keragaman sosial budaya masyarakat	Indeks Gini	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi non migas	Laju pertumbuhan ekonomi non migas

Kode	Indikator Kinerja Utama/Uraian
IT.3	Indeks Gini
	sosial budaya, dan infrastruktur serta pelestarian lingkungan hidup”. Dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan ini harus mampu membangkitkan dan menumbuhkan perekonomian daerah secara inklusif dan seimbang antara sektor migas dan non migas. Keberhasilan pembangunan ekonomi ditentukan oleh indeks gini yang menggambarkan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di suatu wilayah. Semakin baik pembangunan distribusi di suatu wilayah, maka nilai indeks gini akan semakin kecil, begitu juga jika pembangunan ekonomi di suatu wilayah kurang berhasil maka nilai indeks gini akan semakin besar mendekati angka 1 (satu).
	Sumber data
	Buku Kota Bontang Dalam Angka

Kode	Indikator Kinerja Utama/Uraian
	Cara Menghitung Indeks gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh. Indeks gini berkisar antara 0 sampai 1. apabila koefisien gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan benar-benar sempurna terjadi. Jika nilai indeks gini kurang dari 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan "rendah"; nilainya antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan "moderat"; jika nilainya lebih besar dari 0,5 dikatakan berada dalam ketimpangan "tinggi". Unit bertanggung jawab Seluruh Perangkat Daerah Penanggung Jawab Data Seluruh Perangkat Daerah Deskripsi Tujuan pembangunan menjadi bagian dari rumusan strategis yang menggambarkan pencapaian implementasi misi "Kota Bontang Berkelanjutan Yang Layak Huni, Cerdas dan Berwawasan Lingkungan melalui pemantapan ekonomi,
S.S.5	Meningkatnya pertumbuhan Ekonomi Non Migas
I.K.5.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Non Migas
	Deskripsi Tujuan pembangunan akan dicapai dengan penetapan sasaran pembangunan yang kondisinya akan diwujudkan sebagai kinerja utama pelaksanaan pembangunan daerah. Sasaran tersebut adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi non migas. Sumber data Buku Kota Bontang Dalam Angka Cara Menghitung Laju pertumbuhan dihitung dengan cara mengurangi nilai PDRB pada tahun ke-n terhadap nilai pada tahun ke n-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun n-1, kemudian dikalikan dengan 100 persen. Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya. Unit bertanggung jawab Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Penanggung Jawab Data Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan

Misi 3: Kota Bontang yang BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia

Tabel 2.8. Deskripsi operasional IKU 2021-2026 Tujuan 4

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan sejahtera	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya akses layanan pendidikan dan kesejahteraan yang berkualitas	Angka harapan lama sekolah
			Rata-rata klama sekolah
			Usia harapan hidup
		Meningkatnya tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing	Tingkat pengangguran
		Meningkatnya pemberdayaan sosial	Angka kemiskinan

Kode	Indikator Kinerja Utama/Uraian
IT.4	Indeks Pembangunan Manusia
	Deskripsi
	IPM adalah indeks komposit yang diharapkan mampu mencerminkan kinerja pembangunan manusia yang dapat dibandingkan antar wilayah dan antar waktu. IPM menggambarkan pembangunan manusia atau mutu hidup ke dalam suatu angka indeks. Pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk membuat manusia mampu mempunyai lebih banyak pilihan. Pendapatan adalah salah satu dari pilihan yang dimiliki manusia, tetapi bukanlah suatu totalitas dari semua aspek kehidupan manusia, pilihan yang tidak kalah penting adalah pilihan kesehatan, pengetahuan, lingkungan fisik yang baik dan kebebasan untuk bertindak. Dengan adanya pilihan tersebut diharapkan adanya kemajuan dalam pembangunan manusia tersebut.
	Sumber data
	Buku Kota Bontang Dalam Angka
	Cara Menghitung
	Terdapat 3 (tiga) dimensi indikator komponen dalam pengukuran IPM yaitu: 1) Lamanya hidup adalah hidup sehat dan umur panjang yang diukur dengan angka harapan hidup waktu lahir

Kode	Indikator Kinerja Utama/Uraian
	2) Pengetahuan atau pendidikan yang diukur dengan rata- rata antara harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah 3) Standar kehidupan yang layak diukur dengan pengeluaran per kapita Setiap komponen IPM distandardisasi dengan nilai minimum dan maksimum sebelum digunakan untuk menghitung IPM. Rumus yang digunakan sebagai berikut. Dimensi Kesehatan: $I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$ Dimensi Pendidikan : $I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$ $I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$ $I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$ Dimensi Pengeluaran : $I_{pengeluaran} = \frac{\ln(pengeluaran) - \ln(pengeluaran_{min})}{\ln(pengeluaran_{maks}) - \ln(pengeluaran_{min})}$ IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan dan pengeluaran dengan rumus sebagai berikut: $IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}}$
	Unit bertanggung jawab
	Seluruh Perangkat Daerah
	Penanggung Jawab Data
	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja Utama/Uraian
S.S.6	Meningkatnya akses layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja Utama/Uraian
I.K.6.1	Angka harapan lama sekolah
	Deskripsi
	Harapan lama sekolah adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang, dengan asumsi harapan lama sekolah yaitu kemungkinan anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur berikutnya sama dengan rasio penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini.
	Sumber data
	Buku Kota Bontang Dalam Angka
	Cara Menghitung
	$EYS_a^t = FKx \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ Dimana: EYS_a^t : Harapan lama sekolah pada umur a di tahun t ; E_i^t : Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t ; P_i^t : Jumlah penduduk usia i pada tahun t ; i : Usia ($a, a+1, \dots, n$) ; FK : Faktor koreksi.
	Unit bertanggung jawab
	Dinas Pendidikan
	Penanggung Jawab Data
	Dinas Pendidikan
I.K.6.2	Rata-rata lama sekolah
	Deskripsi
	Rata-rata lama sekolah adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal, dengan asumsi dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Rata-rata lama sekolah dihitung berdasarkan penduduk usia 25 tahun keatas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir.
	Sumber data
	Buku Kota Bontang Dalam Angka
	Cara Menghitung

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja Utama/Uraian
	Rumus Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Untuk menghitung rata-rata lama sekolah digunakan rumus berikut: $RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n x_i$ dimana : RLS = Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas x_i = Lama sekolah penduduk ke-i yang berusia 25 tahun N = Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas
	Unit bertanggung jawab
	Dinas Pendidikan
	Penanggung Jawab Data
	Dinas Pendidikan
I.K.6.3	Usia harapan hidup
	Deskripsi
	Usia harapan hidup adalah rata-rata kesempatan atau waktu hidup yang tersisa. Usia harapan hidup bisa diartikan pula dengan banyaknya tahun yang ditempuh penduduk yang masih hidup sampai umur tertentu.
	Sumber data
	Dinas kesehatan dan badan pusat statistik
	Cara Menghitung
	$UHH = \frac{\text{Jumlah Umur orang meninggal (2.500 thn)}}{\text{jumlah orang meninggal (50)}} = 50 \text{ thn}$
	Unit bertanggung jawab
	Dinas Kesehatan
	Penanggung Jawab Data
	Dinas Kesehatan
S.S.7	Meningkatnya tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing
I.K.7.1	Tingkat Pengangguran Terbuka
	Deskripsi
	Tingkat pengangguran terbuka merupakan penduduk usia kerja yang tidak bekerja, sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan suatu usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Tingkat pengangguran terbuka dapat

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja Utama/Uraian
	dihitung dengan cara membandingkan jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja
	Sumber data
	Buku Kota Bontang Dalam Angka
	Cara Menghitung
	$TPT = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100$
	Unit bertanggung jawab
	Dinas Tenaga Kerja dan Badan Pusat Statistik
	Penanggung Jawab Data
	Dinas Tenaga Kerja dan Badan Pusat Statistik
S.S.8	Meningkatnya pemberdayaan sosial
I.K.8.1	Angka Kemiskinan
	Deskripsi
	Penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu prioritas pembangunan Indonesia. Hal ini sejalan dengan komitmen pertama tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals (SDGs), yakni menurunkan kemiskinan dan kelaparan. Tersedianya angka kemiskina yang akurat di setiap wilayah merupakan syarat mutlak dalam penyusunan kebijakan penanggulangan kemiskinan
	Sumber data
	Data survei sosial ekonomi nasional (susenas)
	Cara Menghitung
	$GK = GKM + GKNM$
	GK = Garis kemiskinan
	GKM = Garis kemiskinan makanan GKNM = Garis Kemiskinan Non Makanan
	Unit bertanggung jawab
	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
	Penanggung Jawab Data
	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Sumber: Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang, 2021

2.3.2 Indikator Kinerja Utama 2025-2029

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran utama dalam menilai pencapaian kinerja pemerintah daerah pada level tertinggi, yang merefleksikan dampak akhir (impact) atau ultimate outcome dari seluruh proses pembangunan. Dalam konteks RPJMD Kota Bontang Tahun 2025–2029,

indikator kinerja yang terkait dengan tujuan dan sasaran pembangunan ditetapkan sebagai IKU. Hal ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mengukur keberhasilan strategis secara menyeluruh dan berkelanjutan. IKU Kota Bontang sesuai dengan Keputusan Wali Kota Bontang Nomor 100.3.3.3/515/Bapperida/2025 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bontang Tahun 2025-2029 terlampir, secara singkat kami sajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.9. Deskripsi Operasional IKU 2025-2029

Kode	Indikator Kinerja Utama/Uraian
T1	Terwujudnya Kota Bontang yang Maju
IT1.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
	Deskripsi
	LPE mengukur perkembangan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian pada tahun tertentu terhadap nilai tahun sebelumnya (atas dasar harga konstan).
	Formulasi Perhitungan
	$LPE = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$
	t = tahun berjalan (atas dasar harga konstan)
	t-1 = tahun sebelum tahun berjalan (atas dasar harga konstan)
	Produsen Data:
	Badan Pusat Statistik Kota Bontang
	Sumber Data:
	Publikasi Kota Bontang dalam angka
	Unit Bertanggung Jawab:
	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah
IT1.2	LPE Nonmigas
	Deskripsi
	LPE Nonmigas mengukur perkembangan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian selain sektor minyak dan gas bumi, pada tahun tertentu terhadap nilai tahun sebelumnya (atas dasar harga konstan).
	Formulasi Perhitungan
	$LPE \text{ Nonmigas} = \frac{PDRB \text{ Nonmigas}_t - PDRB \text{ Nonmigas}_{t-1}}{PDRB \text{ Nonmigas}_{t-1}} \times 100\%$
	t = tahun berjalan (atas dasar harga konstan)

Kode	Indikator Kinerja Utama/Uraian
	t-1 = tahun sebelum tahun berjalan (atas dasar harga konstan)
	Produsen Data
	Badan Pusat Statistik Kota Bontang
	Sumber Data
	Publikasi Kota Bontang dalam angka
	Unit Bertanggung Jawab
	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja Utama/Uraian
S1	Meningkatnya Nilai Investasi
IS1	Pertumbuhan Nilai investasi
	Deskripsi
	Pertumbuhan nilai investasi menunjukkan perkembangan nilai investasi yang masuk ke suatu daerah dalam periode tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya.
	Formulasi Perhitungan
	$\text{Pertumbuhan Nilai Investasi} = \frac{\text{Nilai Investasi}_t - \text{Nilai Investasi}_{t-1}}{\text{Nilai Investasi}_{t-1}} \times 100\%$
	t = nilai investasi tahun terakhir
	t-1 = nilai investasi tahun sebelumnya
	Produsen Data
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Sumber Data
	Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Provinsi Kalimantan Timur
	Unit Bertanggung Jawab
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
S2	Meningkatnya Produktivitas Sektor Ekonomi Lokal
IS2.1	Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Pertanian, Perikanan, dan Perkebunan
	Deskripsi
	Persentase nilai tambah/pengeluaran pada sektor/subsektor pertanian, perikanan, dan perkebunan terhadap total PDRB suatu wilayah dalam periode tertentu (atas dasar harga berlaku).
	Formulasi Perhitungan

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja Utama/Uraian
	$\frac{\text{PDRB Sektor Pertanian, Perikanan, Perkebunan}}{\text{PDRB}} \times 100\%$
	Produsen Data
	Badan Pusat Statistik Kota Bontang
	Sumber Data
	Publikasi Kota Bontang dalam angka
	Unit Bertanggung jawab
	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah
IS2.2	Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan
	Deskripsi:
	Persentase nilai tambah/pengeluaran pada sektor yang terkait perdagangan seperti perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor terhadap total PDRB suatu wilayah dalam periode tertentu (atas dasar harga berlaku).
	Formulasi Perhitungan:
	$\frac{\text{PDRB Sektor Perdagangan}}{\text{PDRB}} \times 100\%$
	Produsen Data:
	Badan Pusat Statistik Kota Bontang
	Sumber Data:
	Publikasi Kota Bontang dalam angka
	Unit Bertanggung Jawab:
	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah
IS2.3	Kontribusi PDRB Sektor Jasa
	Deskripsi
	Persentase nilai tambah/pengeluaran pada sektor jasa seperti jasa keuangan dan asuransi, jasa perusahaan, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, serta jasa lainnya terhadap total PDRB suatu wilayah dalam periode tertentu (atas dasar harga berlaku).
	Formulasi Perhitungan
	$\frac{\text{PDRB Sektor Jasa}}{\text{PDRB}} \times 100\%$
	Produsen Data
	Badan Pusat Statistik Kota Bontang
	Sumber Data
	Publikasi Kota Bontang dalam angka
	Unit Bertanggung Jawab

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja Utama/Uraian
	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah
IS2.4	Kontribusi PDRB Sektor Pariwisata
	Deskripsi
	Persentase nilai tambah/pengeluaran pada sektor yang terkait dengan pariwisata seperti penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap total PDRB suatu wilayah dalam periode tertentu (atas dasar harga berlaku).
	Formulasi Perhitungan
	$\frac{\text{PDRB Sektor Akomodasi} + \text{PDRB Sektor Makan Minum}}{\text{PDRB}} \times 100\%$
	Produsen Data:
	Badan Pusat Statistik Kota Bontang
	Sumber Data:
	Publikasi Kota Bontang dalam angka
	Unit Bertanggung Jawab:
	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah
S3	Meningkatnya Produktivitas Sektor Industri Pengolahan
IS3	Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan
	Deskripsi:
	Perkembangan PDRB yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan pada tahun tertentu terhadap nilai tahun sebelumnya (atas dasar harga konstan).
	Formulasi Perhitungan
	$\frac{\text{PDRB Sektor Industri Pengolahan}_t - \text{PDRB Sektor Industri Pengolahan}_{t-1}}{\text{PDRB Sektor Industri Pengolahan}_{t-1}} \times 100\%$
	t = tahun berjalan (atas dasar harga konstan)
	t-1 = tahun sebelum tahun berjalan (atas dasar harga konstan)
	Produsen Data
	Badan Pusat Statistik Kota Bontang
	Sumber Data
	Publikasi Kota Bontang dalam angka
	Unit Bertanggung Jawab
	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah
S4	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur yang Maju dan Merata
IS4	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)
	Deskripsi
	Indikator untuk mengukur ketersediaan dan kualitas layanan infrastruktur dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja Utama/Uraian
	Formulasi Perhitungan IKLI diperoleh melalui perhitungan komposit indeks infrastruktur pekerjaan umum (bobot 30% [tiga puluh persen]), indeks kinerja pengelolaan sampah (bobot 18% [delapan belas persen]), indeks infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman (bobot 20% [dua puluh persen]), indeks infrastruktur perhubungan (bobot 17% [tujuh belas persen]), serta indeks pelayanan kebakaran dan penyelamatan (bobot 15% [lima belas persen]). Perolehan IKLI tersebut dijabarkan sebagai berikut: 1. Indeks infrastruktur pekerjaan umum (bobot 30% [tiga puluh persen]) mengukur ketersediaan dan kualitas layanan infrastruktur pekerjaan umum, dengan perhitungan komposit dari tingkat pelayanan air minum (bobot 15% [lima belas persen]), tingkat pelayanan air limbah (bobot 10% [sepuluh persen]), tingkat kapasitas prasarana persampahan (bobot 9% [sembilan persen]), tingkat pelayanan sumber daya air (bobot 15% [lima belas persen]), tingkat pelayanan drainase perkotaan (bobot 12% [dua belas persen]), tingkat pelayanan jalan umum (bobot 12% [dua belas persen]), tingkat pelayanan bangunan gedung (bobot 12% [dua belas persen]), kesesuaian tata ruang (bobot 10% [sepuluh persen]), dan tingkat kapasitas tenaga kerja konstruksi (bobot 5% [lima persen]); 2. Indeks kinerja pengelolaan sampah (bobot 18% [delapan belas persen]) merupakan penilaian oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai ukuran keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola sampah; 3. Indeks infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman (bobot 20% [dua puluh persen]) mengukur ketersediaan dan kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman, dengan perhitungan komposit dari fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program pemerintah kota (bobot 40% [empat puluh persen]) dan tingkat kualitas permukiman (bobot 60% [enam puluh persen]);
	4. Indeks infrastruktur perhubungan (bobot 17% [tujuh belas persen]) mengukur ketersediaan dan kualitas layanan infrastruktur perhubungan, dengan perhitungan komposit dari tingkat pelayanan transportasi umum (bobot 40% [empat puluh persen]) dan tingkat keselamatan transportasi (bobot 60% [enam puluh persen]); dan

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja Utama/Uraian
	5. Indeks pelayanan kebakaran dan penyelamatan (bobot 15% [lima belas persen]) mengukur kualitas pelayanan kebakaran dan penyelamatan, dengan perhitungan komposit dari tingkat pelayanan pemadaman kebakaran (bobot 40% [empat puluh persen]) dan tingkat pelayanan penyelamatan dan evakuasi pada kejadian kebakaran dan nonkebakaran (bobot 60% [enam puluh persen]). Produsen Data Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Sumber Data Laporan capaian kota berkelanjutan Unit Bertanggung Jawab Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah
S5	Terwujudnya Stabilitas Harga
IS5	Indeks Perkembangan Harga (IPH)
	Deskripsi Indeks yang mengukur perubahan harga-harga komoditas pangan bahan pokok dan penting yang memiliki bobot besar dalam Indeks Harga Konsumen (IHK) dan dapat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah daerah. Formulasi Perhitungan Per komoditas $IPH_{i,t} = \frac{P_{i,t} - P_{i,t-1}}{P_{i,t-1}} \times 100\%$ $IPH_{i,t}$ = Indeks Perkembangan Harga komoditas i pada waktu t $P_{i,t}$ = Harga komoditas i pada waktu t $P_{i,t-1}$ = Harga komoditas i pada periode sebelumnya Agregasi wilayah (semua komoditas) $IPH_t = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n IPH_{i,t}$ IPH_t = IPH rata-rata wilayah pada waktu t n = jumlah komoditas pangan pokok yang dipantau Produsen Data Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Sumber Data Instagram Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Unit Bertanggung Jawab Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja Utama/Uraian
S6	Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat
IS6	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)
	Deskripsi
	Ukuran komposit yang menggambarkan kondisi ketahanan pangan suatu wilayah (kabupaten/kota/provinsi) berdasarkan beberapa indikator yang mewakili aspek ketersediaan pangan, akses (keterjangkauan) pangan, dan pemanfaatan pangan.
	Formulasi Perhitungan
	1. Standardisasi indikator (normalisasi)
	Setiap indikator X_{ij} (indikator ke-i di wilayah j) dinormalisasi ke skala yang sama.
	- z-score: $z_{ij} = \frac{X_{ij} - \mu_i}{\sigma_i}$
	2. Pemberian bobot dan agregasi
	Setiap indikator dinormalisasi kemudian dikalikan bobot. Kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan skor IKP wilayah j:
	$Y_j = \sum_{i=1}^n a_i X'_{ij}$ Y_j : skor IKP wilayah j a_i : bobot indikator i X'_{ij} : nilai indikator i di wilayah j setelah normalisasi
	3. Pengelompokan / klasifikasi wilayah berdasarkan rentang IKP (cut-off)
	Setelah skor IKP terhitung, wilayah diklasifikasikan ke dalam 6 (enam) kelompok (prioritas 1 [satu] sampai 6 [enam]) berdasarkan rentang (cut-off) skor.
	Produsen Data
	Badan Pangan Nasional
	Sumber Data
	Publikasi IKP kabupaten/kota
	Unit Bertanggung jawab
	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, dan Pertanian
S7	Meningkatnya Daya Saing Daerah
IS7	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)
	Deskripsi
	IDSD adalah instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang merefleksikan kemampuan daerah dalam mengoptimalkan potensi lokal melalui produktivitas, inovasi, dan persaingan, baik antar

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja Utama/Uraian
	daerah maupun secara nasional dan internasional.
	Formulasi Perhitungan
	Komponen IDSD terdiri dari 4 (empat) aspek/komponen (lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi) yang dijabarkan dalam 12 (dua belas) pilar yaitu institusi, infrastruktur, adopsi teknologi informasi dan komunikasi, stabilitas ekonomi makro, kesehatan, keterampilan, pasar produk, pasar tenaga kerja, sistem keuangan, ukuran pasar, dinamika bisnis, dan kapabilitas inovasi.
	$IDSD_j = \sum_{c=1}^4 w_c \cdot C_{cj}$ dengan C_{cj} = skor komponen c di daerah j w_c = bobot komponen ke-c Atau lebih rinci via pilar: $IDSD_j = \sum_{k=1}^{12} w_k \cdot P_{kj}$ dengan P_{kj} = skor pilar ke-k di daerah j w_k = bobot pilar ke-k
	Produsen Data
	Badan Riset dan Inovasi Nasional
	Sumber Data
	Publikasi IDSD kabupaten/kota
	Unit Bertanggung Jawab
	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah

Kode	Indikator Kinerja Utama/Uraian
T2	Terwujudnya Kota Bontang yang Sejahtera
IT2.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
	Deskripsi
	Indeks yang mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup.
	Formulasi Perhitungan
	$\text{Indeks Pembangunan Manusia} = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$

	IPM dihitung menggunakan rata-rata geometrik dari indeks Indeks Kesehatan (UHH), indeks pendidikan (rata-rata dari indeks HLS dan RLS), dan indeks pengeluaran
	Produsen Data
	Badan Pusat Statistik Kota Bontang
	Sumber Data
	Publikasi Kota Bontang dalam angka
	Unit Bertanggung Jawab
	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah

Kode	Indikator Kinerja Utama/Uraian
IT2.2	Tingkat Kemiskinan
	Deskripsi
	Indikator yang mengukur proporsi masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya (baik makanan maupun nonmakanan) berdasarkan standar minimum yang telah ditetapkan.
	Formulasi Perhitungan
	$Tingkat\ Kemiskinan = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^a$
	Keterangan :
	a = 0
	z = garis kemiskinan
	yi = rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan (i=1,2,3,...,q), yi<z
	q = banyaknya penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan
	n = jumlah penduduk
	Produsen Data
	Badan Pusat Statistik Kota Bontang
	Sumber data
	Publikasi Kota Bontang Dalam Angka
	Unit Bertanggung Jawab
	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
IT2.2	Indeks Gini
	Deskripsi
	Indeks Gini (<i>Gini Ratio</i>) adalah ukuran ketimpangan distribusi pendapatan atau pengeluaran penduduk.

Kode	Indikator Kinerja Utama/Uraian
	Nilainya berada pada rentang 0–1: 1. Nilai 0 (nol) menunjukkan pemerataan sempurna (semua orang memiliki pendapatan/pengeluaran yang sama). 2. Nilai 1 (satu) menunjukkan ketimpangan sempurna (seluruh pendapatan/pengeluaran hanya dikuasai oleh satu orang/rumah tangga).
	Formulasi Perhitungan
	$Rasio\ Gini = \sum_{i=1}^n f_{pi} (f_{ci} + f_{ci-1})$
	Keterangan :
	n = jumlah observasi
	f _{pi} = frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i
	f _{ci} = frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-1
	f _{ci-1} = frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke (i-1)
	Produsen Data
	Badan Pusat Statistik Kota Bontang
	Sumber data
	Publikasi Kota Bontang dalam angka
	Unit Bertanggung Jawab
	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja Utama/Uraian
S8	Meningkatnya Kualitas dan Akses Terhadap Layanan Pendidikan dan Kesehatan
IS8.1	Indeks Pendidikan
	Deskripsi
	Ukuran capaian pembangunan manusia dari aspek akses dan kualitas pendidikan, yang dihitung berdasarkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). 1. RLS = rata-rata jumlah tahun yang telah dijalani penduduk usia 25 (dua puluh lima) tahun ke atas dalam menempuh pendidikan formal. 2. HLS = perkiraan lamanya sekolah (dalam tahun) yang akan dijalani oleh anak pada usia 7 (tujuh) tahun jika mengikuti pola pendidikan saat ini.
	Formulasi Perhitungan

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja Utama/Uraian
	$\text{Indeks } RLS = \frac{RLS - RLS_{\min}}{RLS_{\max} - RLS_{\min}}$ $\text{Indeks } HLS = \frac{HLS - HLS_{\min}}{HLS_{\max} - HLS_{\min}}$ $\text{Indeks Pendidikan} = \frac{\text{Indeks } RLS + \text{Indeks } HLS}{2}$
	Nilai minimum RLS = 0 (nol) tahun, maksimum = 15 (lima belas) tahun
	Nilai minimum HLS = 0 (nol) tahun, maksimum = 18 (delapan belas) tahun
	Produsen Data
	Badan Pusat Statistik Kota Bontang
	Sumber data
	Publikasi Kota Bontang dalam angka
	Unit Bertanggung Jawab
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
IS8.2	Indeks Kesehatan
	Deskripsi
	Ukuran capaian pembangunan manusia dari aspek derajat kesehatan, yang dihitung menggunakan indikator Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH). Dimana AHH merupakan rata-rata perkiraan jumlah tahun yang dapat dijalani seseorang sejak lahir jika mengalami pola mortalitas yang berlaku pada suatu waktu.
	Formulasi Perhitungan
	$\text{Indeks Kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{\min}}{AHH_{\max} - AHH_{\min}}$
	Standar UNDP:
	1. AHHmin = 20 (dua puluh) tahun
	2. AHHmaks = 85 (delapan puluh lima) tahun
	Produsen Data
	Badan Pusat Statistik Kota Bontang
	Sumber Data
	Publikasi Kota Bontang dalam angka
	Unit Bertanggung Jawab
	Dinas Kesehatan
S9	Meningkatnya Perlindungan Sosial yang Adaptif
IS9	Persentase Keluarga Miskin Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan
	Deskripsi

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja Utama/Uraian
	Indikator ini mengukur efektivitas program perlindungan sosial dalam membantu keluarga mencapai kemandirian ekonomi dan keluar dari garis kemiskinan. Graduasi dalam konteks ini merujuk pada kondisi keluarga yang tidak lagi memenuhi kriteria kemiskinan, baik karena peningkatan pendapatan, pemberdayaan usaha, maupun faktor lain yang mendukung kemandirian ekonomi. Ini penting untuk mengevaluasi apakah program yang berjalan telah berhasil mengentaskan kemiskinan atau hanya bersifat sementara. Formulasi Perhitungan $\frac{\text{Jumlah keluarga tergraduasi}}{\text{Total keluarga penerima manfaat}} \times 100\%$ Produsen Data Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Sumber Data Portal Satu Data Indonesia Kota Bontang Unit Bertanggung Jawab Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
S10	Meningkatnya Ketahanan Keluarga
IS10	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)
	Deskripsi iBangga merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketenteraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia. Formulasi Perhitungan $iBangga = \frac{I_{ketenteraman} + I_{kemandirian} + I_{kebahagiaan}}{3} \times 100\%$ Nilai komposit dari 3 (tiga) dimensi dengan mempertimbangkan bobot tertentu, yaitu: - Dimensi Ketenteraman dengan indikator antara lain: - kegiatan ibadah; - legalitas keluarga; - jaminan kesehatan; - jaminan keuangan; dan - keharmonisan keluarga. - Dimensi Kemandirian dengan indikator antara lain:

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja Utama/Uraian
	a. pemenuhan kebutuhan dasar; b. keberlangsungan pendidikan; c. kesehatan keluarga; dan d. akses informasi. 3. Dimensi Kebahagiaan dengan indikator antara lain: a. interaksi keluarga; dan b. interaksi sosial.
	Produsen Data
	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
	Sumber Data
	Sistem Informasi Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
	Unit Bertanggung Jawab
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
S11	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja
IS11	Tingkat Pengangguran Terbuka
	Deskripsi
	Tingkat pengangguran terbuka adalah ukuran yang menunjukkan perbandingan antara jumlah pencari kerja dengan jumlah angkatan kerja.
	Formulasi Perhitungan
	$\text{Tingkat Pengangguran Terbuka} = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$
	Keterangan :
	1. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, serta (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. 2. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran.
	Produsen Data
	Badan Pusat Statistik Kota Bontang
	Sumber Data

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja Utama/Uraian
	Publikasi Kota Bontang dalam angka
	Unit Bertanggung Jawab
	Dinas Ketenagakerjaan

Kode	Indikator Kinerja Utama/Uraian
T3	Terwujudnya Kota Bontang yang Berkelanjutan
IT3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
	Deskripsi
	Nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL).
	Formulasi Perhitungan
	Perhitungan IKLH kabupaten/kota yang tidak memiliki Gambut adalah (PermenLHK No.27/2021): $IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$
	Produsen Data
	Kementerian Lingkungan Hidup
	Sumber Data
	Surat hasil nilai IKLH provinsi dan kabupaten/kota
	Unit Bertanggung Jawab
	Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja Utama/Uraian
S12	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Kota
S12.1	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
	Deskripsi
	GRK adalah perbandingan antara emisi gas rumah kaca yang terlepas ke atmosfer terhadap produk domestik regional bruto yang dihasilkan pada tahun tersebut. Penurunan intensitas emisi GRK untuk memperlihatkan sinergitas antara upaya penurunan emisi dengan pertumbuhan ekonomi.
	Formulasi Perhitungan

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja Utama/Uraian
	Intesitas Emisi GRK (ton CO2e/2010 IDR)
	$IE_t = \frac{TE_t}{PDRB_t}$
	t = tahun berkenaan
	IE = Intensitas Emisi GRK (ton CO2e/2010 IDR miliar)
	TE = total tingkat emisi GRK (ton CO2e)
	PDRB = Produk Domestik Regional Bruto (2010 IDR miliar)
	Penurunan Intensitas Emisi GRK
	$\%IE_t = \frac{IE_t - IEB_t}{IEB_t}$
	t = tahun berkenaan
	%IE = Persentase Intensitas emisi GRK (ton CO2e/2010 IDR miliar)
	IE = Intensitas Emisi GRK (ton CO2e/2010 IDR miliar)
	IEBt = Intensitas Emisi GRK <i>baseline</i> tahun t (ton CO2e/2010 IDR miliar)
	Produsen Data
	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah
	Sumber Data
	Laporan capaian kota berkelanjutan
	Unit Bertanggung Jawab
	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah
IS12.2	Indeks Risiko Bencana
	Deskripsi
	Indeks Risiko Bencana adalah ukuran komposit yang digunakan untuk menggambarkan tingkat risiko bencana suatu wilayah (provinsi/kabupaten/kota) berdasarkan kombinasi dari ancaman bahaya (<i>hazard</i>), kerentanan (<i>vulnerability</i>), dan kapasitas (<i>capacity</i>).
	Formulasi Perhitungan
	$\text{Risiko} = \text{Bahaya (hazard)} \times \frac{\text{kerentanan (vulnerability)}}{\text{kapasitas (capacity)}}$

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja Utama/Uraian
	Keterangan
	1. Bahaya (<i>hazard</i>) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (<i>magnitude</i>) dari suatu fenomena alam seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya.
	2. Kerentanan (<i>vulnerability</i>) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan.
	3. Kapasitas (<i>capacity</i>) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu:
	a. perkuatan kebijakan dan kelembagaan;
	b. pengkajian risiko dan perencanaan terpadu;
	c. pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik;
	d. penanganan tematik kawasan rawan bencana;
	e. peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana;
	f. perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan
	g. pengembangan sistem pemulihan bencana.
	Produsen Data
	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
	Sumber Data
	Surat Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang penyampaian Indek Ketahanan Daerah dan Indeks Risiko Bencana
	Unit Bertanggung Jawab
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Indikator Kinerja Utama/Uraian
T4	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
IT4	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)
	Deskripsi

	IRB adalah indeks yang digunakan untuk mengukur keberhasilan reformasi birokrasi pada suatu instansi pemerintah yang menunjukkan tingkat efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan profesionalitas birokrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>).
	Formulasi Perhitungan IRB dinilai berdasarkan 2 komponen penilaian yaitu : 1. Reformasi Birokrasi (RB) General mengukur capaian birokrasi secara menyeluruh; dan 2. RB Tematik mengukur pada pelaksanaan reformasi yang berdampak langsung terhadap pembangunan nasional atau prioritas tematik (misalnya pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi pemerintahan).
	$Indeks\ RB = \frac{(Nilai\ RB\ General \times w_G) + (Nilai\ RB\ Tematik \times w_T)}{w_G + w_T}$
	WG = bobot untuk RB General
	WT = bobot untuk RB Tematik
	Nilai RB General = skor yang diperoleh dalam komponen general
	Nilai RB Tematik = skor yang diperoleh dalam komponen tematik
	Produsen Data
	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
	Sumber Data
	Laporan hasil evaluasi reformasi birokrasi
	Unit Bertanggung Jawab
	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja Utama/Uraian
S13	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
IS13.1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
	Deskripsi

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja Utama/Uraian
	Nilai SAKIP merupakan indikator yang digunakan untuk penilaian rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Formulasi Perhitungan <i>Nilai SAKIP =</i> <i>(Bobot Perencanaan x Nilai Perencanaan) +</i> <i>(Bobot Pengukuran x Nilai Pengukuran) +</i> <i>(Bobot Pelaporan x Nilai Pelaporan) +</i> <i>(Bobot Evaluasi x Nilai Evaluasi)</i> Produsen Data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Sumber Data Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP kabupaten/kota Unit Bertanggung Jawab Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
IS13.2	Opini Badan Pemeriksa Keuangan
	Deskripsi Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan ukuran yang menyatakan laporan keuangan yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas sesuai prinsip akuntansi. Opini laporan keuangan disusun dengan pertimbangan kesesuaian antara akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Formulasi Perhitungan Melalui pemeriksaan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, serta catatan dan laporan keuangan. Produsen Data Badan Pemeriksa Keuangan Sumber Data Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Unit Bertanggung Jawab

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja Utama/Uraian
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
S14	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Digitalisasi Pemerintah yang Inovatif
IS14.1	Indeks Pelayanan Publik (IPP)
	Deskripsi
	IPP adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan 6 aspek yaitu:
	1. Aspek kebijakan pelayanan;
	2. Aspek profesionalisme sumber daya manusia;
	3. Aspek sarana prasarana;
	4. Aspek sistem informasi pelayanan publik;
	5. Aspek konsultasi dan pengaduan; dan
	6. Aspek inovasi.
	Formulasi Perhitungan
	$\text{Indeks Pelayanan Publik} = \sum_{k=1}^6 w_k \times A_k$
	Ak = skor aspek ke-k setelah dinormalisasi atau diskor, dengan k=1,2,...,6
	wk = bobot aspek ke-k (jumlah semua bobot = 1 [satu])
	Produsen Data
	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
	Sumber Data
	Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik
	Unit Bertanggung Jawab
	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
IS14.2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
	Deskripsi
	IKM adalah hasil pengukuran dari kegiatan survei kepuasan masyarakat yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.
	Formulasi Perhitungan
	$IKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$
	Produsen Data

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja Utama/Uraian
	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
	Sumber Data
	Hasil survei kepuasan masyarakat
	Unit Bertanggung Jawab
	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
IS14.3	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)/Indeks Pemerintahan Digital (Pemdi)
	Deskripsi
	Indeks SPBE adalah ukuran capaian pelaksanaan SPBE pada instansi pusat dan pemerintah daerah yang menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) penyelenggaraan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Nilai ini mencerminkan sejauh mana aspek kebijakan, tata kelola, manajemen, dan layanan berbasis elektronik telah diimplementasikan secara integratif dan efektif.
	Formulasi Perhitungan
	$\text{Indeks SPBE} = \frac{\sum_{j=1}^n (ND_j \times BD_j)}{BD_j}$
	NDj = nilai domain j (nilai kematangan domain j)
	BDj = bobot domain j
	n = jumlah domain yang digunakan dalam evaluasi SPBE
	Produsen Data
	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
	Sumber Data
	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SPBE
	Unit Bertanggung Jawab
	Dinas Komunikasi dan Informatika

Sumber: Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang, 2021

2.4 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2025

RPJMD Kota Bontang Tahun 2021-2026, selanjutnya dijabarkan secara bertahap dalam rencana kinerja tahunan yang memuat target kinerja tahunan dari masing-masing indikator kinerja sasaran. Target kinerja yang telah ditetapkan tersebut beserta dengan alokasi anggaran masing-masing program dan kegiatan yang mendukungnya, selanjutnya dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Besaran target kinerja yang ditetapkan untuk dicapai dalam

tahun 2025 sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kota Bontang tahun 2025.

2.4.1 Uraian Perubahan Perjanjian Kinerja

Seiring dengan berjalannya waktu dan melihat situasi dan kondisi penyelenggaraan Pemerintah Kota Bontang tahun 2025 maka Perjanjian Kinerja yang telah diperjanjikan perlu untuk dilakukan perubahan, hal tersebut disebabkan oleh ditetapkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang Tahun 2025–2029, maka terdapat penyesuaian terhadap arah kebijakan pembangunan daerah, indikator kinerja, serta target yang harus dicapai oleh Pemerintah Kota Bontang. Penyesuaian tersebut mengakibatkan sebagian indikator, target, maupun rumusan sasaran dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang sebelumnya mengacu pada RPJMD Kota Bontang Tahun 2021–2026 perlu diselaraskan kembali dengan kerangka perencanaan pembangunan daerah yang baru. Oleh karena itu, dilakukan perubahan terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025 agar tetap selaras dengan kebijakan pembangunan daerah, indikator kinerja utama, serta target pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Bontang Tahun 2025–2029.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, perlu dilakukan Perubahan Perjanjian Kinerja, sehingga pelaksanaan sasaran yang telah diperjanjikan dapat terukur dengan baik serta dapat dipertanggungjawabkan. Dalam Perjanjian Kinerja Perubahan pada RPJMD Kota Bontang Tahun 2021–2026 ditetapkan 8 sasaran dengan 13 indikator kinerja. Sementara itu, pada RPJMD Kota Bontang Tahun 2025–2029 ditetapkan 14 sasaran dengan 22 indikator kinerja yang akan dicapai. Sasaran dan indikator tersebut dijabarkan ke dalam 157 program dengan total alokasi anggaran sebesar Rp3.173.022.018.666,26. Dari keseluruhan program tersebut, program dengan jumlah terbanyak adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yaitu sebanyak 25 program dengan total alokasi anggaran sebesar Rp1.256.028.407.028,52. Selanjutnya, Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Kota Bontang Tahun 2025 telah ditandatangani oleh Wali Kota Bontang, sebagaimana tercantum berikut:

Tabel 2.10. Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Kota Bontang Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
RPJMD 2021-2026				
1.	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang harmoni, bersih, adil, Amanah, dan Bertanggung Jawab		Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah	85
1.1		Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif	Indeks Reformasi Birokrasi	A-(82,32)
			Nilai LPPD	Tinggi (4,20)
			Opini BPK	WTP
1.2		Meningkatnya kondusifitas wilayah	Jumlah konflik	5
			Persentase Penyelesaian Gangguan Keamanan dan Keterlibatan Umum	100
2.	Mewujudkan pembangunan perkotaan yang layak huni, cerdas dan berwawasan lingkungan		Indeks Kota Berwawasan Lingkungan (IKBL)	71,78
2.1		Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang maju tangguh	Indeks kualitas perkotaan	76,61
2.2		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan tata ruang yang lestari	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73,38
3.	Mewujudkan inklusivitas dan keseimbangan ekonomi daerah berbasis potensi ekonomi lokal dan keragaman sosial budaya masyarakat		Indeks Gini	0,300
3.1		Meningkatnya pertumbuhan ekonomi non migas	Laju Pertumbuhan Ekonomi Non Migas	5,00
4.	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan sejahtera		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	82,49
4.1		Meningkatnya akses layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas	Angka harapan lama sekolah	13,73
			Rata-rata lama sekolah	11,02
			Usia harapan hidup	75,23

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
4.2		Meningkatnya tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,65
4.3		Meningkatnya pemberdayaan sosial	Angka Kemiskinan	3,31-3,73
RPJMD 2025-2029				
1.	Terwujudnya kota bontang yang maju		Laju Pertumbuhan Ekonomi	1,00-1,15
			Laju Pertumbuhan Ekonomi Non Migas	5,00
1.1		Meningkatnya Nilai Investasi	Pertumbuhan Nilai Investasi	3,00
1.2		Meningkatnya produktivitas sektor ekonomi lokal	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Perikanan dan Perkebunan	1,36
			Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	3,75
			Kontribusi PDRB Sektor Jasa	4,51
			Kontribusi PDRB Sektor Pariwisata	0,72
1.3		Meningkatnya Produktivitas Sektor Industri Pengolahan	Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	0,22
1.4		Meningkatnya kualitas infrastruktur yang maju dan merata	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	77,00
1.5		Terwujudnya Stabilitas harga	Indeks Perkembangan Harga	1,1± 1
1.6		Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat	Indeks Ketahanan Pangan	89,14
1.7		Meningkatnya Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	3,62
2.	Terwujudnya kota bontang yang sejahtera		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	82,83–83,18
2.1		Meningkatnya kualitas dan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan	Indeks Pendidikan	0,76
			Indeks Kesehatan	0,85
			Tingkat Kemiskinan	3,73-3,40
2.2		Meningkatnya Perlindungan Sosial yang Adaptif	Persentase Keluarga Miskin Penerima	8,44

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
			Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	
2.3		Meningkatnya Ketahanan Keluarga	Indeks pembangunan keluarga	74,80
			Indeks Gini	0,330-0,300
2.4		Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran terbuka	6,78-6,65
3.	Terwujudnya Kota Bontang yang Berkelanjutan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	73,38
3.1		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan kota	Penurunan Intensitas Emisi GRK	15,89
			Indeks Risiko Bencana	115,57-114,57
4.	Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik		Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	82,32
4.1		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	70,90
			Opini BPK	WTP
4.2		Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Digitalisasi Pemerintahan yang Inovatif	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,32
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90,85
			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) / Indeks Pemerintahan Digital (Pemdi)	3,59

Tabel 2.11. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bontang Tahun 2025 (Program)

NO	PROGAM	PAGU (Rp)
S1 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	37.387.867.111,00
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	15.259.381.360,00
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.819.085.342,00
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.607.087.317,00
5	Program Pendaftaran Penduduk	1.160.788.035,00
6	Program Pencatatan Sipil	419.820.000,00
7	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.762.926.690,00
8	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	3.114.860,00
9	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	23.669.710.427,00
10	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	20.158.588.295,00
11	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	8.795.019.663,00
12	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	28.649.518.377,00
13	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	34.102.910.088,00
14	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	3.458.610.626,00
15	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	396.536.597,00
16	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	2.940.005.589,00
17	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	16.155.076.710,00
18	Program Pembinaan Perpustakaan	9.406.193.078,00
19	Program Pengelolaan Arsip	1.084.051.430,00
20	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	7.847.000,00
21	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	116.946.003.944,00
22	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	74.279.846.715,00
23	Program Perekonomian Dan Pembangunan	4.755.311.269,00
24	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	74.796.425.342,00



**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KOTA BONTANG
TAHUN 2025**



NO	PROGAM	PAGU (Rp)
25	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	22.019.457.415,00
26	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	14.501.719.421,00
27	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	3.508.043.564,00
28	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.739.623.286,00
29	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	11.714.595.507,00
30	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.004.554.214,00
31	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	4.835.673.746,00
32	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	17.700.923.552,00
33	Program Kepegawaian Daerah	2.671.242.111,00
34	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.791.115.336,00
35	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	3.228.438.309,00
36	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	18.147.749.273,00
37	Program Penyelenggaraan Pengawasan	871.774.000,00
38	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	1.150.766.024,00
39	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	115.700.531.557,00
40	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	5.429.964.890,00
41	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.592.859.310,00
42	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	3.382.478.560,00
43	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1.257.473.050,00
44	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1.090.234.431,00
45	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	28.501.129.722,00
46	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	1.654.703.579,00
47	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	2.397.861.867,00



**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KOTA BONTANG
TAHUN 2025**



NO	PROGAM	PAGU (Rp)
48	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	64.955.975.844,00
49	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	20.168.219.669,00
50	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	44.361.784.897,26
S2 51	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	769.540.800,00
52	Program Penanggulangan Bencana	2.542.313.109,00
53	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	21.163.791.638,00
54	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	633.626.662,00
55	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1.221.021.600,00
S3 56	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	254.946.129.652,00
57	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	39.730.730.176,00
58	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	3.387.611.520,00
59	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	6.114.821.144,00
60	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	301.450.385.807,00
61	Program Penataan Bangunan Gedung	29.793.577.604,00
62	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	252.407.000,00
63	Program Penyelenggaraan Jalan	173.544.486.534,00
64	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	18.470.978.201,00
65	Program Pengembangan Perumahan	8.566.932.733,00
66	Program Kawasan Permukiman	9.786.700.020,00
67	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	2.685.585.000,00
68	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	38.721.829.882,00



**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KOTA BONTANG
TAHUN 2025**



NO	PROGAM	PAGU (Rp)
69	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	22.843.595.967,00
70	Program Pengelolaan Pelayaran	233.260.568,00
S4 71	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.624.300.733,00
72	Program Pengelolaan Tanah Kosong	897.837.177,00
73	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	56.350.189.661,00
74	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	280.275.370,00
75	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.149.926.136,00
76	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	9.028.674.192,00
77	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	70.514.232,00
78	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	9.970.502,00
79	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	255.418.829,00
80	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	396.953.246,00
81	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	31.937.000,00
82	Program Pengelolaan Persampahan	8.503.957.036,00
S5 83	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	25.689.962.809,00
84	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.676.781.156,00
85	Program Penanganan Kerawanan Pangan	95.998.173,00
86	Program Pengawasan Keamanan Pangan	157.784.550,00
87	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	34.663.000,00
88	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	18.760.000,00
89	Program Penatagunaan Tanah	304.200.956,00
90	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	7.657.000,00
91	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	16.360.327,00



**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KOTA BONTANG
TAHUN 2025**



NO	PROGAM	PAGU (Rp)
92	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	12.119.249,00
93	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	149.989.549,00
94	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	37.500.000,00
95	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	5.544.940.957,00
96	Program Pengembangan Umkm	1.092.461.891,00
97	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	2.602.778.882,00
98	Program Promosi Penanaman Modal	7.188.673.700,00
99	Program Pelayanan Penanaman Modal	1.897.015.886,00
100	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1.129.688.865,00
101	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	22.515.835.138,00
102	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	7.387.187.250,00
103	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	28.014.063.838,00
104	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	2.227.278.332,00
105	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1.669.274.051,00
106	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.631.109.306,00
107	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	1.028.914.391,00
108	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	8.706.281.801,00
109	Program Pemasaran Pariwisata	1.909.578.860,00
110	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	1.966.300.590,00
111	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	11.016.625.452,00
112	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.235.047.581,00
113	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	3.083.179.832,00
114	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	350.002.103,00



**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KOTA BONTANG
TAHUN 2025**



NO	PROGAM	PAGU (Rp)
115	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	92.755.509,00
116	Program Penyuluhan Pertanian	741.325.463,00
117	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	65.282.625,00
118	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	9.077.777.152,00
119	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	271.305.010,00
120	Program Pengembangan Ekspor	164.229.000,00
121	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	817.925.091,00
122	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	137.222.129,00
123	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	2.533.002.233,00
124	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	33.055.055,00
125	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	69.063.574,00
S6 126	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	182.319.767.872,00
127	Program Pengelolaan Pendidikan	247.305.321.231,00
128	Program Pengembangan Kurikulum	372.746.294,00
129	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	33.048.171.536,00
130	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	277.190.639,00
131	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	210.534.087.265,00
132	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	229.815.209.491,00
133	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	879.659.320,00
134	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	339.360.279,00
135	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	7.548.603.866,00
136	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	14.851.937.795,00
137	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	825.955.685,00
138	Program Perlindungan Perempuan	1.277.896.861,00



**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KOTA BONTANG
TAHUN 2025**



NO	PROGAM	PAGU (Rp)
139	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	245.861.292,00
140	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	80.389.674,00
141	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	517.312.539,00
142	Program Perlindungan Khusus Anak	1.320.729.498,00
143	Program Pengendalian Penduduk	703.882.818,00
144	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	2.304.988.003,00
145	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	1.990.736.849,00
146	Program Pengembangan Kebudayaan	9.777.602.491,00
147	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	739.228.600,00
S7 148	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	2.022.160.125,00
149	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	14.450.630.001,00
150	Program Penempatan Tenaga Kerja	467.798.018,00
151	Program Hubungan Industrial	8.098.919.093,00
152	Program Pemberdayaan Sosial	1.085.165.076,00
S8 153	Program Rehabilitasi Sosial	4.083.350.459,00
154	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	2.533.261.624,00
155	Program Penanganan Bencana	1.056.812.080,00
156	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	2.253.841.698,00
157	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	108.632.583.548,00

Sumber: Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang, 2025

2.5 PENGUKURAN KINERJA DAN PENGUKURAN EFISIENSI SUMBER DAYA

Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja adalah proses di mana sebuah organisasi menetapkan parameter hasil untuk dicapai oleh program, investasi, dan akusisi yang dilakukan. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dan ingin dicapai agar Visi dan Misi Pemerintah Kota Bontang dapat diwujudkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan metode perbandingan realisasi capaian kinerja sasaran terhadap rencana kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja, kecuali untuk indikator tertentu yang menggunakan nilai indeks. Secara umum ada 2 (dua) pendekatan yang digunakan dalam melakukan pengukuran kinerja, yaitu:

1. Perbandingan Lurus

Pendekatan digunakan untuk mengukur capaian kinerja yang mana peningkatan realisasi capaian mencerminkan peningkatan kinerja. Peningkatan angka melek huruf, panjang jalan, jumlah dokumen, angka kunjungan, dan jenisnya merupakan contoh kasus penggunaan pendekatan tersebut. Rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Realisasi} / \text{Target} \times 100$$

2. Perbandingan Terbalik

Pendekatan ini digunakan untuk mengukur capaian kinerja yang mana meningkatnya realisasi justru mencerminkan menurunkan kinerja organisasi. Demikian pula berlaku sebaliknya, menurunnya realisasi bermakna semakin baik kinerja organisasi. Kasus seperti ini biasanya terdapat pada data angka kematian, tingkat kecelakaan, pencemaran, angka pengangguran, dan sejenisnya. Rumus yang digunakan adalah:

$$\frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

3. Kategori Pencapaian Kinerja

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerja, Pemerintah Kota Bontang menetapkan kategori pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi 5 (lima) kategori, yaitu:

Tabel 2.12. Kategori Capaian Rata-Rata atas Indikator Kinerja

No.	Nilai Kinerja	Predikat Kinerja	Simbol Warna
1	$\geq 100,00$	Sangat Berhasil	Green
2	80,00 s.d. <99,99	Berhasil	Blue
3	50,00 s.d. <80,00	Cukup Berhasil	Yellow
4	0,00 s.d. <50,00	Tidak Berhasil	Red

Sumber: Kementerian PanRB, 2021

4. Pengukuran Efisiensi Sumber Daya

Untuk mengukur efisiensi dapat menggunakan rumus dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2021 yang selama ini telah digunakan oleh Kementerian/Lembaga dalam penilaian efisiensi. Menurut peraturan tersebut efisiensi diperoleh dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan realisasi anggaran dengan alokasi anggaran. Dalam hal ini Efisiensi dapat diukur dengan membandingkan selisih antara Alokasi/Pagu Anggaran yang telah disesuaikan menurut Capaian Sasaran Strategis dan Realisasi Anggaran dengan Alokasi/Pagu Anggaran, atau dengan rumus berikut:

$$\% \text{ Efisiensi} = \frac{\text{Pagu anggaran yang disesuaikan} - \text{Realisasi}}{\text{Anggaran}} \times$$

Pagu anggaran yang disesuaikan adalah Alokasi Anggaran X Capaian



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA BONTANG TAHUN 2025



*Batasan :

Nilai tertinggi efisiensi adalah 20%

Nilai terendah efisiensi adalah -20%

Dengan batasan tersebut dapat diasumsikan bahwa nilai efisiensi di atas 20% dianggap sebagai kesalahan dalam perencanaan sedangkan nilai efisiensi di bawah -20% dianggap tidak efisien atau inefisiensi.



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Tahun 2025 merupakan tahun strategis dalam perencanaan pembangunan Kota Bontang. Tahun ini menjadi masa transisi dari RPJMD 2021–2026 menuju RPJMD 2025–2029. Dengan demikian, 2025 berfungsi ganda yaitu sebagai tahun penuntasan target-target kinerja yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya dan sebagai fondasi awal bagi arah kebijakan dan sasaran pembangunan jangka menengah yang baru. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, maka Pemerintah Kota Bontang menetapkan tujuan dan sasaran strategis serta menetapkan sejumlah indikator dan target kinerja yang dapat menggambarkan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis tersebut. Pemilihan indikator dan target kinerja tersebut dilakukan dengan memperhatikan keselarasan terhadap RPJPD Kota Bontang tahun 2025-2045, RPJMN tahun 2025-2029, dan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur.

Penetapan indikator dan target kinerja dilakukan melalui harmonisasi dan sinkronisasi perencanaan, sehingga agenda pembangunan periode 2025–2029 tetap relevan dengan konteks kebijakan yang lebih luas, memiliki daya ungkit yang lebih kuat terhadap kesejahteraan masyarakat dan berorientasi pada hasil nyata yang dapat dirasakan oleh warga Bontang. Dalam laporan kinerja ini kami sajikan dua capaian kinerja sesuai dengan RPJMD 2021-2026 pada tahun 2025 dan capaian kinerja RPJMD 2025-2029 tahun 2025.

3.1. Capaian Kinerja Berdasarkan RPJMD 2021-2026

Tahun 2025 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD tahun 2021-2026. Target kinerja yang digunakan pada tahun 2025 merupakan perwujudan dari upaya mewujudkan visi dan misi RPJMD Kota Bontang tahun 2021-2026. Selanjutnya visi dan misi RPJMD tersebut dijabarkan dalam 14 sasaran dengan 12 indikator sasaran. Adapun capaian kinerja sasaran strategis adalah sebagai berikut:



**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KOTA BONTANG
TAHUN 2025**



Tabel 3.1 Capaian Kinerja Sasaran Kota Bontang berdasarkan RPJMD 2021-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline 2024	2025			
					Target	Realisasi	Capaian	Predikat Capaian
1.	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang harmoni, bersih, adil, Amanah, dan Bertanggung Jawab		Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah	NA	85	N/A	0	Tidak tercapai
1.1		Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan partisipatif	Indeks Reformasi Birokrasi	81,49 (A-)	82,32 (A-)	85,79 (A-)	104,22	Tercapai
			Nilai LPPD	3,0659	4,20 (Tinggi)	3,3738 (Sedang)	80,33	Tidak Tercapai
			Opini BPK	WTP	WTP	WTP	100,00	Tercapai
1.2		Meningkatnya kondusifitas wilayah	Jumlah konflik	5	5	5	100	Tercapai
			Persentase Penyelesaian Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum	100	100	100	100	Tercapai
2.		Mewujudkan pembangunan perkotaan yang layak huni, cerdas dan berwawasan lingkungan		Indeks Kota Berwawasan Lingkungan (IKBL)	68,09	71,78	72,44	100,91
2.1		Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang maju tangguh	Indeks Kualitas Perkotaan	68,47	76,61	69,68	90,95	Tidak Tercapai
2.2		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan tata ruang yang lestari	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67,71	73,38	75,23	102,52	Tercapai



**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KOTA BONTANG
TAHUN 2025**



No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline 2024	2025			
					Target	Realisasi	Capaian	Predikat Capaian
3.	Mewujudkan inklusivitas dan keseimbangan ekonomi daerah berbasis potensi ekonomi lokal dan keragaman sosial budaya masyarakat		Indeks Gini	0,330	0,300	0,349	85,95	Tidak Tercapai
3.1		Meningkatnya pertumbuhan ekonomi non migas	Laju Pertumbuhan Ekonomi Non Migas	9,40	5	6,33	126,60	Tercapai
4.	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan sejahtera		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	82,49	82,49	83,04	100,66	Tercapai
4.1		Meningkatnya akses layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,73	13,73	13,80	100,51	Tercapai
			Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	10,97	11,02	11,03	100,09	Tercapai
			Usia Harapan Hidup (UHH)	75,03	75,23	75,36	100,17	Tercapai
4.2		Meningkatnya tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing	Tingkat Pengangguran Terbuka	7,06	6,65	6,36	104,36	Tercapai
4.3		Meningkatnya pemberdayaan sosial	Angka Kemiskinan	3,74	3,31-3,73	3,21	103,02	Tercapai

Sumber : Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, 2026

Secara umum, pada tahun 2025, Kota Bontang berhasil mencapai target tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan RPJMD 2021-2026/ Berikut penjelasan capaian kinerja indikator tujuan dan sasaran tahun 2025.

3.1.1 Tujuan 1 Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Harmoni, Bersih, Adil, Amanah, Dan Bertanggung Jawab

Tujuan pembangunan ini merupakan rumusan strategis untuk mewujudkan misi “Kota Bontang yang *HARMONI* melalui sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.” Keberhasilan pencapaian tujuan ditunjukkan dengan tingkat keberhasilan kepemimpinan kepala daerah dalam mengoptimalkan seluruh potensi pembangunan, baik dari aspek pemerintahan, masyarakat, dunia usaha, maupun sumber daya lainnya. Indikator yang digunakan adalah *Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah*, yaitu instrumen strategis untuk mengukur kinerja pemerintahan daerah dan kualitas kepemimpinan kepala daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Adapun capaian Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah selama lima tahun terakhir adalah sebagai berikut.

Tabel 3.2. Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah Tahun 2021-2026

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2021	N/A	N/A	0 %
2022	75	N/A	0 %
2023	79	N/A	0 %
2024	82	N/A	0 %
2025	85	N/A	0 %

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, 2026

Pengukuran Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri. Akan tetapi, sejak ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 tahun 2020 tentang indeks Kepemimpinan Kepala Daerah ditetapkan, Kementerian Dalam Negeri belum pernah melakukan pengukuran karena dikhawatirkan akan berdampak terhadap situasi politik secara nasional terutama menjelang dilaksanakannya Pemilihan Umum baik Pemilu Presiden, Legislatif dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berlangsung berturut-turut sejak tahun 2023 dan 2024. Tujuan 1 diwujudkan melalui 2 sasaran dengan 5 indikator sasaran sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.3. Instrumen Indikator Kinerja Tujuan 1

NO	SASARAN	INDIKATOR
1	Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif	Indeks Reformasi Birokrasi
		Nilai LPPD
		Opini BPK
2	Meningkatnya kondusifitas wilayah	Jumlah Konflik
		Persentase Penyelesaian Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, 2026

3.1.1.1 Sasaran 1 Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Transparan, Akuntabel, dan Partisipatif

Sasaran 1 ini memberikan arahan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang harmonis dan kolaboratif dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Adapun capaian kinerja Pemerintah Kota Bontang tahun 2025 sasaran strategis 1 adalah sebagaimana tabel 3.1. di atas. Dari 3 target indikator yang ditetapkan 1 indikator tidak tercapai, yaitu Nilai LPPD. Rata-rata capaian kinerja sasaran 1 adalah sebesar 94,85 persen. Ada pun penjelasan untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut.

3.1.1.1.1 Indikator Indeks Reformasi Birokrasi

Indikator Indeks Reformasi Birokrasi digunakan untuk menggambarkan keberhasilan dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan. Pengukuran indeks dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri PANRB No. 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi.

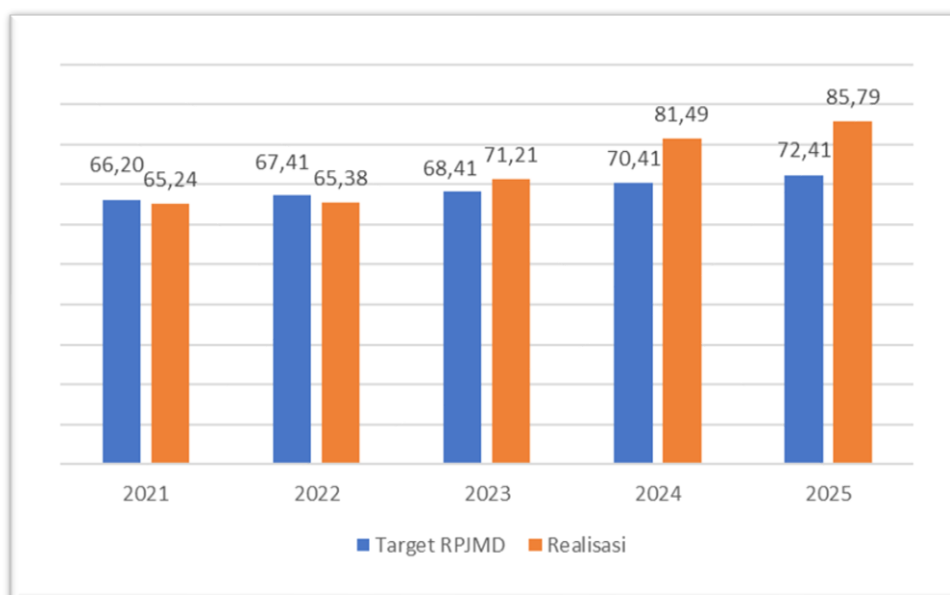
Kota Bontang pada tahun 2025 melakukan penajaman terhadap *road map* RB di lingkungan Pemerintah Kota Bontang melalui Keputusan Wali Kota Bontang Nomor 100.3.3.3/533/ORG/2025 tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang Tahun 2025. Keputusan ini memuat penetapan rencana aksi hasil identifikasi prioritas kegiatan utama RB General dan Tematik Pemerintah Kota Bontang. Selanjutnya membahas manajemen pelaksanaan sampai dengan mekanisme monitoring dan evaluasi RB.

Berdasarkan Surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/168/RB.06/2026 tanggal 10 April 2026 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2025 capaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bontang tahun 2025 adalah 85,79 (Predikat A-), naik 4,3 poin dari tahun 2024 yang mencapai nilai 81,49 (Predikat A-). Adapun komponen perhitungan RB tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4. Komponen Perhitungan Nilai Reformasi Birokrasi
Tahun 2025

Dimensi Reformasi Birokrasi		Total Score Index
A. RB General		
1	Strategi Pelaksanaan RB General	8,50
2	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	39,61
3	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	26,67
Total		74,78
B. RB Tematik		
1	Strategi Pembangunan	3,27
2	Capaian Indikator Dampak	7,74
3	Strategi Pembangunan	0,00
Total		11,01
Total A+B		85,79

Sumber : Kemenpan RB,2026



Gambar 3.1 Perkembangan Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah

dalam Kerangka Perencanaan Jangka Menengah Pemerintah Kota Bontang
Tahun 2021-2025

Sumber : Kemenpan RB,2026

Perkembangan Indeks RB Pemerintah Kota Bontang menunjukkan tren peningkatan sejak tahun 2021 – 2025. Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Indeks RB pada tahun 2021 belum dapat mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD. Akan tetapi sejak tahun 2023 kinerja RB berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini didukung oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. **Peningkatan Koordinasi dan Kolaborasi**
Meningkatnya koordinasi dan kolaborasi dari seluruh perangkat daerah di Pemerintah Kota Bontang dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi RB pada Perangkat Daerah Pengampu, dikoordinir oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bontang.
2. **Perbaikan Dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi**
Reformasi birokrasi yang lebih terarah dan sistematis, dengan fokus pada peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi pelayanan publik, dapat meningkatkan kinerja lembaga pemerintah. Proses reformasi yang dilakukan secara berkelanjutan, dengan evaluasi dan penyesuaian kebijakan yang tepat, dapat berdampak positif terhadap Indeks RB, hal ini termuat dalam penyajian Penetapan Rencana Aksi Roadmap Reformasi Birokrasi Tahun 2025 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bontang. Reformasi berdampak menjadi tujuan dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Tematik.
3. **Pemanfaatan Teknologi Informasi**
Penggunaan teknologi informasi dalam sistem administrasi dan pelayanan publik memungkinkan peningkatan efisiensi birokrasi. Aplikasi dan sistem pemerintahan yang lebih baik meningkatkan aksesibilitas, mempercepat pelayanan, dan mengurangi potensi korupsi. Digitalisasi yang semakin berkembang dapat menjadi faktor kunci dalam meningkatkan capaian Indeks RB. Peningkatan Digitalisasi pada Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Bontang terus diarahkan pada Tata Kelola, Pengembangan Arsitektur SPBE di Daerah, Pemenuhan Manajemen Data serta Integrasi berbagai sistem layanan pada Perangkat Daerah.
4. **Kepemimpinan yang Kuat dan Komitmen Pimpinan**
Komitmen dari pimpinan, memainkan peran penting dalam mendorong perubahan dalam birokrasi. Kepemimpinan yang kuat dan visioner, yang mendukung penuh pelaksanaan reformasi, dimana akan mengarahkan

seluruh elemen organisasi untuk beradaptasi dengan prinsip-prinsip birokrasi yang lebih efektif.

5. Partisipasi dan Pengawasan Publik

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi kinerja pemerintah dan memberikan umpan balik yang konstruktif juga menjadi faktor yang berkontribusi pada keberhasilan ini. Partisipasi publik yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam birokrasi, peningkatan sosialisasi SP4N Lapor merupakan perwujudan bentuk partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan kanal pengaduan, meningkatkan kontribusi bentuk layanan pada pengguna layanan melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), dan peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam menjaga integritas dan akuntabilitas pemerintah.

6. Evaluasi dan Monitoring yang Lebih Baik

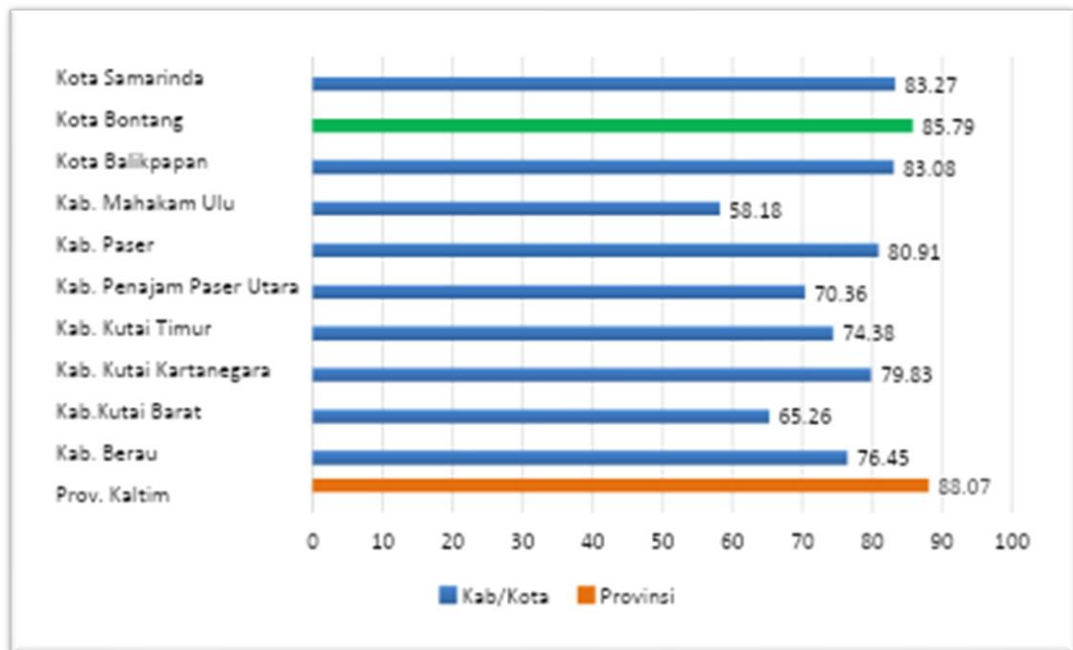
Sistem evaluasi dan monitoring yang lebih baik terhadap kinerja birokrasi, serta tindak lanjut yang jelas terhadap hasil evaluasi tersebut, juga dapat mendorong perbaikan dan mempercepat pencapaian target Indeks RB. Lembaga yang mampu melakukan penilaian dan evaluasi kinerja secara tepat akan lebih mudah mendeteksi area yang perlu perbaikan.

7. Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik

Dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah, baik itu dalam sektor pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, maupun pelayanan lainnya, Indeks RB akan berpengaruh secara positif. Semakin tinggi tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, semakin baik pula indeks birokrasi yang tercapai.

Selanjutnya jika dibandingkan dengan rata-rata capaian Indeks RB Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025, Pemerintah Kota Bontang memperoleh nilai terbaik dan berada di bawah Provinsi Kalimantan Timur dengan selisih nilai 2,28 poin. Perbandingan capaian

Indeks RB antara Kabupaten/Kota dan Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

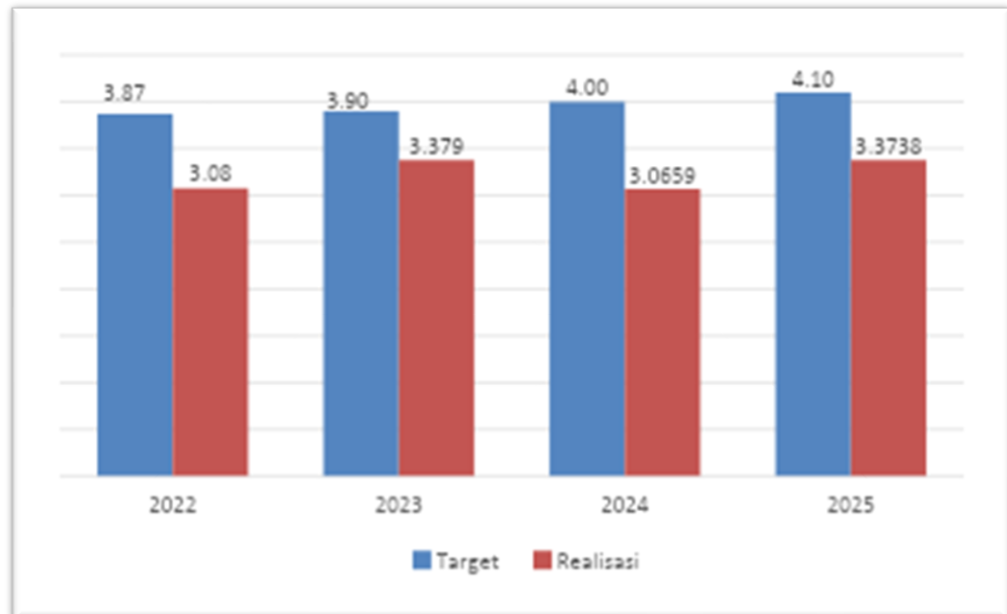


Gambar 3.2 Perbandingan Capaian Indeks RB Pemerintah Kota Bontang dengan Rata-rata Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2025

Sumber :Kementrian PanRB,2026

3.1.1.1.2 Indikator Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

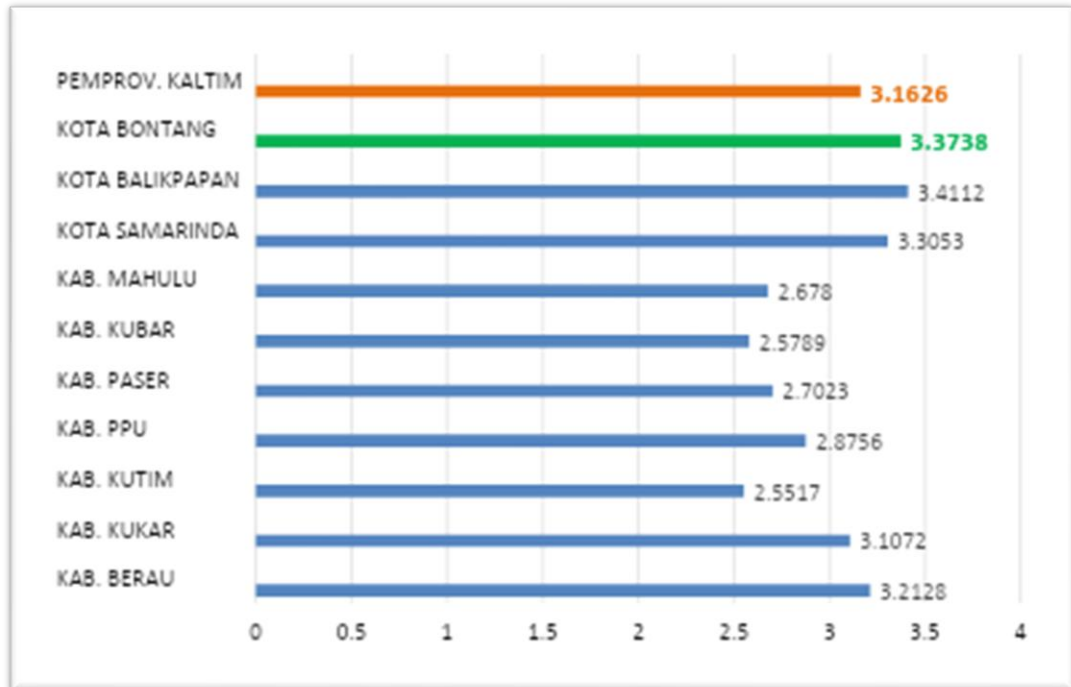
Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Kota Bontang menyampaikan pertanggungjawaban atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pengukuran Nilai LPPD dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Otonomi Daerah. Berikut perbandingan target dan capaian nilai LPPD Pemerintah Kota Bontang tahun 2021-2025.



Gambar 3.3 Grafik Capaian Nilai LPPD dalam Kerangka Perencanaan
Jangka Menengah Pemerintah Kota Bontang Tahun 2021-2025
Sumber : Kementerian Dalam Negeri, 2026

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian LPPD Kota Bontang dari tahun 2022-2025 tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kriteria penilaian LPPD yang berlaku efektif di tahun 2022. Adapun penilaian LPPD tahun 2024 mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 100.2/1/7/2946/OTDA tanggal Keputusan Menteri Dalam Negeri tahun sebelumnya yaitu Nomor 19 Mei 2025 Hal Penyampaian Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) tahun 2025 Terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun 2024.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri 100.2.7 - 739 Tahun 2026 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2025 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2024, Kota Bontang mendapatkan Nilai LPPD sebesar 3,3738 dengan kategori “Sedang”. Walaupun capain ini lebih tinggi 0,3-79 poin dari capaian tahun 2023 yang diumumkan pada tahun 2024 yang lalu, akan tetapi masih lebih rendah dibandingkan target yang ditetapkan sebesar 4.10.



Gambar 3.4. Perbandingan Capaian Nilai LPPD Pemerintah Kota Bontang dengan Rata-rata Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2025

Sumber Data: Kementerian Dalam Negeri, 2026

Beberapa faktor yang menyebabkan capaian nilai LPPD ini belum mampu mencapai target Nilai LPPD yang ditetapkan antara lain adalah:

1. Kualitas data dukung rendah (data tidak valid/tidak sesuai format);
2. Lemahnya motivasi dan komitmen dari pegawai atau perangkat daerah dalam penyusunan laporan yang tepat waktu dan berkualitas;
3. Ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan yang berakibat pada ketidaktercapaian kinerja;
4. Rendahnya kompetensi SDM dalam memahami teknis penyusunan dokumen LPPD termasuk pemahaman terhadap indikator kinerja kunci (IKK);
5. Kurangnya reviu internal APIP terhadap draf LPPD sehingga data yang tidak lengkap atau tidak valid masih masuk dalam dokumen final.

Sebagai upaya perbaikan terhadap capaian Nilai LPPD, Pemerintah Kota Bontang telah melakukan beberapa upaya, seperti:

1. melakukan sosialisasi terhadap Permendagri No. 19 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 2013 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
melakukan asistensi dan bimbingan penyusunan Draf LPPD dengan Tim Daerah maupun Tim Nasional EPPD terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK)
2. meningkatkan frekuensi dan efektivitas pertemuan rutin/FGD antar perangkat daerah sebagai bagian dari pembekalan terhadap peningkatan kualitas LPPD yang dihasilkan; dan
3. secara berkala melakukan sinkronisasi data dan koordinasi kepada seluruh perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang

3.1.1.1.3 Indikator Opini BPK

Opini BPK merupakan hasil penilaian BPK atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah yang dilakukan oleh BPK RI dan disajikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), yang terbagi ke dalam empat kategori, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion*, Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *qualified opinion*, Tidak Wajar atau *adversed opinion*, dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP) atau *disclaimer of opinion*. Opini BPK menjadi salah satu wujud akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara/daerah yang sudah menjadi tanggung jawab dari masing-masing entitas pelaporan.

Dalam pertanggungjawaban keuangan, Pemerintah Kota Bontang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Berdasarkan LHP BPK RI Nomor:14.A/LHP/XIX.SMD/IV/2025 Tanggal 20 Mei 2025 bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bontang Tahun Anggaran 2024 kembali mendapatkan opini WTP yang kesebelas. Opini yang disampaikan oleh BPK menegaskan bahwa laporan keuangan pemerintah Kota Bontang telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan pada posisi keuangan Pemerintah Kota Bontang tanggal 31 Desember 2024,

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-

undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

**Tabel 3.5. Capaian Indikator Kinerja Opini BPK dalam Kerangka
Perencanaan Jangka Menengah Pemerintah Kota Bontang
Tahun 2021-2026**

TAHUN	TARGET	REALISASI
2021	WTP	WTP
2022	WTP	WTP
2023	WTP	WTP
2024	WTP	WTP
2025	WTP	WTP

Sumber : Badan Pemeriksa Keuangan, 2026

Capaian ini sejalan dengan target indikator yang telah ditetapkan dalam kerangka RPJMD Kota Bontang, yaitu WTP hingga tahun 2025. Untuk itu capaian atas indikator ini mencapai 100%. Capaian ini juga selaras dengan opini WTP yang diterima oleh pemerintah kota lainnya di Provinsi Kalimantan Timur, yaitu Kota Samarinda dan Kota Balikpapan.

**Tabel 3.6. Perbandingan Capaian Indikator Opini BPK dengan
Pemerintah Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025**

INDIKATOR	PEMERINTAH KOTA BONTANG	PEMERINTAH KOTA SAMARINDA	PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
Opini BPK	WTP	WTP	WTP

Sumber : Badan Pemeriksa Keuangan, 2026

Capaian Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menunjukkan kesamaan komitmen dan upaya berkelanjutan untuk terus meningkatkan kualitas laporan keuangan secara akuntabel dan transparan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum. Kualitas laporan ini selanjutnya diharapkan dapat juga mencerminkan profesionalitas penyelenggara negara dalam pengelolaan sumber daya penyelenggaraan pemerintahan.

Beberapa faktor pendukung keberhasilan capaian Opini WTP ini diantaranya:

1. Komitmen yang kuat dari kepala daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel dan transparan.

2. Pelaksanaan audit internal secara intensif pada seluruh Perangkat Daerah mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pertanggungjawaban dan tahap pelaporan.
3. Reviu pengendalian internal atas laporan keuangan dengan mengacu pada peraturan terkait pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah secara rutin dan berkala, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas Laporan Keuangan yang dihasilkan dan meminimalisir kemungkinan salah saji.
4. Pendampingan yang intensif dari BPK terkait sistem pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel.
5. Pemantauan secara berkala terhadap tindak lanjut rekomendasi LHP BPK RI dan LHP Inspektorat Daerah Kota Bontang.

3.1.1.2 Sasaran 2 Meningkatnya Kondusifitas Wilayah

Sebagai upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang harmoni, bersih, adil, Amanah dan bertanggung jawab, maka kondusifitas wilayah menjadi faktor yang penting. Kemajemukan masyarakat dalam berbagai dimensinya menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga kondusifitas suatu wilayah sebagai elemen penting pembangunan. Peluang munculnya konflik sosial dalam masyarakat menjadi kerentanan bagi stabilitas keamanan, sehingga diperlukan sinergitas antara pemerintah daerah, aparat intelijen, aparat penegak hukum, aparat keamanan, serta seluruh elemen masyarakat itu sendiri. Sinergitas ini menjadi penting dalam upaya deteksi, peringatan, dan pencegahan dini dalam mengeliminasi potensi kerawanan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban. R²². Sasaran strategis ini diterjemahkan ke dalam dua indikator kinerja, yaitu jumlah konflik yang terjadi dan persentase penyelesaian gangguan keamanan dan ketertiban umum. Adapun capaian dua indikator tersebut di tahun 2024 dapat dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.7. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Jumlah Konflik	Kasus	5	5	100
2	Persentase Penyelesaian Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum	Persen	100	100	100
Rata-Rata Capaian					100

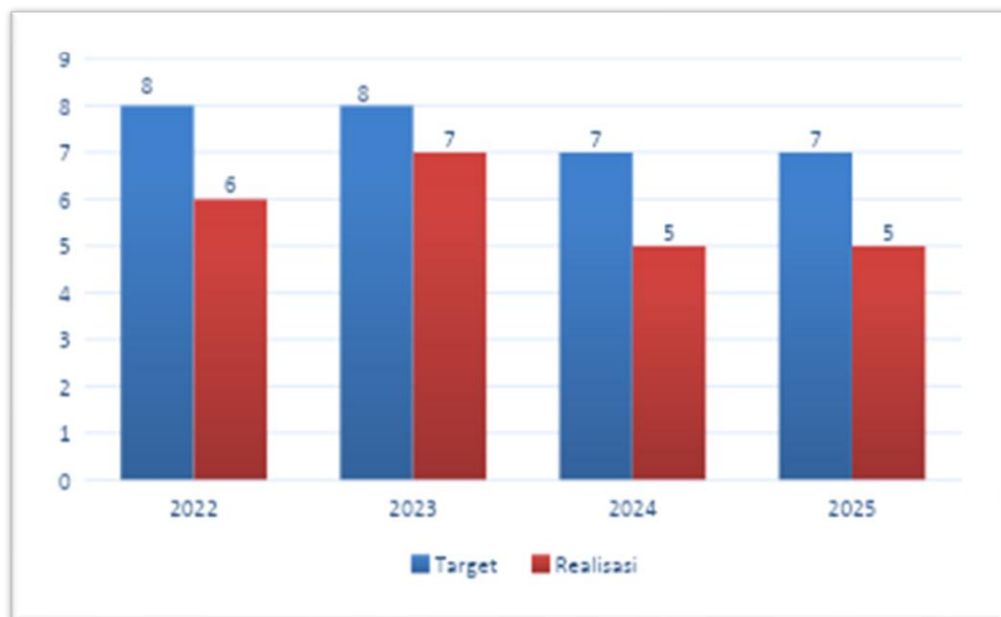
Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, 2026

3.1.1.2.1 Indikator Jumlah Konflik

Salah satu upaya menjaga kondusifitas wilayah adalah melalui mitigasi potensi munculnya konflik di Kota Bontang. Untuk itu, indikator ini akan diukur berdasarkan jumlah konflik yang terjadi dengan penentuan target berdasarkan *baseline* jumlah konflik di tahun 2022. Dengan demikian, realisasi dari indikator ini memiliki karakteristik polarisasi capaian *minimize*, dimana semakin rendah realisasi mengindikasikan kinerja yang semakin baik.

Tahun 2025 terdapat 5 konflik yang terjadi dari 5 target (perkiraan) jumlah konflik yang akan terjadi. Sehingga capaian atas indikator ini adalah sebesar 100,00%. Konflik yang terjadi Tahun 2025 adalah:

1. Permasalahan aktivitas galian C di Kota Bontang;
2. Permasalahan dugaan pencemaran limbah;
3. Permasalahan keresahan warga RT.18 Kelurahan Guntung terhadap dampak lingkungan terkait rencana pembangunan Pabrik Soda ASH;
4. Permasalahan pemasangan patok kayu tak berizin di kawasan laut Bontang Kuala;
5. Permasalahan sengketa tapal batas Kampung Sidrap.



Gambar 3.5 Grafik Capaian Indikator Kinerja Jumlah Konflik dalam Kerangka Perencanaan Jangka Menengah Pemerintah Kota Bontang Tahun 2022-2025

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bontang, 2025

Konflik yang terjadi di Kota Bontang pada tahun 2023 – 2025 menunjukkan penurunan. Hal ini menunjukkan adanya harmonisasi dan kondusivitas serta stabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini

didukung juga dengan partisipasi masyarakat dalam mendukung hal tersebut. Pemerintah Kota Bontang berupaya untuk meningkatkan kolaborasi dengan masyarakat dengan cara mengkombinasikan langkah-langkah preventif, reaktif, dan partisipatif sehingga dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk perdamaian jangka panjang.

Adapun beberapa catatan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bontang yang antara lain :

1. Pendalaman aktivitas ilegal oleh kepolisian, dan menunggu saksi ahli dan proses hukum
2. Rehabilitasi lingkungan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim pasca proses hukum, dengan dana dan waktu signifikan
3. Edukasi masyarakat tentang pelestarian hutan lindung dan tata ruang.
Beberapa faktor keberhasilan capaian kinerja tahun 2025 ini antara lain:
 1. Komitmen yang kuat dari Kepala Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai penanggung jawab indikator kinerja, serta seluruh unsur terkait yang terlibat aktif dalam penanganan konflik sosial.
 2. Selalu melakukan pembinaan yang intensif dengan forum di bawah tanggungjawab Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Tim Kewaspadaan Dini (Tim Wasdin), dan Tim Penanganan Konflik Sosial (Tim PKS) dalam membantu pemecahan permasalahan konflik.
 3. Efektivitas monitoring di lapangan oleh Tim Monitoring Tenaga Kerja Asing (TKA) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dan Kewaspadaan Dini sebagai sumber data dalam mengidentifikasi potensi konflik.
 4. Menjalinkan kerjasama kepada pihak terkait seperti TNI dan POLRI untuk bersama-sama menjaga kondusifitas keamanan dan ketertiban di lingkungan Pemerintah Kota Bontang.

3.1.1.2.2 Indikator Persentase Penyelesaian Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum

Indikator persentase penyelesaian gangguan keamanan dan ketertiban umum sebagai salah satu alat ukur keberhasilan kinerja dalam menjaga kondusifitas wilayah. Pada tahun 2025, gangguan keamanan dan ketertiban umum 100% dapat diselesaikan dengan baik. Berikut data capaian penyelesaian gangguan dan penyelesaian trantibum tahun 2025.

Tabel 3.8 Rekapitulasi Kasus Gangguan Trantibum tahun 2025.

No	Jenis	Jumlah	Keterangan
1.	Kasus pelanggaran	1897	Terselesaikan
2.	Kasus Aduan	20	Terselesaikan

Sumber : Satpol PP, 2026

Dari grafik tersebut terlihat bahwa keberhasilan penyelesaian gangguan keamanan dan ketertiban umum dari 80% tahun 2021 kemudian stabil 100% dari tahun 2022 sampai 2025. Sedangkan perbandingan capaian dalam kerangka perencanaan jangka menengah dapat terlihat pada tabel berikut:



Gambar 3.6 Grafik Capaian Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum dalam Kerangka Perencanaan Jangka Menengah Pemerintah Kota Bontang Tahun 2021-2025

Sumber : Satpol PP, 2026

Penanganan gangguan keamanan dan ketertiban umum dapat diatasi dengan baik yang dibuktikan dengan terselesaikannya semua gangguan. Sehingga, dapat dikatakan bahwa Kota Bontang dapat menjaga kondusivitas wilayah dengan baik. Pemerintah Kota Bontang mengoptimalkan koordinasi antar instansi dan melibatkan masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan serta ketertiban wilayah. Hal tersebut dapat diiringi dengan pengembangan sistem respon cepat yang terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi penanganan kasus. Kolaborasi antara aparat penegak hukum, masyarakat, dan dunia usaha harus diperkuat melalui forum keamanan wilayah yang dapat

menjadi wadah koordinasi dan sinergi. Selain itu, penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga keamanan bersama juga perlu terus dilakukan sebagai langkah proaktif untuk mengurangi potensi gangguan keamanan wilayah.

Keberhasilan terhadap capaian dari indikator ini dapat terjadi karena beberapa faktor pendukung lainnya, diantaranya:

1. Partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersamaan dan keharmonisan kehidupan sosial bermasyarakat antara lain pelaksanaan sistem keamanan lingkungan sebagai wujud kesadaran dan kepedulian terhadap ketertiban dan keamanan lingkungan.
2. Pelaksanaan monitoring dan patroli wilayah secara rutin pada 15 kelurahan di Kota Bontang.
3. Pelaksanaan apel dan patroli gabungan yang terdiri dari Satpol PP, TNI, Polres, UPTD Pasar, Dinas Perhubungan serta Perangkat Daerah lain yang terkait.
4. Terbangunnya sistem pengelolaan/penanganan pengaduan masyarakat, sehingga terdokumentasinya pengaduan yang masuk dan ditindaklanjuti secara tepat waktu sesuai prosedur yang berlaku.

Dari hasil yang sudah dijelaskan di atas, Pemerintah Kota Bontang akan terus berupaya untuk menyelesaikan seluruh konflik atau kejadian-kejadian yang terprediksi atau yang murni muncul secara tidak terduga dengan cara melakukan pengawasan dan pendekatan-pendekatan persuasif kepada seluruh masyarakat serta organisasi kemasyarakatan dengan melakukan sosialisasi dan bentuk lainnya yang dianggap mampu untuk meredam atau menyelesaikan masalah yang mungkin akan terjadi.

Dalam peningkatan kualitas capaian indikator ini Pemerintah Kota Bontang berupaya meningkatkan sinergitas dalam hal penegakan hukum dengan melibatkan aparat penegak hukum, meliputi kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Sinergitas ini diharapkan dapat menghasilkan standar prosedur penanganan yang jelas dan tepat dalam penanganan dalam pengaduan gangguan keamanan dan ketertiban umum yang terjadi sehingga tidak menjadi masalah yang berlarut-larut.

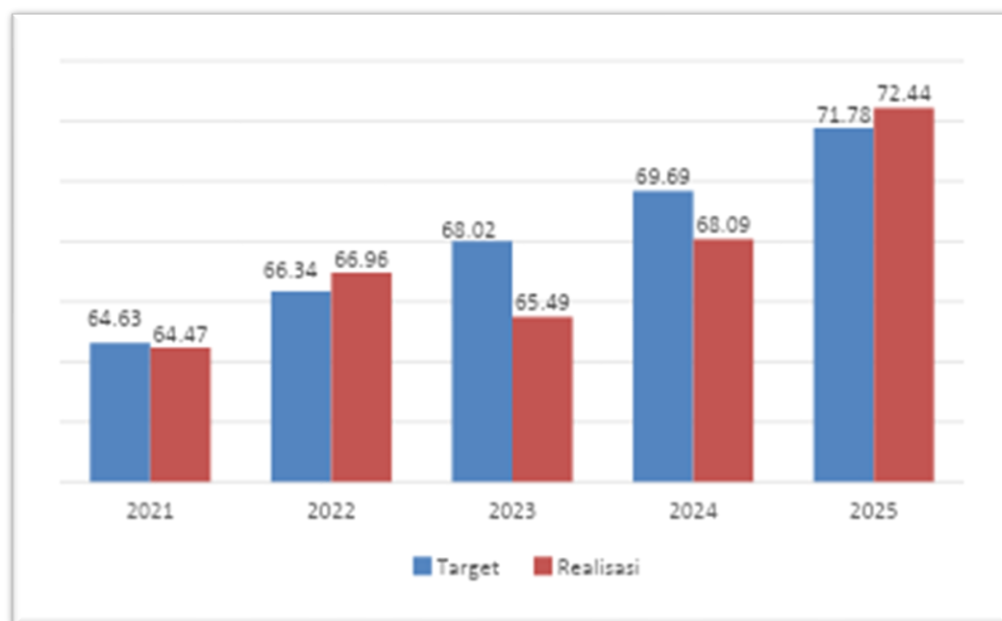
Untuk upaya peningkatan kondusifitas wilayah juga telah mendapatkan pengakuan dari berbagai instansi:

3.1.2 Tujuan 2 Mewujudkan Pembangunan Perkotaan yang Layak Huni, Cerdas dan Berwawasan Lingkungan

Tujuan pembangunan ini merupakan rumusan strategis untuk mewujudkan misi ke-2, yaitu ***“Kota Bontang Berkelanjutan yang Layak Huni, Cerdas, dan Berwawasan Lingkungan melalui pemantapan ekonomi,***

sosial budaya, infrastruktur, serta pelestarian lingkungan hidup.” Pencapaian tujuan ini berkaitan erat dengan keberhasilan melaksanakan pembangunan kota yang semakin maju perkembangan kotanya namun disaat yang sama mampu menjaga keseimbangan antara daya dukung dengan daya tampung lingkungan. Penerapan prinsip dasar pembangunan berkelanjutan secara konsisten akan mengarahkan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan secara konsisten akan mengarahkan pelaksanaan pembangunan Kota Bontang menjadi kota yang berwawasan lingkungan.

Keberhasilan pembangunan pada tujuan 2 digambarkan dengan indikator Indeks Kota Berwawasan Lingkungan (IKBL). IKBL ditentukan oleh 2 indikator, yaitu Indeks Kualitas Perkotaan (IKP) dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Indeks Kualitas Perkotaan (IKP) ditentukan oleh Kualitas Infrastruktur dan ketahanan daerah. Indeks Kualitas Infrastruktur (IKI) menggambarkan kualitas infrastruktur. Sedangkan kualitas lingkungan hidup (IKLH) ditentukan oleh Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Air (IKA), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL).



Gambar 3.7 Capaian Kinerja IKBL Tahun 2021-2025

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, 2026

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat, bahwa selama 5 tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2023-2024, realisasi IKBL tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh realisasi IKP yang tidak dapat terpenuhi di tahun tersebut. Adapun penyebab IKP tidak dapat terpenuhi akan diulas di bawah.

Tabel.3.9 Capaian IKBL Tahun 2021-2025

Indikator	Tahun									
	2021		2022		2023		2024		2025	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Indeks Kota Berwawasan lingkungan	64,63	65,47	66,34	67,67	68,02	65,49	69,69	68,09	71,78	72,45
Indeks Kualitas Perkotaan	64,47	66,15	67,35	67,41	70,16	64,16	72,98	68,47	76,61	69,68
Indek Kualitas Lingkungan Hidup	64,79	64,79	65,33	67,96	65,87	66,81	66,41	67,71	66,95	75,23

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, 2026

Pada tabel di atas, dapat dilihat, bahwa capaian IKBL tahun 2025 dapat tercapai melampaui target yang ditetapkan walaupun capaian IKP tahun 2025 tidak memenuhi target yang telah ditetapkan. Kondisi ini berbeda dengan capaian tahun 2023 dan 2024 di mana capaian IKBL tidak dapat tercapai karena capaian IKP tidak mampu mencapai target yang ditetapkan. Penjelasan detail dari indikator di atas adalah sebagai berikut.

3.1.2.3. Sasaran 3 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan yang Maju Tangguh

Sasaran strategis ini merupakan rumusan dari upaya mewujudkan Kota Bontang yang layak huni, cerdas dan berwawasan lingkungan. Sasaran strategis ini digambarkan dengan kualitas perkotaan yang baik dan tangguh. Indikator Sasaran Strategis ini adalah Indeks kualitas Perkotaan, yang dibentuk melalui 2 komponen, yaitu Indeks Kualitas Infrastruktur (IKI) dan Indeks Ketahanan Daerah (IKD). Adapun capaian IKP tahun 2025 sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.10. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Indeks Kualitas Perkotaan	Indeks	76,61	69,68	90,95%
Rata-rata Capaian					90,95%

Sumber : Badan Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang, 2026

3.1.2.3.1 Indikator Indeks Kualitas Perkotaan

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini ditetapkan Indikator Kinerja Indeks Kualitas Perkotaan yang merupakan indeks komposit dari pengukuran terhadap:

1. Indeks Kualitas Infrastruktur
Indeks ini diukur melalui 10 parameter, yaitu 1) tingkat akses hunian (TAH); 2) tingkat kualitas hunian (TKH); 3) tingkat pelayanan air minum (TPAM); 4) tingkat pelayanan air limbah (TPAL); 5) tingkat pelayanan sampah (TPS); 6) tingkat pelayanan sumber daya air (TPSDA); 7) tingkat pelayanan jalan umum (TPJU); 8) tingkat pelayanan transportasi umum (TPTU); 9) tingkat pelayanan bangunan gedung (TPBG); dan 10) tingkat pelayanan pemadam kebakaran (TPPK).
2. Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan alat ukur untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana dan kesiapsiagaan suatu wilayah wilayah untuk menghadapi dan mengurangi resiko bencana. IKD memiliki 71 indikator kapasitas daerah dalam 7 prioritas penanggulangan bencana yang disusun oleh BNPB.

Tabel 3.11 Capaian IKP tahun 2021-2025

INDEKS KUALITAS PERKOTAAN (IKP)		Tahun									
PARAMETER	INDIKATOR	2021		2022		2023		2024		2025	
		T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
A. Indeks Kualitas Infrastruktur (IKI)		0.77	0.80	0.78	0.82	0.78	0.82	0.79	0.83	0.81	0.82
1. Tingkat Akses Hunian (TAH)	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah	68.94	68.94	69.38	85.60	69.83	84.30	70.27	81.52	70.71	81.52
2. Tingkat Kualitas Hunian (TKH)	Persentase permukiman layak huni	98.39	98.45	98.84	98.95	99.15	99.07	99.48	99.48	99.79	99.60
3. Tingkat Pelayanan Air Minum (TPAM)	Persentase penduduk memiliki akses air minum layak	81.66	83.53	83.13	85.40	84.55	85.72	85.93	88.39	87.28	90.20
4. Tingkat Pelayanan Air Limbah (TPAL)	Persentase penduduk memiliki akses sanitasi (air limbah domestik) layak	94.96	94.91	95.50	94.30	96.00	96.02	96.50	96.26	97.00	97.72



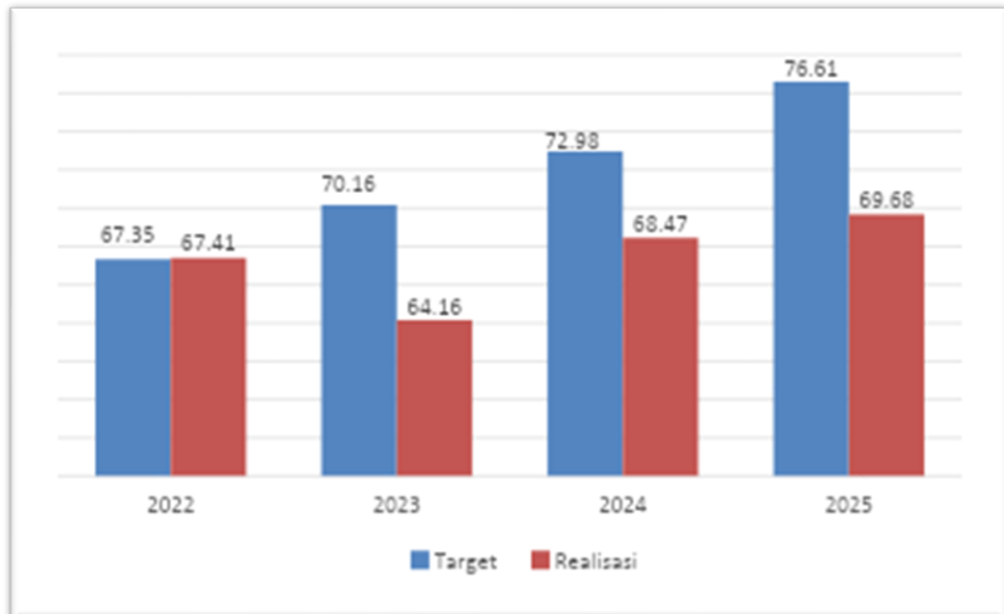
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA BONTANG TAHUN 2025



INDEKS KUALITAS PERKOTAAN (IKP)		Tahun									
5. Tingkat Pelayanan Sampah (TPS)	Persentase pengelolaan sampah	98.00	99.67	99.00	99.66	99.00	99.70%	99.00	99.71	100.00	99.75
6. Tingkat Pelayanan Sumber Daya Air (TPSDA)	Persentase wilayah perkotaan tidak tergenang banjir	91.29	96.20	92.55	97.33	93.81	98.20	95.07	99.00	96.33	98.84
7. Tingkat Pelayanan Jalan Umum (TPJU)	Persentase jalan umum dalam kondisi baik	89.70	91.53	91.70	87.97	93.70	92.57	95.70	94.51	97.70	87.51
8. Tingkat Pelayanan Transportasi Umum (TPTU)	Persentase layanan angkutan umum perkotaan	23.88	23.88	23.88	23.88	23.88	23.88	23.88	23.88	39.19	23.88
9. Tingkat Pelayanan Bangunan Gedung (TPBG)	Persentase bangunan berizin	22.61	51.24	22.99	50.29	23.37	47.96	23.75	46.61	24.13	44.55
10. Tingkat Pelayanan Pemadam Kebakaran (TPPK)	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	94.59	100	94.74	100	95.83	100	100	100	100
B. Indeks Ketahanan Daerah (IKD)		0.52	0.52	0.57	0.53	0.62	0.46	0.67	0.54	0.72	0.57
INDEKS KUALITAS PERKOTAAN (IKP)		64.47	66.15	67.35	67.41	70.16	64.16	72.98	68.47	76.61	69.68

Sumber Data: Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah, 2026

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa IKI tahun 2025 tercapai 101,23 persen. dari target. Sedangkan IKD hanya tercapai 79,16 persen. Hal ini menyebabkan Indeks Kualitas Perkotaan (IKP) hanya tercapai 90,95 persen dari target. Hal ini disebabkan oleh beberapa komponen dalam pengukuran Indeks Ketahanan Daerah belum tersedia seperti dokumen rencana penanggulangan bencana dan dokumen rencana kontijensi bencana.



Gambar 3.8 Grafik Capaian Indikator Kinerja Indeks Kualitas Perkotaan dalam Kerangka Perencanaan Jangka Menengah Pemerintah Kota Bontang Tahun 2022-2025

Sumber : Badan Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang, 2025

Guna mendorong peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang layak huni dan nyaman maka terdapat beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Bontang sebagai berikut:

1. Melakukan upaya penurunan luas genangan banjir melalui perbaikan dan pengembangan sistem drainase perkotaan dan lingkungan, pembangunan polder dan kolam depresi, normalisasi sungai dan pembangunan perkuatan tebing sungai;
2. Melakukan upaya pemenuhan layanan infrastruktur perkotaan dan lingkungan permukiman yang layak dan berkualitas;
3. Meningkatkan layanan penyediaan air bersih dan sanitasi layak bagi masyarakat;
4. Melakukan penyediaan bangunan gedung perkantoran yang berkualitas.

3.1.2.4 Sasaran 4 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Tata Ruang yang Lestari

Sasaran 4 merupakan keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH merupakan komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Adapun capaian kinerja IKLH tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.12. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	73,38	75,23	102,52%
Rata-rata Capaian					109,38%

Sumber : Badan Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang, 2026

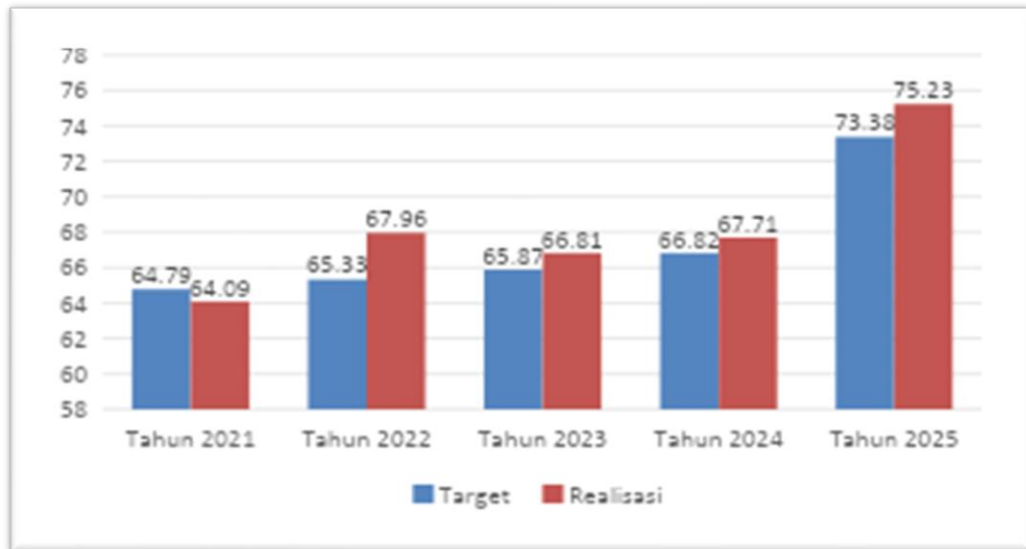
3.1.2.4.1 Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

IKLH diukur oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Capaian IKLH selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan sebagaimana terlihat pada Gambar 3.9. Pengukuran IKLH di tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendali Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Status dan Kondisi Lingkungan Hidup serta Respon Terhadap Lingkungan Hidup. Sedangkan perhitungan IKLH tahun 2021-2024 mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Lingkungan Hidup. Perubahan peraturan tersebut menyebabkan perubahan dalam pengukuran IKLH sehingga nilai IKLH tahun 2025 mengalami peningkatan yang signifikan. Capaian Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Bontang dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini.

**Tabel 3.13. Nilai Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Pemerintah Kota Bontang Tahun 2025**

Indikator	Target	Realisasi	Kategori
IKA	71,34	73,61	Sedang
IKU	83,51	85,01	Baik
IKTL	58,16	59,94	Buruk
IKLH	73,38	75,23	Sedang

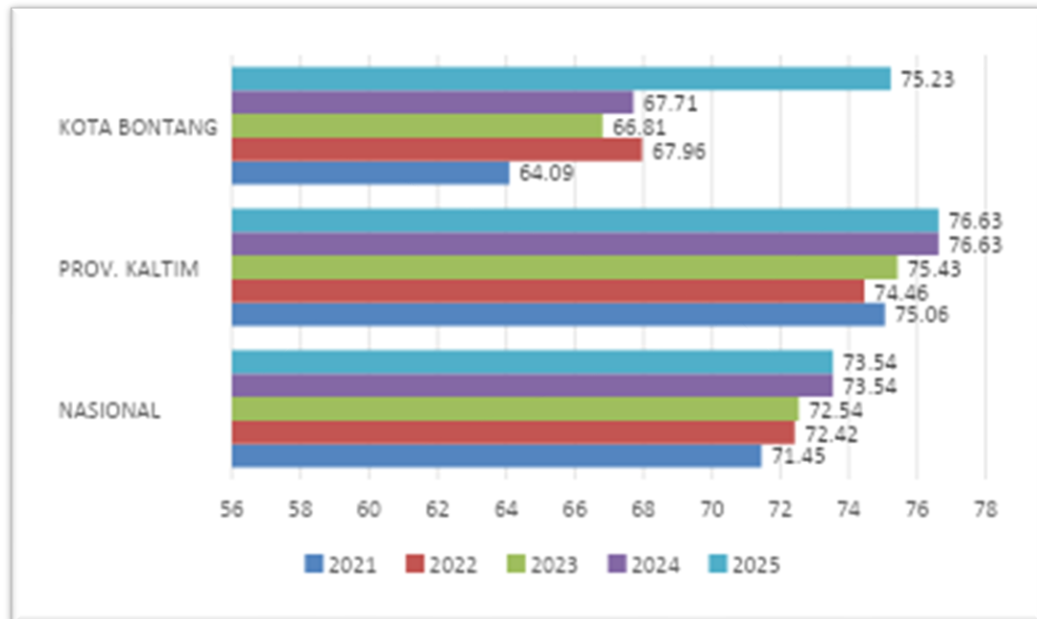
Sumber : Badan Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang, 2026



Gambar 3.9 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Bontang
Tahun 2021-2025

Sumber : Badan Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang, 2025

Dari grafik di atas terlihat bahwa pada tahun 2021-2024 capaian IKLH menunjukkan capaian kualitas lingkungan hidup dengan kategori “Sedang”. Pada tahun 2023 dan 2024 capaian IKLH mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2022. Hal ini disebabkan oleh menurunnya capaian Indeks Kualitas Air yang disebabkan oleh capaian Indeks kualitas air rata-rata di kisaran angka 53,5 yang tergolong rendah. Indeks kualitas air yang tergolong rendah ini disebabkan oleh menurunnya kualitas air sungai karena limbah rumah tangga pada permukiman dan limbah dari industri rumah tangga seperti usaha kuliner, usaha pengolahan tahu-tempe, usaha pencucian kendaraan bermotor, usaha kimia/ batik, usaha hasil hutan dan perkebunan/furniture. Akan tetapi pada tahun 2025, IKLH menunjukkan peningkatan yang signifikan dan menunjukkan capaian dengan kategori “Sedang”. Jika dibandingkan dengan capaian indeks kualitas lingkungan hidup dengan capaian Provinsi Kalimantan Timur dan capaian Nasional, maka pada tahun 2025 posisi Kota Bontang berada di bawah Provinsi Kalimantan Timur tapi berada di atas Nasional.



Gambar 3.10 Perbandingan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Kota Bontang, Provinsi Kaltim, dan Nasional Tahun 2021-2025

Sumber : Badan Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang, 2025

Faktor pendorong tercapainya kinerja IKLH di antaranya sebagai berikut:

1. Konsistensi dalam menjalankan program program yang telah ditetapkan;
2. Pembinaan dan pengawasan terhadap sektor usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran;
3. Sinergitas yang tinggi dari berbagai pihak dalam pencapaian program-program pengendalian pencemaran dan kerusakan dan persampahan yang telah dijalankan pemerintah;
4. Ketersediaan SDM aparatur DLH yang berkualitas;
5. Peningkatan gerakan pengurangan penggunaan sampah;
6. Pengadaan dan perbaikan fasilitas pendukung pengangkutan sampah (truk, bak truk sampah).

Upaya yang telah dilakukan dalam mencapai target IKLH ini antara lain:

1. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap kualitas air, kualitas udara, dan kualitas lahan secara berkala di beberapa lokasi;
2. Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berlangsung di masyarakat yang berpotensi menjadi sumber pencemaran;
3. Meningkatkan kualitas pengelolaan persampahan;
4. Kolaborasi pelaksanaan program pelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan antara pemerintah, dunia usaha, dunia pendidikan, komunitas dan masyarakat, salah satunya melalui SALING

PADU TAMAN;

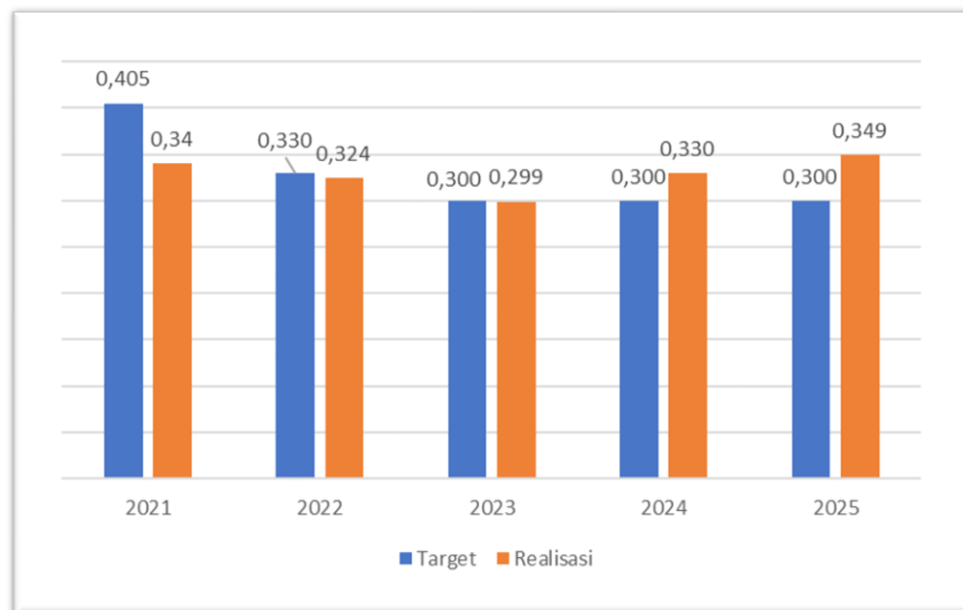
5. Mendorong dilakukannya inovasi yang mendukung terhadap peningkatan kualitas lingkungan seperti *Project Pilot* Pengelolaan Air Limbah (ECOLYMA TPA dan ECOLYMA KULINER), dan Instalasi Pemanenan Air Hujan (IPAH);
6. Pemberian penghargaan kepada masyarakat dan pelaku usaha yang menerapkan gerakan pengurangan penggunaan plastik secara konsisten
7. Mendorong sekolah untuk menjadi sekolah yang berwawasan lingkungan melalui Sekolah ADIWIYATA;
8. Penetapan regulasi tentang optimalisasi pengelolaan persampahan dan pengelolaan lingkungan, seperti:
 - a. Peraturan Daerah Kota Bontang tentang pengelolaan sampah, pengelolaan limbah B3, dan pengelolaan limbah domestik;
 - b. Peraturan Wali Kota Bontang tentang pengurangan penggunaan plastik sekali pakai;
 - c. Keputusan Wali Kota tentang pembentukan Forum Lingkungan Hidup Kota Bontang; dan
 - d. Instruksi Wali Kota tentang penanaman pohon dan pembuatan Lubang Resapan Biopori (LRB) bagi ASN dan penanaman pohon bagi ASN dan Calon Pengantin.

3.1.3. Tujuan 3 Mewujudkan Inklusivitas dan Keseimbangan Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Ekonomi Lokal dan Keragaman Sosial Budaya Masyarakat

Tujuan 3 merupakan penerjemahan dari misi 2 RPJMD 2021-2026, yaitu “Kota Bontang Berkelanjutan Yang Layak Huni, Cerdas dan Berwawasan Lingkungan Melalui Pemantapan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Infrastruktur serta Pelestarian Lingkungan Hidup”. Dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan ini, pembangunan harus mampu kembali membangkitkan dan menumbuhkan perekonomian daerah secara inklusif dan seimbang antara sektor migas dan non migas. Perekonomian daerah harus semakin dikembangkan dengan mendorong dan mengakselerasikan peningkatan produktivitas sektor-sektor ekonomi yang berbasis pada sektor unggulan daerah dan sektor-sektor yang memiliki daya ungkit yang luas terhadap peningkatan perekonomian masyarakat. Secara bersamaan, untuk mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi Kota Bontang tersebut, tetap menjadi prioritas menumbuhkan investasi untuk pembangunan berbagai industri baru sebagai substitusi dari penurunan peran industri pengolahan migas dalam perekonomian daerah. Sektor-sektor non migas menjadi sangat penting untuk dikembangkan guna mengimbangi pertumbuhan ekonomi migas yang

cenderung mengalami penurunan selama beberapa tahun terakhir.

Keberhasilan pembangunan ekonomi ditentukan oleh Indeks Gini yang menggambarkan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di suatu wilayah. Semakin baik pembangunan ekonomi di suatu wilayah, maka nilai Indeks Gini akan semakin kecil, begitu juga jika pembangunan ekonomi di suatu wilayah kurang berhasil maka Nilai Indeks Gini akan semakin besar mendekati angka 1. Berikut capaian Indeks Gini Kota Bontang selama 5 tahun terakhir.



Gambar 3.11 Capaian Indeks Gini Kota Bontang Tahun 2021-2025

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, 2026

Selama 5 tahun terakhir, capaian Indeks Gini terbaik terjadi pada tahun 2023, sedangkan pada tahun 2024 dan 2025 capaian indeks gini mengalami peningkatan yang menyebabkan target tidak tercapai. Penyebab utama kenaikan indeks gini di Kota Bontang adalah kesenjangan pengeluaran yang melebar di antara sesama penduduk miskin serta kecepatan pemulihan ekonomi pasca-kontraksi yang tidak terserap secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Meskipun indeks gini Kota Bontang mengalami peningkatan, tetapi tercatat masih berada di atas rata-rata nasional yang berada di kisaran 0,381 yang berarti tingkat ketimpangan di Kota Bontang masih dikategorikan dalam level menengah.

Beberapa faktor yang menyebabkan peningkatan indeks gini adalah dapat dirincikan sebagai berikut:

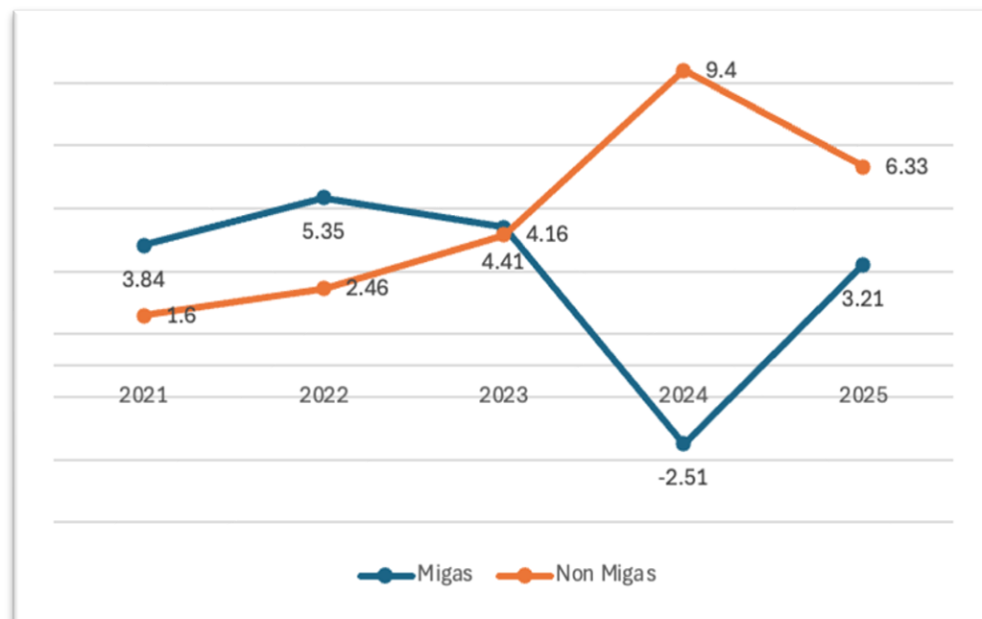
1. Melebarnya Kesenjangan di Kelompok Bawah

- **Peningkatan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1):** Jarak rata-rata pengeluaran warga miskin terhadap Garis Kemiskinan justru semakin menjauh. Nilai P1 Bontang naik dari **0,31 (2024) menjadi 0,35 (2025)**.
 - **Peningkatan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2):** Ketimpangan pengeluaran di dalam internal kelompok masyarakat miskin itu sendiri semakin tinggi, naik dari **0,04 (2024) menjadi 0,06 (2025)**. Kondisi ini menunjukkan kesejahteraan penduduk miskin paling bawah tidak bergerak secepat kelompok di atasnya.
2. Efek Pemulihan Ekonomi yang Tidak Proporsional
- Pada tahun 2024, perekonomian Kota Bontang sempat mengalami **kontraksi tajam sebesar minus 2,51%**. Memasuki tahun 2025, ekonomi Bontang melesat tumbuh positif ke angka **3,21%**, ditopang oleh sektor non-migas dan industri. Namun, lonjakan pertumbuhan ekonomi yang cepat ini cenderung dinikmati terlebih dahulu oleh kelompok masyarakat berpenghasilan menengah ke atas atau pekerja sektor industri formal, sehingga memperlebar jarak pendapatan dengan pekerja sektor informal.
3. Kenaikan Garis Kemiskinan yang Membebani Daya Beli
- Garis Kemiskinan di Kota Bontang naik dari Rp763.661 di tahun 2023 naik menjadi Rp801.945,00 di tahun 2024 dan mengalami kenaikan kembali menjadi Rp831.247,00 per kapita per bulan (2025).
 - Meskipun angka kemiskinan makro berhasil ditekan turun menjadi 3,21 persen di tahun 2025, akan tetapi peningkatan biaya hidup ini memukul kelompok masyarakat rentan yang pengeluarannya pas-pasan, membuat disparitas alokasi konsumsi semakin timpang dibanding kelompok kaya.

3.1.3.5 Sasaran 5 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Non Migas

Sasaran 5 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi non Migas merupakan sasaran yang diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif berbasis pada potensi ekonomi lokal. Keberhasilan Sasaran 5 ini ditunjukkan dengan indikator Pertumbuhan Ekonomi Non Migas, yaitu indikator yang mengukur kecepatan kenaikan nilai tambah produksi barang dan jasa di luar sektor penyulingan minyak bumi dan gas alam cair (LNG). Indikator ini mencerminkan kinerja ekonomi riil masyarakat Bontang secara mandiri, sekaligus menjadi kompas dalam upaya diversifikasi ekonomi agar kota ini tidak lagi mengalami kerentanan akibat menipisnya cadangan gas alam.

Sebagai kota industri, Kota Bontang tumbuh dari sektor industri pengolahan, terutama pada industri pengolahan migas. Keterbatasan industri pengolahan yang didominasi oleh sektor migas, sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya alam yang tidak dapat tergantikan, yaitu pada gas alam, minyak bumi dan pertambangan. Akan tetapi pertumbuhan ekonomi non migas selama 5 tahun terakhir, telah menunjukkan pertumbuhan yang sangat baik. Hal ini menunjukkan, bahwa perkembangan perekonomian di luar industri pengolahan merupakan sektor yang potensial untuk terus dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Pertumbuhan ekonomi non migas Kota Bontang selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Gambar 3.12 Pertumbuhan Ekonomi Kota Bontang Tahun 2021-2025

Sumber : Badan Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang, 2025

Berdasarkan gambar 3.12 dapat dilihat, bahwa pertumbuhan ekonomi tanpa migas Kota Bontang lebih stabil dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi dengan migas. Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi dengan migas Kota Bontang berkontraksi menjadi -2,51 persen, sedangkan pertumbuhan ekonomi tanpa migas tumbuh positif di angka 9,4 persen. Sedangkan pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi dengan migas Kota Bontang tumbuh menjadi 3,21, sedangkan pertumbuhan ekonomi tanpa migas berkontraksi menjadi 6,33 persen.

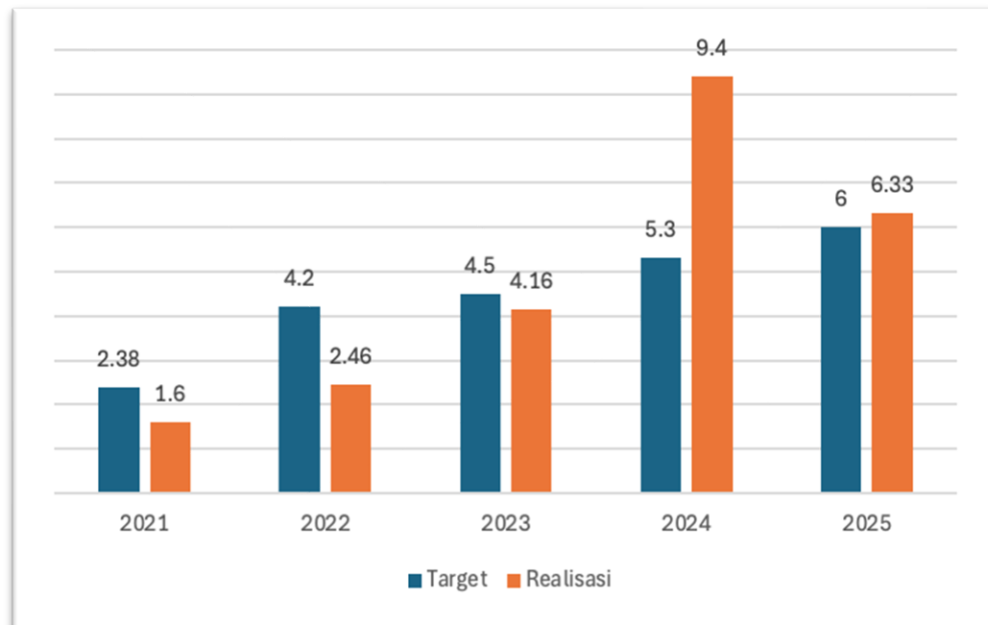
Tabel 3.14. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5

NOI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Non Migas	Persen	5	6,33	126,60
Rata-rata Capaian					126,60

Sumber: Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang, 2026

3.1.3.5.1 Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi Non Migas

Keberhasilan pertumbuhan ekonomi non migas ditunjukkan dengan indikator Laju pertumbuhan ekonomi non migas. Pertumbuhan ekonomi non migas menjadi target kinerja yang ditetapkan di dalam RPJMD 2021-2026. Capaian laju pertumbuhan ekonomi non migas selama 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut:



Gambar 3.13 Capaian Pertumbuhan Ekonomi Non Migas Kota Bontang Tahun 2021-2025

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026

Pada gambar di atas, dapat dilihat bahwa, capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Non Migas cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pertumbuhan ekonomi non migas pada tahun 2025 berkontraksi menjadi 6,63 persen dibandingkan tahun 2024 yang tumbuh 9,4 persen. Perlambatan pertumbuhan ekonomi non migas ini disebabkan oleh adanya tekanan fiskal pada pemerintah daerah yang berdampak terhadap program-program stimulus non migas yang bersumber dari pemerintah, sehingga daya dorong belanja

pemerintah terhadap sektor konstruksi dan pengadaan non-migas ikut terdampak. Penyebab lainnya adalah belum kuatnya struktur ekonomi daerah, terutama akibat volatilitas pada sektor industri pengolahan non-migas dan sektor ekstraksi/pertambangan.

Pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa walaupun sektor industri pengolahan masih menjadi penopang ekonomi Kota Bontang, akan tetapi sektor-sektor lainnya cenderung mengalami peningkatan. Dalam rangka mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi non migas, maka Pemerintah Kota Bontang terus meningkatkan terjadinya diversifikasi ekonomi yang berfokus pada penguatan sektor riil, hilirisasi, dan investasi berkelanjutan.

Kota Bontang selama 2 tahun terakhir berhasil mendorong laju pertumbuhan non migas sehingga melampaui target yang ditetapkan. Faktor yang dinilai mendukung dan berdampak pada pencapaian target tersebut adalah:

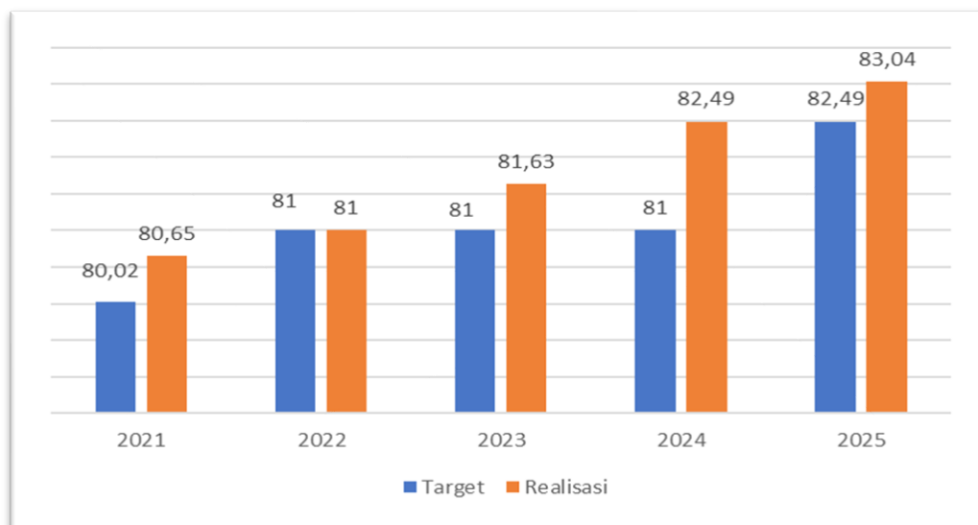
1. Iklim investasi yang kondusif di Kota Bontang sehingga meningkatkan kepercayaan investor untuk berinvestasi di Kota Bontang;
2. Kebijakan Pemerintah Kota Bontang untuk mengembangkan pariwisata, yang diharapkan dapat memberikan *multy player efect* ke sektor lainnya, seperti UMKM;
3. Fasilitasi Pemerintah Kota Bontang dalam pengembangan produksi pengolahan, pemasaran, kemitraan peningkatan kualitas SDM serta desain dan teknologi bagi para pelaku usaha kecil dan mikro salah satunya adalah dengan meresmikan *UMKM Centre*;
4. Terselenggaranya event-event di Kota Bontang dalam rangka mempromosikan destinasi wisata lokal untuk menarik lebih banyak pengunjung wisata;
5. Optimalisasi potensi perikanan dan pertanian, seperti pengenalan dan pelatihan diversifikasi olahan hasil perikanan, pembinaan dan pemberian sarana dan prasarana kepada petani terkait pengendalian hama dan penyakit tanaman;
6. Peningkatan kualitas infrastruktur jalan di wilayah Kota Bontang; dan
7. Peningkatan aksesibilitas fasilitas publik yang dapat menarik investasi melalui perbaikan dan pembangunan infrastruktur transportasi, komunikasi, dan utilitas untuk mendukung kegiatan ekonomi.

3.1.4 Tujuan 4 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Sejahtera

Tujuan 4 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Sejahtera merupakan penjabaran dari Misi ke 3 RPJMD 2021-2026 yaitu “*Kota Bontang yang berdaya saing dan sejahtera melalui peningkatan*

kualitas sumber daya manusia.” Untuk mewujudkan Tujuan 4 ini maka sasaran pembangunan diarahkan pada peningkatan akses pendidikan dan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat, meningkatkan kompetensi tenaga kerja agar lebih berkualitas dan berdaya saing, serta meningkatkan pemberdayaan sosial masyarakat. Pemberdayaan dimaksudkan agar secara sosial masyarakat akan semakin sejahtera yang ditandai dengan penurunan angka kemiskinan.

Tujuan 4 ini, diarahkan pada pembangunan sumber daya manusia. Keberhasilan pembangunan SDM ditandai dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Semakin baik kualitas SDM di Kota Bontang, maka ditunjukkan semakin tinggi nilai IPM yang diperoleh. IPM dibentuk melalui 3 dimensi yaitu dimensi kesehatan, dimensi pendidikan, dan dimensi pendapatan. Dimensi kesehatan diukur melalui Usia Harapan Hidup. Dimensi pendidikan diukur melalui Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Sedangkan dimensi pendapatan diukur melalui Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan, yang mewakili kemampuan daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok. Berikut ini capaian IPM Kota Bontang tahun 2021-2025.

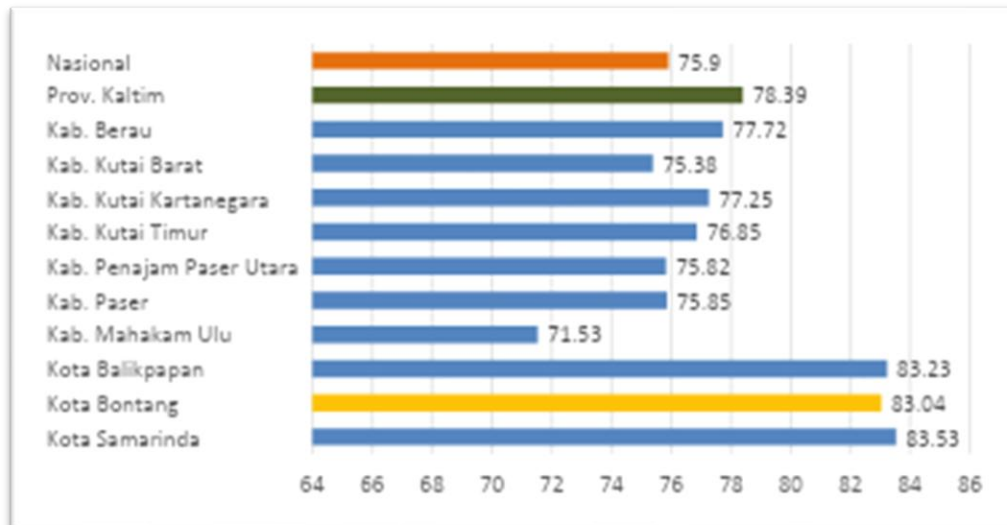


Gambar 3.14 Grafik Realisasi Indikator Kinerja Tujuan 4

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bontang, 2026

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan tren peningkatan yang konsisten sepanjang periode 2021–2025. Jika dibandingkan antara target dan realisasi, terlihat bahwa capaian aktual melampaui rencana yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan sumber daya manusia dari tahun ke tahun semakin baik. Jika dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi Kalimantan Timur, maka capaian IPM Kota Bontang lebih tinggi.

Secara wilayah, IPM Kota Bontang menduduki urutan ke-3 setelah Kota Balikpapan dan Kota Samarinda.



Gambar 3.15 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bontang dengan Kabupaten/Kota, Provinsi Kalimantan Timur, dan Nasional Tahun 2025

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bontang, 2025

3.1.4.6 Sasaran 6 Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan Yang Berkualitas

Pembangunan manusia, peningkatan mutu layanan bidang pendidikan dan kesehatan menjadi determinan penting dalam rangka peningkatan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Keberhasilan suatu pembangunan tidak hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun juga harus memperhitungkan sejauh mana keberhasilan pembangunan manusia seutuhnya. Dalam rangka mendorong peningkatan sumber daya manusia, maka pembangunan diarahkan pada sektor pendidikan, melalui peningkatan akses layanan pendidikan yang berkualitas. Akses pendidikan yang berkualitas menjadi kunci penting agar anak-anak di Kota Bontang menjadi SDM yang berkualitas. Selain itu pemenuhan akses layanan kesehatan yang berkualitas juga sangat penting.

Selanjutnya, untuk mengukur Sasaran 6 ini, maka digunakan 3 indikator kinerja sebagai alat ukurnya, yaitu Angka Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), dan Usia Harapan Hidup (UHH). Indikator pertama dan kedua merupakan alat ukur di bidang pendidikan yang dapat menggambarkan jangka waktu masyarakat menempuh pendidikan. Adapun

indikator ketiga merupakan alat ukur di bidang kesehatan yang dapat menggambarkan kondisi kesehatan masyarakat..

3.1.4.6.1 Indikator Harapan Lama Sekolah

HLS mengindikasikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak-anak pada usia tertentu di masa depan. Indikator ini juga menunjukkan komitmen Pemerintah yang menggambarkan sejauh mana sistem pendidikan di suatu wilayah mampu menjamin anak-anak untuk bersekolah tanpa putus di tengah jalan. Semakin tinggi HLS, semakin baik pula potensi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang akan memasuki angkatan kerja di masa mendatang.

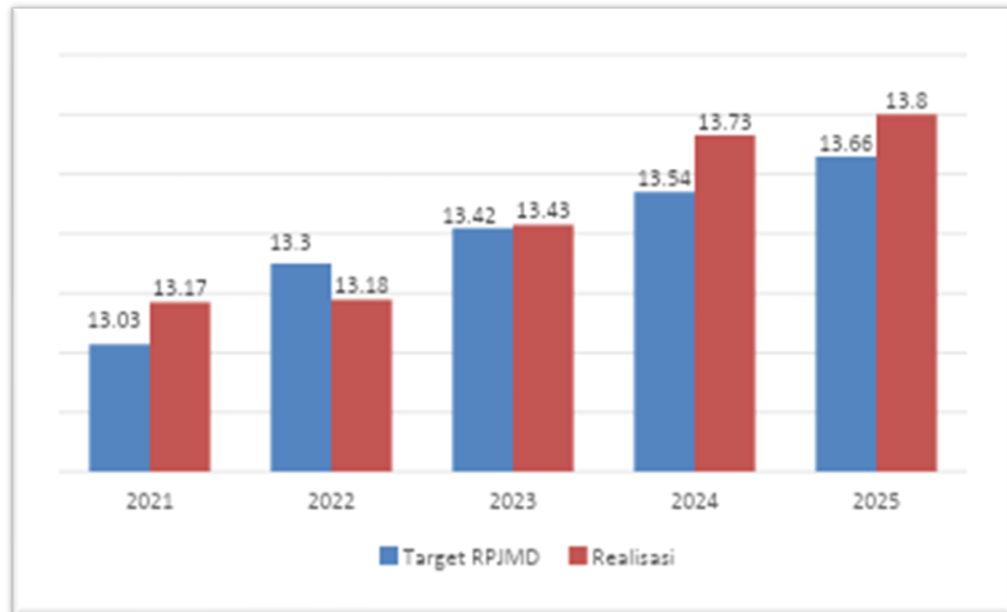
Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik bahwa capaian HLS Kota Bontang pada tahun 2025 adalah 13,80. Angka tersebut menggambarkan bahwa anak-anak di Kota Bontang yang berusia 7 tahun memiliki harapan menempuh pendidikan selama 13 tahun atau hingga diploma I. Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian kinerja tahun 2025 untuk indikator Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) telah melampaui target dalam perjanjian kinerja sebesar 13,73 dengan tingkat pencapaian 100,51%.

Tabel 3.15. Target dan Realisasi Angka Harapan Lama Sekolah
Kota Bontang Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,73	13,80	100,51
Rata-rata Capaian					100,51

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2026

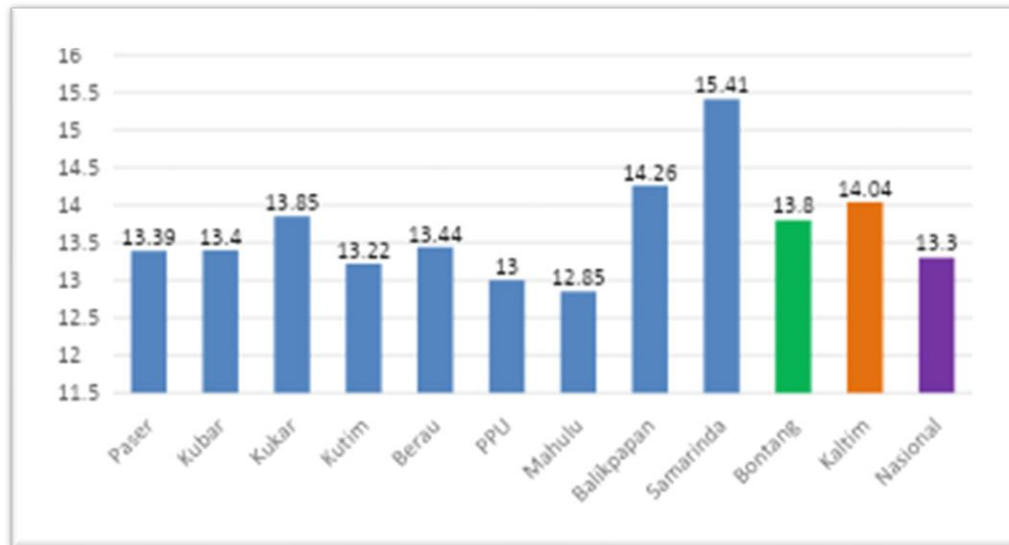
Berdasarkan RPJMD Kota Bontang Tahun 2021-2026, capaian indikator Angka HLS pada tahun kelima perencanaan telah berhasil melampaui target yang ditetapkan yaitu 13,80.



Gambar 3.16 Perbandingan Target dan Realisasi Angka Harapan Lama Sekolah Kota Bontang dalam Kerangka Perencanaan Jangka Menengah
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bontang, 2026

Walaupun capaian HLS telah melampaui target yang ditetapkan, tetapi Pemerintah Kota Bontang perlu terus meningkatkan lagi. Capaian HLS tersebut memberikan dampak langsung dan kaitan erat dengan pasar tenaga kerja di Bontang. Keberadaan Kota Bontang sebagai kota industri, di mana kebutuhan tenaga kerja lokal di Bontang, didominasi oleh industri padat karya dan teknologi tinggi seperti petrokimia, LNG, dan manufaktur. Target HLS yang menyentuh tingkat pendidikan tinggi (Diploma/Sarjana muda), sumber daya manusia (SDM) lokal diharapkan mampu mengisi posisi teknis dan spesialis yang menjadi standar perusahaan besar.

Capaian HLS Kota Bontang tahun 2025 termasuk tinggi jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur. Dari 10 Kabupaten/Kota, Kota Bontang menduduki urutan ke-4 setelah Kota Samarinda, Kota Balikpapan, dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun jika dibandingkan dengan Angka HLS tingkat Provinsi Kalimantan Timur, capaian Kota Bontang lebih rendah 0,60 poin, sedangkan jika dibandingkan dengan Angka HLS tingkat Nasional, capaian Kota Bontang masih lebih tinggi 0,50 poin.



Gambar 3.17 Perbandingan Angka HLS Kota Bontang dengan
Kabupaten/Kota Sekitar, Provinsi Kalimantan Timur, dan Nasional
Tahun 2025

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, 2025

3.1.4.6.2 Indikator Rata-rata Lama Sekolah

RLS didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal oleh penduduk usia 25 tahun ke atas, tidak termasuk tahun yang dihabiskan untuk penduduk yang mengulang karena tidak naik kelas. Indikator ini menjadi cermin efektivitas kebijakan pendidikan dan pengentasan buta huruf yang telah diterapkan di wilayah tersebut selama beberapa dekade ke belakang. Semakin tinggi angka RLS, maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya. Semakin tinggi RLS, semakin tinggi pula produktivitas masyarakat dan kemampuan daya saing ekonomi wilayah tersebut.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, bahwa RLS Kota Bontang pada tahun 2025 mencapai angka 11,03 melampaui target yang telah ditetapkan dan melampaui realisasi tahun 2024 dengan angka 10,97. Angka tersebut menggambarkan bahwa rata-rata penduduk Kota Bontang yang berusia 25 tahun ke atas di tahun 2025 telah menyelesaikan pendidikan formalnya selama 11,03 tahun atau setara dengan kelas 11 Sekolah Menengah/ sederajat. Capaian kinerja Walikota Bontang tahun 2025 untuk indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) sudah sedikit di atas target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Dari target sebesar 11,02 dengan tingkat pencapaian indikator Angka RLS sekitar 100,09%.

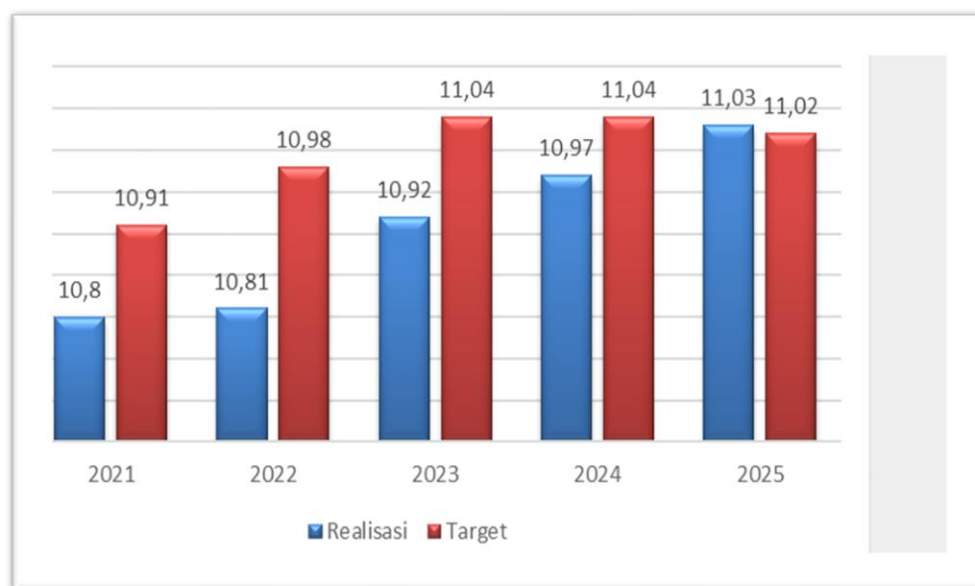
Tabel 3.16. Target dan Realisasi Rata-rata Lama Sekolah Kota Bontang
Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	11,02	11,03	100,09
Rata-rata Capaian					100,09

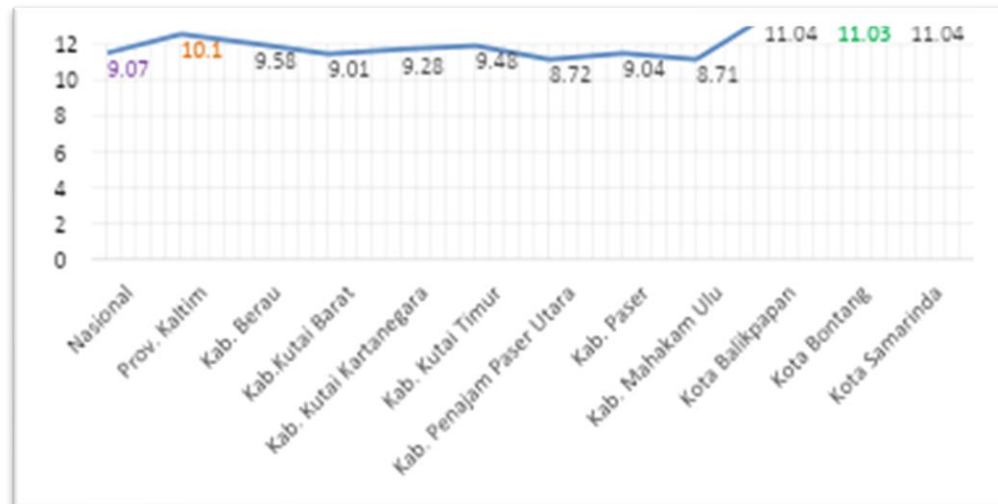
Sumber : Badan Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang, 2025

Pada tahun 2025 capaian rata-rata lama sekolah berada di angka 11,03. Ini artinya penduduk usia 15 tahun ke atas di Kota Bontang berada hanya mampu menamatkan pendidikan sampai dengan kelas XI SLTA. Hal ini masih berada di bawah wajib belajar 12 tahun bagi penduduk usia 15 tahun ke atas. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kota Bontang sangat mempengaruhi kualifikasi tenaga kerja. RLS yang tinggi mendorong kesiapan angkatan kerja untuk bersaing di sektor industri padat karya dan keahlian khusus. Dengan pendidikan terakhir yang hanya mampu sampai dengan kelas XI SLTA, tentu hal ini menjadi persoalan tersendiri pada sektor tenaga kerja. Untuk itu Pemerintah Kota Bontang aktif untuk terus mendorong anak-anak untuk mampu mengenyam pendidikan sampai pendidikan tinggi.

Dalam kerangka perencanaan jangka menengah yang tertuang di RPJMD Kota Bontang Tahun 2021-2026 bahwa realisasi indikator RLS tahun ketiga perencanaan lebih baik dari tahun sebelumnya, namun masih dibawah nilai yang ditargetkan.



Gambar 3.18 Perbandingan Target dan Realisasi Rata-Rata Lama Sekolah Kota Bontang dalam Kerangka Perencanaan Jangka Menengah
Sumber : Badan Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang, 2025



Gambar 3.19 Perbandingan RLS Kota Bontang dengan Kabupaten/Kota Sekitar, Provinsi Kalimantan Timur, dan Nasional Tahun 2025
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Nilai RLS Kota Bontang tahun 2025 termasuk tinggi ketiga dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur dan masih lebih baik dari nilai Tingkat Nasional dan Provinsi Kaltim.

Sama dengan indikator sebelumnya, RLS Kota Bontang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun meskipun lambat dengan rata-rata kenaikan 0,04% setiap tahunnya. Hasil dari program pendidikan umumnya memang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk terlihat. Meskipun demikian data ini menunjukkan kinerja yang positif.

Faktor yang mendukung pencapaian indikator ini diantaranya adalah:

1. Dukungan/komitmen pemerintah dalam penyelenggaraan urusan pendidikan;
2. Adanya akses pendidikan wajib belajar 12 tahun, meliputi program paket A, B dan C bagi masyarakat secara gratis pada Sanggar Kegiatan Belajar (SKB);
3. Banyaknya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang dikelola oleh masyarakat dan mendapatkan dana bantuan operasional PKBM yang bersumber dari APBD Pemerintah Kota Bontang;
4. Adanya dukungan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari perusahaan-perusahaan di Kota Bontang untuk dunia pendidikan.

3.1.4.6.3 Indikator Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan komposit pembentuk IPM yang digunakan dalam rangka pencapaian Sasaran Keenam yaitu Meningkatkan Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas. Dalam pembangunan, UHH secara krusial menggambarkan kualitas kesehatan masyarakat dan keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan hidup penduduknya. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, kesehatan adalah hal yang fundamental selain pendidikan, untuk membentuk kapabilitas manusia yang lebih luas agar dapat berkontribusi optimal dalam pembangunan. Maka wajar jika pengembangan bidang kesehatan juga menjadi salah satu fokus utama Kota Bontang dalam upaya mencapai kemajuan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Semakin tinggi tingkat kesehatan seseorang, maka fungsi tubuh untuk beraktivitas menjadi lebih optimal sehingga diharapkan dapat mendorong peningkatan produktivitas seseorang yang mengarah ke peningkatan kesejahteraan.

UHH merupakan indikator yang mengukur rata-rata perkiraan jumlah tahun hidup seseorang sejak lahir. UHH menunjukkan tingginya derajat kesehatan dan kesejahteraan penduduk di suatu wilayah. UHH juga merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan, khususnya derajat kesehatan bagi para penduduknya. UHH yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Merujuk pada data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik, UHH Kota Bontang pada tahun 2025 adalah 75,36 atau berada pada kategori tinggi. Angka tersebut menggambarkan bahwa rata-rata bayi yang lahir dan hidup di Kota Bontang pada tahun 2025 memiliki usia harapan hidupnya mencapai 75,36 tahun. Capaian ini lebih tinggi dari target yang ditetapkan pada angka 75,23 tahun. Tingkat Capaian indikator ini mencapai 100,17% atau 0,13 poin di atas target.

Tabel 3.17. Target dan Realisasi Usia Harapan Hidup Kota Bontang Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	75,23	75,36	100,17
Rata-rata Capaian					100,17

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup penduduk. Meningkatnya pelayanan kesehatan, meningkatnya daya beli masyarakat akan meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, mampu memenuhi kebutuhan gizi dan kalori, mampu mempunyai pendidikan yang lebih baik sehingga memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, yang pada gilirannya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidupnya. Dengan demikian keberhasilan program kesehatan terutama dalam pencapaian indeks kesehatan dan usia harapan hidup bukan hanya tanggung jawab Dinas Kesehatan namun merupakan tanggung jawab bersama antara unsur pemerintah, swasta, akademisi, serta masyarakat.

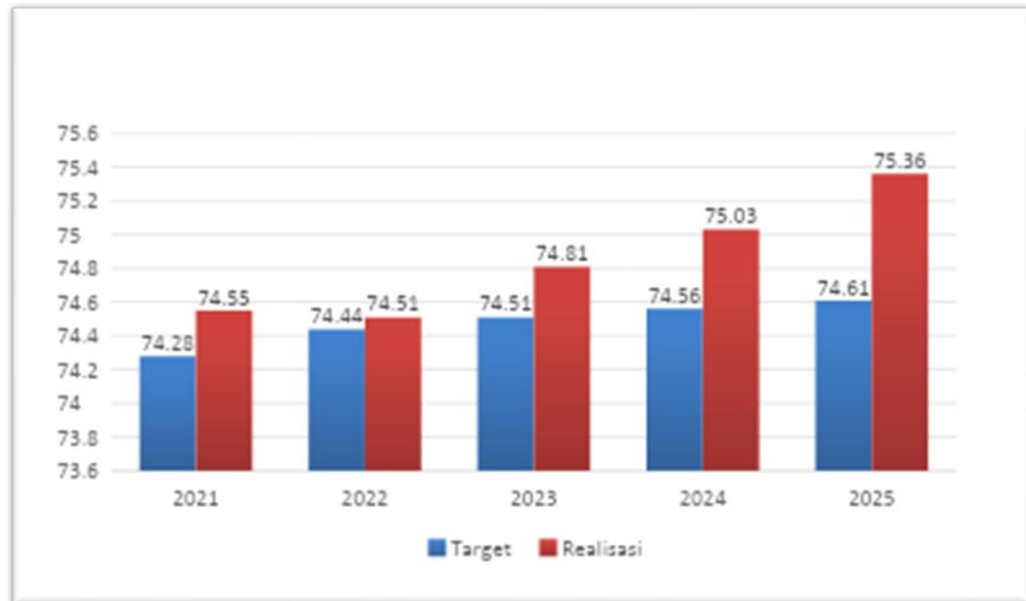
Memperkuat akses dan kualitas pelayanan kesehatan melalui program promotif, preventif, dan kuratif, terutama bagi kelompok rentan. Pemerintah dapat meningkatkan pelayanan kesehatan dasar dengan menyediakan tenaga medis yang memadai, memperluas ketersediaan obat-obatan, serta memastikan cakupan pelayanan imunisasi dan pemeriksaan kesehatan rutin yang lebih luas. Dapat juga menyelenggarakan kampanye kesehatan masyarakat, seperti pola hidup sehat dan pencegahan penyakit menular harus terus digalakkan untuk menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan mendukung peningkatan usia harapan hidup secara berkelanjutan.



Gambar 3.20 Usia Harapan Hidup Kota Bontang Tahun 2020-2025

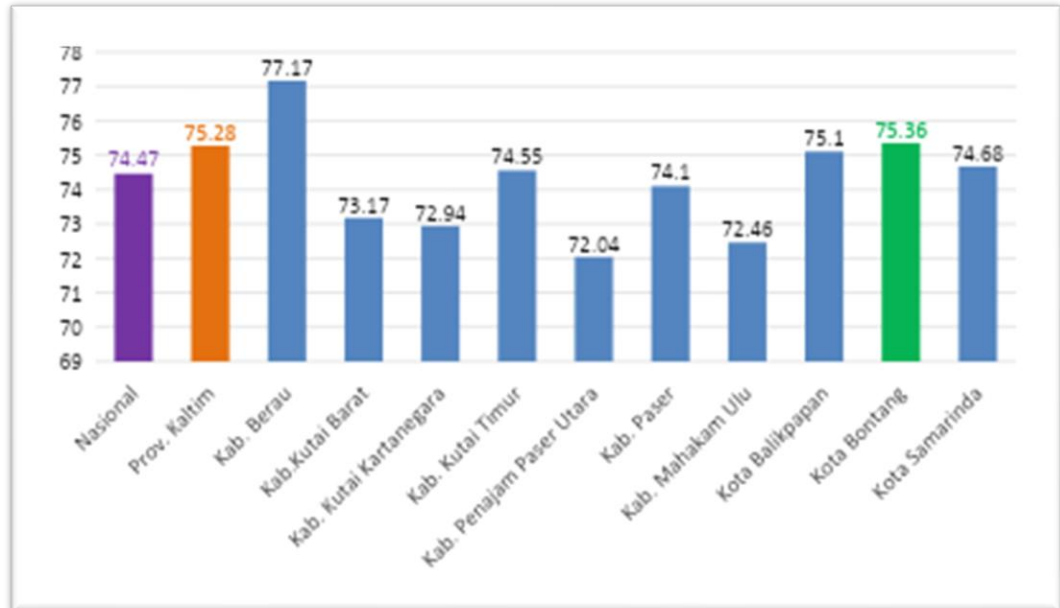
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bontang, 2025

Dalam kerangka perencanaan jangka menengah yang tertuang di RPJMD Kota Bontang Tahun 2021-2026, capaian indikator UHH ini di tahun kedua perencanaan lebih baik dari tahun sebelumnya dan keduanya berhasil melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD. Bahkan capaian indikator UHH di tahun 2025 ini telah melampaui target akhir dari perencanaan jangka menengah di tahun 2025.



Gambar 3.21 Perbandingan Target dan Realisasi Usia Harapan Hidup Kota Bontang dalam Kerangka Perencanaan Jangka Menengah
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bontang, 2025

Capaian yang sangat baik menurut dokumen perencanaan ini perlu dikonfirmasi dan dibandingkan dengan capaian indikator sejenis di tempat lain agar lebih objektif. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, UHH Kota Bontang tahun 2025 termasuk tinggi jika dibandingkan dengan Kabupaten dan Kota lainnya di Provinsi Kalimantan Timur. Dari 10 Kabupaten dan Kota yang ada, hanya Kota Balikpapan yang Usia Harapan Hidupnya di atas Kota Bontang, selebihnya lebih rendah. Adapun jika dibandingkan dengan UHH tingkat Provinsi dan Nasional, capaian Kota Bontang juga lebih tinggi 0,08 poin dari Provinsi Kalimantan Timur dan 0,89 poin dari tingkat Nasional.



Gambar 3.22 Perbandingan Usia Harapan Hidup Kota Bontang dengan Kabupaten/Kota Sekitar, Provinsi Kalimantan Timur, dan Nasional Tahun 2025

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan data di atas, Usia Harapan Hidup di Kota Bontang di tahun 2025 berada di atas capaian Provinsi Kalimantan Timur maupun nasional. Secara regional Kalimantan Timur, capaian UHH Bontang berada di urutan ke-2 setelah Kabupaten Berau. Capaian indikator tersebut menunjukkan baiknya kondisi dan sistem pelayanan kesehatan masyarakat di Kota Bontang dan menggambarkan keberhasilan pelayanan kesehatan dasar, gizi yang baik, serta rendahnya angka kematian bayi dan ibu.

Keberhasilan pelayanan kesehatan di Kota Bontang didorong oleh **komitmen jaminan kesehatan menyeluruh, alokasi anggaran yang optimal, serta penguatan faskes dasar dan intervensi gizi berbasis komunitas**. Sinergi berbagai faktor ini berhasil meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan membawa Bontang meraih penghargaan nasional tertinggi, seperti **Universal Health Coverage (UHC) Awards Kategori Utama**. Berikut adalah beberapa faktor utama pendukung keberhasilan pelayanan kesehatan di Kota Bontang:

1. Cakupan Jaminan Kesehatan Universal (UHC) Menyeluruh.

Pemerintah Kota Bontang berhasil mendaftarkan **100% warganya ke dalam sistem jaminan kesehatan nasional**. Program ini memastikan seluruh lapisan masyarakat mendapatkan kepastian akses pengobatan gratis tanpa hambatan biaya finansial. Komitmen tersebut dijalankan secara berkelanjutan melalui integrasi jaminan kesehatan daerah.

2. **Komitmen Anggaran dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)**
Pemerintah Kota Bontang berkomitmen memberikan dukungan finansial yang kuat melalui alokasi anggaran SPM bidang kesehatan. Pendanaan difokuskan langsung pada pemenuhan target wajib, termasuk pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bayi, dan penanganan penyakit menular maupun tidak menular.
3. **Program Inovatif dan Layanan Gratis Berbasis Komunitas**
Pemerintah meluncurkan berbagai inisiatif kesehatan preventif yang kreatif dan menyentuh langsung masyarakat di tingkat dasar, seperti cek kesehatan gratis, dan Operasi Timbang yang dilakukan bagi balita untuk mendukung gerakan percepatan penurunan prevalensi stunting.
4. **Penguatan Sarana dan Budaya Kerja di Puskesmas dan Rumah Sakit**
Pemerintah telah melakukan pembenahan signifikan pada Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama (FKTP) dari segi infrastruktur, ketersediaan obat, hingga kecukupan tenaga medis. Puskesmas (seperti Puskesmas Bontang Utara 1) dan Rumah Sakit di Bontang juga menerapkan penguatan budaya kerja untuk meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) demi menjamin pelayanan administrasi pasien yang cepat, transparan, dan responsif.
5. **Sinkronisasi Kebijakan Lintas Sektor**
Pemerintah berupaya untuk melakukan sinkronisasi kebijakan lintas sektor melalui kolaborasi antar perangkat daerah (kolaborasi program ketahanan keluarga dan kampung KB), dan kolaborasi dengan perusahaan melalui program CSR terkait penanganan stunting.

Walaupun pelayanan kesehatan di Kota Bontang sudah sangat baik, akan tetapi masih terdapat beberapa permasalahan yang masih perlu menjadi perhatian Pemerintah untuk diselesaikan, sebagai berikut:

1. **Masih tingginya angka prevalensi stunting**
Berdasarkan hasil SIGIZI/Kesga tahun 2025 prevalensi stunting di Kota Bontang tercatat 19,48 persen. Sedangkan angka prevalensi stunting berdasarkan hasil operasi timbang pada bulan November 2025 tercatat lebih rendah yaitu pada angka 17,4 persen. Angka ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan target penurunan prevalensi stunting yang berada di angka 12,5 persen.
2. **Masih terdapat rumah yang belum memiliki sanitasi layak**
Masih terjadi praktik Buang Air Sembarangan (BAB). Berdasarkan data tahun 2025, masih terdapat 2.123 rumah atau 2.345 KK yang tidak memiliki jamban sehat. Hal ini dapat berpengaruh terhadap tingkat kesehatan masyarakat seperti stunting dan penyakit lainnya.
3. **Ketimpangan antara jumlah tenaga dokter dan jumlah penduduk**

Ketidakseimbangan Rasio dokter dengan jumlah penduduk, dimana dengan jumlah penduduk sekitar 190 ribu jiwa, Bontang idealnya memiliki minimal 190 dokter umum merujuk pada standar ideal Kemenkes (1 dokter : 1.000 penduduk). Namun, jumlah riil di lapangan masih di bawah angka tersebut sehingga memicu antrean panjang di fasilitas kesehatan. selain itu, terjadinya beban kerja berlebih bagi tenaga kesehatan, membuat beban kerja tenaga medis yang ada menjadi sangat berat, berisiko menurunkan tingkat ketelitian pelayanan, serta memperlambat waktu respons di tingkat Puskesmas.

Beberapa faktor yang selama ini dinilai mampu menjadi faktor pendukung pencapaian indikator ini, diantaranya adalah:

1. Adanya peningkatan kualitas fasilitas kesehatan Pemerintah yakni dengan meningkatnya status BLUD bagi seluruh Puskesmas di Kota Bontang
2. Adanya kebijakan untuk memberikan bantuan subsidi jaminan kesehatan bagi masyarakat, sehingga Kota Bontang dapat mencapai *universal health coverage (UHC)*.
3. Peningkatan derajat kesehatan ibu dan Anak melalui perbaikan pelayanan kesehatan ibu dan anak pada posyandu, pemberian PMT bagi ibu hamil dan balita.
4. Adanya pengendalian penyakit menular dan tidak menular;
5. Peningkatan kualitas lingkungan sehat termasuk pengentasan ODF, pemenuhan kebutuhan air bersih, penyediaan pangan sehat bebas pengawet, cemaran udara dan kimia;
6. Peningkatan penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk melalui kerjasama dengan pihak swasta;
7. Pemenuhan ketersediaan obat-obatan, vaksin, sarana prasarana, dan alat kesehatan;
8. Penduduk Kota Bontang telah 100% memiliki jaminan pelayanan kesehatan .

Adapun beberapa permasalahan yang masih menjadi permasalahan di bidang kesehatan, antara lain:

1. Tingginya angka prevalensi stunting;
2. Masih terdapat rumah yang belum memiliki sanitasi sehat;
3. Masih terdapat masyarakat yang belum memiliki kesadaran terhadap perilaku hidup bersih dan sehat;
4. Masih terdapat kawasan kumuh, yang memerlukan penanganan sanitasi.

Selain untuk memenuhi target-target yang ingin diwujudkan dalam RPJMD, perbaikan layanan kesehatan memang seharusnya perlu dilakukan terus menerus selain karena ilmu pengetahuan dan teknologi terus berkembang, kesehatan merupakan investasi jangka panjang untuk

mewujudkan penduduk Kota Bontang berkualitas dan sejahtera di masa yang akan datang.

3.1.4.7 Sasaran 7 Meningkatnya Tenaga Kerja yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Pencapaian Sasaran Ketujuh ini, sebagaimana dijelaskan sebelumnya juga diarahkan untuk mewujudkan Tujuan Keempat dari Misi Ketiga RPJMD Kota Bontang yaitu Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing dan Sejahtera. Sasaran ini fokus pada peningkatan kompetensi tenaga kerja di Kota Bontang agar mampu bersaing di pasar tenaga kerja. Hal ini penting mengingat beberapa industri besar Indonesia berada di Kota Bontang, sehingga perlu disiapkan sumber daya manusia yang mumpuni untuk memenuhi kebutuhan industri tersebut agar tidak mengambil banyak tenaga kerja dari luar Kota Bontang. Sasaran ini juga berkorelasi langsung dengan Sasaran 6, yaitu HLS dan RLS. Untuk menjadikan sumber daya manusia sebagai andalan pembangunan, maka ditunjang oleh pendidikan dan kompetensi yang dimiliki.

Keberhasilan Sasaran 7 ini, digambarkan dengan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Indikator ini menggambarkan sejauh mana kualitas dan daya saing tenaga kerja sehingga mampu terserap di pasar kerja dan menurunnya jumlah pengangguran.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi indikator yang penting dalam pembangunan. TPT merefleksikan kemampuan pasar kerja dalam menyerap pasar kerja. Artinya, TPT menggambarkan sejauh mana pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan lapangan kerja baru. Jika suatu daerah pertumbuhan ekonominya tinggi, tetapi angka penganggurannya juga tinggi artinya pertumbuhan ekonominya tidak inklusif dan hanya dinikmati pada sektor padat modal. TPT juga menjadi indikator untuk menggambarkan kesejahteraan masyarakat. Penduduk yang menganggur tidak memiliki pendapatan, yang otomatis akan menurunkan daya beli masyarakat, meningkatkan ketergantungan pada bantuan pemerintah, dan berisiko menaikkan angka kriminalitas. TPT juga memberikan gambaran mengenai *link and match* dunia pendidikan dengan dunia kerja. Jika pengangguran didominasi oleh lulusan berpendidikan tinggi (SMK/Diploma/Sarjana), hal itu menjadi sinyal pembangunan bahwa terjadi ketidaksesuaian (*mismatch*) antara kompetensi yang diajarkan di sekolah dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh industri saat ini. Selanjutnya TPT juga menjadi rapor untuk menilai apakah investasi besar yang masuk (seperti di sektor migas atau manufaktur) berhasil memprioritaskan dan menyerap tenaga kerja lokal, atau justru lebih banyak mendatangkan pekerja dari luar daerah.

3.1.4.7.1 Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka

Secara bertahap Pemerintah Kota Bontang berhasil mengurangi angka pengangguran di kota Bontang selama 5 tahun terakhir total dari 9,92% (2021) turun secara bertahap menjadi 7,06% (2024), hingga menyentuh angka 6,36% pada tahun 2025. Meskipun Bontang sempat mencatatkan tingkat pengangguran tertinggi di Kalimantan Timur akibat karakteristik daerah industri padat modal, tren makro menunjukkan pemulihan yang konsisten pasca pandemi Covid 19.

Tabel 3.18. Target dan Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka
Kota Bontang Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN		TARGET	TAHUN 2025 REALISASI	% CAPAIAN
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen		6,65	6,36	104,72
Rata-rata Capaian						104,72

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bontang, 2025

Dalam kerangka perencanaan jangka menengah yang tertuang di RPJMD Kota Bontang Tahun 2021-2026, capaian indikator Tingkat Pengangguran Terbuka terus mengalami peningkatan kinerja. Capaian ini juga dapat menjadi modal yang baik bagi Kota Bontang untuk mewujudkan target akhir periode perencanaan jangka menengah.



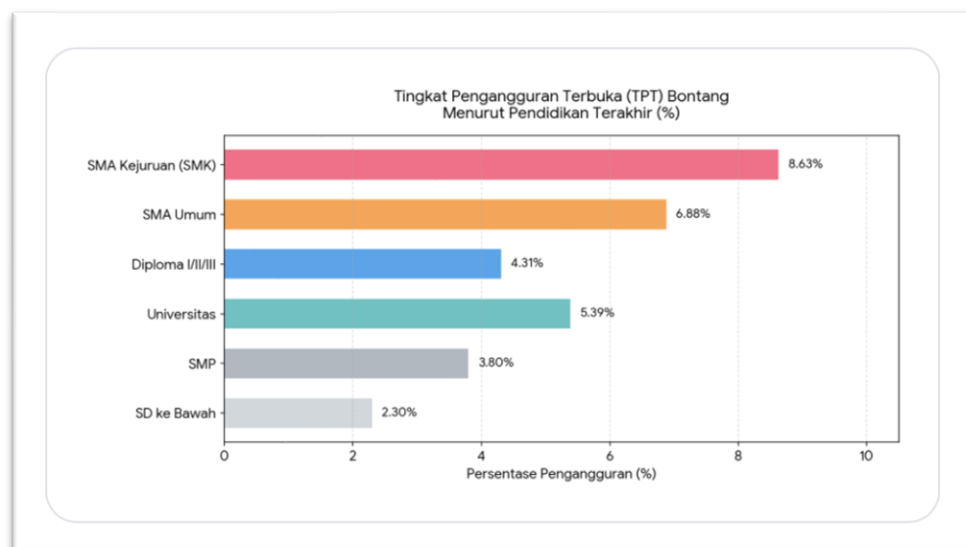
Gambar 3.23 Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Bontang dalam Kerangka Perencanaan Jangka Menengah Tahun 2021-2025

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bontang, 2026

Diketahui jumlah angkatan kerja Kota Bontang tahun 2025 berdasarkan data BPS diketahui sebesar 99,089 jiwa, yang terdiri dari 92.786 jiwa merupakan penduduk yang bekerja dan 6.303 jiwa penduduk yang

menganggur. Sedangkan jumlah Bukan Angkatan Kerja berjumlah 44.640 jiwa. Berdasarkan data tersebut, maka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah 68,94 persen.

Berdasarkan data BPS, golongan pendidikan yang konsisten menyumbang angka pengangguran terbesar di Kota Bontang selama 5 tahun terakhir adalah lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Umum. Selanjutnya secara berurutan, kelompok lulusan pendidikan menengah atas mendominasi jumlah pencari kerja yang belum terserap, disusul oleh lulusan Perguruan Tinggi (Universitas), sedangkan tingkat pendidikan rendah (SD dan SMP) justru mencatatkan persentase pengangguran yang jauh lebih kecil.



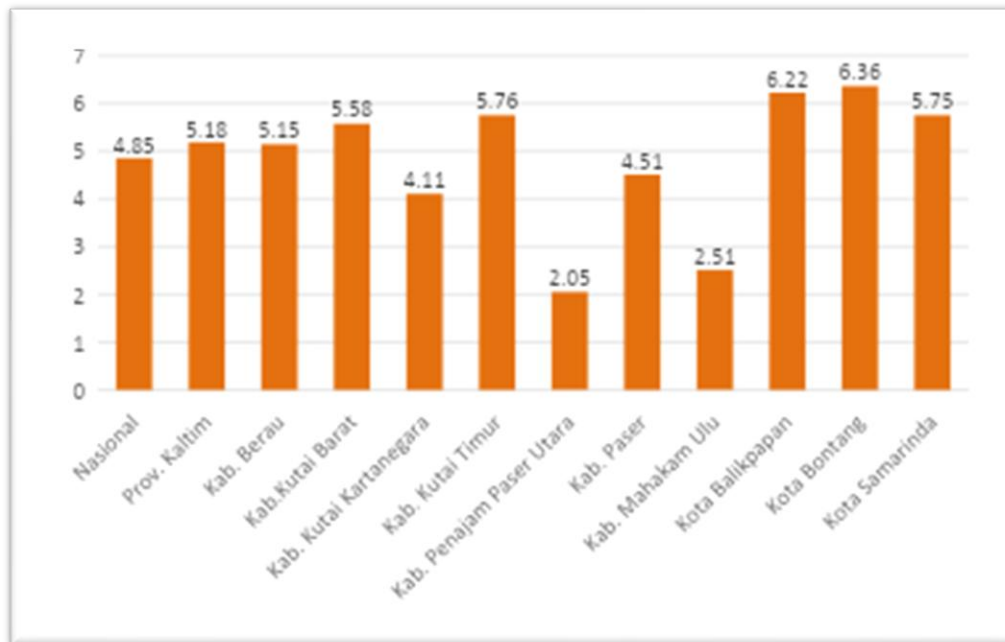
Gambar 3.24 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bontang Menurut Pendidikan Tahun 2025.

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2026

Kondisi pengangguran yang didominasi oleh lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ini mengkonfirmasi adanya *mismatch* struktural (kurangnya sertifikasi industri berat spesifik yang dimiliki lulusan lokal). Selain itu lulusan SMA ternyata belum terserapnya mereka secara optimal di sektor retail/UMKM non-migas, menjadi salah satu faktor yang menyebabkan peningkatan jumlah pengangguran.

Jika dibandingkan TPT di Kota Bontang dengan nasional dan Provinsi, maka angka TPT Kota Bontang berada di atas capaian TPT nasional dan provinsi. dan antar kabupaten kota/kota di Kalimantan Timur, maka Kota Bontang menunjukkan capaian yang paling tinggi. Demikian pula jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Kalimantan Timur, maka Kota Bontang menunjukkan angka yang paling tinggi di antara kabupaten/kota lainnya. Hal ini terjadi karena jumlah penduduk Kota Bontang relatif kecil

dibandingkan dengan jumlah penduduk kabupaten/kota tetangga maupun provinsi. Sehingga jika dibagi antara jumlah pengangguran terbuka dengan jumlah angkatan kerja, persentasenya menjadi relatif tinggi. Kondisi ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Kota Bontang untuk terus menekan angka pengangguran.



Gambar 3.25. Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Bontang dengan Kabupaten/Kota Sekitar, Provinsi Kalimantan Timur, dan Nasional Tahun 2025

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Beberapa kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran di Kota Bontang dan menjadi faktor pendukung keberhasilan penurunan angka pengangguran adalah sebagai berikut:

1. Intervensi pelatihan Pemerintah

Pemerintah Kota Bontang mensyaratkan keterbukaan data dari perusahaan terkait proyeksi kebutuhan tenaga kerja. Data ini digunakan oleh Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) untuk melakukan intervensi pelatihan berbasis kompetensi. Jika RLS rata-rata tenaga kerja lokal dirasa masih perlu ditingkatkan untuk posisi tertentu, program pelatihan dan sertifikasi digencarkan agar SDM lokal tidak hanya menjadi penonton di kotanya sendiri.

2. Kebijakan penyerapan tenaga kerja lokal

Pemerintah Kota Bontang mewajibkan perusahaan-perusahaan di wilayahnya untuk memprioritaskan pencari kerja lokal demi menekan

angka pengangguran. Pemerintah Kota Bontang secara proaktif menyalurkan data pencari kerja lokal yang memenuhi syarat ke berbagai perusahaan di wilayah tersebut. Warga lokal yang belum lolos seleksi kualifikasi perusahaan akan kembali didata dan diberikan pelatihan tambahan agar mereka sesuai dengan spesifikasi formasi lowongan kerja.

3. Kebijakan *link and match*.

Pemerintah terus mendorong lembaga pelatihan dan perusahaan agar menyelaraskan kurikulum dan membuka data kebutuhan tenaga kerja tahunan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa latar belakang pendidikan pencari kerja sesuai dengan formasi yang dibutuhkan. Selain itu Pemerintah juga meminta agar jurusan-jurusan pada sekolah-sekolah vokasi di Kota Bontang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Hal ini dilakukan agar lulusan sekolah vokasi bisa langsung terserap pada pasar kerja yang dibutuhkan.

Adapun faktor yang dinilai menghambat sehingga upaya untuk menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Bontang selama ini menjadi kurang signifikan diantaranya adalah:

1. Tingginya angka pencari kerja dibandingkan dengan jumlah lowongan kerja yang tersedia;
Berdasarkan data BPS, jumlah pencari kerja terdaftar berjumlah 10.708 jiwa. Sementara itu lowongan kerja terdaftar hanya berjumlah 5.363 lowongan atau hanya 50,08 persen dari jumlah pencari kerja. sedangkan tenaga kerja yang berhasil ditempatkan hanya berjumlah 4.107 penempatan.
2. Kurangnya kesesuaian kualifikasi pencari kerja dengan kebutuhan perusahaan/dunia usaha;
3. Belum adanya lembaga sertifikasi profesi di tingkat Bontang
Untuk itu perlu dilakukan evaluasi kembali dan penguatan terhadap program-program yang telah disusun sehingga dapat berdampak signifikan pada perluasan lapangan kerja, peningkatan mutu dan kemampuan serta perlindungan tenaga kerja.

3.1.4.8 Sasaran 8 Meningkatnya Pemberdayaan Sosial

Sasaran kedelapan ini diarahkan untuk mewujudkan Tujuan Keempat dari Misi Ketiga RPJMD Kota Bontang yaitu “Meningkatkan Kualitas Sumber daya Manusia yang Berdaya Saing dan Sejahtera”. Pemberdayaan dimaksudkan agar secara sosial masyarakat akan semakin sejahtera. Pemberdayaan juga merupakan bentuk upaya pemerintah untuk melindungi dan memberikan jaminan sosial bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang secara ekonomi rentan untuk mencukupi kehidupannya secara layak.

Pemberdayaan dan perlindungan kesejahteraan termasuk memperluas akses bagi masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan secara layak akan menjadi bagian intervensi program pembangunan yang harus dapat direalisasikan secara efektif. Permasalahan mendasar bagi masyarakat yang rentan secara ekonomi adalah rendahnya tingkat pendidikan dan minimnya keterampilan sehingga tidak mampu mengakses peluang kerja dan berusaha secara mandiri.

Sasaran strategis ini diukur dengan menggunakan indikator sebagai Angka Kemiskinan. Indikator ini dianggap dapat menggambarkan sejauh mana keberhasilan pemberdayaan sosial mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat secara ekonomi.

Dalam proses pembangunan angka kemiskinan menggambarkan tingkat efektivitas distribusi kesejahteraan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tanpa dibarengi oleh penurunan angka kemiskinan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi hanya dirasakan oleh lapisan masyarakat yang di atas, dan tidak inklusif. Angka kemiskinan juga merefleksikan ketidakmampuan sejumlah penduduk dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan makanan (setara 2.100 kilokalori per kapita per hari) dan kebutuhan non-makanan dasar (seperti perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Selain itu naik turunnya angka kemiskinan menggambarkan seberapa efektif program jaring pengaman sosial pemerintah (seperti bantuan sosial, subsidi kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi) dalam melindungi kelompok rentan agar tidak jatuh ke bawah garis kemiskinan. Angka kemiskinan juga menunjukkan bahwa pembangunan diukur tidak hanya dari jumlah orang miskin, tetapi juga dari seberapa jauh jarak rata-rata pengeluaran mereka dari garis kemiskinan (Indeks Kedalaman), serta seberapa timpang pengeluaran di antara sesama warga miskin itu sendiri (Indeks Keparahan).

3.1.4.8.1 Indikator Angka Kemiskinan

Keberhasilan pemberdayaan sosial ditandai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang ditandai dengan Angka Kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu kondisi di mana seseorang atau kelompok orang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Kemiskinan juga dapat diartikan sebagai ketidakmampuan untuk mengakses sumber daya yang tersedia di sekitarnya.

Persentase penduduk miskin yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik di mana untuk mengukurnya menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi

pengeluaran. Nilai pengeluaran untuk kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori perkapita perhari menjadi Garis Kemiskinan Makanan, sedangkan nilai pengeluaran untuk kebutuhan minimum perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan menjadi Garis Kemiskinan Non Makanan. Sehingga seseorang masuk kategori miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan yang merupakan penjumlahan Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Non Makanan. Untuk tahun 2024 sendiri telah ditetapkan garis kemiskinan di Kota Bontang adalah senilai Rp. Rp. 801.945,-.

Data Badan Pusat Statistik, Angka Kemiskinan di Kota Bontang pada tahun 2024 adalah 3,74 persen. Angka tersebut menggambarkan bahwa 3,74 persen penduduk Kota Bontang tahun 2024 memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan atau di bawah Rp. 801,945,-. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa capaian kinerja Walikota Bontang di tahun 2024 untuk indikator Angka Kemiskinan masih di bawah target yang ditetapkan. Dari target sebesar 3,90 persen dalam Perjanjian Kinerja, tingkat pencapaian indikator Angka Kemiskinan sebesar 104,27%, dengan realisasi 3,74 persen. Pada tahun 2025 Angka Kemiskinan Kota Bontang dari target 3,31-3,73 terealisasi 3,21 persen, ini menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Kota Bontang dari tahun ke tahun semakin berkurang, ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Kota Bontang dalam menangani penduduk miskin yang ada di Kota Bontang, dan sesuai Data Badan Pusat Statistik Kota Bontang bahwa pada tahun 2025 menunjukkan bahwa kondisi kehidupan masyarakat Kota Bontang sudah sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan lebih tingginya persentase pengeluaran rumah tangga untuk bukan makanan (60,82%) dibandingkan dengan pengeluaran untuk makanan (39,18%). Jika dilihat dari kelompok bukan makanan yang dikonsumsi penduduk Kota Bontang, sebagian besar digunakan untuk pengeluaran perumahan dan fasilitas rumah tangga yaitu sebesar 26,78%. Sedangkan untuk kelompok makanan paling banyak untuk pengeluaran makanan dan minuman jadi yakni sekitar 15,36%. Garis kemiskinan Kota Bontang Tahun 2025 memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan menyentuh angka Rp. 831,247,- per bulan. Ada kenaikan Rp 29,3,- atau 0,03 persen.

Tabel 3.19. Capaian Angka Kemiskinan di Kota Bontang Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Angka Kemiskinan	Persen	3,31-3,73	3,21	103,02
Rata-rata Capaian					103,02

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bontang, 2025

Persentase penduduk miskin pada tahun 2025 sebesar 3,21 persen, menurun 0,53 persen poin terhadap tahun 2024. Jumlah penduduk miskin di Kota Bontang tahun 2025 sebanyak 6,18 ribu orang, menurun 0,93 ribu orang terhadap tahun 2024. Garis kemiskinan (GK) Kota Bontang tahun 2025 berada pada level Rp831.247,- per kapita per bulan atau meningkat sekitar Rp29.302,- dibanding Garis Kemiskinan pada tahun 2024 pada level Rp801.945, per kapita per bulan. Penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan dikatakan sesuai penduduk miskin, artinya 3,21 persen penduduk Kota Bontang memiliki rata-rata pengeluaran per bulan kurang dari Rp 831.247,-.

Rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap Garis Kemiskinan mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini tercermin dari Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Bontang pada tahun 2024 sebesar 0,31 naik sebesar 0,04 poin pada tahun 2025 menjadi 0,35. Berikut ini angka kemiskinan Kota Bontang selama 5 tahun terakhir.

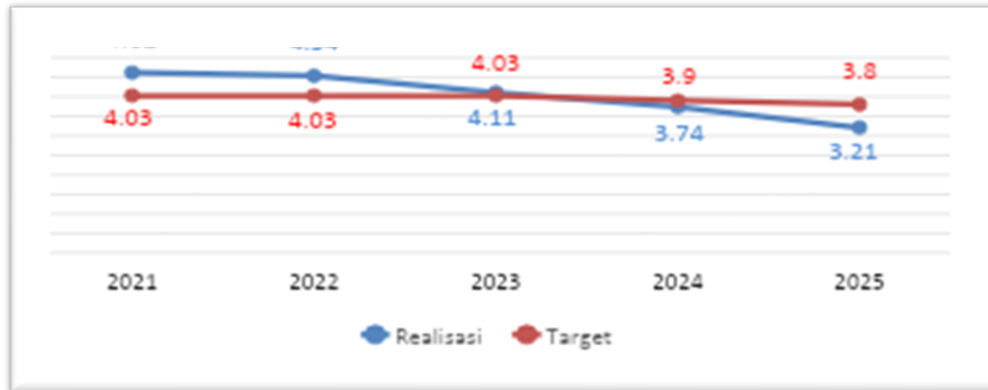


Gambar 3.26 Perkembangan Angka Kemiskinan Kota Bontang Tahun 2020-2025

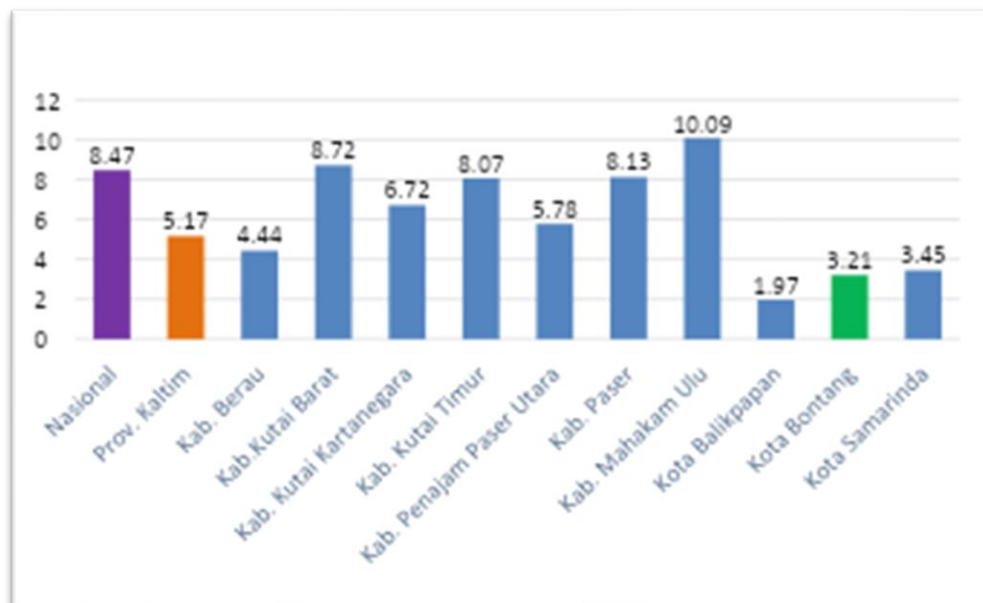
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bontang, 2025

Dalam kerangka perencanaan jangka menengah yang tertuang di RPJMD Kota Bontang Tahun 2021-2026, capaian indikator Angka Kemiskinan di tahun kedua perencanaan lebih baik dari tahun sebelumnya namun keduanya belum berhasil memenuhi target yang ditetapkan dalam RPJMD. Meskipun sama-sama belum memenuhi target, capaian tahun 2023 dapat memperbaiki capaian tahun sebelumnya karena mampu memangkas jarak nilai target dan realisasi dari -0,51 poin di tahun 2022 menjadi -0,08 poin di tahun 2023. Pada

tahun 2024 Pemerintah Kota Bontang belum berhasil mewujudkan target tahun lalu dan tahun 2024, bahkan ada kenaikan 0,37 poin sehingga menjadi 3,74 dan pada tahun 2025 naik menjadi 0,53 poin menjadi 3,21.

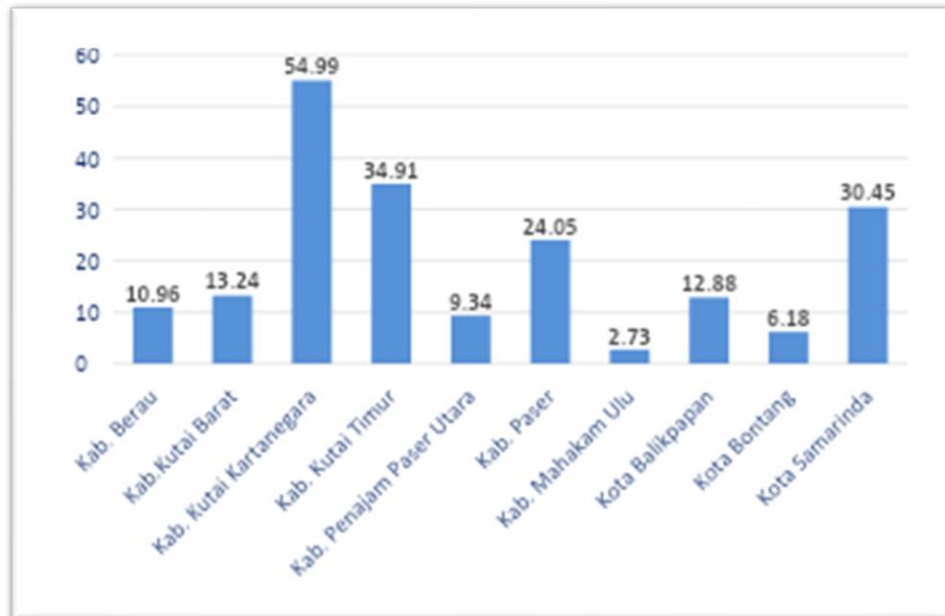


Gambar 3.27 Perbandingan Target dan Realisasi Angka Kemiskinan di Kota Bontang dalam Kerangka Perencanaan Jangka Menengah
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026



Gambar 3.28 Perbandingan Angka Kemiskinan di Kota Bontang dengan Kabupaten/Kota Sekitar, Provinsi Kalimantan Timur, dan Nasional Tahun 2025

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, 2025



Gambar 3.29. Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin di Kota Bontang dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2026

Berdasarkan data BPS, Angka Kemiskinan di Kota Bontang menunjukkan perbaikan setiap tahunnya meskipun agak lambat. Penurunan Angka Kemiskinan tersebut pun belum bisa memenuhi target-target yang ada di dalam dokumen RPJMD. Meskipun demikian Angka Kemiskinan Kota Bontang di tahun 2025 ternyata relatif jauh lebih baik dibandingkan daerah Kabupaten/Kota sekitar terkecuali Kota Balikpapan. Dengan Angka Kemiskinan seperti ini dapat digambarkan bahwa kesejahteraan penduduk Kota Bontang tidak hanya lebih baik dari Kabupaten/Kota sekitar, tetapi juga lebih baik dari rata-rata kesejahteraan penduduk Provinsi Kalimantan Timur dan penduduk seluruh Indonesia. Secara sederhana, kemiskinan di Kaltim masih terkonsentrasi di beberapa daerah besar, terutama Kutai Kartanegara, Kutai Timur, dan Samarinda. Upaya penanggulangan kemiskinan perlu lebih fokus di wilayah tersebut, sementara daerah dengan angka rendah tetap harus dijaga agar tidak meningkat.

Strategi Kota Bontang terkait pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan ternyata terbukti efektif meningkatkan kesejahteraan penduduk Kota Bontang. Sesuai dengan RPJMD Kota Bontang Tahun 2021-2026 strategi yang dilakukan terkait sasaran dan indikator ini adalah menguatkan sinkronisasi penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan jaminan dan rehabilitasi sosial masyarakat. Terkait strategi ini, Pemerintah Kota Bontang tidak hanya memberikan bantuan atau jaminan sosial kepada masyarakat tetapi juga mensinkronkan data-data kemiskinan dan kegiatan-kegiatan

pemberdayaan masyarakat yang ada sehingga capaiannya dalam penanggulangan kemiskinan menjadi lebih efektif.

Beberapa faktor yang dinilai mendukung penurunan angka kemiskinan di Kota Bontang di antaranya adalah:

1. Tingginya komitmen dan dukungan pemerintah dalam penanganan kemiskinan melalui pengurangan beban keluarga miskin, seperti; Kegiatan Pemberian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH), pemberian subsidi iuran jaminan kesehatan bagi pasien kelas 3, pemberian beasiswa pendidikan,
2. Peningkatan pendapatan dan pemberdayaan ekonomi bagi keluarga miskin melalui kolaborasi dengan dunia usaha, melalui pemberian bantuan permodalan melalui ZMart (bantuan permodalan dari BAZ), pemberian pelatihan bagi keluarga miskin, Program Bontang Kreatif (Kredit dengan bunga 0% bekerja sama dengan Bank Kaltimara), dan Program Stimulan RT yang mendorong pengembangan ekonomi dari tingkat RT khususnya bagi keluarga tidak mampu.
3. Pemberian Jaminan kesehatan untuk warga miskin ditanggung pemerintah;
4. Penataan kantong-kantong kemiskinan, terutama pada kawasan kumuh.

Meskipun Angka Kemiskinan Kota Bontang sudah cukup baik, program dan kegiatan pemberdayaan sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan penduduk tetap perlu dilanjutkan atau ditingkatkan lagi. Selain untuk memenuhi target-target yang ingin diwujudkan dalam RPJMD, pemberdayaan sosial memang seharusnya perlu dilakukan terus menerus selain karena masih ada masyarakat yang secara ekonomi rentan, program dan kegiatan tersebut merupakan investasi jangka panjang untuk mewujudkan penduduk Kota Bontang berkualitas dan sejahtera di masa yang akan datang.

3.2. CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN RPJMD 2025-2029

Pemerintah Kota Bontang telah menyusun RPJMD Tahun 2025-2029 dan tahun 2025 merupakan tahun transisi yang menjadi peralihan dari pelaksanaan RPJMD 2021-2026 menuju periode RPJMD 2025-2029. Kondisi ini menempatkan tahun 2025 sebagai fase strategis yang tidak hanya berfungsi sebagai tahun penuntasan target kinerja periode sebelumnya, tetapi juga sebagai fondasi awal bagi arah kebijakan dan sasaran pembangunan jangka menengah yang baru. Dalam konteks tersebut, terjadi penyesuaian indikator dan target kinerja daerah guna mengakomodasi dinamika kebijakan nasional, prioritas pembangunan provinsi, serta kebutuhan dan tantangan pembangunan Kota Bontang ke depan. Perubahan indikator dan target ini dilakukan melalui proses harmonisasi dan sinkronisasi perencanaan agar kesinambungan

pembangunan tetap terjaga, sekaligus memastikan bahwa agenda pembangunan periode 2025–2029 memiliki relevansi, daya ungkit, dan orientasi hasil yang lebih kuat.

Pembangunan Kota Bontang tahun 2025-2029 diarahkan untuk mewujudkan visi “Terwujudnya Kota Bontang sebagai Kota Industri dan Jasa yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan sebagai Daerah Mitra IKN”. Guna mewujudkan visi ini, maka pembangunan dilaksanakan melalui 5 misi pembangunan, yaitu:

1. Mewujudkan transformasi sosial menuju sumber daya manusia yang berdaya saing;
2. Mewujudkan transformasi ekonomi yang dinamis dan inklusif;
3. Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik;
4. Memperkuat infrastruktur kewilayahan yang kuat dan merata; dan
5. Meningkatkan pelestarian lingkungan hidup.

Selanjutnya visi dan misi RPJMD 2025-2029 dijabarkan dalam 4 tujuan dengan 7 indikator tujuan dan 14 sasaran dengan 22 indikator sasaran. Adapun hasil capaian RPJMD tahun 2025 dengan RPJMD 2025-2029 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.20 Capaian tujuan dan sasaran Kota Bontang Tahun 2025
berdasarkan target RPJMD 2025-2029**

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Baseline	2025			
					2024	Target	Realisasi	Capaian	Predikat Capaian
T1. Terwujudnya Kota Bontang yang Maju	IT1.1. LPE			Persen	-2,51	1,00-1,15	3,21	279,13%	Tercapai
	IT1.2. LPE non-Migas			Persen	9,4	5	6,33	126,60%	Tercapai
		S1. Meningkatnya Nilai Investasi	IS1. Pertumbuhan Nilai investasi	Persen	12,97	3	13,84	461,33%	Tercapai
		S2. Meningkatnya Produktivitas Sektor Ekonomi Lokal	IS2.1. Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Perikanan dan Perkebunan	Persen	1,21	1,36	1,21	88,97%	Tidak Tercapai
			IS2.2. Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	Persen	3,7	3,75	3,89	103,73%	Tercapai
			IS2.3. Kontribusi PDRB Sektor Jasa	Persen	4,47	4,51	4,67	103,55%	Tercapai
			IS2.4. Kontribusi	Persen	0,67	0,72	0,72	100,00%	Tercapai



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA BONTANG TAHUN 2025



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Baseline	2025			
					2024	Target	Realisasi	Capaian	Predikat Capaian
			PDRB Sektor Pariwisata						
		S3. Meningkatkan Produktivitas Sektor Industri Pengolahan	IS3. Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	Persen	-4,99	0,22	2,42	1100,00%	Tercapai
		S4. Meningkatkan kualitas infrastruktur yang maju dan merata	IS4. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	Persen	76,38	77	76,72*	99,66%	Tidak Tercapai
		S5. Terwujudnya Stabilitas harga	IS5. Indeks Perkembangan Harga	Indeks	N/A	1,1± 1	1,04	100,00%	Tercapai
		S6. Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat	IS6. Indeks Ketahanan Pangan	Persen	88,89	89,14	77,94**	-	(Tidak dapat dinilai)
		S7. Meningkatkan Daya Saing Daerah	IS7. Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,58	3,62	3,57	98,62%	Tidak Tercapai
T2. Terwujudnya Kota Bontang yang Sejahtera	IT2.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			Indeks	82,49	82,83 – 83,18	83,04	100,25%	Tercapai
		S8.Meningkatnya kualitas dan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan	IS8.1. Indeks Pendidikan	Indeks	0,75	0,76	0,731	96,18%	Tidak Tercapai
			IS8.2. Indeks Kesehatan	Indeks	0,85	0,85	0,852	100,24%	Tercapai
	IT2.2. Tingkat Kemiskinan			Persen	3,74	3,73-3,4	3,21	105,92%	Tercapai
		S9. Meningkatkan Perlindungan Sosial yang Adaptif	IS9. Persentase Keluarga Miskin Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	Persen	7,78	8,44	2,4	29,62%	Tidak Tercapai



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA BONTANG TAHUN 2025



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Baseline	2025			
					2024	Target	Realisasi	Capaian	Predikat Capaian
		S10.Meningkatnya Ketahanan Keluarga	IS10. Indeks pembangunan keluarga	Indeks	65.30 (2023)	74,8	77,3	103,34%	Tercapai
	IT2.3. Indeks Gini			Indeks	0,33	0,330 - 0,300	0,349	94,56%	Tidak Tercapai
		S11. Meningkatkan Daya Saing Tenaga Kerja	IS11. Tingkat Pengangguran terbuka	Persen	7,06	6,78-6,65	6,36	104,56%	Tercapai
T3. Terwujudnya Kota Bontang yang Berkelanjutan	IT3. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			Indeks	67,71	73,38	75,23	102,52%	Tercapai
		S12. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan kota	IS12.1. Penurunan Intensitas Emisi GRK	Persen	1,9	15,89	0,80	1.992,16 %	Tercapai
			IS12.2. Indeks Risiko Bencana	Indeks	116,57	115,57-114,57	85,25** (106,99)	107,08%	Tercapai
T4. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	IT4. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)			Indeks	81,49	82,32	85,79	104,22%	Tercapai
		S13. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	IS13.1. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Angka	70,04	70,9	71,42	100,73%	Tercapai
			IS13.2. Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	100,00%	Tercapai
		S14.Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Digitalisasi Pemerintahan yang Inovatif	IS14.1. Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	4,28	4,32	4,53	104,86%	Tercapai
			IS14.2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	90,66	90,85	92,8	102,15%	Tercapai
			IS14.3. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) / Indeks Pemerintahan Digital (Pemdi)	Indeks	3,39	3,59	3,76	104,74%	Tercapai

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, 2026

*data sementara

** perubahan metode perhitungan

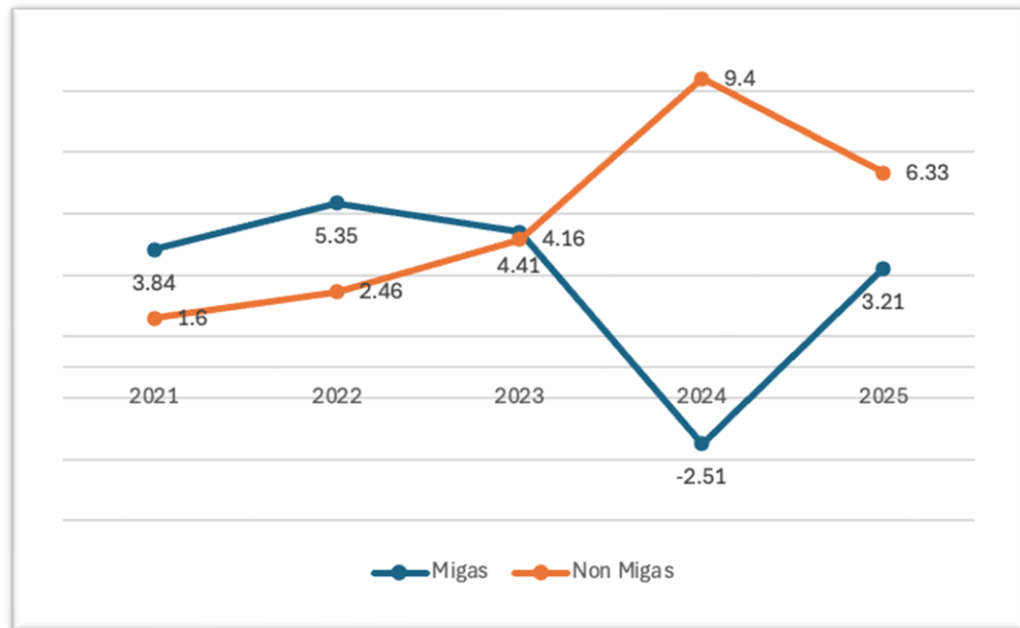
Secara umum, pada tahun 2025, Kota Bontang berhasil mencapai target tujuan dan sasaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berikut penjelasan tujuan, sasaran dan indikator sasaran pada tahun 2025 setelah mengalami perubahan RPJMD 2025-2029.

3.2.1. Tujuan 1 Terwujudnya Kota Bontang yang Maju

Tujuan 1 Terwujudnya Kota Bontang yang Maju berfokus pada penguatan ketahanan ekonomi Kota Bontang yang masih bertumpu pada kemajuan ekonomi yang progresif, yang ditandai dengan peningkatan aktivitas ekonomi, investasi dan diversifikasi berbagai sektor yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing ekonomi Kota Bontang dan terjadinya stabilitas harga barang. Kota Bontang yang maju juga diarahkan pada kualitas infrastruktur perkotaan yang modern, layak huni dan berkelanjutan.

Kota Bontang yang Maju ditandai dengan indikator laju pertumbuhan ekonomi dengan migas dan laju pertumbuhan ekonomi tanpa migas. Pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang mencerminkan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh perekonomian daerah. Indikator Laju Pertumbuhan ekonomi dengan migas untuk melihat pembangunan ekonomi Kota Bontang secara keseluruhan. Sedangkan indikator Laju Pertumbuhan Tanpa Migas mencerminkan kinerja ekonomi riil masyarakat Bontang secara mandiri, sekaligus menjadi kompas dalam upaya diversifikasi ekonomi agar kota ini tidak lagi mengalami kerentanan akibat menipisnya cadangan gas alam.

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) tahun 2025 mencapai 3,21 persen, berbalik dari kontraksi -2,51 persen pada 2024. Hal yang berbeda terjadi pada LPE non migas pada tahun 2025, yang mengalami kontraksi menjadi 6,33 persen. Angka ini lebih rendah 3,07 persen dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 9,4 persen. Meskipun LPE non migas mengalami kontraksi di tahun 2025, tetapi kondisi ini mencerminkan pemulihan ekonomi yang signifikan dengan basis nonmigas yang cukup dinamis, meskipun struktur ekonomi masih belum kuat yang dipengaruhi industri besar. Pemulihan tersebut juga ditopang oleh upaya Pemerintah Kota dalam menjaga iklim investasi dan stabilitas harga melalui berbagai program fasilitasi investasi dan pengendalian inflasi daerah. Perubahan LPE dengan migas dan LPE non migas terjadi karena adanya peningkatan produksi barang dan jasa di sektor migas. Pada sektor non migas, nilai produksi barang dan jasa mengalami peningkatan, akan tetapi karena sektor industri pengolahan migas menjadi penyumbang lebih dari 75 persen PDRB, maka peningkatan produksi di sektor non migas, seolah terjadi penurunan.



Gambar 3.30 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi dengan Migas dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Non Migas Kota Bontang Tahun 2021-2025

Sumber: Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah, 2026

3.2.1.1 Sasaran 1 Meningkatnya Nilai Investasi

Sasaran 1 Meningkatnya Nilai Investasi merupakan sasaran pembangunan yang dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan investasi di Kota Bontang untuk mewujudkan Kota Bontang yang Maju. Pertumbuhan investasi menggambarkan kecepatan penambahan modal baru (baik modal asing/PMA maupun domestik/PMDN) yang masuk ke suatu wilayah dalam periode waktu tertentu. Pertumbuhan nilai investasi menjadi lokomotif pembangunan yang diharapkan dapat menjadi pemicu dalam pembangunan ekonomi dan akan berdampak terhadap nilai PDRB dan pembukaan lapangan kerja baru.

Salah satu penopang tertinggi dalam investasi adalah dari industri pengolahan yang mengambil porsi 85,96 persen dari total investasi di Kota Bontang. Kinerja ini menunjukkan bahwa Kota Bontang masih menjadi lokasi strategis bagi investor, terutama pada sektor industri eksisting seperti industri kimia dasar, barang kimia, dan farmasi. Di sisi lain, dominasi investasi pada sektor kimia juga menunjukkan bahwa penguatan investasi di sektor lain masih perlu terus didorong untuk memperbaiki struktur ekonomi daerah.

3.2.1.1.1 Indikator Pertumbuhan Nilai Investasi

Pertumbuhan nilai investasi pada tahun 2025 mencapai sekitar 13,66 meningkat 0,69 persen dibanding tahun 2024 persen yang tumbuh 12,97 persen. Peningkatan ini menjadi salah satu penanda terjadinya pemulihan ekonomi di Kota Bontang, yang sebelumnya berkontraksi cukup dalam. Capaian tahun 2025 ini jauh melampaui dari target yang ditetapkan yaitu 3 persen di dalam RPJMD 2025-2029. Perkembangan pertumbuhan investasi di Kota Bontang masih fluktuatif. Hal ini berkaitan dengan kondisi Kota Bontang sebagai industri

Tahun 2024-2025, Pertumbuhan investasi lebih konsisten ditopang oleh dimulainya persiapan hilirisasi kluster industri baru, seperti rencana pembangunan pabrik amoniak lanjutan, industri *Soda Ash*, dan pengisian utilitas di Kawasan Peruntukan Industri (KPI) Bontang Lestari.

Tabel 3.21. Perkembangan Investasi Kota Bontang Tahun 2021-2025

URAIAN	2021	2022	2023	2024	2025
PMDN	897	1,169	2,248	2,571	3,027
PMA	498	185	151	139	54
PMDN+PMA	1,395	1,876	2,399	2,711	3,081
PERTUMBUHAN	-66.39%	34.54%	27.88%	12.97%	13.66%

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, 2026

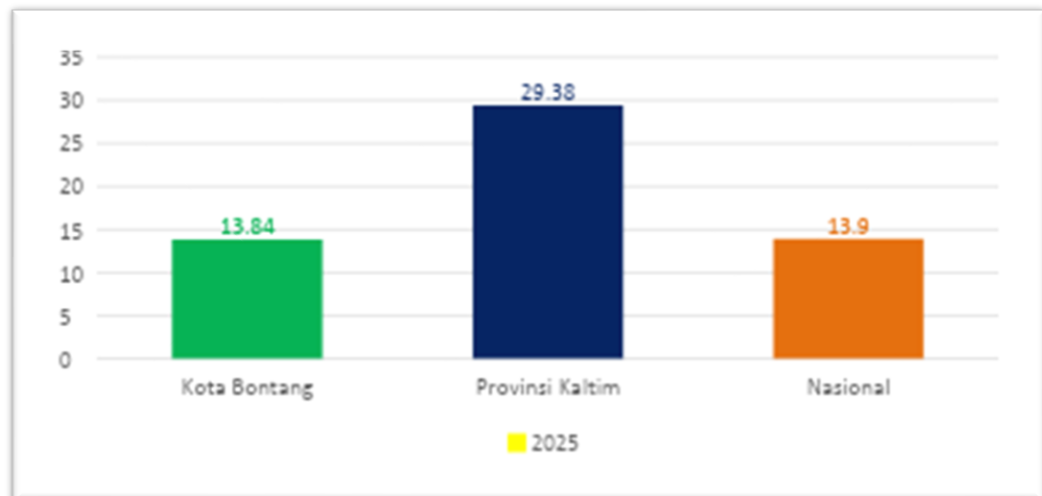
Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi mengalami tekanan sampai -66,39 persen. Hal ini sebagai dampak dari Pandemi *Covid 19* yang memasuki tahap akhir. Selanjutnya tahun 2022-2023 merupakan tahap pemulihan ekonomi dari dampak Pandemi *Covid 19*. Hal ini berdampak terhadap kepercayaan investor untuk melakukan investasi kembali. Sedangkan tahun 2024-2025 merupakan fase stabilisasi dan ekspansi dimana pertumbuhan investasi relatif stabil.

Indikator yang digunakan adalah Pertumbuhan Nilai Investasi dengan satuan persen. Target yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah 3, sedangkan realisasi yang dicapai mencapai 13,84, sehingga dihasilkan capaian sebesar 461,33%. Hal ini menunjukkan bahwa:

1. Target terlampaui sangat signifikan: realisasi jauh di atas target yang ditetapkan.
2. Kinerja investasi menunjukkan tren positif: adanya peningkatan yang melampaui ekspektasi menandakan keberhasilan strategi dan kebijakan

yang diterapkan.

3. Rata-rata capaian juga tercatat sebesar 461,33%, memperkuat gambaran bahwa indikator ini memberikan kontribusi besar terhadap pencapaian kinerja keseluruhan.



Gambar 3.31 Perbandingan Pertumbuhan Nilai Investasi Tahun 2025

Sumber : Badan Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang, 2025

Capaian Kota Bontang tahun 2025 menunjukkan posisi yang kompetitif dalam konteks nasional, meskipun masih di bawah rata-rata provinsi. Hal ini menandakan bahwa iklim investasi di Kota Bontang cukup kondusif dan berpotensi terus ditingkatkan melalui kebijakan daerah yang lebih agresif dalam menarik investor.

Peningkatan pertumbuhan investasi di Kota Bontang disebabkan oleh beberapa faktor, seperti:

1. Iklim investasi yang sudah terbentuk di Kota Bontang dan menjadi ciri khas daerah, khususnya pada industri kimia dasar, barang kimia, dan farmasi;
2. Ketersediaan kawasan industri yang memudahkan para investor dalam penyertaan modal;
3. Kemudahan perizinan melalui Perizinan Digital;
4. Iklim usaha yang kondusif;

3.2.1.2 Sasaran 2 Meningkatnya Produktivitas Sektor Ekonomi Lokal

Sasaran 2 Meningkatnya Produktivitas Sektor Ekonomi Lokal merupakan sasaran yang diarahkan untuk mewujudkan Tujuan 1 dan Misi 2 “Mewujudkan Transformasi Ekonomi yang Dinamis dan Inklusif”. Sasaran ini menjadi arah pembangunan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal

dengan mengurangi ketergantungan pada sektor migas. Meningkatkan produktivitas sektor ekonomi lokal diharapkan akan menumbuhkan diversifikasi ekonomi di Kota Bontang.

Untuk menggambarkan meningkatnya produktivitas sektor ekonomi lokal, maka digunakan 3 indikator, yaitu: 1) kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Perikanan, dan Perkebunan; 2) kontribusi PDRB sektor perdagangan; dan 3) kontribusi PDRB sektor jasa. Ketiga lapangan usaha PDRB tersebut merupakan lapangan usaha yang menggambarkan perkembangan perekonomian sektor ekonomi lokal di Kota Bontang.

Secara umum produktivitas sektor ekonomi lokal mengalami peningkatan, kecuali pada sektor pertanian, perikanan dan perkebunan. Di samping itu, sektor perdagangan dan sektor jasa menunjukkan potensi sebagai penggerak utama sektor ekonomi lokal. Pada sektor perdagangan, jasa, dan pariwisata yang berhasil melampaui target. Sebaliknya, kontribusi sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan tidak mengalami peningkatan signifikan dibanding baseline, sehingga sasaran penguatan basis ekonomi lokal berbasis pangan belum tercapai. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan ekonomi lokal Kota Bontang memiliki potensi besar untuk tumbuh, ditengah pertumbuhan ekonomi Bontang yang didominasi oleh sektor industri pengolahan.

3.2.1.2.1 Indikator Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Perikanan dan Perkebunan

Adapun capaian kinerja Pemerintah Kota Bontang di tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan yang merujuk pada RPJMD 2025-2029 untuk Indikator Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Perikanan dan Perkebunan menunjukkan capaian 88,97 dari target yang ditetapkan di dalam RPJMD. Kontribusi Sektor Pertanian, Perikanan dan Perkebunan tahun 2025 berdasarkan data BPS mencapai 1,21 persen dari total PDRB (ADHK) atau sebesar Rp 498,74 miliar dari total PDRB sebesar Rp 42.899,73 miliar. Angka ini lebih kecil dibandingkan target yang ditetapkan 1,26 persen pada RPJMD maupun Perjanjian Kinerja. Pada tahun 2024, PDRB Sektor Pertanian, Perikanan dan Perkebunan menyumbang 1,21 persen dari total PDRB atau sebesar Rp 497,44 miliar dari total PDRB sebesar Rp 41.563,91 miliar.. Jika dibandingkan kontribusinya terhadap PDRB pada tahun 2024 dan 2025 menunjukkan angka yang sama, akan tetapi dengan nilai yang berbeda karena PDRB mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian, perikanan dan perkebunan tetap mengalami peningkatan produksi tetapi tidak signifikan, sehingga kontribusinya terhadap total PDRB sama.

Stagnasi yang terjadi pada lapangan usaha pertanian, perikanan dan perkebunan disebabkan oleh skala produksi lokal yang sangat terbatas menghadapi dominasi masif sektor industri pengolahan (seperti pupuk dan petrokimia) yang menguasai lebih dari 75% perekonomian Kota Bontang. Keterbatasan lahan pertanian yang hanya tersisa 37 hektar lahan pertanian produktif, menyebabkan Kota Bontang harus mengandalkan pasokan pangan dari luar. Selain itu pertumbuhan lapangan industri pengolahan dan lapangan usaha konstruksi mengalami pergerakan yang lebih masif dibandingkan lapangan usaha perikanan, pertanian dan perkebunan.

Guna meningkatkan kontribusi PDRB sektor perikanan, pertanian dan perkebunan di tahun-tahun mendatang, diperlukan beberapa upaya yang antara lain:

- 1) Peningkatan produktivitas melalui teknologi dan inovasi di sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan;
- 2) Diversifikasi komoditas agar tidak bergantung pada produk utama semata;
- 3) Transformasi ke pertanian urban modern, mengingat karakteristik perkotaan yang hanya memiliki keterbatasan lahan pertanian;
- 4) Hilirisasi produk hasil perikanan dan kelautan yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan;
- 5) Modernisasi armada nelayan, sehingga mampu menjangkau laut yang lebih luas dan meningkatkan produksi perikanannya.
- 6) Penguatan akses pasar dengan memperluas jaringan distribusi dan meningkatkan daya saing produk lokal; dan
- 7) Dukungan kebijakan berupa insentif dan investasi yang mendorong pengembangan sektor ini.

3.2.1.2.2 Indikator Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan

Kontribusi PDRB sektor perdagangan pada tahun 2025 tercapai sebesar 103,73 persen dari target yang ditetapkan pada RPJMD 2025-2029. Pada tahun 2025 kontribusi PDRB sektor perdagangan mencapai 3,89 persen dari total PDRB (ADHK) atau sebesar Rp1.587,28 miliar dari total PDRB Rp 42.899,33 miliar. Angka ini meningkat 0,19 persen dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 3,70 persen atau sebesar Rp1.483,68 miliar dari total PDRB Rp 41.563,92 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan salah satu pilar penyokong non-migas terpenting. Peningkatan ini didorong oleh normalnya pasokan barang, ekspansi retail modern, dan aktivitas libur hari besar keagamaan nasional.

Sektor perdagangan memegang peranan yang jauh lebih vital dibanding persentase PDRB-nya yang kecil karena karakteristik "ekonomi kerakyatan"

yang dimilikinya. Sektor perdagangan menjadi katup penyelamat tenaga kerja lokal yang banyak bergerak di pasar kerja informal dan retail. Selain itu sektor ini mengonversi pendapatan para pekerja industri besar di Bontang menjadi konsumsi domestik nyata. Perputaran uang dari transaksi ritel, pasar tradisional, dan agen grosir menjaga likuiditas atau peredaran uang di tingkat akar rumput tetap hidup. Sektor perdagangan juga menjadi indikator stabilitas harga. Perdagangan yang sehat memastikan harga pasokan bahan pokok dari luar daerah tetap terjangkau oleh kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Beberapa hal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bontang untuk peningkatan kinerja indikator Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan antara lain:

1) Digitalisasi UMKM dan perdagangan

Pemerintah telah mendorong pembayaran non tunai dengan menggunakan QRIS dan mendorong UMKM masuk dalam ekosistem *e-commerce* seperti [Borneos.co](https://borneos.co). Platform ini merupakan sebuah *startup* digital lokapasar (*marketplace*) lokal yang didirikan oleh pemuda kreatif Bontang. Aplikasi ini berfokus membantu digitalisasi produk-produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal.

2) Meningkatkan konektivitas dan manajemen logistik.

Pemerintah Kota Bontang telah bekerja sama dengan beberapa daerah di Sulawesi dan daerah sekitar untuk meningkatkan rantai pasok bagi kebutuhan pangan kota.

3) Pemberdayaan ekonomi lokal pada retail modern.

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan mengenai pembatasan pasar waralaba di Kota Bontang dan kebijakan yang mewajibkan jaringan toko swalayan/retail modern nasional di Bontang untuk mengalokasikan ruang rak khusus (*shelving*) bagi produk olahan makanan atau kerajinan tangan hasil perdagangan mikro warga Bontang.

3.2.1.2.3 Indikator Kontribusi PDRB Sektor Jasa

PDRB sektor jasa terdiri dari Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi, Lapangan Usaha Jasa Perusahaan, Lapangan Usaha Jasa Pendidikan, Lapangan Usaha Jasa Kesehatan, dan Kegiatan Sosial Wajib, dan Lapangan Usaha Jasa Lainnya. Sektor jasa memegang peran vital sebagai mesin pertumbuhan baru (*new growth engine*) dalam proses diversifikasi ekonomi daerah.

Secara struktural, perekonomian Bontang memang masih didominasi oleh industri pengolahan berat. Namun, dalam hal kecepatan tumbuh (laju pertumbuhan), kelompok sektor jasa mencatatkan performa yang sangat progresif. Itu sebabnya, sektor jasa menjadi salah satu kontributor utama yang

menjaga laju pertumbuhan ekonomi non-migas Bontang tetap stabil di atas 6%. Sektor ini tumbuh subur mengiringi tingginya tingkat konsumsi dan pendapatan per kapita masyarakat Bontang. Perkembangan sektor jasa dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.22. Perkembangan PDRB Sektor Jasa Tahun 2024-2025

Lapangan usaha sektor jasa	2024		2025	
	Nilai (miliar rupiah)	Pertumbuhan	Nilai (miliar rupiah)	Pertumbuhan
Jasa Keuangan dan asuransi	687.69	1.3	690.48	-2.04
Jasa perusahaan	418.63	7.34	476.37	9.17
Jasa pendidikan	905.31	4.21	973.42	5.01
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	720.18	3.76	791.00	7.06
jasa lainnya	329.40	9.98	374.15	9.75
Jumlah	3,061.21	5,32	3,305.42	22,12
PDRB ADHB	68,418.31	-	70,789.05	-
Kontribusi sektor jasa terhadap PDRB	4.47	-	4.67	-

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026

Capaian kinerja untuk indikator Kontribusi Sektor Jasa menunjukkan ketercapaian 103,73 persen dari target yang ditetapkan di RPJMD/PK sebesar 4,51 persen. Jika dilihat pada tabel di atas, maka pada tahun 2025 menunjukan pertumbuhan yang sangat signifikan. Hal ini didorong oleh beberapa faktor yang mendorong peningkatan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Tingginya Daya Beli Masyarakat (*High-Income Pockets*): Keberadaan korporasi skala besar di Bontang menciptakan kelompok pekerja formal dengan tingkat penghasilan stabil. Kelompok ini menjadi pasar potensial (konsumen utama) bagi industri jasa premium, seperti jasa pendidikan swasta, klinik kesehatan, kafe, perhotelan, dan jasa hiburan.
- 2) Kemudahan Izin Usaha Berbasis Risiko (OSS): Pemkot Bontang sukses mengimplementasikan kemudahan izin operasional di mana sebagian besar usaha jasa masuk dalam kategori risiko rendah. Hal ini memicu ledakan jumlah pelaku usaha baru, khususnya di sektor ekonomi kreatif, kuliner, dan jasa kemitraan.
- 3) Peningkatan Belanja Publik APBD: Alokasi anggaran belanja daerah Pemkot Bontang yang menyentuh angka triliunan rupiah ikut mengalir ke sektor jasa, terutama melalui pengadaan jasa konstruksi, jasa konsultasi, serta pembiayaan program jaminan kesehatan gratis untuk warga rentan.

3.2.1.2.4 Indikator Kontribusi PDRB Sektor Pariwisata

Sektor pariwisata di Kota Bontang memegang peran strategis sebagai lokomotif diversifikasi ekonomi pasca-migas. Sektor ini menciptakan dampak berantai (*multiplier effect*) yang langsung menyentuh ekonomi kerakyatan, sekaligus memperkecil kesenjangan (indeks Gini) yang selama ini didominasi industri padat modal.

Aktivitas pariwisata di Bontang tidak berdiri sendiri, melainkan ditopang oleh ekosistem rantai pasok dari beberapa lapangan usaha PDRB berikut:

- 1) **Penyediaan Akomodasi (Perhotelan & Homestay):** Memfasilitasi tempat tinggal bagi wisatawan maupun pekerja luar daerah. Investasi hotel kini didorong sebagai gerbang ekonomi baru di Bontang;
- 2) **Penyediaan Makan Minum (Kuliner/UMKM):** Menjamurnya kafe modern, restoran *seafood* di pesisir Bontang Kuala, serta sentra oleh-oleh produk olahan laut;
- 3) **Transportasi dan Jasa Angkutan Laut:** Jasa sewa kapal tradisional menuju destinasi pulau, serta transportasi darat bagi wisatawan; dan
- 4) **Jasa Hiburan, Kesenian, dan Rekreasi:** Pengelolaan spot foto, wisata mangrove, snorkeling, hingga pergelaran budaya tahunan (*Bontang City Carnival*).

Tabel 3.23. Perkembangan PDRB sektor Pariwisata di Kota Bontang Tahun 2024-2025.

Lapangan Usaha Sektor Pariwisata	2024		2025	
	Nilai (miliar rupiah)	Pertumbuhan	Nilai (miliar rupiah)	Pertumbuhan
Transportasi dan pergudangan	1,370.51	4.18	1,493.65	5.56
Penyediaan akomodasi dan makan minum	457.11	6.76	511.87	9.93
Jasa lainnya	329.40	9.98	374.15	9.75
Jumlah	2,157.02	6.97	2,379.67	8.41
PDRB ADHB	68,418.31	-	70,789.05	-
Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	3.15	-	3.36	-

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2026

Berdasarkan data di atas, maka dapat diketahui bahwa capaian kinerja indikator kontribusi sektor pariwisata tercapai sebesar 466,67 persen dari target sebesar 0,72 persen pada RPJMD dan realisasi sebesar 3,36 persen di tahun

2025. Sektor pariwisata juga tumbuh 8,41 persen di tahun 2025, lebih tinggi 1,44 persen dibandingkan tahun 2024.

Keberhasilan pertumbuhan ekonomi di sektor pariwisata di Kota Bontang ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

- 1) Keunikan Wisata Bahari & Ekowisata: Daya tarik alam yang kuat pada destinasi unggulan seperti Pulau Beras Basah, Pulau Segajah, hingga Bontang Mangrove Park (BMP) yang tidak dimiliki kota industri lain.
- 2) Komitmen Regulasi dan Anggaran Daerah: Masuknya sektor pariwisata sebagai prioritas pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta kesiapan dokumen *Rencana Induk Pengelolaan Objek Wisata (RIPOW)*.
- 3) Kedekatan dengan Kawasan Industri: Banyaknya ekspatriat, tamu korporasi, serta pekerja industri raksasa lokal yang memiliki daya beli tinggi mencari alternatif hiburan akhir pekan di destinasi wisata lokal.

Agar pariwisata dapat berkontribusi optimal sebagai substitusi ekonomi industri, Pemerintah Kota Bontang perlu melakukan langkah konkret berikut:

- 1) **Pemberdayaan Masyarakat Lokal berbasis *Homestay***: Melibatkan warga pesisir secara langsung melalui pelatihan pengelolaan *homestay* standard, pemandu wisata bersertifikat, dan pengelolaan kuliner higienis agar uang wisata berputar langsung di masyarakat;
- 2) **Penguatan Infrastruktur dan Fasilitas Sanitasi**: Memperbaiki fasilitas dermaga, penyediaan air bersih, toilet standar pariwisata, serta fasilitas pengelolaan sampah di destinasi lepas pantai seperti Pulau Beras Basah demi menjaga keberlanjutan lingkungan;
- 3) **Legalisasi dan Standardisasi Aset Wisata**: Mempercepat proses penetapan status legal, inventarisasi mendalam, serta standarisasi keamanan (*safety tools*) pada puluhan aset wisata Bontang yang saat ini persentase ketetapan resminya masih rendah; dan
- 4) **Pemasaran Digital & Kalender Event Terpadu**: Mengintegrasikan sistem informasi promosi wisata Bontang secara digital serta memperbanyak penyelenggaraan festival/event ekonomi kreatif nasional guna meningkatkan durasi tinggal (*length of stay*) pelancong di Kota Taman.

3.2.1.3 Sasaran 3 Meningkatnya Produktivitas Sektor Industri Pengolahan

Sasaran 3 ini, merupakan sasaran pembangunan yang mengarahkan Kota Bontang sebagai kota industri. Industri pengolahan—khususnya subsektor manufaktur kimia, petrokimia, dan pengolahan gas cair (LNG)—bukan lagi sekadar sektor unggulan, melainkan jantung dan lokomotif utama yang menggerakkan seluruh urat nadi pembangunan Kota Bontang selama lima

tahun terakhir. Industri pengolahan merupakan penggerak utama perekonomian Kota Bontang yang berkontribusi rata-rata sekitar 75-78 persen terhadap total PDRB setiap tahunnya. Artinya, hampir tiga perempat dari seluruh nilai tambah ekonomi yang tercipta di kota ini berasal dari aktivitas industrialisasi raksasa (seperti PT Pupuk Kaltim dan PT Badak NGL). Sektor ini menjadi magnet investasi terbesar (baik PMA maupun PMDN) yang menyuntikkan likuiditas dan dana segar secara terus-menerus ke dalam sirkulasi ekonomi daerah.

Dominasi industri pengolahan skala besar ini memberikan beberapa keuntungan komparatif yang tidak dimiliki oleh kabupaten/kota lain di Kalimantan Timur, antara lain sebagai pendongkrak PDRB per kapita tertinggi. Hal ini menempatkan masyarakat Bontang dalam klaster wilayah dengan produktivitas ekonomi per kepala yang makmur. Pajak, retribusi dan dana bagi hasil dari industri pengolahan juga memberikan kontribusi terhadap fiskal daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan daerah.

3.2.1.3.1 Indikator Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan

Indikator yang digunakan untuk menunjukkan keberhasilan Sasaran 3 adalah Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan. Industri pengolahan merupakan pendongkrak PDRB per kapita terbesar.

Pertumbuhan sektor industri pengolahan pada tahun 2025 tercatat sebesar 2,42%, mengalami perbaikan signifikan dibandingkan capaian tahun 2024 yang mengalami kontraksi sebesar -4,99%. Dengan capaian tersebut maka kinerja pertumbuhan industri pengolahan tahun 2025 tercapai sebesar 1100 persen dari target yang ditetapkan di dalam RPJMD. Peningkatan ini menunjukkan kembalinya aktivitas industri pengolahan ke jalur pertumbuhan setelah periode pelemahan di tahun sebelumnya. Namun, mengingat titik awalnya merupakan kontraksi yang cukup dalam, lonjakan capaian persentase lebih tepat dibaca sebagai proses normalisasi kinerja ketimbang peningkatan kinerja yang luar biasa. Pemulihan sektor ini tetap penting karena industri pengolahan merupakan motor utama perekonomian Kota Bontang.

Tabel 3.24. Perkembangan Industri Pengolahan Kota Bontang
Tahun 2024-2025

Lapangan Usaha	2024		2025	
	Nilai (miliar rupiah)	Pertumbuhan	Nilai (miliar rupiah)	Pertumbuhan
Industri pengolahan	52.226.62	- 4,99	53.299.76	2,42
PDRB ADHB	68,418.31	-	70,789.05	-

Kontribusi Sektor Industri pengolahan terhadap PDRB	76.33	-	75.29	-
---	-------	---	-------	---

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2026

Beberapa faktor yang mendorong terjadinya peningkatan pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan antara lain adalah karena adanya lonjakan volume produksi komoditas berbasis gas dan kimia di Bontang beserta kembali beroperasinya pabrik pengolahan amonia, pupuk urea dan pengolahan LNG yang beroperasi dengan kapasitas penuh (*rebound effect*) sehingga volume output fisik siap ekspor melonjak drastis. Selain itu pada tahun 2025, sektor industri pengolahan menjadi magnet utama penyerapan modal. Industri pengolahan menyerap andil terbesar, yaitu 85,96 persen dari total Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang masuk ke Bontang. Hal ini berhasil mendorong total realisasi investasi kota menembus Rp3,08 triliun (melampaui target 123,23%). Aliran dana segar ini mempercepat realisasi ekspansi proyek pabrik-pabrik baru (seperti draf proyek strategis hilirisasi amoniak dan *Soda Ash*) yang langsung tercatat sebagai penambah nilai PDRB sektoral.

3.2.1.4 Sasaran 4 Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Yang Maju Dan Merata

Sasaran 4 merupakan penjabaran dari perwujudan Kota Bontang yang Maju. Kota Bontang yang Maju, tidak hanya digambarkan dengan perekonomiannya yang maju, tetapi juga memiliki kualitas infrastruktur yang maju dan merata. Kota Bontang yang maju ditandai dengan fasilitas publik yang dibangun memiliki standar modern, tangguh, dan berkelanjutan. Sedangkan infrastruktur yang merata artinya Bontang memiliki fasilitas yang tidak hanya berpusat di satu titik (seperti pusat kota atau area industri besar), melainkan menjangkau hingga ke daerah pelosok atau pinggiran.

3.2.1.4.1 Indikator Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)

Untuk menggambarkan kualitas layanan infrastruktur maka digunakan indikator Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI). IKLI terdiri dari 5 parameter, yaitu infrastruktur pekerjaan umum, kinerja pengelolaan sampah, infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman, infrastruktur perhubungan, dan pelayanan kebakaran dan penyelamatan.

Tabel 3.25. Capaian Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Kota Bontang Tahun 2021-2025

No	Parameter	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	24.36	24.40	100,16%
2.	Indeks Kinerja Pengelolaan	14.04	14.45	100,35%

No	Parameter	Target	Realisasi	Capaian
	Sampah			
3.	Indeks Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	12.55	12,56	100,08%
4.	Indeks Infrastruktur Perhubungan	11.05	11.05	100%
5.	Indeks Pelayanan Kebakaran dan Penyelamatan	15.00	15.00	100%
	IKLI	77.00	77.47	100,62

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, 2026

Adapun kinerja IKLI tahun 2025 tercapai sebesar 100,62 persen dari target. IKLI tercatat sebesar 77,47 persen atau lebih tinggi 0,47 persen dari target 2025 yang ditetapkan sebesar 77,00 persen di RPJMD. Sedangkan baseline IKLI tahun 2024 tercatat sebesar Rp 76,38 persen.

Hal ini menunjukkan bahwa kualitas layanan infrastruktur secara umum mengalami peningkatan yang sangat baik. Berbagai upaya perbaikan terus dilakukan, terutama pada peningkatan kualitas pengelolaan sampah serta infrastruktur perkotaan dan infrastruktur pada kawasan permukiman. Namun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan seperti kondisi sebagian ruas jalan yang belum optimal dan kawasan yang kerap terdampak banjir, sehingga sasaran ini masih memerlukan percepatan perbaikan untuk menopang daya saing.

Faktor pendorong capaian antara lain peningkatan pengelolaan sampah, perbaikan infrastruktur perkotaan, serta penguatan layanan permukiman. Kendala utama masih terlihat pada kondisi sebagian ruas jalan yang belum optimal dan kawasan yang kerap terdampak banjir.

Adapun implikasi ke depan yang harus dilakukan adalah perlu percepatan perbaikan infrastruktur jalan dan sistem drainase untuk mengurangi risiko banjir. Penguatan pengelolaan lingkungan perkotaan dan permukiman harus terus dilakukan agar kualitas layanan infrastruktur semakin mendekati atau melampaui target. Monitoring capaian tahunan penting dilakukan untuk memastikan perbaikan kinerja konsisten dan mendukung daya saing daerah.

3.2.1.5 Sasaran 5 Terwujudnya Stabilitas Harga

Sasaran pembangunan ini digunakan sebagai penjabaran dari Tujuan 1 Kota Bontang yang Maju. Dimana, selain perekonomiannya yang tumbuh positif dibarengi dengan penyediaan layanan infrastruktur yang berkualitas, ditandai pula dengan stabilitas harga yang terjaga. Stabilitas harga adalah kondisi di mana pergerakan harga barang dan jasa di pasar berlangsung secara

terkendali, tidak mengalami lonjakan drastis (inflasi tinggi), dan tidak merosot tajam (deflasi) dalam jangka waktu tertentu.

Stabilitas harga berperan sebagai pondasi utama bagi keberlanjutan pembangunan daerah. Stabilitas harga menjadi alat untuk daya beli masyarakat dan menekan kemiskinan. Selain itu stabilitas harga juga berperan dalam memberikan kepastian iklim investasi serta menjaga stabilitas fiskal daerah. Selain itu, stabilitas harga juga memberikan stimulus positif bagi produsen dan pedagang untuk memperluas volume usahanya karena adanya jaminan keuntungan yang rasional.

3.2.1.5.1 Indikator Indeks Perkembangan Harga

Indikator yang digunakan untuk mengukur stabilitas harga di Kota Bontang adalah Indeks Perkembangan Harga (IPH). Pada tahun 2025 IPH tercatat sebesar 1,04 persen dan berada dalam rentang target yang ditetapkan sebesar $1,1 \pm 1$ persen. Dengan demikian, perkembangan harga di Kota Bontang masih berada dalam rentang sasaran yang ditetapkan, sehingga menunjukkan bahwa inflasi daerah relatif terkendali.

Keberhasilan menjaga stabilitas harga ini ditopang oleh Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Warung Tekan Inflasi (Wartekin) sebagai upaya Pemerintah Kota untuk menjaga stabilitas harga pangan bagi masyarakat. Kondisi tersebut membantu mempertahankan daya beli rumah tangga di tengah proses pemulihan ekonomi dan berkontribusi menjaga konsistensi pertumbuhan ekonomi daerah dari sisi konsumsi.

3.2.1.6 Sasaran 6 Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat

Sasaran pembangunan ini merupakan penjabaran dari Tujuan Terwujudnya Kota Bontang yang Maju. Kota Bontang yang maju juga ditandai dari ketahanan pangannya. Sebagaimana diketahui bahwa Bontang memiliki keterbatasan dalam penyediaan bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Maka untuk menjaga ketahanan pangan kota, perlu dilakukan upaya agar ketersediaan pangan tetap terjaga. Ketahanan pangan ini juga menjadi alat untuk menjaga stabilitas ekonomi dan menekan inflasi daerah. Selain itu ketahanan pangan juga menjadi pondasi untuk menciptakan kualitas SDM yang berkualitas.

3.2.1.6.1 Indikator Indeks Ketahanan Pangan

Meningkatnya ketahanan pangan, ditandai dengan indikator Indeks Ketahanan Pangan (IKP). Indeks Ketahanan Pangan (IKP) merupakan indikator makro yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi tingkat

ketahanan pangan suatu wilayah. IKP disusun berdasarkan skor komposit dari berbagai indikator turunan yang diadopsi dari konsep ketahanan pangan global. Alat ukur ini berfungsi untuk memetakan wilayah yang tangguh pangan serta mengidentifikasi wilayah yang rentan terhadap rawan pangan.

Skor akhir IKP disajikan dalam rentang nilai 0 hingga 100. Semakin tinggi nilai IKP suatu kota (seperti Kota Bontang), artinya ketahanan pangan di wilayah tersebut semakin kokoh. Bagi pemerintah daerah, data IKP digunakan sebagai kompas kebijakan untuk menentukan kelurahan mana yang perlu diberikan bantuan pangan darurat, subsidi transportasi logistik, atau program pertanian perkotaan (*urban farming*).

Indeks Ketahanan Pangan Kota Bontang tahun 2025 adalah 77,94. Berdasarkan klasifikasi Badan Pangan Nasional capaian ini menempatkan Kota Bontang ke dalam Kelompok Prioritas 6, yang berarti wilayah ini berstatus Sangat Tahan pangan. Nilai ini menunjukkan bahwa Kota Bontang memiliki sistem ketahanan pangan, aksesibilitas ekonomi masyarakat, serta pemanfaatan penyerapan gizi yang sangat kokoh dan stabil dibandingkan dengan rata-rata wilayah lainnya di Indonesia.

Berbeda dengan tahun 2024, skor IKP Bontang tercatat lebih tinggi 3,48 poin atau sebesar 81,42. Capaian ini menempatkan Bontang ke dalam kelompok Prioritas 6 yang menunjukan Bontang berstatus Sangat Tahan Pangan.

Penurunan skor IKP di tahun 2025 disebabkan oleh perubahan komposit dan bobot perhitungan yang semula menggunakan 9 indikator (2024) menjadi 12 indikator (2025). Bontang yang semula memiliki performa bagus pada urutan 20 nasional di tahun 2024, turun menjadi urutan ke-97 nasional di tahun 2025. Untuk itu Pemerintah Kota Bontang perlu bersungguh-sungguh meningkatkan kinerja ketahanan pangannya di tahun yang akan datang.

3.2.1.7 Sasaran 7 Meningkatnya Daya Saing Daerah

Kota Bontang yang maju diwujudkan salah satunya digambarkan dengan kota yang memiliki daya saing daerah, baik pada skala regional, maupun nasional. IDSD menunjukkan tingkat produktivitas, kemajuan, kemandirian, serta kemampuan suatu daerah dalam memanfaatkan seluruh potensi yang dimilikinya untuk mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan. IDSD juga menunjukkan seberapa efisien pemerintah daerah mengonversi input (modal, anggaran APBD, tenaga kerja) menjadi output pembangunan yang bernilai tambah tinggi. Wilayah dengan skor IDSD tinggi (seperti klaster kota maju) membuktikan bahwa ekosistem daerahnya sangat produktif dan minim pemborosan sumber daya.

3.2.1.7.1 Indikator Indeks Daya Saing Daerah

IDSD dibentuk oleh **4 komponen utama** yang dijabarkan ke dalam **12 pilar daya saing**, di mana setiap pilar memiliki bobot yang setara yaitu masing-masing **8,33 persen**. Adapun rincian komponen pembentuk IDSD adalah sebagai berikut:

1. **Komponen Lingkungan Pendukung (*Enabling Environment*)**
Kelompok ini mengukur kesiapan prasyarat dasar fisik, hukum, dan stabilitas makro agar aktivitas ekonomi di daerah dapat berjalan kondusif.
 - **Pilar 1: Kelembagaan** (keamanan, transparansi publik, dan tata kelola birokrasi).
 - **Pilar 2: Infrastruktur** (kualitas konektivitas jalan, pelabuhan, jembatan, dan utilitas listrik/air).
 - **Pilar 3: Adopsi TIK / Teknologi** (tingkat penetrasi internet, kepemilikan gawai, dan layanan digital pemda).
 - **Pilar 4: Stabilitas Ekonomi Makro** (laju inflasi wilayah dan manajemen fiskal APBD).
2. **Komponen Sumber Daya Manusia (*Human Capital*)**
Kelompok ini menilai kapasitas fisik dan intelektual dari populasi penduduk yang menjadi motor penggerak produktivitas wilayah.
 - **Pilar 5: Kesehatan** (Angka Harapan Hidup, jaminan faskes, serta penanganan stunting).
 - **Pilar 6: Keterampilan / Pendidikan** (tingkat pendidikan pekerja, ketersediaan sertifikasi keahlian, dan rata-rata lama sekolah).
3. **Komponen Pasar (*Markets*)**
Kelompok ini menakar efisiensi tata kelola penyerapan komoditas, dinamika tenaga kerja, serta ekosistem keuangan lokal.
 - **Pilar 7: Pasar Produk / Efisiensi Pasar** (distribusi barang, persaingan usaha sehat, dan hambatan perdagangan daerah).
 - **Pilar 8: Pasar Tenaga Kerja / Ketenagakerjaan** (fleksibilitas upah/UMK, meritokrasi kerja, dan penyerapan pengangguran terbuka).
 - **Pilar 9: Sistem Keuangan / Akses Keuangan** (kemudahan akses kredit perbankan, KUR bagi UMKM, dan stabilitas lembaga keuangan).
 - **Pilar 10: Ukuran Pasar** (skala domestik PDRB dan pangsa pasar ekspor komoditas daerah).
4. **Komponen Ekosistem Inovasi (*Innovation Ecosystem*)**
Kelompok ini mengukur kelincahan dunia usaha dalam beradaptasi serta kapasitas penciptaan iptek baru di tingkat daerah.

- **Pilar 11: Dinamika Bisnis** (biaya pembukaan usaha lewat OSS, budaya kewirausahaan, dan waktu pengurusan izin).
- **Pilar 12: Kapasitas Inovasi / Kapabilitas Inovasi** (jumlah paten/HAKI, kolaborasi riset dengan akademisi, dan penguasaan iptek daerah).

Tabel 3.26. Capaian IDSD Kota Bontang Tahun 2024-2025 Berdasarkan Pilar Komponen IDSD

Pilar IDSD	2024	2025
Pilar 1	4.13	4.45
Pilar 2	3.63	3.67
Pilar 3	5.00	5.00
Pilar 4	3.77	3.33
Pilar 5	4.15	4.16
Pilar 6	4.08	4.18
Pilar 7	2.54	2.2
Pilar 8	3.03	4.22
Pilar 9	2.45	2.22
Pilar 10	4.75	4.74
Pilar 11	2.65	2.28
Pilar 12	3.45	2.37
IDSD	3.7	3.57

Sumber : Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2026

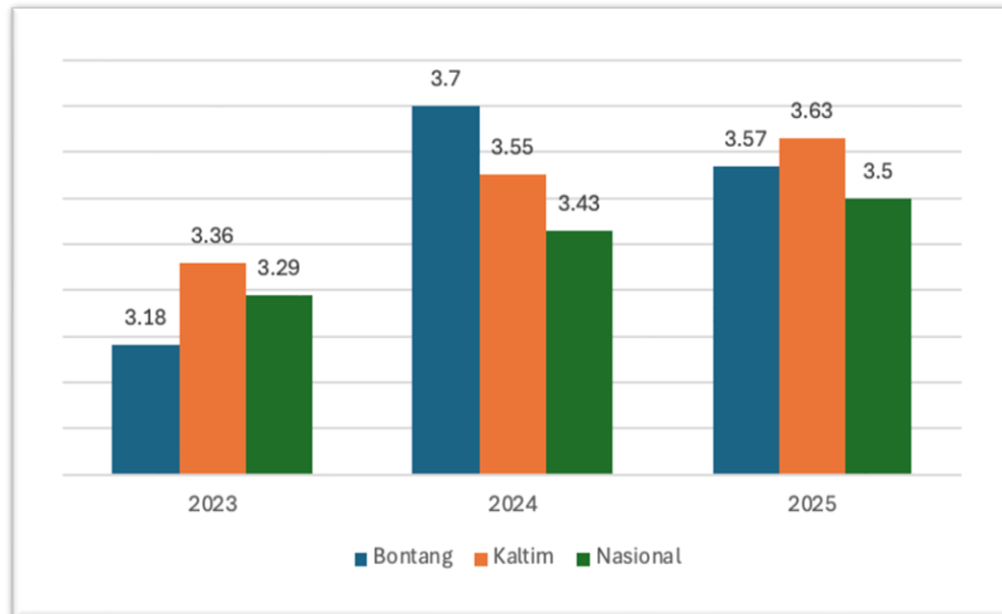
Indeks Daya Saing Daerah pada tahun 2025 mengalami penurunan tercatat sebesar 3,57 (Klaster Kategori Tinggi), mengalami penurunan dibandingkan 0.13 poin dibandingkan capaian tahun 2024 sebesar 3,70. Jika dibandingkan dengan target tahun 2025, maka capaian IDSD hanya tercapai 98,62% dari target yang ditetapkan sebesar 3.62. Ketidaktercapaian target IDSD tahun 2025 ini disebabkan oleh adanya pergeseran serta penyesuaian teknis pada beberapa pilar penilaian makro ekonomi daerah.

Berdasarkan tinjauan pembangunan dari Bapperida Kota Bontang dan kerangka penilaian instrumen dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), faktor-faktor utama yang melatarbelakangi penurunan skor tersebut meliputi:

1. Tekanan Struktural Fiskal Daerah (Pilar Stabilitas Ekonomi Makro)

- **Kondisi APBD:** Pada APBD murni tahun 2025, Kota Bontang mengalami penurunan fiskal sebesar Rp 129 miliar dibandingkan tahun 2024 (dari Rp2,3 triliun menyusut menjadi Rp2,2 triliun).

- **Imbas ke Skor:** Keterbatasan ruang fiskal daerah ini menurunkan penilaian pada **Pilar 4 (Stabilitas Ekonomi Makro)**, khususnya pada indikator kemampuan manajemen pengeluaran modal daerah terhadap kapasitas ekonomi wilayah.
2. Efek Rambatan Kontraksi Ekonomi Tahun Sebelumnya
- Meskipun pada tahun 2025 pertumbuhan ekonomi Kota Bontang bangkit positif menjadi 3,21%, basis penilaian data makro IDSD 2025 sangat dipengaruhi oleh capaian riil tahun sebelumnya (2024).
 - Kontraksi tajam ekonomi Kota Bontang sebesar minus 2,51% pada tahun 2024 akibat fluktuasi lifting gas dan industri pengolahan ikut terbawa dan mengerem rata-rata skor pada komponen **Pilar 10 (Ukuran Pasar/Kapasitas Ekonomi)**.
3. Masalah Ketimpangan Pasar Tenaga Kerja (Pilar Pasar Tenaga Kerja)
- Walaupun angka pengangguran makro Kota Bontang berhasil turun menjadi 6,36% di tahun 2025, Kota Bontang masih dibayangi oleh ketimpangan penyerapan antara pekerja industri formal dan informal.
 - Melebarnya jurang Rasio Gini yang merangkak naik menuju 0,349 serta masalah ketidaksesuaian (*mismatch*) kompetensi lulusan SMK lokal yang belum tersertifikasi global menekan penilaian pada **Pilar 8 (Pasar Tenaga Kerja)**.
4. Penyesuaian Indikator Teknis oleh BRIN
- Mulai tahun 2025, BRIN melakukan penyempurnaan standarisasi data dengan mengintegrasikan harmonisasi data lintas kementerian yang lebih ketat (mengacu pada instrumen *Global Competitiveness Index*).
 - Perubahan batas ambang (*threshold*) nilai dasar dan bobot pada pilar **Ekosistem Inovasi (Pilar 11 dan 12)** membuat perolehan nilai daerah-daerah berbasis industri padat modal seperti Bontang mengalami penyesuaian korektif secara matematis.
- Dengan demikian perlu penguatan terutama pada pilar-pilar komponen IDSD yang terkait pilar stabilitas ekonomi, ekosistem pasar dan ekosistem inovasi.
- Capaian IDSD Kota Bontang tahun 2024-2025 konsisten berada pada Kategori Daya Saing Tinggi (>3,50) dan berada di atas capaian IDSD nasional. Gambaran perbandingan capaian IDSD Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional terlihat sebagaimana gambar di bawah ini.



Gambar 3.32 Perbandingan Capaian IDSD Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional Tahun 2023-2025

Sumber : Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2026

3.2.2. Tujuan 2 Terwujudnya Kota Bontang yang Sejahtera

Tujuan 2 Terwujudnya Kota Bontang yang Sejahtera merupakan penjabaran dari Misi 1 RPJMD 2025-2026, yaitu “Mewujudkan Transformasi Sosial Menuju Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing”. Kota Bontang yang sejahtera dipahami sebagai kondisi masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri, merata dan berkeadilan. Kondisi ini ditandai dengan pengentasan kemiskinan, turunnya tingkat pengangguran, menurunnya ketimpangan pendapatan penduduk, peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing dan memiliki ketahanan keluarga sehingga mampu memenuhi kebutuhan ekonominya (materiil) maupun sosial (spiritual) secara adil dan merata.

Keberhasilan kinerja pembangunan Tujuan 2, ditunjukkan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kemiskinan, dan Indeks Gini. Indikator Pembangunan Manusia menunjukkan pembangunan sumber daya manusia agar lebih berkualitas dan berdaya saing. Tingkat kemiskinan dan indeks gini menunjukkan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan menurunkan kemiskinan.

Pada tahun 2025, IPM tercapai pada rentang target yang ditetapkan di dalam RPJMD. Sedangkan untuk Tingkat Kemiskinan mengalami penurunan yang signifikan mencapai 3,21 persen. Hal ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam pengentasan kemiskinan. Sedangkan indeks gini Kota

Bontang tahun 2025 tidak mencapai target yang ditetapkan. Rincian capaian IPM, tingkat kemiskinan dan indeks gini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.27. Capaian Kinerja Indikator Tujuan 2 Tahun 2025

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	IPM	82,83-83,18	83,04	100,25%
2	Tingkat Kemiskinan	3,40-3,73	3,21	105,92%
3	Indeks Gini	0,330-0,300	0,349	94,56%

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, 2026

Penjelasan faktor pendukung dan penghambat capaian kinerja ke-3 indikator di atas telah disampaikan pada Sub Bab Capaian Kinerja Berdasarkan RPJMD 2021-2025.

3.2.2.8. Sasaran 8 Meningkatnya Kualitas Dan Akses Terhadap Layanan Pendidikan Dan Kesehatan

Sasaran pembangunan ini merupakan penjabaran dari Tujuan 1 RPJM pada aspek kualitas SDM. Dalam hal ini, sasaran difokuskan pada pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan. Kualitas dan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan menjadi hal yang penting untuk meningkatkan kualitas SDM masyarakat.

Keberhasilan kinerja sasaran pembangunan ini ditunjukkan dengan peningkatan nilai Indeks Pendidikan dan Indeks Kesehatan. Indeks pendidikan merupakan

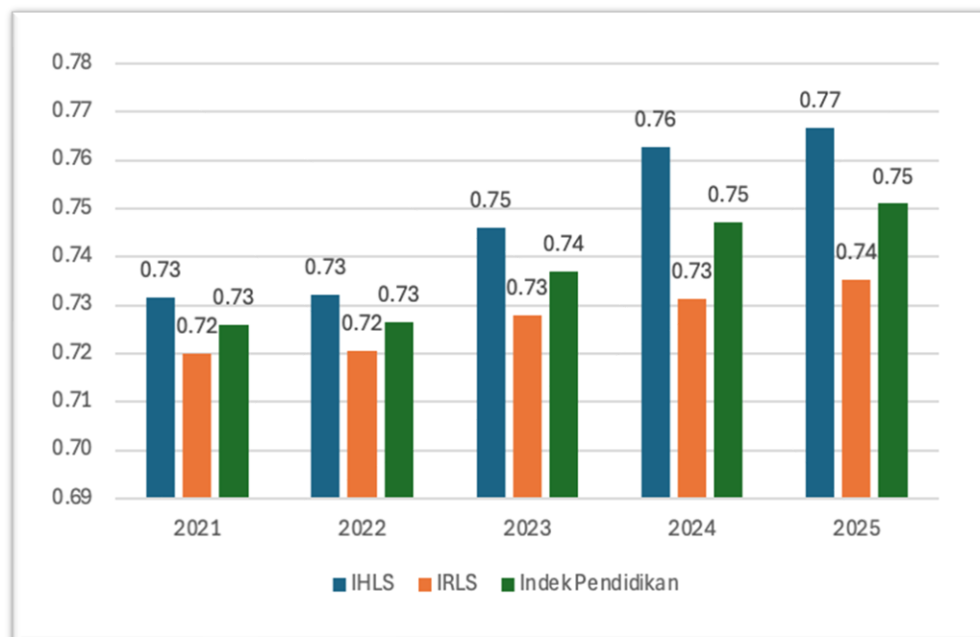
Pada sasaran ini Indeks Pendidikan belum mencapai target yang ditetapkan, sementara Indeks Kesehatan telah mencapai target. Hal ini mengindikasikan bahwa akses dan kualitas layanan kesehatan relatif membaik. Komposisi capaian ini menunjukkan bahwa sektor kesehatan dan daya beli memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap peningkatan IPM. Meskipun tidak mencapai target, komponen indeks pendidikan dalam IPM Kota Bontang tahun 2025 menunjukkan tren positif, meskipun kenaikannya relatif terbatas. Hal ini tercermin dari peningkatan Harapan Lama Sekolah menjadi 13,80 tahun dan Rata-rata Lama Sekolah menjadi 11,03 tahun. Kenaikan yang moderat tersebut menunjukkan bahwa capaian pendidikan masyarakat Bontang telah berada pada tingkat yang relatif tinggi sehingga ruang peningkatan indikator menjadi semakin sempit. Selain itu, karakteristik indikator Rata-rata Lama Sekolah yang bersifat struktural menyebabkan perubahan berlangsung secara

gradual karena dipengaruhi oleh komposisi tingkat pendidikan penduduk usia dewasa yang terbentuk pada periode sebelumnya.

3.2.2.8.1. Indikator Indeks Pendidikan

Indeks Pendidikan mengukur dimensi pengetahuan dan tingkat melek huruf. Indeks ini dibentuk oleh kombinasi Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Indeks Pendidikan dihitung dari rata-rata Indeks Harapan Lama Sekolah dan Indeks Rata-rata Lama Sekolah.

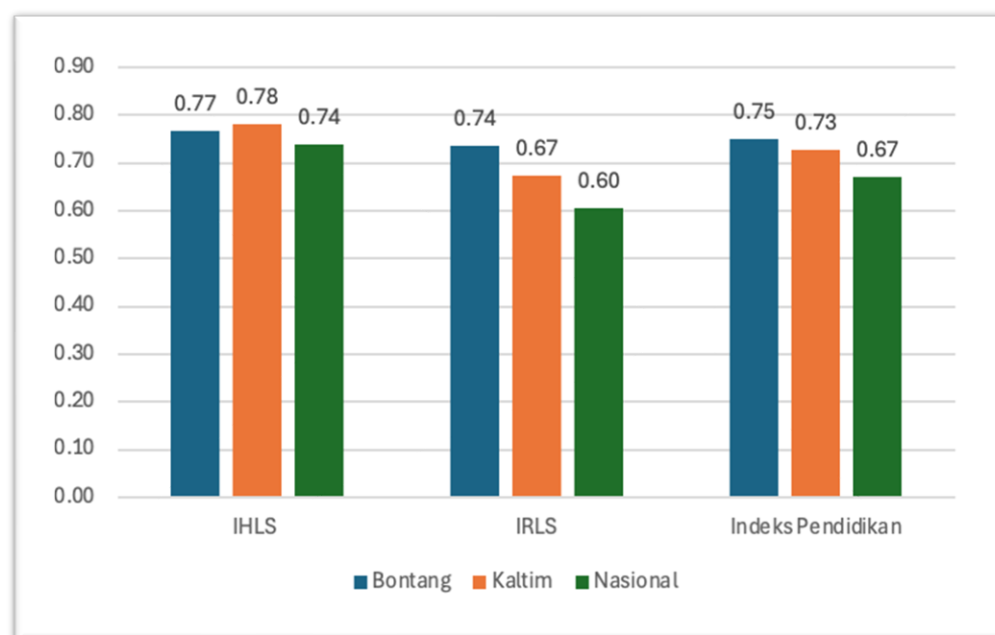
Capaian Indeks Pendidikan pada tahun 2025 tercatat 0,74. Capaian masih lebih rendah dibandingkan target yang ditetapkan di dalam RPJMD 2025-2029 yaitu sebesar 0,76. Penyebab ketidaktercapaian target indikator indeks pendidikan adalah masih rendahnya Rata-rata Lama Sekolah yang menyentuh 11,03 tahun atau dapat diartikan bahwa rata-rata penduduk usia 25 tahun ke atas, telah bersekolah selama 11 tahun (setara dengan SLTA kelas 2). Sementara di dalam RPJMD ditargetkan penduduk usia 25 tahun ke atas, telah menyelesaikan pendidikan minimal sampai lulus SLTA. Capaian Indeks Harapan Lama Sekolah, Indeks Rata-rata Lama Sekolah dan Indeks Pendidikan Kota Bontang mengalami kenaikan selama 5 tahun. Hal ini didorong oleh peningkatan capaian Harapan Lama Sekolah dan capaian Rata-Rata Lama Sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas dan akses layanan pendidikan di Kota Bontang semakin baik setiap tahunnya.



Gambar 3.33 Capaian HLS, RLS dan Indeks Pendidikan Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional Tahun 2025

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, 2026

Dijelaskan di atas bahwa capaian Indeks Pendidikan tahun 2025 tidak mencapai target yang ditetapkan di dalam RPJMD. Meskipun demikian capaian Indeks Pendidikan Kota Bontang jauh di atas Indeks Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional. Salah satu faktor pendukung keunggulan Kota Bontang adalah capaian RLS Kota Bontang yang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional. Hal ini menunjukkan kualitas angkatan kerja dewasa (usia 25 tahun ke atas) di Bontang secara rata-rata jauh lebih terdidik dibanding rata-rata provinsi (10,10 tahun) maupun nasional (9,07 tahun). Sedangkan pada sisi Harapan Lama Sekolah, Provinsi Kalimantan Timur secara akumulatif justru sedikit lebih tinggi (**14,04 tahun**) dibanding Bontang (**13,80 tahun**). Hal ini dipicu oleh dominasi fasilitas perguruan tinggi yang relatif lebih banyak di pusat kota administrasi lain seperti Kota Samarinda (HLS 15,41 tahun) dan Balikpapan (14,26 tahun). Perbandingan Indeks Harapan Lama Sekolah, Indeks Rata-Rata Lama Sekolah dan Indeks Pendidikan Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025 sebagaimana pada gambar di bawah ini.



Gambar 3.34 Perbandingan Capaian IHLS, IRLS dan Indeks Pendidikan Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional Tahun 2025
Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, 2026

Beberapa hal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bontang dan mendukung peningkatan indeks pendidikan antara lain:

1. Pemberian beasiswa UKT bagi mahasiswa baik yang kuliah di Kota Bontang maupun di luar Kota Bontang.

Pemberian beasiswa UKT ini bertujuan untuk mendorong penduduk Bontang memiliki pendidikan yang lebih tinggi sekaligus meningkatkan Harapan Lama Sekolah. Pada tahun 2025, beasiswa UKT telah diberikan kepada 1.269 mahasiswa.

2. Gratis pendidikan dan perlengkapan sekolah bagi siswa sampai dengan SMP

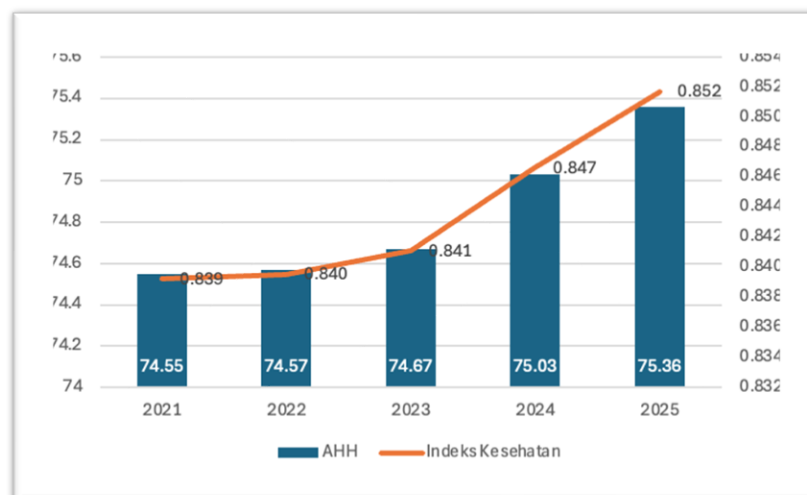
Gratis pendidikan diberikan bagi siswa yang bersekolah di sekolah negeri, sedangkan pemberian perlengkapan sekolah ditujukan bagi siswa kelas 1 SD sampai dengan siswa SMP dengan jumlah 32.279 siswa.

3. Mengoptimalkan SKB dan PKBM untuk mendorong 13 tahun wajib belajar

Melalui 1 SKB dan 14 PKBM yang ada di Kota Bontang, maka Pemerintah mendorong agar warga Kota Bontang yang masih belum memiliki pendidikan sampai dengan SLTA untuk melanjutkan pendidikan melalui Program Kejar Paket A, B dan C. Program ini telah diikuti oleh 1698 orang.

3.2.2.8.2 Indikator Indeks Kesehatan

Indeks kesehatan merupakan indikator di dalam RPJMD 2025-2029 untuk mengukur keberhasilan **Sasaran Meningkatnya Kualitas Dan Akses Terhadap Layanan Pendidikan Dan Kesehatan**. Data utama yang digunakan untuk mengukur indeks kesehatan adalah Usia Harapan Hidup. Usia Harapan Hidup merupakan salah satu komponen pembentuk IPM. Adapun Usia Harapan Hidup dan Indeks Kesehatan Kota Bontang tahun 2021-2025 sebagaimana gambar di bawah ini.



Gambar 3.35 Capaian Usia Harapan Hidup dan Indeks Kesehatan
Kota Bontang Tahun 2025

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, 2026

Berdasarkan gambar di atas, maka dapat dilihat sejalan dengan peningkatan Angka Harapan Hidup, terlihat bahwa indeks kesehatan juga mengalami peningkatan yang signifikan sejak 2024.

Indeks kesehatan Kota Bontang pada tahun 2025 tercatat sebesar 0.852, naik 0,005 poin dibandingkan tahun 2024 yang tercatat 0,847. Kenaikan ini menunjukkan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Bontang yang ditandai dengan meningkatnya harapan hidup. Capaian indeks kesehatan tahun 2025 telah melampaui target indeks pendidikan yang ditetapkan di dalam RPJMD 2025-2029 yaitu 0,850. Sehingga persentase capaian mencapai 100,24 persen.

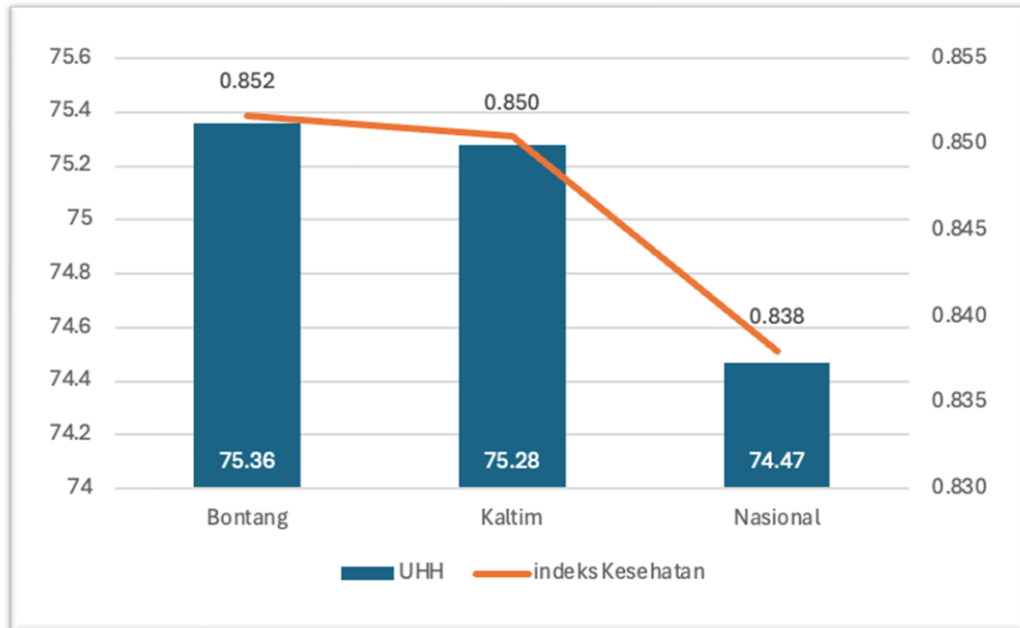
Capaian ini menandakan adanya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan, serta kesadaran masyarakat dalam menjaga pola hidup sehat. Selisih positif antara target dan realisasi mencerminkan efektivitas kebijakan kesehatan daerah. Keberhasilan kinerja ini didukung oleh:

1. peningkatan kualitas layanan dan akses kesehatan bagi masyarakat;
2. peningkatan pemahaman masyarakat terkait dengan pola hidup bersih dan sehat;
3. adanya jaminan kesehatan gratis bagi masyarakat, dimana Pemerintah Kota Bontang berhasil mencapai 100% *universal health coverage (UHC)*;
4. penguatan fasilitas kesehatan dasar dan rujukan;
5. pelaksanaan program pemberian pangan lokal bergizi yang menyoar balita kurus dan ibu hamil dengan masalah kekurangan energi kronis (KEK);
6. pelaksanaan program Bontang Sehat dan Mental Health;

Dengan keberhasilan ini, menunjukkan efisiensi penggunaan sumber daya yang cukup baik. sumber daya yang telah disiapkan baik anggaran, SDM, sarana dan prasarana dapat dimanfaatkan dengan baik sehingga hasilnya mampu mencapai target yang ditetapkan. Meskipun demikian ada beberapa kendala yang dihadapi, terutama untuk menjangkau masyarakat yang berada di pulau-pulau.

Capaian indeks kesehatan tahun 2025 Kota Bontang telah melampaui capaian Provinsi Kalimantan Timur dan nasional sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini. Dengan demikian maka, ke depan Pemerintah Kota Bontang perlu mempertahankan program kesehatan yang terbukti efektif dan diperluas cakupannya, meningkatkan pemerataan akses pelayanan kesehatan di seluruh wilayah agar capaian tetap konsisten, mengintegrasikan teknologi

kesehatan dan digitalisasi layanan dapat memperkuat kualitas pelayanan serta mempercepat pencapaian target di masa mendatang, melakukan monitoring capaian tahunan penting dilakukan untuk memastikan tren positif berlanjut dan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.



Gambar 3.36 Perbandingan Usia Harapan Hidup dan Indeks Kesehatan Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional Tahun 2025

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, 2026

Faktor kelemahan/kegagalannya adalah :

- 1) Peningkatan masih terbatas karena keterbatasan cakupan layanan di wilayah tertentu.
- 2) Belum optimalnya integrasi teknologi kesehatan untuk mempercepat pelayanan.
- 3) Tantangan dalam menjaga keberlanjutan program kesehatan jangka panjang.

3.2.2.9. Sasaran 9 Meningkatnya Perlindungan Sosial yang Adaptif

Sasaran Meningkatnya Perlindungan Sosial yang Adaptif merupakan penjabaran dari pencapaian Tujuan 2 Terwujudnya Kota Bontang yang Sejahtera dan Misi 1 RPJMD 2025-2029 Mewujudkan Transformasi Sosial Menuju Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing. Memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat merupakan kewajiban pemerintah

kepada warganya dengan tujuan mencegah dan mengatasi risiko kemiskinan, kerentanan, serta kerawanan sosial.

3.2.2.9.1 Indikator Persentase Keluarga Miskin Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan

Indikator yang digunakan untuk menggambarkan keberhasilan kinerja perlindungan sosial yang adaptif adalah “Persentase Keluarga Miskin Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan”. Indikator ini menghitung keluarga penerima manfaat (KPM) sudah dinyatakan lulus dan keluar dari program bantuan pemerintah karena kondisi ekonominya sudah mandiri dan meningkat. Dengan demikian tingkat kemiskinan di Kota Bontang akan turun sesuai dengan target yang ditetapkan.

Pada RPJMD 2025-2029, Persentase Keluarga Miskin Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan ditargetkan pada tahun 2025 sebesar 8,44 persen. Akan tetapi yang terealisasi sebesar 2,4 persen dengan persentase capaian sebesar 28,44 persen dari target. Dengan demikian target yang ditetapkan tidak terpenuhi.

Rendahnya capaian kinerja indikator tersebut disebabkan oleh rendahnya jumlah keluarga yang keluar dari garis kemiskinan dibandingkan dengan jumlah penerima manfaat perlindungan sosial. Jumlah penerima manfaat pada tahun 2025 tercatat 3083 KK, sedangkan jumlah KK miskin yang keluar dari kemiskinan tercatat 24 KK. Hal ini menunjukkan bahwa program perlindungan sosial kurang tepat menyasar pada keluarga miskin. Ke depannya perlu penguatan basis data terpadu, perbaikan mekanisme targeting, serta koordinasi lintas program pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan kemandirian keluarga miskin. Program perlindungan sosial juga dapat diintegrasikan dengan pemberdayaan ekonomi agar keluarga miskin tidak hanya bergantung pada bantuan. Selain itu perlu penguatan akses terhadap lapangan kerja produktif, pelatihan keterampilan, dan dukungan permodalan. Selain itu monitoring dan evaluasi program harus diperketat untuk memastikan bantuan benar-benar mendorong graduasi dari kemiskinan.

3.2.2.10. Sasaran 10 Meningkatnya Ketahanan Keluarga

Sasaran Meningkatnya Ketahanan Keluarga merupakan salah satu penjabaran dari Tujuan 2 Terwujudnya Kota Bontang yang Sejahtera dan Misi 1 RPJMD 2025-2029 Mewujudkan Transformasi Sosial Menuju Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing, di mana Kota Bontang yang sejahtera digambarkan salah satunya dengan meningkatnya ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga adalah kemampuan sebuah keluarga untuk menggunakan seluruh sumber daya yang mereka miliki agar dapat hidup mandiri, sejahtera,

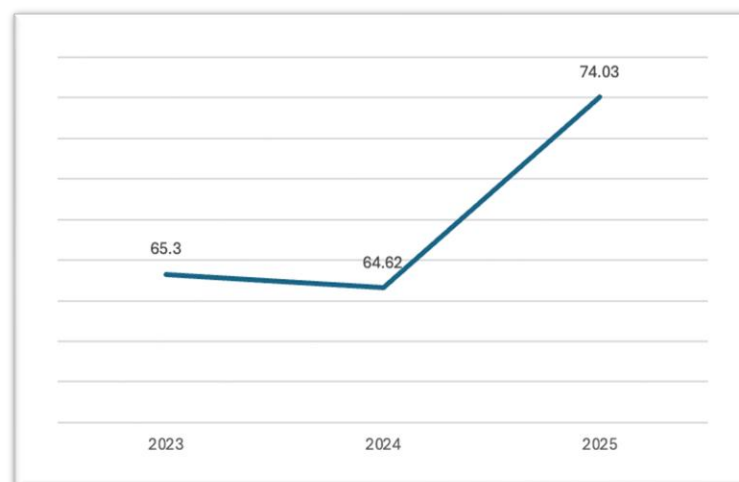
dan bahagia. Jadi Kota Bontang yang sejahtera juga digambarkan dengan keluarga yang memiliki ketahanan untuk bisa hidup mandiri, sejahtera dan bahagia baik secara jasmani dan rohani.

Indeks Pembangunan Keluarga menunjukkan peningkatan yang signifikan dari baseline dan telah melampaui target yang ditetapkan, mengindikasikan perbaikan ketangguhan keluarga. Penguatan ketahanan keluarga tetap perlu disinergikan dengan perluasan perlindungan sosial agar keluarga miskin tidak kembali rentan terhadap guncangan ekonomi maupun sosial.

3.2.2.3.1 Indikator Indeks Pembangunan Keluarga

Untuk menggambarkan keberhasilan pembangunan ketahanan keluarga, maka digunakan Indeks Ketahanan Keluarga. Indeks ketahanan keluarga adalah yang digunakan oleh pemerintah untuk melihat seberapa baik kualitas, ketangguhan, dan kebahagiaan keluarga-keluarga di suatu wilayah. Indikator ini dihitung oleh BKKBN. Indeks Ketahanan Keluarga meliputi 3 dimensi, yaitu dimensi ketentraman, dimensi kemandirian dan dimensi kebahagiaan.

Indeks Pembangunan Keluarga pada tahun 2025 tercatat sebesar 77,3. Capaian ini meningkat 12,68 dari tahun 2024 yang tercatat sebesar 64,62. Capaian tahun 2025 ini, melampaui target yang ditetapkan sebesar 74,8, dengan tingkat capaian mencapai 103,34%. Ini menunjukkan adanya keberhasilan dari program-program daerah yang mulai terasa dampaknya secara merata di tingkat keluarga. Perbandingan antara capaian indeks pembangunan keluarga Kota Bontang tahun 2025 terlihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 3.37 Capaian Indeks Pembangunan Keluarga Kota Bontang
Tahun 2023-2025

Sumber : BKKBN, 2026

Peningkatan yang signifikan capaian Indeks Pembangunan Keluarga pada tahun 2025 didorong oleh beberapa faktor. Berikut faktor pendorong berdasarkan dimensi penilaian.

1. Pendorong Dimensi Kemandirian Keluarga

Dimensi kemandirian berfokus pada ketahanan ekonomi, pemenuhan gizi, kesehatan, dan kelangsungan pendidikan anak. Program pendorongnya meliputi:

- **Gerakan Ekonomi Bontang & UMKM Tangguh:** Memberikan pelatihan keterampilan kerja dan fasilitasi modal bagi pelaku usaha mikro, terutama para ibu rumah tangga, agar keluarga rentan dapat mandiri secara finansial.
- **Bontang Pintar & Beasiswa UKT:** Memastikan kelangsungan pendidikan wajib 12 tahun melalui pemberian perlengkapan sekolah gratis dan beasiswa agar anak-anak dari keluarga kurang mampu tidak putus sekolah.
- **Jaminan Kesehatan Gratis (UHC 100%):** Membebaskan keluarga dari beban biaya pengobatan saat ada anggota keluarga yang sakit, sehingga kestabilan ekonomi rumah tangga tetap terjaga.
- **Operasi Timbang Serentak & Penanganan Gizi Buruk:** Gerakan masif jemput bola ke posyandu untuk mendeteksi dini sekaligus memberikan makanan tambahan bergizi guna memastikan tumbuh kembang balita berjalan optimal.

2. Pendorong Dimensi Ketentraman Keluarga

Dimensi ketentraman berfokus pada aspek legalitas, keselarasan hubungan, serta perlindungan hak anggota keluarga. Program pendorongnya meliputi:

- **Fasilitasi Dokumen Kependudukan Gratis:** Layanan jemput bola pembuatan Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA), Kartu Keluarga, dan pelayanan isbat nikah massal secara gratis demi menjamin perlindungan hukum bagi setiap keluarga.
- **Edukasi Perlindungan Perempuan dan Anak:** Layanan digital penanganan kekerasan serta penyuluhan rutin ke masyarakat untuk menekan angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan pernikahan usia dini.
- **Penguatan Perda Pembangunan Ketahanan Keluarga:** Sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2022 secara meluas untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga keharmonisan, moralitas, dan pembagian peran yang sehat dalam rumah tangga.

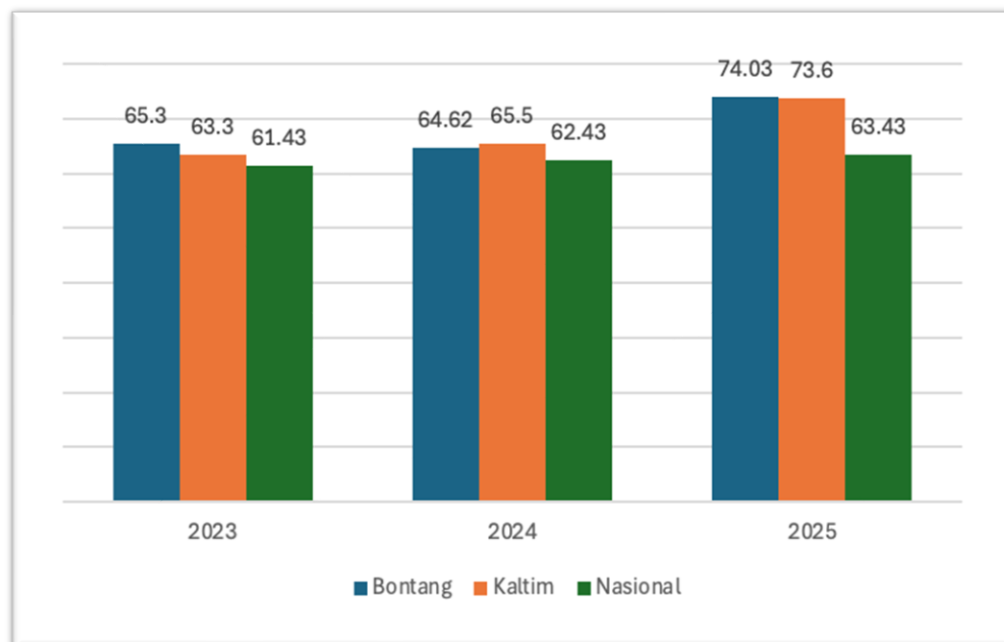
3. Pendorong Dimensi Kebahagiaan Keluarga

Dimensi kebahagiaan berfokus pada kesehatan mental, waktu luang keluarga, serta hubungan baik antar tetangga. Program pendorongnya meliputi:

- **Digitalisasi Program "Tengok Tetangga":** Gerakan kepedulian sosial berbasis RT yang kini dipantau secara digital. Program ini mendorong warga saling membantu tetangga yang sedang mengalami kesulitan, sehingga menciptakan lingkungan tempat tinggal yang aman dan nyaman.
- **Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB):** Pembinaan wilayah setingkat kelurahan untuk mengintegrasikan program kependudukan, KB, dan pembangunan sektor terkait secara mandiri.
- **Penyediaan Ruang Publik yang Ramah Keluarga:** Pembangunan taman bermain ramah anak dan fasilitas rekreasi gratis yang bersih di area perkotaan agar keluarga memiliki tempat berinteraksi yang sehat pada akhir pekan.

4. Penguatan Basis Data: Pendataan Keluarga 2025 (PK-25)

- **Intervensi Tepat Sasaran:** Pemkot Bontang berhasil menyelesaikan pemutakhiran data keluarga secara serentak. Data mikro yang akurat dan *real-time* ini membuat penyaluran berbagai bantuan sosial, kesehatan, serta pendidikan langsung menyasar keluarga yang paling membutuhkan tanpa salah sasaran.



Gambar 3.38 Perbandingan Capaian Indeks Pembangunan Keluarga Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional Tahun 2025.

Sumber : BKKN, 2026

Kota Bontang sukses melompat tinggi dan berdiri di posisi tertinggi dibandingkan Provinsi Kalimantan Timur dan nasional sebagai daerah dengan status **Keluarga Tangguh**. Keberhasilan lokal ini didorong oleh kebijakan belanja anggaran yang fokus pada jaring pengaman sosial dan kontribusi besar dari sektor industri yang berhasil mendongkrak kemampuan fiskal masyarakat.

3.2.2.11. Sasaran 11 Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja

Sasaran pembangunan Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja juga merupakan penerjemahan dari pencapaian Tujuan Terwujudnya Kota Bontang yang Sejahtera dan Misi 1 RPJMD 2025-2029 Mewujudkan Transformasi Sosial Menuju Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing. Kota Bontang yang sejahtera digambarkan dengan kondisi di mana SDM nya memiliki kompetensi yang tinggi dan memiliki daya saing di pasar kerja sehingga mampu mendapatkan pekerjaan yang layak untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Tingkat Pengangguran Terbuka berhasil turun melampaui target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa peluang kerja di Kota Bontang relatif membaik. Meskipun demikian, peningkatan kesempatan kerja ini belum sepenuhnya mampu menekan ketimpangan pendapatan, sebagaimana tercermin dari Indeks Gini yang meningkat. Secara umum, sasaran 11 telah tercapai, namun ke depan perlu diarahkan untuk tidak hanya memperluas kesempatan kerja, tetapi juga meningkatkan kualitas dan inklusivitas pekerjaan sehingga berkontribusi lebih kuat terhadap pengurangan kesenjangan dan penguatan kesejahteraan kelompok berpendapatan rendah.

3.2.2.11.1 Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka

Keberhasilan dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja digambarkan dengan terjadinya penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka. Semakin tinggi daya saing tenaga kerja maka semakin rendah tingkat pengangguran terbuka. semakin baik kompetensi dan daya saing tenaga kerja di Kota Bontang, maka akan lebih mudah terserap di pasar kerja. Semakin sejahtera penduduk suatu wilayah maka, semakin besar yang bekerja untuk mendapatkan penghidupan yang layak.

Berdasarkan RPJMD 2025-2029, pada tahun 2025 TPT Kota Bontang ditargetkan turun antara 6,78-6,65 persen. Berdasarkan data BPS, tercatat TPT turun menjadi 6,36 persen. Dengan demikian capaian tersebut melampaui target yang telah ditetapkan. Angka turun 0,7 poin dibandingkan capaian tahun 2024 yaitu 7.06 persen. Capaian TPT selama 5 tahun terakhir dan perbandingan capaian TPT Kota Bontang dengan daerah sekitar, provinsi dan nasional

setelah dijelaskan sebagaimana terdapat pada Sub Bab Capaian Kinerja Berdasarkan RPJMD 2021-2025.

Walaupun TPT Kota Bontang, akan tetapi Kota Bontang tetap harus meningkatkan kinerjanya dalam mengurangi jumlah pengangguran, mengingat pengangguran menjadi permasalahan yang dapat memicu timbulnya permasalahan sosial lain seperti kemiskinan.

3.2.3. Tujuan 3 Terwujudnya Kota Bontang yang Berkelanjutan

Tujuan 3 merupakan penjabaran dari Misi 5 RPJMD 2025-2029 yaitu Meningkatkan Pelestarian Lingkungan Hidup. Tujuan pembangunan ini berfokus untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan kota agar pembangunan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Untuk itu Kota Bontang bertekad untuk mewujudkan lingkungan yang lebih bersih, sehat dan tangguh terhadap perubahan iklim sekaligus menciptakan basis ekonomi dan ekosistem yang lestari untuk keberlanjutan generasi mendatang. Keberhasilan tujuan pembangunan ditunjukkan dengan meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Berdasarkan RPJMD 2025-2029, pada tahun 2025 IKLH ditargetkan sebesar 73,38. Hasil penilaian Kementerian Lingkungan Hidup, IKLH Kota Bontang tercapai sebesar 75,23 dengan kategori sedang. Capaian ini meningkat signifikan dibandingkan tahun 2024 yang lalu yaitu sebesar 67,71. Penjelasan lengkap terkait IKLH telah disampaikan pada Sub Bab Capaian Kinerja Berdasarkan RPJMD 2021-2026.

3.2.3.12. Sasaran 12 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Dan Ketahanan Kota

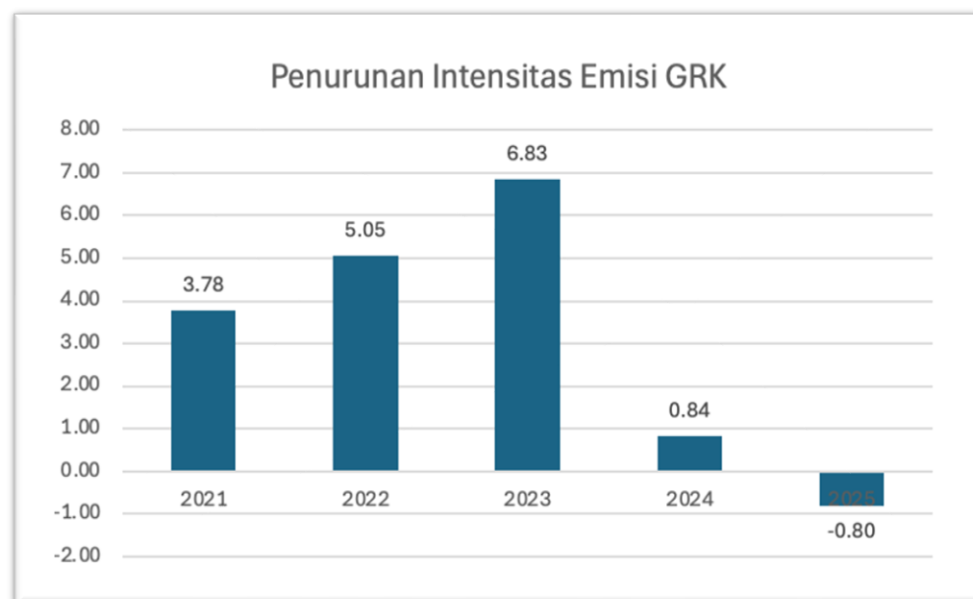
Sasaran pembangunan ini berfokus pada upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup sehingga dapat menjadi lingkungan yang bersih, sehat dan tangguh terhadap bencana. Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini adalah penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) dan Indeks Risiko Bencana (IRB).

Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) adalah upaya untuk mengurangi jumlah gas berbahaya (seperti karbon dioksida atau metana) yang dilepaskan ke udara untuk setiap nilai ekonomi atau hasil produksi yang diciptakan. Intensitas emisi dihitung berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Targetnya adalah ekonomi tetap tumbuh dan masyarakat semakin makmur, tetapi polusi yang dihasilkan dari aktivitas ekonomi tersebut justru semakin mengecil. Penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dikatakan baik atau sukses jika ekonomi daerah atau hasil produksi tetap

tumbuh tinggi (atau stabil), tetapi jumlah emisi gas buang yang dihasilkan per satuan ekonomi justru semakin menurun.

3.2.3.12.1 Indikator Penurunan Intensitas Emisi GRK

Penurunan Intensitas Emisi GRK terealisasi tahun 2025 sebesar -0,8% masih jauh dibawah target di dalam RPJMD 2025-2029 yang ditetapkan sebesar 15,89%. Ketidaktercapaian target penurunan intensitas emisi GRK ini utamanya disebabkan oleh melonjaknya total emisi GRK tahun 2025 menjadi 10.738.041,43 ton (naik sekitar 416 ribu ton dari tahun 2024), sedangkan pertumbuhan PDRB tidak melaju secepat kenaikan emisinya. Kondisi ini dipicu oleh dua faktor utama, yaitu lonjakan emisi di sektor transportasi akibat tingginya mobilitas logistik dan kendaraan pribadi yang belum diimbangi transportasi massal yang efektif, serta naiknya penggunaan batu bara untuk operasional industri pada sub-sektor energi. Berikut perkembangan penurunan intensitas emisi gas rumah kaca tahun 2021-2025.



Gambar 3.39 Perkembangan Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca Kota Bontang Tahun 2021-2025

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, 2026

Tabel 3.28 Perhitungan Intensitas Emisi GRK Kota Bontang Tahun 2021-2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Total emisi GRK (juta ton)	11,31	11,00	10,68	10,32	10,74
PDRB ADHK	39,949.08	40,930.98	42,633.63	41,563.91	42,899.73

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Intensitas Emisi GRK	283.08	268.78	250.42	248.32	250.31
Penurunan Intensitas Emisi GRK	3.78	5.05	6.83	0.84	-0.80

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, 2026

Sebagai kota industri besar di Kalimantan Timur, Pemerintah Kota Bontang bersama sektor swasta dan masyarakat telah menjalankan berbagai langkah nyata untuk mengendalikan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Aksi mitigasi yang telah dan sedang berjalan di Kota Bontang dikelompokkan ke dalam beberapa sektor utama:

1. Regulasi dan Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon

- Penyusunan dan Pemutakhiran RAD-GRK: Pemkot Bontang melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah telah menyusun dokumen Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) untuk jangka panjang dan melakukan pemutakhiran berkala guna memetakan target serta capaian mitigasi emisi.
- Integrasi Sistem Data: Bontang aktif melakukan pengumpulan data berkala (seperti inventarisasi emisi sektor lahan) guna memantau capaian target daerah secara transparan.

2. Sektor Industri Hijau & Investasi Berkelanjutan

- Transisi ke Energi Terbarukan: Mendorong industri raksasa di Bontang untuk beralih ke sumber energi ramah lingkungan. Salah satu contoh nyatanya adalah pengoperasian instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap berskala besar di area industri.
- Transformasi Kota Industri Hijau: Bontang telah diakui sebagai salah satu *role model* kota industri hijau di Indonesia (terbukti lewat capaian penghargaan pelestarian lingkungan berkelanjutan), dimana pertumbuhan industri besar disinergikan erat dengan efisiensi energi rendah karbon.

3. Sektor Transportasi perkotaan

- Program Langit Biru & Uji Emisi Gratis: Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bontang secara rutin mengadakan uji emisi kendaraan gratis bagi masyarakat umum. Langkah ini bertujuan memantau kadar polusi udara, menekan emisi gas buang kendaraan bermotor, dan membangun kesadaran berkendara yang ramah lingkungan.

4. Sektor Kehutanan dan Lahan (*Carbon Sink*)

- Konservasi Bontang Mangrove Park: Hutan mangrove merupakan penyerap karbon (*carbon sink*) alami terbesar di Bontang. Pemkot

bekerja sama dengan berbagai lembaga dan perusahaan swasta untuk melakukan rehabilitasi, penanaman kembali ribuan bibit, serta mengembangkannya menjadi kawasan *eco-edupark* berbasis konservasi.

- Gerakan Penghijauan Kota: Menggalang aksi penanaman pohon keras secara massal bersama dunia usaha (seperti pohon tanjung yang memiliki daya serap emisi karbon tinggi) untuk memperluas area Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan.

5. Sektor Pengelolaan Sampah & Berbasis Komunitas

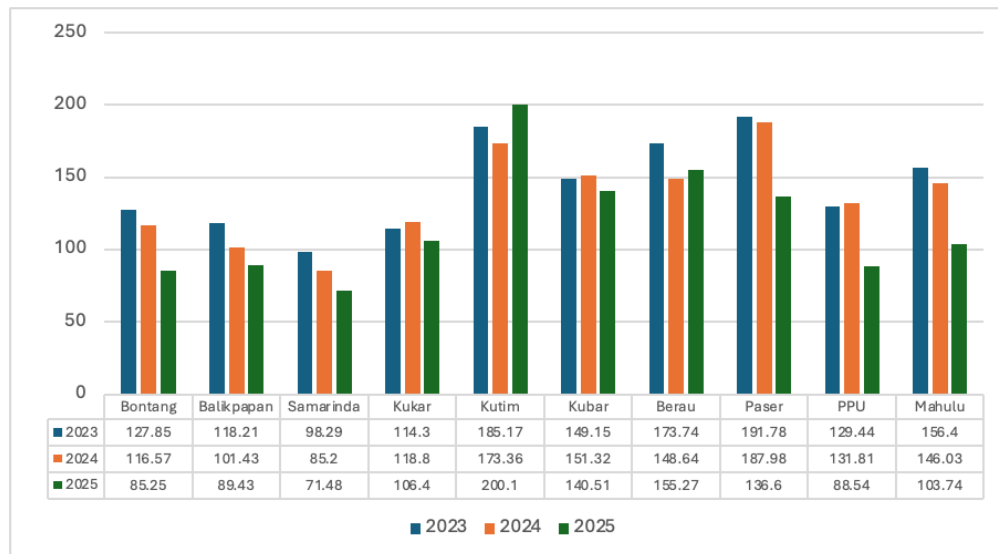
- Program Kampung Iklim (ProKlim): Pemkot Bontang membina masyarakat di tingkat tapak (RT/Kelurahan) untuk menerapkan gaya hidup adaptif terhadap perubahan iklim melalui hemat energi, penghijauan lokal, dan pemilahan sampah.
- Pengurangan Sampah Residu TPA: Melakukan inovasi pengelolaan sampah terpadu guna menekan jumlah sampah residu hingga target 10% yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Cara ini efektif untuk meminimalkan produksi gas metana yang memicu efek rumah kaca dari pembusukan sampah terbuka.

3.2.3.12.2 Indikator Indeks Risiko Bencana

Indeks Risiko Bencana (IRB) adalah angka atau nilai yang menunjukkan tingkat ancaman kerugian akibat bencana di suatu wilayah. Nilai ini dihitung dengan melihat seberapa besar bahaya alam yang mengancam, jumlah manusia dan harta benda di daerah tersebut, serta kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana. Indeks ini menjadi panduan penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk menentukan langkah penyelamatan dan pembangunan daerah yang aman.

Pada RPJMD 2025-2029, Indeks Risiko Bencana tahun 2025 ditargetkan antara rentang 14,57-115,57 dan terealisasi 85,25. Capaian ini, melampaui capaian tahun 2024 yaitu sebesar 116,57. Dengan penurunan IRB tahun 2025 ini, maka Kota Bontang berhasil **keluar dari zona risiko bencana kelas "sedang"** menuju **kelas risiko rendah**. Hal ini menegaskan bahwa intervensi program penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bontang telah memberikan dampak efektif terhadap peningkatan ketahanan wilayah.

Dalam lingkup provinsi, kinerja penanggulangan bencana Kota Bontang tergolong sangat baik. Pada tahun 2024, Kota Bontang menempati peringkat ketiga dengan nilai IRB terendah. Capaian ini meningkat pada tahun 2025, dimana Kota Bontang berhasil menempati peringkat kedua terendah (85,25) setelah Kota Samarinda (71,48).



Gambar 3.40 IRB Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur
Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, 2026

Penurunan indeks ini bukan berarti potensi ancaman alamnya (seperti banjir rob, abrasi, atau cuaca ekstrem) hilang sama sekali, tetapi menunjukkan kapasitas ketangguhan daerah Kota Bontang yang semakin baik dan menunjukkan tingkat keamanan wilayah Bontang yang semakin membaik bagi investasi dan kehidupan masyarakat.

Keberhasilan ini didorong oleh keberhasilan Pemerintah Kota Bontang melalui Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) dalam menyelesaikan penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana Daerah, penguatan infrastruktur pengendalian banjir dan semakin meluasnya edukasi tentang tanggap bencana di kelurahan serta kolaborasi yang sangat baik dengan pihak perusahaan dalam mitigasi terhadap risiko akibat kegagalan teknologi.

3.2.4. Tujuan 4 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

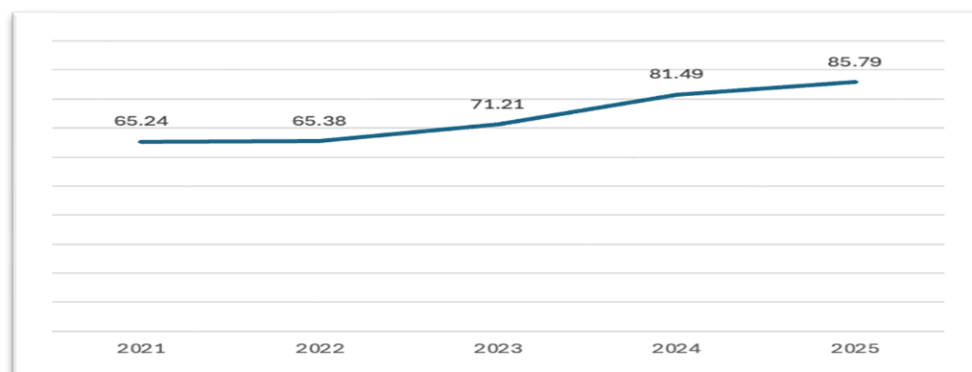
Tujuan 4 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik merupakan penjabaran dari pencapaian Misi 3 RPJMD Kota Bontang Tahun 2025-2029, yaitu Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan landasan utama dalam menciptakan pelayanan publik yang berkualitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang baik menjadi faktor pendukung dalam setiap melaksanakan setiap aspek dalam penyelenggaraan pemerintahan yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik difokuskan untuk melakukan reformasi birokrasi secara berkelanjutan. Hal ini bertujuan agar

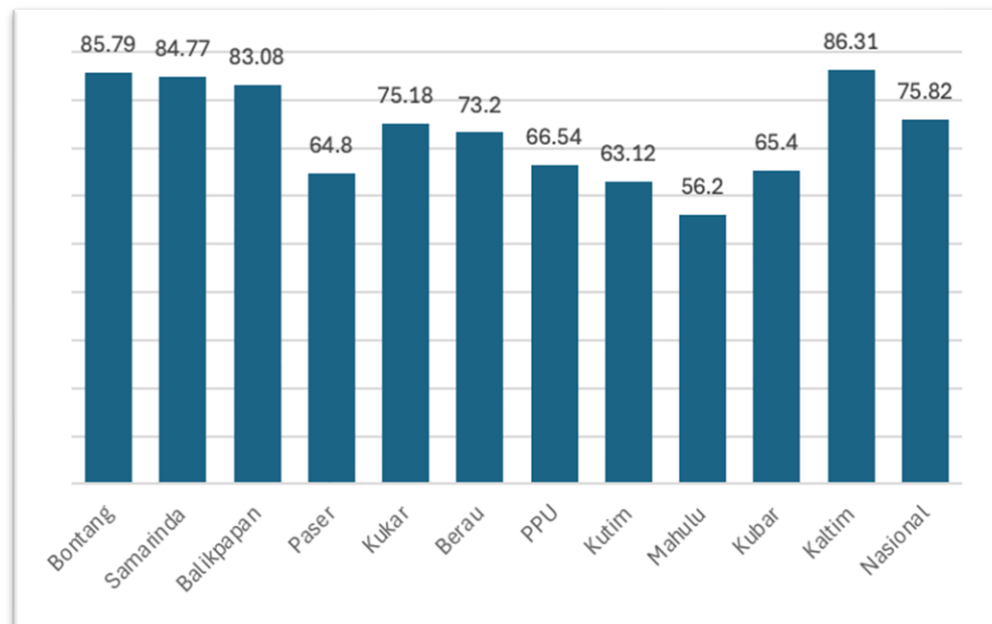
pembangunan dan pelayanan publik yang diberikan lebih berdampak kepada masyarakat. Untuk itu, maka pemerintah perlu mendorong penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital dan inovasi untuk mempercepat akses layanan, mengurangi praktik birokrasi yang berbelit serta meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Keberhasilan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik ditunjukkan dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). Indeks Reformasi Birokrasi adalah angka atau nilai yang digunakan untuk mengukur seberapa baik perubahan tata kelola pemerintahan yang dilakukan oleh suatu instansi, baik di tingkat pusat maupun daerah. Nilai ini menjadi bukti nyata apakah sebuah instansi pemerintah telah bekerja secara efektif, efisien, akuntabel, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Pada RPJMD 2025-2029, Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2025, ditargetkan 82,32 dan terealisasi sebesar 85,79. Capaian ini meningkat 4,30 poin dibandingkan tahun 2024 yang terealisasi 81,49 pada tahun 2024 dan melampaui target 82,32. Selama 5 tahun terakhir capaian IRB terus mengalami peningkatan. Hal ini didorong oleh adanya perbaikan bertahap pada proses tata kelola, penguatan pengawasan internal dalam pelaksanaan program dan kegiatan, penguatan dan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan teknologi informasi dan data pembangunan.



Gambar 3.41 Indeks Reformasi Birokrasi Kota Bontang Tahun 2025
Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, 2026



Gambar 3.42 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten/Kota dan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, 2026

Upaya perbaikan yang telah dilakukan ini menghantarkan Kota Bontang berada setingkat lebih rendah dibandingkan Provinsi Kalimantan Timur (85.79). Meskipun demikian, Kota Bontang tetap harus mengoptimalkan kinerjanya agar capaian IRB dapat mencapai target yang telah ditetapkan di dalam RPJMD setiap tahunnya.

3.2.4.13 Sasaran 13 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

Sasaran pembangunan ini merupakan penjabaran dari tujuan pembangunan ke-4 RPJMD 2025-2029. Salah satu cara untuk mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik adalah melalui peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang rakyat (APBN/APBD) dan setiap kebijakan yang diambil memberikan manfaat nyata dan hasil (*outcome*) yang konkret bagi masyarakat.

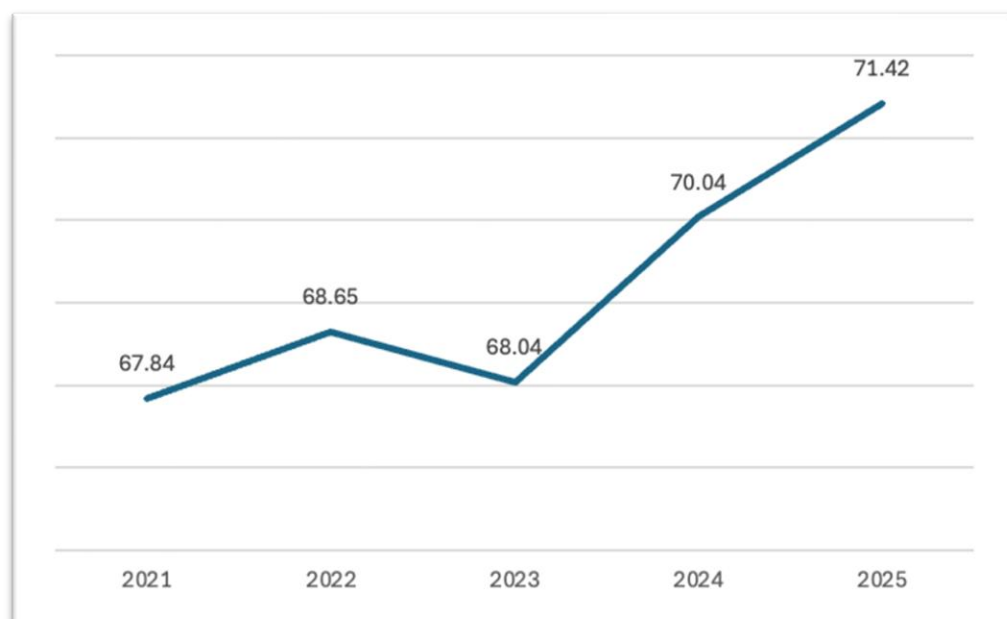
Pengukuran akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan diukur melalui dua indikator, yaitu Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah digunakan untuk mengukur akuntabilitas keuangan sebagai aspek administrasi legal. Sedangkan Nilai SAKIP digunakan untuk mengukur kemanfaatan dan efektivitas kinerja

pemerintah terhadap pencapaian target di dalam RPJMD, sebagai aspek substantif - kemanfaatan.

Nilai SAKIP Kota Bontang tahun 2025 sebesar 71,49, naik dari 70,04 dan melampaui target. Dari sisi akuntabilitas keuangan, Kota Bontang kembali mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK sesuai target. Secara keseluruhan, Pemerintah Kota Bontang mampu menjaga dan meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan, meskipun peningkatan kualitas SAKIP masih memiliki cukup banyak ruang perbaikan.

3.2.4.13.1 Indikator Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja pada tahun 2025 tercatat sebesar 71,42, meningkat dibandingkan capaian tahun 2024 sebesar 70,04. Realisasi tersebut sedikit melampaui target di dalam RPJMD 2025-2029 yang ditetapkan sebesar 70,9. Capaian SAKIP Kota Bontang tahun 2021-2025 menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan.



Gambar 3.43 Nilai SAKIP Kota Bontang Tahun 2021-2025

Sumber : Sekretariat Daerah, 2026

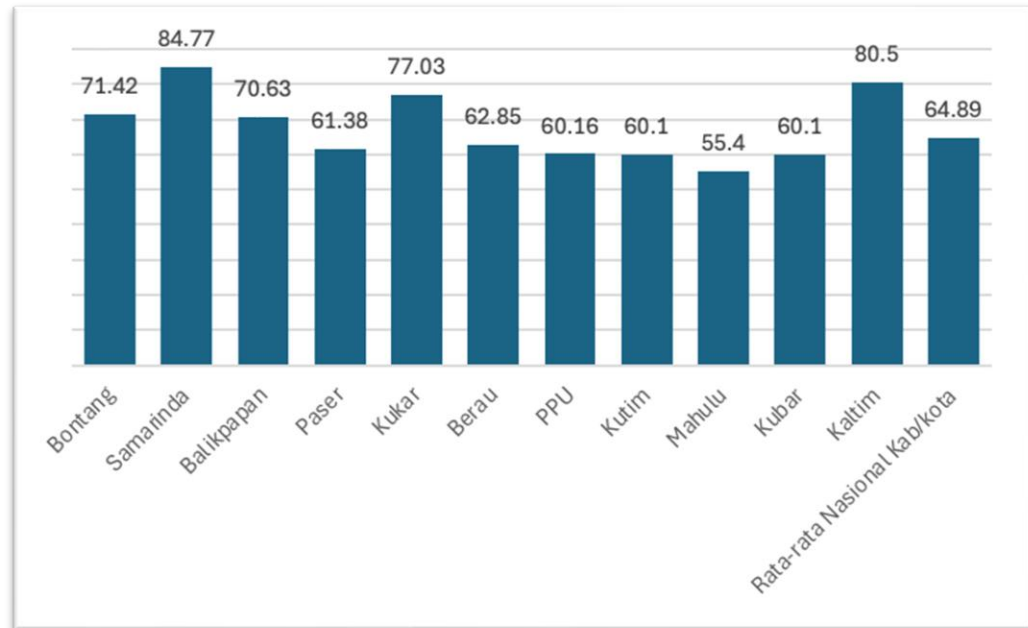
Pada tahun 2021-2023 Nilai SAKIP Kota Bontang mengalami fluktuasi. Hal ini merupakan masa transisi pasca Pandemi Covid 19. Pasca-2022, grafik menunjukkan lompatan performa yang sangat signifikan. Nilai meroket sebesar 2,00 poin menuju angka **70,04** pada tahun 2024 (berhasil menembus ambang batas psikologis predikat **BB**). Tren positif ini berlanjut pesat di tahun 2025 dengan kenaikan 1,38 poin menjadi **71,42**. Capaian tahun 2025 ini

melampaui target yang ditetapkan di dalam RPJMD 2025-2029 untuk tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 70,90.

Keberhasilan ini menunjukkan adanya komitmen perbaikan tata kelola yang bersifat struktural dan berkelanjutan, bukan sekadar perbaikan dokumen sesaat. Perbaikan penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilakukan dalam aspek perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja. Hal ini didorong oleh beberapa faktor pendukung, seperti:

1. Komitmen yang kuat dari Kepala Daerah dan seluruh jajaran Pemerintah Kota Bontang untuk meningkatkan nilai SAKIP;
2. Perbaikan pada komponen perencanaan melalui perbaikan pada kualitas dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, Perjanjian Kinerja, cascading kinerja/pohon kinerja) yang menyeluruh;
3. Pemanfaatan teknologi informasi dalam perencanaan serta monitoring dan evaluasi kinerja melalui aplikasi e-SMART;
4. Peningkatan peran APIP dalam melakukan Reviu SAKIP Perangkat Daerah;
5. Peningkatan kualitas laporan baik pada laporan SAKIP Kota maupun laporan SAKIP Perangkat Daerah.

Jika dibandingkan capaian Nilai SAKIP Kota Bontang tahun 2025 dengan Kabupaten/Kota, maka Kota Bontang menduduki Peringkat ke-3 setelah Kota Samarinda (84,77) dan Kabupaten Kutai Kartanegara (77,03), akan tetapi masih berada di bawah capaian SAKIP Provinsi Kalimantan Timur (80,50). Walaupun Nilai SAKIP Kota Bontang masih berada di atas rata-rata Kabupaten/Kota (64,89), tetapi Kota Bontang masih perlu terus berupaya untuk meningkatkan nilai SAKIP-nya agar target di akhir masa RPJMD 2025-2029 bisa tercapai, yaitu 85,00.



Gambar 3.44 Capaian SAKIP Kabupaten/Kota, Provinsi Kalimantan Timur, dan Rata-rata Nasional Kabupaten/Kota Tahun 2025

Sumber : Sekretariat Daerah, 2026

3.2.4.13.2 Indikator Opini BPK

Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada dasarnya adalah "medical check-up" tahunan bagi kesehatan finansial sebuah daerah. Audit BPK dilakukan untuk memeriksa apakah keuangan daerah telah dicatat, digunakan, dan dilaporkan dengan jujur.

Kota Bontang telah berhasil mempertahankan WTP atas Opini BPK terhadap laporan Keuangan Pemerintah Daerah (2014-2025). Hal ini membuktikan bahwa sistem akuntansi di Pemkot Bontang sudah *mature* (matang). Siapapun pemimpinnya terjadi transisi kepemimpinan di Bontang dari waktu ke waktu birokrasi di bawahnya tetap mampu menjaga ritme tata kelola keuangan yang taat asas. Selain itu, data APBD Bontang 2025 menunjukkan performa anggaran yang sehat. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melampaui target, menyentuh **Rp400,47 miliar (104,07%)**, dan realisasi belanja berada di angka produktif **93,01%**. Angka ini menunjukkan fungsi perencanaan anggaran berjalan presisi.

Predikat WTP yang diperoleh Kota Bontang menunjukkan keberhasilan Pemerintah untuk mencapai target sebagaimana yang dituangkan di dalam RPJMD 2025-2029, maka Kota Bontang telah mencapai target yang ditetapkan. Tetapi target ini bukan lagi, hanya sekedar tercapainya Opini WTP terhadap Laporan Keuangan Daerah, tetapi juga bagaimana laporan keuangan

daerah dapat disajikan dengan memenuhi Standar Akuntansi Pemerintah dan dilaksanakan secara patuh sesuai peraturan perundang-undangan.

Capaian opini WTP ini, tidak hanya didapatkan oleh Pemerintah Kota Bontang, tetapi semua Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan opini WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah masing-masing. Tentu saja ini prestasi yang sangat baik yang menunjukkan konsistensi dan komitmen untuk menyelenggarakan keuangan daerah yang akuntabel, efektif dan efisien.

Beberapa hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas tata kelola keuangan di lingkungan Pemerintah Kota Bontang adalah sebagai berikut:

- a) Penguatan sistem pengendalian internal melalui audit internal berkala dan monitoring penggunaan anggaran.
- b) Peningkatan kapasitas SDM dengan pelatihan berkelanjutan di bidang akuntansi pemerintahan dan manajemen keuangan.
- c) Pemanfaatan teknologi digital untuk mempercepat proses pencatatan, pelaporan, dan pengawasan keuangan daerah.
- d) Kolaborasi lintas perangkat daerah agar setiap unit kerja memiliki tanggung jawab yang jelas dalam menjaga kualitas laporan keuangan.
- e) Evaluasi reguler atas kebijakan fiskal dan prosedur akuntansi guna memastikan kesesuaian dengan standar terbaru.

3.2.4.14 Sasaran 14 Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Digitalisasi Pemerintahan

Sasaran pembangunan ini merupakan penjabaran dari misi ke-3 RPJMD 2025-2029. Peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi prioritas utama dalam reformasi birokrasi Kota Bontang. Digitalisasi pemerintahan terus didorong untuk mempercepat akses layanan, mengurangi praktik birokrasi yang berbelit, serta meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Penyelenggaraan pelayanan publik perlu didukung dengan transformasi digital. Dengan demikian, pelayanan yang cepat, mudah, dan transparan dapat diwujudkan demi kemajuan Kota Bontang.

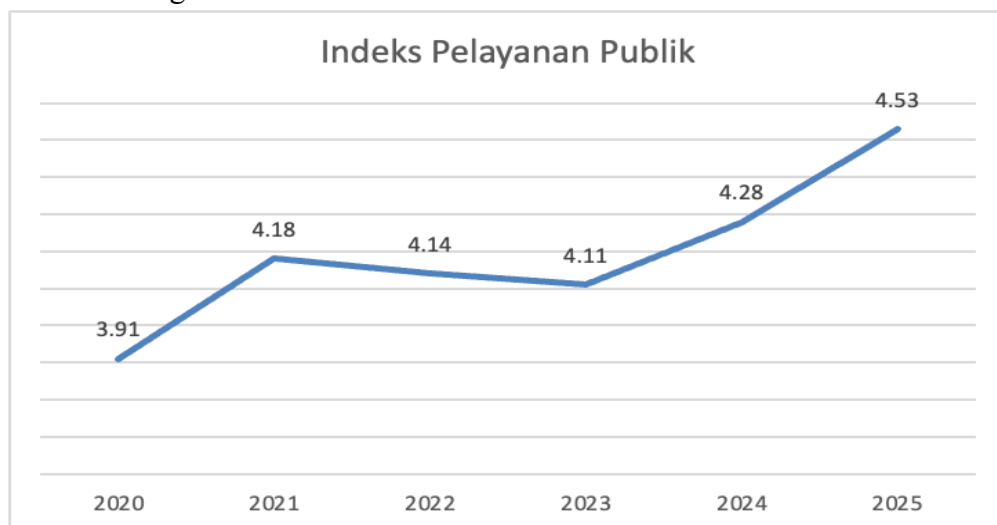
Untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik sehingga benar-benar bisa dirasakan manfaatnya bagi masyarakat, maka digunakan 3 indikator untuk mengukurnya, yaitu: Indeks Pelayanan Publik (IPP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks SPBE) / Indeks Pemerintahan Digital (Pemdi).

IPP merupakan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (EKPPP) oleh KemenPANRB, yang mengevaluasi kesiapan sistem dan

infrastruktur penyelenggaraan pelayanan . IKM mengukur persepsi dan kepuasan nyata yang dirasakan oleh pengguna layanan. Pelaksanaan IKM didasari oleh PermenPANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Sedangkan Indeks SPBE didasari oleh Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE merupakan instrumen yang digunakan untuk menilai, mengukur, dan mengevaluasi tingkat kematangan penyelenggaraan Pemerintah Digital (*Digital Government*) di instansi pusat maupun pemerintah daerah.

3.2.4.14.1 Indikator Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Indeks Pelayanan Publik pada tahun 2025 tercatat sebesar 4,55, meningkat dibandingkan capaian tahun 2024 sebesar 4,28. Realisasi tersebut juga melampaui target yang ditetapkan di tahun 2025 pada RPJMD 2025-2029, yaitu sebesar 4,52, dengan tingkat capaian 104,70%. Berikut ini capaian IPP Kota Bontang tahun 2020-2025.



Gambar 3.45 Capaian IPP Kota Bontang Tahun 2022-2025

Sumber : Sekretariat Daerah, 2026

Jika dianalisis secara makro, perkembangan IPP Kota Bontang menunjukkan performa yang sangat positif dan ekspansif, bertransformasi dari kategori Baik menuju kategori Pelayanan Prima (Skala >4.5).

- Fase Akselerasi Awal (2020–2021): Terjadi lonjakan signifikan dari nilai 3.91 ke 4.18. Kenaikan tajam ini mengindikasikan adanya respons kebijakan yang masif dalam membenahi standar pelayanan, terutama adaptasi sistem pelayanan publik digital di tengah situasi pandemi COVID-19.
- Fase Stagnasi dan Koreksi Minor (2021–2023): Tren menunjukkan penurunan tipis yang konsisten selama dua tahun berturut-turut, yaitu dari

4.18 (2021) ke 4.14 (2022) menjadi 4.11 (2023). Dalam analisis kebijakan publik, fluktuasi minor ini wajar terjadi (fase jenuh atau *plateau*). Hal ini biasanya dipicu oleh perubahan instrumen/indikator penilaian dari KemenPAN RB yang semakin ketat (misalnya peningkatan bobot pada aspek inklusivitas disabilitas dan integrasi sistem informasi).

- Fase Lompatan Prima (2023–2025): Ini adalah pencapaian paling impresif. Kinerja pelayanan publik Bontang melesat dari 4.11 (2023) menjadi 4.28 (2024), hingga menembus angka 4.53 pada tahun 2025. Angka 4.53 menempatkan Kota Bontang pada kasta tertinggi pelayanan publik (Predikat A / Pelayanan Prima).

Melonjaknya nilai IPB hingga mencapai 4.53 pada tahun 2025 dipicu oleh beberapa intervensi kebijakan strategis:

1. Optimalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Bontang: Pemusatan berbagai jenis layanan (perizinan, adminduk, instansi vertikal) dalam satu atap fisik dan sistem digital terpadu berhasil memotong rantai birokrasi, menghemat waktu, dan menekan biaya pengurusan bagi masyarakat.
2. Peningkatan Kepatuhan Standar Pelayanan (UU 25/2009): Pemkot Bontang secara masif memastikan setiap Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) contoh seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) memenuhi komponen wajib: Maklumat Pelayanan, Sistem Pengelolaan Pengaduan (SP4N-LAPOR!), dan transparansi tarif.
3. Komitmen Inklusivitas Sarana Prasarana: Penilaian IPP beberapa tahun terakhir memberikan bobot besar bagi fasilitas ramah kelompok rentan. Keberhasilan Bontang mengindikasikan bahwa unit-unit layanan utamanya telah dilengkapi dengan guiding block, bidang miring (ramp), toilet disabilitas, ruang laktasi, dan area bermain anak yang fungsional.
4. Digitalisasi Layanan Terintegrasi: Keselarasan implementasi Arsitektur SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) lokal yang matang mempermudah verifikasi administrasi secara otomatis, mengurangi human error, serta mempercepat penerbitan dokumen produk layanan.

Tabel 3.29 Capaian IPP Kalimantan Timur, Kota Bontang, Kota Samarinda dan Kota Balikpapan Tahun 2025

No	Nilai IPPP	Nilai	Kategori
1.	Kalimantan Timur	4.35	-A
2.	Samarinda	4.67	A

No	Nilai IPPP	Nilai	Kategori
3.	Balikpapan	4.7	A
4.	Bontang	4.53	A

Sumber : Sekretariat Daerah, 2026

Tabel 3.30 Target IPP Kota Bontang di dalam RPJMD 2025-2029

INDIKATOR	TARGET				
	2025	2026	2027	2028	2029
Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,32	4,35	4,38	4,41	4,44

Sumber : Bapperida, 2026

Merujuk pada data di atas, maka Kota Bontang harus terus meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik. Walaupun capaian IPP Kota Bontang melampaui Provinsi Kalimantan Timur dan telah melampaui target IPP di akhir RPJMD, akan tetapi capaian IPP Kota Bontang masih di bawah Kota Samarinda dan Kota Balikpapan.

Meskipun telah mencapai predikat Pelayanan Prima (4.53), ada beberapa tantangan dimasa depan untuk melanjutkan keberlanjutan pelayanan publik di Kota Bontang, yaitu:

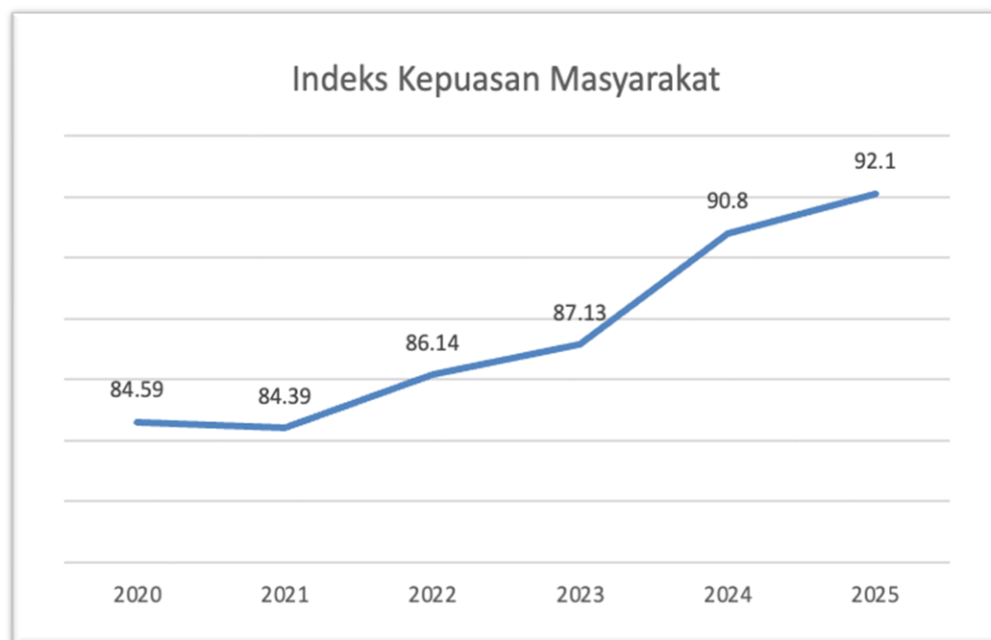
1. **Efek *Spillover* dan Replikasi Kinerja yang Belum Merata:** Penilaian IPP KemenPANRB umumnya masih berfokus pada *leading sector* (sampel UPP utama seperti DPMPTSP, Disdukcapil, RSUD, atau Kecamatan tertentu). Tantangan riilnya adalah bagaimana mentransfer standar kualitas "Prima" ini ke unit yang bersentuhan langsung dengan akar rumput, seperti seluruh Puskesmas, Kelurahan, dan Dinas teknis lainnya agar tidak terjadi ketimpangan kualitas pelayanan.
2. **Tekanan Integrasi Kebijakan Pusat (GovTech INA Digital):** Dengan lahirnya Perpres 82/2023 tentang Percepatan Transformasi Digital, Bontang dituntut untuk menyelaraskan seluruh aplikasi pelayanan publik lokalnya ke dalam ekosistem portal nasional (Interoperabilitas penuh). Ego sektoral antar-bidang yang ingin mempertahankan aplikasi mandiri dapat menghambat penilaian tata kelola pelayanan masa depan.
3. **Anomali Ekspektasi Publik (IPP vs IKM):** Semakin canggih sarana dan sistem yang dibangun (IPP tinggi), maka ekspektasi dan batas toleransi masyarakat terhadap kesalahan pelayanan justru akan

semakin tipis. Sedikit saja hambatan atau ketidakramahan petugas di lapangan akan langsung memicu sentimen negatif yang berdampak pada Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Kota Bontang saat ini berada di jalur (*on the right track*) yang sangat positif dalam aspek tata kelola sistem pelayanan. Tugas terbesarnya kini adalah menjaga konsistensi, meratakan kualitas ke seluruh unit kerja terkecil, dan mempercepat respons penanganan keluhan masyarakat demi mengunci target opini kualitas tertinggi secara berkelanjutan.

3.2.4.14.2 Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2025 tercatat mencapai 92,8, meningkat 0,19 poin dibandingkan capaian tahun 2024 yang terealisasi sebesar 90,66. Realisasi tersebut melampaui target tahun 2025 pada RPJMD 2025-2029 yang ditetapkan sebesar 90,85, dengan tingkat capaian 102,15%. Selama beberapa tahun terakhir, capaian IKM juga menunjukkan peningkatan yang signifikan. Peningkatan ini menunjukkan adanya persepsi positif masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah.



Gambar 3.46 Capaian IKM Kota Bontang Tahun 2022-2025

Sumber : Sekretariat Daerah, 2026

Kenaikan impresif hingga mencapai **92.1** di tahun 2025 dipicu oleh beberapa faktor kebijakan strategis berikut:

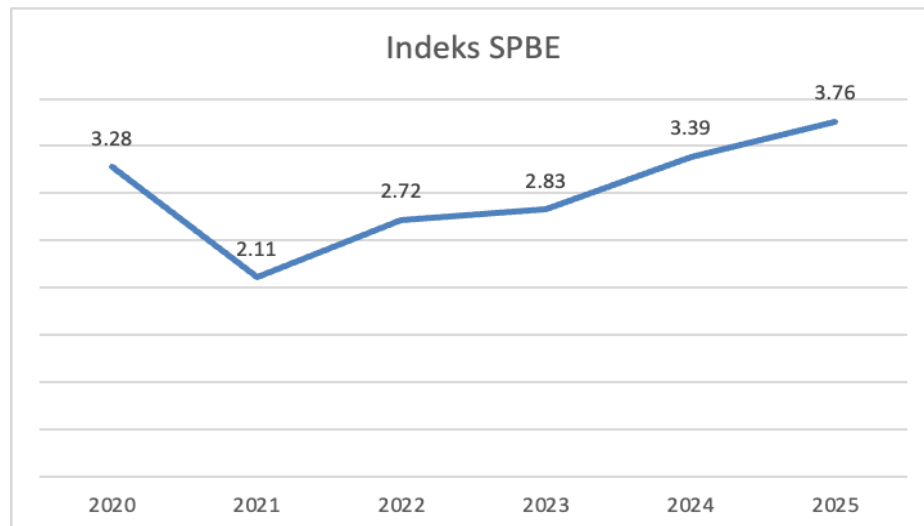
- **Penyederhanaan Birokrasi dan Deregulasi:** Pemangkasan prosedur (*proses bisnis*) pelayanan yang berbelit-belit. Kebijakan standarisasi waktu penyelesaian pelayanan dan kepastian biaya berhasil menekan praktik pungutan liar secara drastis.
- **Integrasi Layanan Digital Terpadu (*Satu Data/MPP Digital*):** Tidak lagi menggunakan aplikasi yang terfragmentasi (terpecah-pecah), pemerintah berhasil mengintegrasikan berbagai layanan dalam satu portal/ekosistem digital, sehingga mempermudah akses masyarakat dari mana saja dan kapan saja.
- **Kultur Aparatur Sipil Negara (ASN) Berorientasi Pelayanan:** Efektifnya internalisasi nilai dasar ASN *BerAKHLAK* yang dikawal ketat oleh sistem evaluasi kinerja berbasis output, yang memaksa lini depan (*frontliner*) mengubah pola pikir dari "layanan birokratis" menjadi "layanan ramah publik".
- **Optimalisasi Pengaduan dan Respons Cepat:** Mekanisme penanganan keluhan masyarakat (seperti SP4N-LAPOR!) yang terhubung langsung dengan indikator kinerja utama (IKU) kepala instansi, membuat setiap keluhan publik diselesaikan dengan kepastian lini waktu yang jelas.

Meskipun saat ini berada di angka prima (**92.1**), mempertahankan atau meningkatkannya menjadi tantangan yang tidak mudah. Tugas pemerintah saat ini adalah menggeser fokus dari yang semula "membangun sistem pelayanan" menjadi "**menjaga resiliensi sistem, mengamankan data, dan meratakan kualitas pelayanan**" agar kepuasan masyarakat yang sudah sangat tinggi ini dapat berkelanjutan.

3.2.4.14.3 Indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) / Indeks Pemerintahan Digital (Pemdi)

Indeks SPBE merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat kematangan (*maturity level*) pelaksanaan e-government di instansi pemerintah (pusat maupun daerah). Sedangkan Indeks Pemerintahan Digital adalah instrumen yang mengukur seberapa jauh digitalisasi sudah diadopsi, diakses dengan mudah, dan benar-benar mengubah cara hidup masyarakat. Indikator ini dievaluasi dan dikomandoi oleh Kementerian PANRB.

Pada tahun 2025 capaian Indeks SPBE meningkat dari 3,39 menjadi 3,76 atau naik 0.37 poin. Capaian ini melampaui target di dalam RPJMD 2025-2029 yang ditetapkan 3,59. Selama beberapa tahun terakhir Indeks SPBE mengalami fluktuasi sebagaimana pada gambar di bawah ini.



Gambar 3.47 Capaian Indeks SPBE Kota Bontang Tahun 2020-2025

Sumber : Sekretariat Daerah, 2026

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2020-2021 Indeks SPBE mengalami kemerosotan tajam. Penurunan tajam ini didorong oleh adanya perubahan instrumen atau indikator penilaian evaluasi SPBE yang lebih ketat oleh KemenPANRB pada tahun 2021 (transisi ke regulasi evaluasi baru). Banyak aplikasi instansi yang sebelumnya dianggap "ada" ternyata tidak terintegrasi (*silo*) sehingga nilainya jatuh saat diaudit secara ketat. Pada tahun 2021-2023 mulai merangkak naik ke 2.72 (2022) dan 2.83 (2023). dan pada tahun 2023-2025 terjadi lonjakan performa yang sangat impresif dari **2.83** melesat ke **3.39** (2024) dan berhasil menembus angka **3.76** di tahun 2025. Kenaikan eksponensial dalam dua tahun terakhir ini menunjukkan bahwa reformasi arsitektur digital dan interoperabilitas sistem telah berjalan sepenuhnya di lapangan.

Lompatan besar menuju nilai **3.76** didorong oleh beberapa faktor kunci, yaitu:

- Penerapan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE yang Selaras:** Pemerintah Kota Bontang telah membangun Arsitektur SPBE melalui Keputusan Wali Kota Bontang No. 100.3.3.3/356/KOMINFO/2025 Tahun 2025 tentang Perubahan Keputusan Wali Kota Bontang No. 100.3.3.3/369/KOMINFO/2024 dan telah menyelaraskan dengan arsitektur SPBE nasional.
- Keberhasilan Interoperabilitas Layanan (Sistem Berbagi Pakai):** Kenaikan nilai mencerminkan implementasi *Single Sign-On* (SSO) dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) yang berjalan baik, sehingga ego sektoral data antar-dinas berhasil dipangkas.

3. **Komitmen Kuat Manajemen Puncak (*Tone from the Top*):** Kepala Daerah dan seluruh Kepala Perangkat Daerah telah berkomitmen untuk mewujudkan *smart city*, dimana semua proses digitalisasi pemerintahan dipantau dan diintegrasikan.
4. **Peningkatan Keamanan Informasi:** Adanya pemenuhan standar keamanan, seperti penerapan sertifikat elektronik (TTE), audit keamanan teknologi informasi secara rutin, dan kerja sama mitigasi dengan BSSN.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 8 Tahun 2026 tentang Evaluasi Kinerja Pemerintahan Digital, maka pada tahun 2026, instrumen indeks SPBE diubah menjadi Indeks Pemerintahan Digital. Dengan demikian, tantangannya adalah terjadinya pergeseran paradigma penilaian dari yang semula berbasis ketersediaan sistem internal (*system-centric*) menjadi berbasis dampak nyata dan kenyamanan pengguna (*user-centric*) yang dapat mempengaruhi capaian indeks pemerintahan digital ke depannya. Tantangan itu terutama terkait dengan:

1. Konsolidasi Aplikasi ke dalam satu portal terpadu;
2. Kesenjangan Kompetensi Digital ASN yang dapat mempengaruhi operasional SPBE rentan lumpuh jika terlalu bergantung pada vendor (pihak ketiga). Untuk itu perlu mengubah kebiasaan kerja manual atau semi digital menjadi ekosistem digital yang lincah.
3. Jaminan Keamanan Siber dan Privasi; Ketika semua sistem diintegrasikan ke dalam satu payung pemerintah digital, risiko kebocoran data nasional meningkat drastis. Pemerintah dituntut memenuhi standar keamanan ketat yang selaras dengan UU Perlindungan Data Pribadi (PDP), bukan sekadar memiliki antivirus atau *firewall* dasar.
4. Ketimpangan Infrastruktur dan Anggaran Daerah; masih perlunya anggaran untuk membangun infrastruktur TIK di tengah kondisi tekanan fiskal saat ini.
5. Pengukuran Berorientasi Pengguna (*User-Centric*); Indeks Pemdi mengukur seberapa sering aplikasi tersebut digunakan dan seberapa mudah masyarakat menyelesaikan urusannya. Ini menuntut pembenahan total pada sisi *User Experience* (UX) layanan publik digital.

3.3. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bontang tahun 2025 tercatat sebesar **Rp3.173.022.018.666,26** di mana berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar **Rp.384.830.817.025,00** dari pendapatan transfer sebesar **Rp2.477.950.231.195,00** dari pendapatan daerah lain yang sah sebesar **Rp28.083.452.549,00**.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA BONTANG TAHUN 2025



Dari alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD Perubahan 2025 sebesar **Rp3.173.022.018.666,26**, Pemerintah Kota Bontang berhasil merealisasikan anggarannya sebesar **Rp2.951.281.269.753,89** atau **93,01** persen dari nilai atau pagu APBD Perubahan tahun 2025. Adapun secara detail realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 3.31 Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 (*unaudited*)

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	2.890.864.500.769,00	2.846.725.346.601,10	98,47	2.817.668.394.556,87
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	384.830.817.025,00	400.476.550.622,60	104,06	329.657.276.443,99
4.1.01	Pajak Daerah	221.509.159.000,00	210.853.103.973,50	95,18	150.018.177.986,95
4.1.02	Retribusi Daerah	126.127.573.000,00	132.963.277.376,00	105,41	107.833.253.435,03
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.453.961.893,38	4.306.542.274,38	96,69	4.137.180.321,93
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	32.740.123.131,62	52.353.626.998,72	159,90	67.668.664.700,08
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	384.830.817.025,00	400.476.550.622,60	104,06	329.657.276.443,99
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.477.950.231.195,00	2.422.227.884.153,00	97,75	2.412.503.986.437,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.994.919.617.000,00	1.998.933.813.335,00	100,20	2.051.183.904.273,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	483.030.614.195,00	423.294.070.818,00	87,63	361.320.082.164,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	483.030.614.195,00	423.294.070.818,00	87,63	361.320.082.164,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	2.477.950.231.195,00	2.422.227.884.153,00	97,75	2.412.503.986.437,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	28.083.452.549,00	24.020.911.825,50	85,53	75.507.131.675,88
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	2.296.338.156,60
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	28.083.452.549,00	24.020.911.825,50	85,53	73.210.793.519,28
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	28.083.452.549,00	24.020.911.825,50	85,53	75.507.131.675,88
	JUMLAH PENDAPATAN	2.890.864.500.769,00	2.846.725.346.601,10	98,47	2.817.668.394.556,87
5	BELANJA DAERAH	3.173.022.018.666,26	2.951.281.268.573,89	93,01	3.117.029.950.793,71
5.1	BELANJA OPERASI	1.882.004.460.648,26	1.753.952.096.542,17	93,19	2.064.462.920.368,71
5.1.01	Belanja Pegawai	798.344.677.285,26	767.922.271.108,00	96,18	709.969.282.885,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.002.728.947.524,00	911.379.627.758,17	90,88	1.257.207.393.171,71
5.1.05	Belanja Hibah	76.207.070.089,00	70.466.210.676,00	92,46	96.086.644.312,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4.723.765.750,00	4.183.987.000,00	88,57	1.199.600.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	1.882.004.460.648,26	1.753.952.096.542,17	93,19	2.064.462.920.368,71
5.2	BELANJA MODAL	1.284.492.598.818,00	1.196.324.172.031,72	93,13	1.051.965.132.367,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	50.230.720.479,00	31.193.192.567,00	62,09	5.263.015.170,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	262.657.007.538,00	238.592.991.131,00	90,83	243.101.129.946,00



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA BONTANG TAHUN 2025



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	163.187.065.860,00	146.097.987.026,00	89,52	259.132.176.018,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	796.956.019.297,00	769.899.572.922,72	96,60	537.738.283.319,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.761.814.644,00	7.490.039.425,00	96,49	5.130.404.098,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	3.699.971.000,00	3.050.388.960,00	82,44	1.600.123.816,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	1.284.492.598.818,00	1.196.324.172.031,72	93,13	1.051.965.132.367,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	6.224.959.200,00	705.000.000,00	11,32	601.898.058,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	6.224.959.200,00	705.000.000,00	11,32	601.898.058,00
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	6.224.959.200,00	705.000.000,00	11,32	601.898.058,00
5.4	BELANJA TRANSFER	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	3.173.022.018.666,26	2.951.281.268.573,89	93,01	3.117.029.950.793,71
	SURPLUS/DEFISIT	(282.157.517.897,26)	(104.555.921.972,79)	37,05	(299.361.556.236,84)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	282.157.517.897,26	282.157.517.897,00	99,99	581.519.074.134,10
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	282.157.517.897,26	282.157.517.897,00	99,99	606.519.074.134,10
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	282.157.517.897,26	282.157.517.897,00	99,99	606.519.074.134,10
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	282.157.517.897,26	282.157.517.897,00	99,99	606.519.074.134,10
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	25.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00	25.000.000.000,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	25.000.000.000,00

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah , 2026

Memperhatikan data realisasi APBD sebagaimana di atas, pada pos belanja daerah hanya mampu terealisasi 98,47 persen sebesar Rp2.846.725.346.601,10 dari target APBD Perubahan 2025 sebesar Rp2.890.864.500.769,00. Sementara itu pada sisi beban belanja tahun 2025 lebih besar daripada pendapatan daerah.

Penurunan kinerja pendapatan daerah ini dipengaruhi oleh adanya kebijakan pusat berupa pengurangan alokasi transfer ke daerah. Pemberlakuan UU HKPD juga membawa konsekuensi adanya penurunan PAD khususnya karena adanya ketentuan mengenai opsen PKB dan BBNKB yang menggantikan skema bagi hasil pajak daerah. Selain itu, Kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2025 mengalami perubahan setelah diberlakukannya Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang ditargetkan Rp1.994.919.617,- pada tahun 2025 hanya terealisasi sebesar 98,64 persen atau sebesar

Rp1.967.940.803.809,-. Sedangkan Pendapatan Transfer Antar Daerah hanya terealisasi sebesar 87,63 persen atau sebesar Rp423.294.070.818,- dari target Rp483.030.614.195,-. Penurunan ini terutama karena realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi tidak tersalurkan sebesar target yang telah ditetapkan.

Pada sisi Belanja Daerah, tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp3.173.022.018.666,26 dengan realisasi sebesar Rp2.951.281.268.573,89 atau 93,01% dari target. Untuk menutupi belanja yang lebih besar dari belanja, diproyeksikan Penerimaan Pembiayaan Daerah pada APBD 2025 sebesar Rp282.157.517.897,26.

Selama 5 tahun terakhir, serapan anggaran Pemerintah Kota Bontang menunjukkan hasil yang sangat Baik dengan rata-rata 90,66 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pada tahun 2025 dapat dilaksanakan dengan sangat baik sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan di dalam APBD. Hal ini didukung oleh beberapa faktor, seperti: komitmen pimpinan dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan secara efektif, efisien dan akuntabel; monitoring dan evaluasi yang ketat dari pimpinan dan dalam pelaksanaan APBD; akselerasi program prioritas pembangunan yang diarahkan pada program-program yang berdampak langsung dan dapat dirasakan oleh masyarakat. Adapun capaian realisasi anggaran selama 5 tahun terakhir sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel. 3.32 Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2021-2025

TAHUN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	Serapan Anggaran (%)
2021	1.287.088.373.928,00	1.206.801.559.080,47	15.443.538.460	93,76
2022	1.566.982.158.682,00	1.797.622.874.064,59	211.862.421.726,00	87,21
2023	2.532.272.667.551,00	2.193.037.806.236,00	339.234.861.315,00	86,60
2024	3.360.998.808.720,00	3.117.016.950.793,71	243.981.857.926,29	92,74
2025	3.173.022.018.666,26	2.951.281.268.573,89	221.740.750.092,37	93,01
Rata-rata Serapan Anggaran				90,66

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah , 2026

3.4 CAPAIAN EFISIENSI SUMBER DAYA

Hasil pengukuran efisiensi sumber daya pelaksanaan pembangunan tahun 2025 menunjukkan hasil Baik dengan tingkat efisiensi 15,47 persen. Rata-rata capaian kinerja Tujuan dan Sasaran 99,28 dan capaian anggaran 91,98. Dari kacamata *Value for Money* (VfM), hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Kota Bontang berhasil mencapai target kinerja yang optimal tanpa harus menghabiskan seluruh sisa pagu anggaran secara boros (terjadi penghematan ruang fiskal yang produktif).

Tingkat Efisiensi dibagi menjadi 3 kategori, yaitu:

- **0% s.d. 20% = Baik** (Capaian kinerja optimal dengan penghematan anggaran yang proporsional).
- **> 20% = Tidak Baik** (Terjadi deviasi terlalu besar, potensi sisa anggaran berlebih/kurang akuratnya perencanaan, atau kinerja drop).
- **< 0% = Tidak Baik** (Teoritis menunjukkan persentase realisasi anggaran lebih besar daripada persentase capaian kinerja/pemborosan).

Tabel. 3.33 Efisiensi Sumber Daya Pembangunan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian (%)		Efisiensi (%)
			Kinerja	Anggaran	
1	Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif	Indeks Reformasi Birokrasi	110	91.96	18.04
		Nilai LPPD	73	88.34	77.31
		Opini BPK	22.69		22.69
2	Meningkatnya Kondusivitas Wilayah	Jumlah Konflik	100	96.15	3.85
		Persentase Penyelesaian Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum	100	95.91	4.09
3	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan Yang Maju dan Tangguh	Indeks Kualitas Perkotaan	90.93	93.09	-2.16
4	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan tata ruang yang lestari	Indeks Kualitas lingkungan hidup	102.52	92.47	10.05
5	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi non migas	Laju Pertumbuhan Ekonomi Non Migas	110	94.47	15.53

No	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian (%)		Efisiensi (%)
			Kinerja	Anggaran	
6	Meningkatnya akses layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas	Angka harapan lama sekolah	100.51	77.89	22.62
		Rata-rata lama sekolah	100.09	82.49	16.6
		Usia harapan hidup	100.17	95.96	4.21
7	Meningkatnya tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing	Tingkat Pengangguran Terbuka	100.36	98.89	1.47
8	Meningkatnya pemberdayaan sosial	Angka Kemiskinan	103.02	96.19	6.83

Sumber : Sekretariat Daerah, 2026

1. Indikator Berpredikat "Baik" (Efisiensi 1 - 20%)

Berdasarkan tabel di atas, terdapat beberapa indikator yang tingkat efisiensi "Baik" dengan tingkat efisiensi antara 2-20%, yaitu

- **Indeks Reformasi Birokrasi (18.04%):** Kinerja melampaui target (110%) dengan serapan anggaran 91.96%.
- **Jumlah Konflik (3.85%) & Penyelesaian Gangguan Ketertiban (4.09%):** Kondusifitas wilayah terjaga 100% dengan serapan anggaran berkisar 95%-96%.
- **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (10.05%):** Kinerja mencapai 102.52% dengan anggaran 92.47%.
- **Laju Pertumbuhan Ekonomi Non-Migas (15.53%):** Kinerja sangat tinggi (110%) dengan serapan 94.47%.
- **Rata-rata Lama Sekolah (16.6%) & Usia Harapan Hidup (4.21%):** Keduanya berhasil mencapai target kinerja di atas 100% secara efisien.
- **Tingkat Pengangguran Terbuka (1.47%) & Angka Kemiskinan (6.83%):** Mampu mengungkit kinerja ketenagakerjaan dan sosial di atas 100% dengan penyerapan fiskal yang optimal (96%-98%).

Beberapa faktor pendorong keberhasilan efisiensi sumber daya di atas dipengaruhi oleh:

1. Komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh jajaran untuk mencapai target yang telah ditetapkan;

2. Adanya perencanaan yang tepat, sehingga tidak terjadi *gap* yang tinggi antara perencanaan anggaran dengan realisasi anggaran dan antara target kinerja dengan capaian kinerja;
3. kematangan pelaksanaan di lapangan, sehingga program kegiatan dapat dilaksanakan tepat sebagaimana yang direncanakan

2. Indikator Berpredikat "Tidak Baik" (Efisiensi > 20%)

Terdapat tiga indikator yang masuk dalam kategori tidak baik karena nilai efisiensinya melampaui ambang batas 20%. Hal ini mencerminkan adanya masalah perencanaan atau ketidakselarasan eksekusi:

- **Nilai LPPD (77.31%):** Indikator ini mencatatkan rapor merah yang paling mencolok. Capaian kinerjanya sangat rendah, hanya **73%**, namun menyerap anggaran hingga **88.34%**. Ini menunjukkan inefisiensi yang parah.
- **Opini BPK (22.69%):** Walaupun kinerjanya sempurna (100%), namun realisasi anggaran hanya **77.31%**. Deviasi efisiensi di atas 20% ini menandakan adanya *over-budgeting* (penganggaran terlalu besar) saat perencanaan awal.
- **Angka Harapan Lama Sekolah (22.62%):** Mirip dengan kasus Opini BPK, kinerjanya tercapai (100.51%) tetapi penyerapan anggarannya terlalu rendah (77.89%), sehingga menyisakan sisa anggaran (*silpa*) yang tidak produktif bagi sektor pendidikan.

Penyebab Efisiensi > 20% pada Kasus: Nilai LPPD (77.31%), Opini BPK (22.69%), Angka Harapan Lama Sekolah (22.62%) adalah:

- **Perencanaan Makro yang Kurang Akurat (*Over-Budgeting*):** Pada kasus *Opini BPK* dan *Angka Harapan Lama Sekolah*, target kinerja tercapai penuh, namun menyisakan anggaran yang sangat besar (hanya terserap ~77%). Ini menandakan pagu awal yang dikunci terlalu besar, sehingga mematikan potensi anggaran tersebut untuk dialokasikan ke program mendesak lainnya (*opportunity cost*).
- **Kegagalan Eksekusi Radikal (Kasus Spesifik: Nilai LPPD):** Ini adalah potret inefisiensi terburuk pada tabel, di mana anggaran habis banyak (88.34%) tetapi kinerjanya sangat rendah (73%). Faktor penyebabnya meliputi:
 - Anggaran habis untuk komponen pendukung (seperti honor tim, rapat koordinasi berkali-kali, atau perjalanan dinas konsultasi) daripada substansi pemenuhan dokumen LPPD itu sendiri.

- o Lemahnya koordinasi pengumpulan data sektoral antar-OPD, sehingga anggaran habis terbuang namun output dokumen yang dihasilkan tidak maksimal saat dinilai oleh tim pusat.

3. Indikator Berpredikat "Tidak Baik" (Efisiensi < 0%)

- **Indeks Kualitas Perkotaan (-2.16%):** Ini adalah satu-satunya indikator yang masuk dalam kategori minus. Penyerapan anggaran tercatat sebesar **93.09%**, namun capaian kinerjanya tertinggal di angka **90.93%**. Kondisi ini mengindikasikan terjadinya pemborosan fiskal di mana uang yang dikeluarkan tidak mampu mengungkit output kinerja ke tingkat yang setara.

Kasus minus ini terjadi karena serapan anggaran tinggi (93.09%) tetapi kinerjanya tertinggal di angka 90.93% adalah:

- **Kenaikan Harga Satuan di Tengah Jalan:** Terjadinya inflasi bahan baku material atau perubahan desain infrastruktur perkotaan yang membuat biaya membengkak tanpa menambah volume output fisik.
- **Faktor Hambatan Geografis/Cuaca:** Penyerapan keuangan tetap berjalan untuk membayar termin proyek, namun pekerjaan fisik di lapangan tertunda akibat kendala teknis atau cuaca, sehingga capaian kinerja akhir tahun tidak mampu mengejar persentase keuangannya.

Sebagai langkah korektif maka Pemerintah Kota Bontang harus melakukan pengetatan yang efektif dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi agar penyerapan anggaran yang tinggi atau kinerja yang terlalu rendah dapat diantisipasi lebih awal dan disiapkan langkah untuk mengatasi hal tersebut.

3.5 Penghargaan Kota Bontang 2025

1. Penghargaan Arindama Bidang Pembangunan Sosial.

Pemberian penghargaan ini didasarkan dari perhitungan dan penilaian hasil pelaksanaan kinerja Pemerintah Kota Bontang



Gambar 3.48 Penghargaan Arindama Pemerintah Kota Bontang
Tahun 2025

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Bontang, 2025

2. Penghargaan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan (LJP) BPK RI dengan Opini “WTP”.

Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, menghadiri acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur di Ruang Auditorium Nusantara, Kantor BPK Kaltim, Jalan M. Yamin, Samarinda, Jumat (23/5/2025). Kali ini, Pemerintah Kota Bontang berhasil mempertahankan capaian meraih Opini penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari LHP tersebut dan berturut-turut sejak 2015.



Gambar 3.49 Penghargaan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan (LJP) BPK RI dengan Opini “WTP” Tahun 2025

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Bontang, 2025

3. Penghargaan Produk Hukum Yang Berkualitas

Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menerima penghargaan bergengsi atas komitmen Pemerintah Kota Bontang dalam membangun daerah melalui produk hukum yang berkualitas. Piagam Penghargaan diserahkan langsung Direktur Jenderal Perundang-undangan Kemenkum RI, Dhahanaputra didampingi Direktur Pengundangan, Penerjemah, Publikasi, dan Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan Kemenkum RI, Alexander Palti dan Kepala Kanwil Kemenkumham Kaltim, Muhammad Ikmal Idrus, di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil) Kalimantan Timur, Jalan MT Haryono, Samarinda, pada Rabu (28/5/2025).



Gambar 3.50 Penghargaan Produk Hukum Yang Berkualitas
Sumber : Sekretariat Daerah Kota Bontang, 2025

4. Penghargaan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Tahun 2025

Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang sukses menorehkan prestasi gemilang dengan meraih predikat UNGGUL dalam ajang Penganugerahan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Award 2025 yang diselenggarakan oleh Lembaga Adminitrasi Negara (LAN). Penghargaan bergengsi ini diserahkan oleh Kepala LAN RI Muhammad Taufiq dan diterima langsung oleh Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, di Hotel Samator Novotel Surabaya, Jawa Timur, Selasa 25 November 2025. Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) sendiri adalah instrumen ketat yang dirancang untuk mengukur "kesehatan" sebuah kebijakan publik. Sebuah daerah tidak akan mendapatkan predikat Unggul jika kebijakannya hanya bagus di atas kertas (Perencanaan).



Gambar 3.51. Penghargaan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)
Tahun 2025
Sumber : Sekretariat Daerah Kota Bontang, 2025

5. Penghargaan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)

Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang berhasil meraih penghargaan atas capaian dalam penyelenggaraan kearsipan daerah tahun 2024 dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Penghargaan diserahkan oleh Kepala ANRI, Mego Pinandito dan diterima secara langsung oleh Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, dalam Rapat Koordinasi Identifikasi Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Kearsipan Pemerintah Daerah Wilayah I di Jakarta, Selasa (21/10/2025).



Gambar 3.52. Penghargaan Kota Layak Anak Tahun 2025

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Bontang, 2025

6. Penghargaan Indonesia Smart Nation Award (ISNA)

Atas komitmennya dalam menerapkan tata kelola dan pembangunan daerah berbasis konsep kota cerdas, Kota Bontang terpilih sebagai salah satu penerima penghargaan bergengsi dalam ajang Indonesia Smart Nation Award (ISNA) 2025



Gambar 3.53. Penghargaan Indonesia Smart Nation Award (ISNA) Tahun 2025

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Bontang, 2025

7. Penghargaan Pembentukan Pos Bantuan Hukum oleh Kemenkum RI

Komitmen Pemerintah Kota Bontang dalam memberikan akses keadilan bagi seluruh masyarakat kembali mendapat pengakuan nasional. Kota Bontang resmi meraih penghargaan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia atas keberhasilan membentuk Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di semua kelurahan. Penghargaan tersebut diserahkan pada Rabu (17/9/2025) di Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Timur (Kaltim).

Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni hadir langsung menerima penghargaan bergengsi itu. Capaian ini menjadi bukti nyata bahwa layanan bantuan hukum kini dapat diakses secara lebih mudah oleh warga. Total ada 15 Posbakum yang telah berdiri di setiap kelurahan. Warga bisa berkonsultasi maupun mendapatkan pendampingan awal secara gratis ketika menghadapi persoalan hukum.



Gambar 3.54. Penghargaan Pembentukan Pos Bantuan Hukum
Sumber : Sekretariat Daerah Kota Bontang, 2025

8. Penghargaan Kabupaten/Kota Sehat Tahun 2025 dan Penghargaan Kabupaten/Kota STBM Award 2025

Pemerintah Kota Bontang pada Tahun 2025 meraih penghargaan sebagai Kota Sehat dan Penghargaan Kabupaten/Kota STBM Award 2025 seluruh Indonesia dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia Bapak Budi G. Sadikin yang diserahkan pada tanggal 28 November 2025 di Jakarta.



Gambar 3.55. Penghargaan Kabupaten/Kota Sehat Tahun 2025
Sumber : Sekretariat Daerah Kota Bontang, 2025

9. Penghargaan UI Greencitymetric 2025

Pemerintah Kota Bontang kembali menorehkan prestasi di kancah nasional dengan diterimanya penghargaan UI Green City Metric 2025. Penghargaan ini diserahkan dalam acara penganugerahan di Kota Madiun, Kamis (2/10/2025).

Dalam kesempatan itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Bontang, Sony Suwito Adi Cahyono, hadir mewakili Wali Kota Bontang untuk menerima penghargaan. Sony didampingi oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bontang, Heru Tri Admojo.



Gambar 3.56. Penghargaan Kota Bontang Piala Adi Pura Kencana
Sumber : Sekretariat Daerah Kota Bontang, 2025

10. Penghargaan SAKIP dan ZI Award Tahun 2025.

Enam Puskesmas di Kota Bontang telah diusulkan untuk mengikuti seleksi pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia, dan pada tanggal 11 Februari 2025 diumumkan secara resmi bahwa dari enam Puskesmas yang diusulkan, tiga Puskesmas berhasil mendapatkan predikat Zona Integritas Menuju WBK/WBBM melalui acara SAKIP dan ZI Award 2025 di Gedung Auditorium Kementerian PANRB di Jakarta melalui daring sesuai undangan yang diterima oleh Pemerintah Kota Bontang.





Gambar 3.57. Penghargaan 3 Puskesmas Kota Bontang Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Tahun 2025

Sumber : KemenpanRB, 2025

11. Penghargaan Terbaik Sebagai Badan Publik Informatif Kategori Pemerintah Kab/Kota.

Penghargaan tertinggi diraih untuk kategori Pemerintah Kabupaten/Kota, serta kategori Perangkat Daerah yang diwakili oleh BKPSDM dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Penghargaan Kota Bontang sebagai “Terbaik 1” diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Seno Adji Kepada Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, di Pendopo Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Jumat (3/10/2025). Acara ini dihadiri oleh jajaran pejabat tinggi provinsi dan pusat, termasuk Ketua Komisi Informasi (KI) Pusat Donny Yoesgiantoro.



Gambar 3.58. Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2025

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Bontang, 2025

BAB IV PENUTUP

4.1 HAMBATAN

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kinerja tahun 2025, terdapat beberapa hambatan strategis yang berdampak signifikan terhadap pencapaian kinerja Pemerintah Kota Bontang, antara lain:

1. Pengukuran indikator kinerja sering terlambat dan baru dilakukan di akhir tahun, ditambah hasil penilaian kinerja dari kementerian/lembaga yang menjadi indikator capaian kinerja belum diumumkan, sehingga pemerintah daerah terpaksa menggunakan data lama sebagai acuan. Akibatnya, laporan kinerja menjadi kurang akurat dan perencanaan pembangunan menjadi tidak sesuai dengan kondisi terbaru.
2. Koordinasi dengan Kementerian/Lembaga yang belum optimal berdampak pada keterlambatan publikasi hasil penilaian indikator kinerja seperti LPPD, SAKIP, dan Reformasi Birokrasi (RB). Kondisi ini menghambat pemerintah daerah dalam menyusun laporan kinerja secara komprehensif, akurat, dan tepat waktu. Akibatnya, proses evaluasi dan perumusan kebijakan berbasis kinerja menjadi kurang efektif, serta menurunkan kualitas akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Belum optimalnya integrasi data dan sinkronisasi program antar perangkat daerah mengakibatkan keterbatasan dalam konsistensi informasi, kesulitan dalam pemantauan capaian, serta hambatan dalam pencapaian indikator kinerja secara menyeluruh. Kondisi ini berpotensi menimbulkan duplikasi kegiatan, ketidakefisienan penggunaan anggaran, dan menurunkan kualitas koordinasi antar sektor pembangunan.
4. Lemahnya koordinasi antar perangkat daerah maupun antar bidang di dalam perangkat daerah berimplikasi langsung pada menurunnya efektivitas pelaksanaan program. Kondisi ini menyebabkan target pembangunan sulit tercapai, kebijakan berpotensi tumpang tindih, serta penggunaan anggaran menjadi tidak efisien. Akibatnya, kualitas pelayanan publik menurun dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat melemah.

4.2 STRATEGI KE DEPAN

Adapun beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan dalam rangka mengatasi permasalahan di atas sekaligus sebagai upaya meningkatkan capaian kinerja Pemerintah Kota Bontang dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Melakukan perbaikan dokumen perencanaan. Sebagaimana tahun sebelumnya, Kota Bontang melakukan perbaikan atau penyesuaian terhadap beberapa indikator kinerja yang dirasa sudah kurang relevan. Sebagai contoh pada nilai Indeks Reformasi Birokrasi untuk target 2026 sebesar 74,41, sedangkan pada tahun 2025 Pemerintah Kota Bontang telah mencapai indeks RB sebesar 85,79 atau sudah melampaui target tahun 2026, sehingga perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap target indikator kinerja Indeks Refromasi Birokrasi.
2. Melakukan berbagai strategi perbaikan termasuk upaya peningkatan kolaborasi dalam rangka pencapaian target kinerja pemerintah daerah, seperti peningkatan nilai LPPD, dukungan kebijakan pada sektor non migas, peningkatan pemerataan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan Rata-rata Lama Sekolah, termasuk penyesuaian anggaran sehingga menjadi lebih efisien dalam pencapaian sasaran strategi;
3. Melakukan evaluasi dan pengawasan deviasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU);
4. Menurunkan pohon kinerja hingga pada dokumen perencanaan dan pelaporan perangkat daerah;
5. Komitmen yang tinggi dari semua pihak dalam pencapaian sasaran strategi sangat diharapkan dan perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang sangat menentukan capaian kinerja agar lebih maksimal;
6. Meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah;
7. Meningkatkan investasi pada jaringan dan perangkat teknologi informasi telekomunikasi (TIK) agar layanan berbasis elektronik dapat diakses secara merata oleh seluruh masyarakat.
8. Peningkatan kapasitas aparatur;
9. Penguatan Reformasi Birokrasi, seperti mendorong penerapan *reward and punishment* bagi aparatur untuk memperkuat akuntabilitas dan responsivitas pelayanan publik.

Terkait isu-isu strategis Kota Bontang yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat beberapa langkah penyelesaian isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas SDM Kota Bontang, melalui upaya peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan gizi masyarakat, peningkatan kualitas pencari kerja, hingga pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat.
2. Mengembangkan dan mengoptimalkan sektor-sektor non-basis, melalui upaya pengembangan potensi ekonomi daerah, revitalisasi pasar, hingga penguatan UMKM.
3. Pemenuhan infrastruktur dasar dan lingkungan hidup, melalui upaya peningkatan (baik kuantitas maupun kualitas) pemenuhan fasilitas umum, sarana-prasarana, serta kapasitas lingkungan hidup
4. Akselerasi dan penguatan reformasi birokrasi, melalui upaya pengembangan kompetensi aparatur, mendorong inovasi pelayanan publik, pengembangan aplikasi dan integrasi sistem informasi, hingga penguatan pengawasan internal.

4.3 LAPORAN HASIL EVALUASI DAN TINDAK LANJUT

Pemerintah Kota Bontang berkomitmen untuk terus melakukan upaya-upaya dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja. Sebagai instansi publik, hal tersebut sangat penting karena terkait dengan pertanggungjawaban Pemerintah Kota Bontang terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi yang diembannya kepada publik. Terkait hal tersebut, beberapa catatan dan rekomendasi dari Kementerian PAN dan RB sebagai pihak yang berwenang mengevaluasi SAKIP menjadi penting untuk ditindaklanjuti.

Berdasarkan Hasil Evaluasi AKIP tahun 2025 dari Kementerian PAN dan RB, dengan surat Nomor B/424/AA.05/2024 tanggal 3 September 2024, terdapat 10 rekomendasi dan 12 catatan yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Bontang. Dari 10 rekomendasi dan 12 catatan yang ada tersebut telah disusun rencana tindak lanjut untuk setiap rekomendasinya dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja. Secara detil rencana tindak lanjut tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.1. Rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024 dan Tindak Lanjutnya

NO	REKOMENDASI	CATATAN ATAS REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1.	Menyelaraskan penjenjangan kinerja dari level tertinggi sampai dengan ke level terendah melalui perbaikan penjenjangan kinerja yang merujuk pada PermenPANRB Nomor 89 Tahun 2021 sehingga kinerja yang dijabarkan memenuhi unsur logis dan mampu menyajikan alternatif kinerja yang efektif untuk mendorong tercapainya kinerja organisasi.	1. Penjenjangan kinerja belum sepenuhnya menggambarkan kerangka logis dalam mencapai kinerja pada level PD ke level dibawahnya. 2. Hal tersebut terlihat pada perjanjian kinerja Inspektur Pembantu Inspektorat Daerah Kota Bontang belum sepenuhnya mendukung kinerja pada level Inspektorat Kota Bontang	1. BAPPERIDA selaku koordinator perencanaan melakukan pendampingan dalam penyusunan pohon kinerja
2.	Melakukan reviu dan perbaikan dokumen perencanaan tingkat PD agar seluruh tujuan/sasaran strategis berorientasi hasil, indikator kinerja memenuhi kriteria SMART dan cukup target kinerja yang ditetapkan lebih realistis berdasarkan capaian kinerja periode sebelumnya.	1. Penetapan target dalam PK di level PD untuk Tahun 2024 belum mempertimbangkan realisasi kinerja tahun sebelumnya sebagaimana yang disampaikan dalam LKjIP Tahun 2023 contoh pada penetapan target PK Dinas PUPR Tahun 2024 dengan sasaran "Meningkatnya jumlah penduduk berakses air minum" dengan indikator "Persentase penduduk berakses air minum"	1. Bapperida melakukan monev terhadap perencanaan Perangkat Daerah 2. Inspektorat melakukan evaluasi terhadap perencanaan tingkat Perangkat Daerah

NO	REKOMENDASI	CATATAN ATAS REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
		2. Terdapat beberapa indikator kinerja yang masih belum memenuhi kriteria SMART dan cukup. Contohnya pada indikator kinerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yaitu "Terlaksananya Program Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota"	Inspektorat melakukan evaluasi terhadap perencanaan tingkat Perangkat Daerah evaluasi internal saki
3.	Memastikan aplikasi E-Sakip dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh Pemerintah Kota Bontang dengan melakukan perbaikan/pembaharuan sehingga aplikasi tersebut dapat secara optimal dimanfaatkan sebagai sumber informasi manajemen kinerja	Aplikasi E-Sakip sebagai instrumen manajemen kinerja yang salah satu fungsinya memudahkan dalam melakukan monev capaian kinerja belum termanfaatkan secara optimal. Pembaharuan data realisasi kinerja yang dimasukkan oleh seluruh PD data belum dipantau secara realtime oleh Walikota	Bagian Organisasi Setda telah berkoordinasi kepada Bapperida dan Bagian Adbang Setda untuk melakukan pembaharuan data realisasi kinerja seluruh perangkat daerah.
4.	Mendorong seluruh PD agar secara berkala menyampaikan pembaharuan data capaian kinerja yang lengkap dan tepat waktu melalui aplikasi e-sakip	Komitmen dari seluruh PD untuk memanfaatkan aplikasi e-sakip sebagai sarana monitoring dan evaluasi capaian kinerja masih rendah. Terdapat PD yang belum secara aktif melakukan pembaharuan data capaian kinerja secara berkala dan berkelanjutan	Menginstruksikan kepada seluruh perangkat daerah untuk segera melakukan pembaharuan data pada sistem E-SMART

NO	REKOMENDASI	CATATAN ATAS REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
5.	Memastikan seluruh dokumen IKU PD telah memuat definisi operasional, formulasi pengukuran dan sumber data memastikan formulasi pengukuran telah sesuai untuk mengukur keberhasilan capaian kinerja	Masti terdapat dokumen IKU PD yang belum dilengkapi dengan definisi operasional, melainkan hanya berisi formulasi perhitungan, contoh hal ini dapat dilihat pada IKU Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	1. Penjelasan SS - SK - SP dan indikatornya pada seluruh level kinerja dari Kota - PD - Bidang. 2. Akan melakukan pembinaan dan pendampingan dalam hal penyusunan indikator kinerja utama kepada PD terkait serta memperhatikan seluruh IKU PD1.
6.	Memastikan kualitas laporan kinerja sepuruh PD telah menyajikan informasi yang memadai tentang perbandingan realisasi kinerja dengan target di Renstra serta perbandingan realisasi kinerja dengan level wilayah/nasional	Laporan kinerja pada level PD belum cukup menyampaikan informasi yang memadai, misalnya tentang perbandingan realisasi kinerja dengan target di renstra serta perbandingan realisasi kinerja dengan level wilayah/nasional. Hal tersebut terlihat pada laporan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pelaporan Kinerja berdasarkan berdasarkan kriteria PermenPANRB 53 Tahun 2014
7.	Memanfaatkan informasi capaian pada laporan kinerja sebagai pertimbangan untuk penentuan strategi dan target kinerja kedepan	Informasi dalam laporan kinerja belum optimal digunakan untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya. Hal tersebut ditunjukkan pada target kinerja lebih	1. Melakukan Monitoring tindak lanjut hasil evaluasi Sakip tahun 2023 dan monitoring dokumen

NO	REKOMENDASI	CATATAN ATAS REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
		rendah dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya tanpa penjelasan yang cukup contoh pada Dinas PUPR	perencanaan kinerja dimulai dari bulan bulan Februari 2025. 2. Melakukan evaluasi Sakip tahun 2024 terhadap seluruh perangkat daerah sesuai dengan jadwal PKPT 2025
8.	Memanfaatkan aplikasi e-sakip sebagai instrumen dalam melakukan evaluasi AKIP internal kepada seluruh PD	Evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang dilaksanakan terhadap seluruh PD belum menggunakan teknologi informasi (aplikasi)	Memaksimalkan sistem E-Smart dalam melakukan evaluasi
9.	Memastikan seluruh rekomendasi hasil evaluasi AKIP internal selesai ditindaklanjuti oleh seluruh PD melalui mekanisme monitoring yang tepat secara berkala	Monitoring atas tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi internal tahun 2023 belum dilakukan secara berkala sehingga belum terjadi perbaikan pada pelaksanaan akuntabilitas kinerja pada unit kerja. Hal ini terlihat dari masih banyaknya PD yang belum menyampaikan laporan tindak lanjut hasil evaluasi	Inspektorat Melakukan monitoring kepada seluruh Perangkat Daerah
10.	Memastikan pelaksanaan evaluasi AKIP internal dilaksanakan dengan pendalaman yang cukup memadai terhadap aspek kualitas dan pemanfaatan setiap komponen AKIP	Hasil evaluasi internal belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya contohnya pada inspektorat Daerah dengan nilai dan predikat tertinggi tetapi masih	Terkait dengan pendalaman yang cukup memadai, Inspektorat Kota Bontang telah melakukan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

NO	REKOMENDASI	CATATAN ATAS REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
	sehingga nilai dan predikat yang diberikan benar2 menggambarkan kondisi implementasi AKIP yang sebenarnya	banyak terdapat kinerja di level unit kerja eselon III yang bersifat output dan indikator kinerja yang belum SMART dan cukup.	SAKIP Kota Bontang Tahun 2023 2024, dengan nara sumber dari Kemenpan RB

Sumber: Kementerian PanRB,2025

4.4 PENILAIAN KINERJA ORGANISASI

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Bontang menunjukkan nilai 71,42 dengan predikat “BB”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Sangat Baik”, yaitu implementasi SAKIP sudah sangat baik pada pemerintah daerah dan sebagian besar unit kerja, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.

Adapun catatan penting pada komponen perencanaan kinerja adalah:

1. Pohon kinerja di sebagian perangkat daerah belum cukup menjabarkan faktor-faktor yang mendukung kinerja utama dan masih cenderung menjabarkan program/kegiatan yang selama ini dilakukan seperti pohon kinerja dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, pohon kinerja belum mengidentifikasi faktor lain yang mempengaruhi dan membutuhkan kolaborasi lintas OPD untuk mencapai kinerja tersebut seperti yang ditemukan pada pohon kinerja dinas pemuda, olahraga dan pariwisata.
2. Masih ditemukan indikator kinerja utama dalam perangkat daerah yang belum berorientasi pada hasil seperti indikator “persentase peran lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam kesejahteraan masyarakat”, “persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran”, “Persentase bagi perusahaan yang difasilitasi dalam penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) pada sektor non migas”, “Persentase jumlah warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana” dan “persentase warisan budaya tak benda dan

kesenian yang dilestarikan”.

3. Masih ditemukan indikator kinerja utama dalam perangkat daerah yang belum cukup spesifik dan measurable seperti yang ditemukan pada SATPOLPP yaitu indikator “Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan” yang tidak dapat di ukur dengan akuntabel.
4. Masih ditemukan penentuan target kinerja dalam RPJMD yang belum memperhatikan capaian kinerja tahun sebelumnya sehingga penentuan target belum cukup akuntabel. Hal tersebut juga di temui pada perjanjian kinerja perangkat daerah dimana target kinerja tahun berjalan lebih rendah dari capaian kinerja tahun sebelumnya seperti yang ditemukan pada BKPSDM.

Rekomendasi yang diberikan adalah:

1. Meningkatkan kualitas pohon kinerja di sebagian perangkat daerah sehingga dapat menjabarkan dan mengidentifikasi faktor-faktor lain yang mendukung kinerja dan menejemahkannya kedalam program/kegiatan sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat benar-benar mendukung kinerja tidak hanya *business as usual*.
2. Memastikan kualitas penentuan indikator kinerja utama dalam seluruh perangkat daerah sehingga lebih berorientasi pada hasil dan memenuhi kriteria *SMART* sehingga lebih tepat untuk menggambarkan kondisi yang ingin tuju.
3. Memastikan penentuan target kinerja di tingkat pemerintah daerah dan perangkat daerah memperhatikan capaian kinerja tahun sebelumnya sehingga penentuan target kinerja dapat dicapai (*achievable*), menantang dan realistis.

Catatan penting pada Nilai Komponen Pengukuran Kinerja adalah:

Kota Bontang dan perangkat daerah telah melakukan pengukuran secara berkala atas realisasi kinerja, dan rencana aksinya kepada seluruh perangkat daerah. Untuk mendukung pelaksanaan pengukuran kinerja tersebut telah disusun pedoman formulasi perhitungan yang tertera pada Indikator Kinerja Utama (IKU) pemerintah daerah. Namun demikian, masih terdapat hal yang menjadi catatan dalam pengukuran kinerja di antaranya sebagai berikut:

1. Pengukuran kinerja telah menggunakan teknologi informasi melalui *esmart.bontangkota.go.id*, namun belum semua perangkat daerah secara

berkala mengisi capaian kinerja terkini dan secara berkelanjutan.

2. Sebagian besar perangkat daerah telah melakukan monitoring dan evaluasi atas rencana aksi triwulan. Namun, hasil pengukuran kinerja belum dijadikan dasar dalam penyesuaian strategi dan alokasi sumber daya dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien. Selain itu, hasil pengukuran kinerja tahunan maupun triwulan yang dilakukan di perangkat daerah belum dijadikan dasar untuk pemberian *Reward and Punishment*.

Rekomendasi yang diberikan adalah:

1. Memastikan pengukuran kinerja dilakukan secara berkala dan berjenjang di seluruh perangkat daerah.
2. Memastikan hasil pengukuran kinerja dimanfaatkan sebagai dasar dalam penyesuaian strategi, alokasi anggaran dan menjadi dasar dalam pemberian *reward and punishment* kinerja.

Nilai Komponen Pelaporan Kinerja adalah:

Kota Bontang telah menyusun laporan kinerja tahun 2024 baik tingkat pemerintah daerah maupun tingkat perangkat daerah. Laporan kinerja tersebut telah menyajikan realisasi kinerja yang telah diperjanjikan. Namun, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja di antaranya sebagai berikut:

1. Belum terdapat analisis yang mendalam terhadap kinerja yang capaian kinerjanya di bawah 100% seperti nilai LPPD, pertumbuhan ekonomi, indeks gini, indeks kualitas perkotaan, dan rata-rata lama sekolah. Sehingga, analisis yang disajikan tersebut belum dapat dimanfaatkan untuk perbaikan perencanaan penentuan program dan kegiatan yang lebih berdampak untuk mencapai kinerja.
2. Laporan kinerja sebagian perangkat daerah belum dilengkapi dengan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi di level nasional/internasional seperti laporan kinerja dinas pendidikan dan dinas kesehatan yang dapat dijadikan bahan evaluasi kinerja daerah terhadap capaian nasional.
3. Belum seluruh perangkat daerah memberikan analisis yang belum cukup tajam mengenai analisis keberhasilan dan kegagalan pada setiap indikator kinerja dan rekomendasi perbaikan kinerja ke depannya. Sehingga laporan

hasil evaluasi kinerja belum berdampak pada perbaikan kualitas pelaksanaan kinerja ke depannya.

Rekomendasi yang diberikan adalah:

1. Meningkatkan kualitas laporan kinerja di tingkat pemerintah daerah dengan memberikan analisis yang mendalam untuk dapat dimanfaatkan untuk perbaikan perencanaan penentuan program dan kegiatan yang lebih berdampak untuk mencapai kinerja.
2. Memastikan laporan kinerja perangkat daerah dilengkapi dengan *benchmark* dengan capaian kinerja di tingkat nasional dan internasional untuk dapat dijadikan bahan evaluasi kinerja daerah terhadap capaian nasional.
3. Meningkatkan kualitas laporan kinerja perangkat daerah dengan memastikan analisa yang tajam mengenai analisa keberhasilan dan kegagalan pada setiap indikator dan dilengkapi dengan rekomendasi perbaikan kinerja ke depannya.

Nilai Komponen Evaluasi Internal

Inspektorat Kota Bontang telah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP internal pada perangkat daerah. Untuk mendukung pelaksanaan evaluasi tersebut telah disusun pedoman evaluasi melalui Keputusan Wali Kota Bontang No. 188.45/170/ITDA/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang. Berikut catatan yang perlu diperhatikan atas evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagai berikut:

1. Masih ditemukan hasil penilaian evaluasi internal di sebagian perangkat daerah yang tidak menggambarkan kondisi yang sesuai seperti yang ditemukan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana dimana hasil evaluasi internal menunjukkan hasil yang memuaskan namun masih ditemui kesalahan yang mendasar.
2. Sebagian hasil evaluasi SAKIP internal OPD mulai dikomunikasikan melalui aplikasi e-smart namun belum terlihat mekanisme evaluasi, komunikasi temuan dan rekomendasi dalam aplikasi tersebut hal ini terlihat dai masih banyaknya rekomendasi evaluasi internal yang belum ditindaklanjuti perangkat daerah.

Rekomendasi yang diberikan adalah:

1. Memastikan hasil evaluasi internal di seluruh perangkat daerah menggambarkan kondisi yang sesuai dengan implementasi SAKIP yang terjadi.
2. Memanfaatkan aplikasi e-smart yang telah dibangun untuk menjadi alat evaluasi SAKIP, komunikasi temuan dan memantau tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.

Dari hasil evaluasi tersebut maka, nilai total Sakip Pemerintah Kota Bontang Tahun 2025 adalah 71,42 dengan predikat ‘BB’ Dengan perhitungan seperti tabel dibawah ini:

Tabel 4.2. Hasil Evaluasi Komponen Kinerja AKIP Tahun 2025

No.	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			2024	2025
1.	Perencanaan Kinerja	30	22,71	22,99
2.	Pengukuran Kinerja	30	19,99	20,42
3.	Pelaporan Kinerja	15	10,53	10,73
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	16,81	17,27
Nilai Hasil Evaluasi		100	70,04	71,42
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			(BB)	(BB)

Sumber: Kementerian PanRB,2025

Adapun untuk Hasil Capaian Indikator Makro adalah:

Tabel 4.3. Hasil Evaluasi Capaian Indikator Makro AKIP Tahun 2025

Hasil Capaian Indikator Makro	Tahun lalu (2024)	Tahun ini (2025)
Angka Kemiskinan	3,74	3,21
Laju Pertumbuhan Ekonomi	9,40	2,51
Tingkat Pengangguran terbuka	7,06	6,36
Penurunan emisi GRK	0,00	0,00
Indeks Pembangunan Manusia	82,49	83,04
Indeks Gini Ratio	0,29	0,29
Pendapatan Perkapita	0,00	0,00

Sumber:Badan Pusat Statistik,2026



LAMPIRAN LKjIP KOTA BONTANG TAHUN 2025

1. INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN 2023
 2. PERJANJIAN KINERJA 2025
 3. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN 2025
 4. INDIKATOR KINERJA UTAMA 2025-2029
 5. PERJANJIAN KINERJA 2026
6. BA KESEPAKATAN PERUBAHAN SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA TAHUN 2025



WALI KOTA BONTANG

**KEPUTUSAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR: 100.3.3.3/307/BAPELITBANG
TAHUN 2023**

**TENTANG
PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KOTA BONTANG TAHUN 2021-2026**

WALI KOTA BONTANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan kinerja dilingkungan Pemerintah Kota Bontang, perlu menetapkan indikator kinerja utama;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Bontang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bontang.

Mengingat : 1. undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4641);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Kesatu : Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bontang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan acuan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pemerintah Kota Bontang;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bontang

Pada Tanggal 14 Juli 2023

Wali Kota Bontang,



RI RASE

Lampiran I

Keputusan Wali Kota Bontang Nomor
100.3.3.3/307/BAPELITBANG
Tentang
Penetapan Indikator Kinerja Utama
Pemerintah Kota Bontang Tahun
2021-2026
Tanggal: 3 Januari 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2026
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BONTANG

- 1) Nama Organisasi : Pemerintah Kota Bontang
- 2) Tugas :
 - a. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
 - b. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - c. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJMD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
 - d. Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang APBD, rancangan perda tentang Perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD terhadap DPRD untuk dibahas bersama;
 - e. Mewakili daerahnya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - f. Mengusulkan pengangkatan Wakil Wali Kota;
 - g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- 3) Indikator Kinerja Utama
 - 1) Tujuan 1: Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang harmoni, bersih, adil, amanah, dan bertanggung jawab.

Kode	Indikator Kinerja Utama/Uraian
T.1	Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah
	Diskripsi
	Satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk melakukan pengukuran dan penilaian terhadap kepemimpinan kepala daerah.
	Kepala Daerah memiliki peran penting untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Kepemimpinan Kepala Daerah ikut serta dalam menentukan keberhasilan tujuan pemerintah daerah. Keberhasilan tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain: a) Tingkat kemiskinan menurun b) Tingkat pendidikan masyarakat meningkat c) Tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat d) Tingkat kesehatan masyarakat meningkat
	Sumber data
	LKPJ, LKjIP, LPPD, Evaluasi RKPD, Evaluasi RPJMD
	Cara Menghitung
	Cara pengukuran sesuai Permendagri Nomor 38 Tahun 2020 tentang Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah
	Unit bertanggung jawab

	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang)
	Penanggung Jawab Data
	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang)

Sasaran Tujuan 1:

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja Utama/Uraian
S.S.1	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif
I.K.1.1	Indeks Reformasi Birokrasi
	Diskripsi Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dengan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan atau organisasi, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Nilai pelaksanaan RB yaitu nilai rata-rata hasil evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) di tingkat kabupaten/kota yang dilakukan oleh Kementerian PANRB, berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi.
	Sumber Data Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi yang di susun oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bontang
	Cara Menghitung A) RB General terbagi menjadi 3 yaitu: 1) Capaian Sasaran Strategis terbagi menjadi 2 yaitu: a) tata kelola pemerintahan digital yang efektif lincah dan kolaboratif, b) budaya birokrasi berAKHLAK dengan ASN yang profesional 2) Capaian pelaksanaan kebijakan RB terbagi menjadi 2 yaitu: a) tata kelola pemerintahan digital yang efektif lincah dan kolaboratif, b) budaya birokrasi berAKHLAK dengan ASN yang profesional 3) Capaian Strategis Pelaksanan RB General
	Unit bertanggung jawab Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
	Penanggung jawab data Sekretariat Daerah Kota Bontang
I.K.1.2	Nilai LPPD
	Diskripsi Laporan Penyusunan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. LPPD merupakan salah satu laporan yang wajib yang disusun dan disampaikan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. LPPD disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintah daerah oleh Pemerintah Pusat.
	Sumber Data Laporan Penyusunan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

	(LPPD) yang di susun oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bontang
	Cara Menghitung
	Pengukuran LPPD sesuai dengan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada lampiran pada Bab IV Sistematika ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah.
	Unit bertanggung jawab
	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
	Penanggung jawab data
	Seluruh Perangkat Daerah dan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
I.K.1.3	Opini BPK
	Diskripsi
	Opini BPK merupakan opini audit tertinggi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal pengelolaan anggaran di kementerian/lembaga. Entitas yang dapat opini WTP bisa dikatakan laporan keuangannya "Bersih". Opini WTP menyatakan laporan keuangan yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang mterial, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas sesuai prinsip akuntansi. Opini laporan keuangan disusun dengan pertimbangan kesesuaian antara akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern. Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undana Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
	Sumber Data
	Hasil Pemeriksaan BPK
	Cara Menghitung
	Melalui pemeriksaan keuangan yang terdiri dari Neraca, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggarna lebih, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, serta catatan dan laporan keuangan.
	Unit bertanggung jawab
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Penanggung jawab data
	Seluruh Perangkat Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
S.S.2	Meningkatnya kondusifitas wilayah
I.K.2.1	Jumlah Konflik
	Diskripsi
	Konflik merupakan suatu hal yang selalu ada dan sulit untuk dipisahkan dalam kehidupan sosial. Konflik sosial merupakan berdampak baik bagi kemajuan dan perubahan masyarakat, tetapi jika konflik yang terjadi dimasyarkat tidak mampu dikelola dan diatasi dengan baik maka konflik akan menimbulkan dampak buruk hingga timbulnya berbagai kerusakan baik itu fisik maupun non fisik, ketidak-amanan, ketidak harmonisan dan menciptakan ketidak stabilan, bahkan sampai mengakibatkan jatuhnya korban jiwa.
	Sumber Data
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

	Cara Menghitung
	Dengan cara melihat penurunan konflik yang terjadi pada tahun berjalan dibandingkan dengan tahun sebelumnya
	Unit bertanggung jawab
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Penanggung jawab data
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
I.K.2.2	Persentase penyelesaian gangguan keamanan dan ketertiban umum
	Diskripsi
	Tindakan kejahatan kriminalitas, unjuk rasa, dan mogok kerja merupakan tindakan yang merugikan dan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Kemampuan menurunkan angka kriminalitas dan konflik sosial yang berlatar belakang suku, agama, ras dan antar golongan memiliki peran penting bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat karena mampu mendorong iklim berinvestasi di Kota Bontang.
	Sumber Data
	Olah data tindak kejahatan dari Polres Bontang, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Cara Menghitung
	Jumlah pengaduan yang ditegakkan dibagi Pengaduan pelanggaran yang masuk dikali 100%
	Unit Bertanggung Jawab
	Satuan Polisi Pamong Praja
	Penanggung Jawab Data
	Satuan Polisi Pamong Praja

2) Tujuan 2: Mewujudkan pembangunan, perkotaan yang layak huni, cerdas dan berwawasan lingkungan.

Kode	Indikator Kinerja Utama/Uraian
T.2	Indeks Kota Berwawasan Lingkungan (IKBL)
	Diskripsi
	Pembangunan ini akan berkaitan erat dengan keberhasilan melaksanakan pembangunan kota yang semakin maju perkembangan kotanya namun pada saat yang sama tetap mampu menjaga keseimbangan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan
	Sumber data
	Hasil Indeks Kualitas Perkotaan dan hasil Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
	Cara Menghitung
	Hasil rata-rata dari nilai Indeks Kualitas Perkotaan dan hasil Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
	Unit bertanggung jawab
	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang
	Penanggung Jawab Data
	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang, Dinas Perhubungan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Sasaran Tujuan 2:

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja Utama/Uraian
------	--

S.S.3	Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang maju tangguh
I.K.3.1	Indeks Kualitas Perkotaan
	Diskripsi
	Tujuan pembangunan dicapai dengan penetapan pada sasaran pembangunan yang merupakan suatu kondisi yang akan diwujudkan sebagai kinerja utama pelaksanaan pembangunan daerah. Adapun sasaran pembangunan tersebut adalah: 1) meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang maju tangguh; dan 2) meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan tata ruang yang lestari
	Sumber data
	Hasil Indeks Kualitas Infrastruktur dan hasil indeks Ketahanan Daerah
	Cara Menghitung
	Parameter pengukur indeks kualitas perkotaan ada 2 yaitu: 1) Indeks kualitas infrastruktur (IKI) yang terdiri dari: a) tingkat akses hunian b) tingkat kualitas hunian, c) tingkat pelayanan air minum, d) tingkat pelayanan air limbah, e) tingkat pelayanan sampah, f) tingkat pelayanan sumber daya air, g) tingkat pelayanan jalan umum, h) tingkat pelayanan transportasi umum, i) tingkat pelayanan bangunan gedung, j) tingkat pelayanan pemadam kebakaran 2) Indeks Ketahanan Daerah yang komposit pengukurnya ada 71 indikator kapasitas daerah dalam 7 prioritas penanggulangan bencana yang dibuat oleh BNPB
	Unit bertanggung jawab
	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang
S.S.4	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan tata ruang yang lestari
I.K.4.1	Indeks kualitas lingkungan hidup
	Diskripsi
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dapat diketahui seberapa jauh kondisi dan status kualitas lingkungan hidup dari segi kualitas air, kualitas udara, dan tutupan lahan.
	Sumber data
	Indeks kualitas udara, indeks kualitas air dan indeks kualitas lahan
	Cara Menghitung
	Mengukur IKLH = (0.376 x IKA)+(0.405xIKU)+(0.219xIKL)
	Unit bertanggung jawab
	Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

3) Tujuan 3: Mewujudkan inklusivitas dan keseimbangan ekonomi daerah berbasis potensi ekonomi lokal dan keragaman sosial budaya masyarakat

Kode	Indikator Kinerja Utama/Uraian
T.3	Indeks Gini
	Diskripsi
	Tujuan pembangunan menjadi bagian dari rumusan strategis yang menggambarkan pencapaian implentasi misi "Kota Bontang Berkelanjutan Yang Layak Huni, Cerdas dan Berwawasan Lingkungan melalui pemantapan ekonomi,

	sosial budaya, dan infrastruktur serta pelestarian lingkungan hidup”. Dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan ini harus mampu membangkitkan dan menumbuhkan perekonomian daerah secara inklusif dan seimbang antara sektor migas dan non migas. Keberhasilan pembangunan ekonomi ditentukan oleh indeks gini yang menggambarkan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di suatu wilayah. Semakin baik pembangunan distribusi di suatu wilayah, maka nilai indeks gini akan semakin kecil, begitu juga jika pembangunan ekonomi di suatu wilayah kurang berhasil maka nilai indeks gini akan semakin besar mendekati angka 1 (satu).
	Sumber data
	Buku Kota Bontang Dalam Angka
	Cara Menghitung
	Indeks gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh. Indeks gini berkisar antara 0 sampai 1. apabila koefisien gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan benar-benar sempurna terjadi. Jika nilai indeks gini kurang dari 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan ”rendah”; nilainya antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan ”moderat”; jika nilainya lebih besar dari 0,5 dikatakan berada dalam ketimpangan ”tinggi”.
	Unit bertanggung jawab
	Seluruh Perangkat Daerah
	Penanggung Jawab Data
	Seluruh Perangkat Daerah

Sasaran Tujuan 3:

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja Utama/Uraian
S.S.5	Meningkatnya pertumbuhan Ekonomi Non Migas
I.K.5.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Non Migas
	Diskripsi
	Tujuan pembangunan akan dicapai dengan penetapan sasaran pembangunan yang kondisinya akan diwujudkan sebagai kinerja utama pelaksanaan pembangunan daerah. Sasaran tersebut adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi non migas.
	Sumber data
	Buku Kota Bontang Dalam Angka
	Cara Menghitung
	Laju pertumbuhan dihitung dengan cara mengurangi nilai PDRB pada tahun ke-n terhadap nilai pada tahun ke n-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai paa tahun n-1, kemudian dikalikan dengan 100 persen. Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatn daeri satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya.
	Unit bertanggung jawab
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menegah dan Perdagangan
	Penanggung Jawab Data
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menegah dan Perdagangan

4) Tujuan 4: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan sejahtera

Kode	Indikator Kinerja Utama/Uraian
T.4	Indeks Pembangunan Manusia
	Diskripsi
	IPM adalah indeks komposit yang diharapkan mampu mencerminkan kinerja pembangunan manusia yang dapat dibandingkan antar wilayah dan antar waktu. IPM

	menggambarkan pembangunan manusia atau mutu hidup ke dalam suatu angka indeks. Pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk membuat manusia mampu mempunyai lebih banyak pilihan. Pendapatan adalah salah satu dari pilihan yang dimiliki manusia, tetapi bukanlah suatu totalitas dari semua aspek kehidupan manusia, pilihan yang tidak kalah penting adalah pilihan kesehatan, pengetahuan, lingkungan fisik yang baik dan kebebasan untuk bertindak. Dengan adanya pilihan tersebut diharapkan adanya kemajuan dalam pembangunan manusia tersebut.
	Sumber data
	Buku Kota Bontang Dalam Angka
	Cara Menghitung
	Terdapat 3 (tiga) dimensi indikator komponen dalam pengukuran IPM yaitu: 1) Lamanya hidup adalah hidup sehat dan umur panjang yang diukur dengan angka harapan hidup waktu lahir 2) Pengetahuan atau pendidikan yang diukur dengan rata-rata antara harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah 3) Standar kehidupan yang layak diukur dengan pengeluaran per kapita Setiap komponen IPM distandardisasi dengan nilai minimum dan maksimum sebelum digunakan untuk menghitung IPM. Rumus yang digunakan sebagai berikut. Dimensi Kesehatan: $I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$ Dimensi Pendidikan : $I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$ $I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$ $I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$ Dimensi Pengeluaran : $I_{pengeluaran} = \frac{\ln(pengeluaran) - \ln(pengeluaran_{min})}{\ln(pengeluaran_{maks}) - \ln(pengeluaran_{min})}$ IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan dan pengeluaran dengan rumus sebagai berikut: $IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}}$
	Unit bertanggung jawab
	Seluruh Perangkat Daerah
	Penanggung Jawab Data
	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Sasaran Tujuan 4:

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja Utama/Uraian
S.S.6	Meningkatnya akses layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas
I.K.6.1	Angka harapan lama sekolah
	Diskripsi
	Harapan lama sekolah adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang, dengan asumsi harapan lama

	sekolah yaitu kemungkinan anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur berikutnya sama dengan rasio penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini.
	Sumber data
	Buku Kota Bontang Dalam Angka
	Cara Menghitung
	$EYS_a^t = FKx \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ Dimana: EYS_a^t : Harapan lama sekolah pada umur a di tahun t ; E_i^t : Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t ; P_i^t : Jumlah penduduk usia i pada tahun t ; i : Usia ($a, a+1,...,n$) ; FK : Faktor koreksi.
	Unit bertanggung jawab
	Dinas Pendidikan
	Penanggung Jawab Data
	Dinas Pendidikan
I.K.6.2	Rata-rata lama sekolah
	Diskripsi
	Rata-rata lama sekolah adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal, dengan asumsi dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Rata-rata lama sekolah dihitung berdasarkan penduduk usia 25 tahun keatas dengan asusmsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir.
	Sumber data
	Buku Kota Bontang Dalam Angka
	Cara Menghitung
	Rumus Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Untuk menghitung rata-rata lama sekolah digunakan rumus berikut: $RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n x_i$ dimana : RLS = Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas x_i = Lama sekolah penduduk ke-i yang berusia 25 tahun N = Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas
	Unit bertanggung jawab
	Dinas Pendidikan
	Penanggung Jawab Data
	Dinas Pendidikan
I.K.6.3	Usia harapan hidup
	Diskripsi
	Usia harapan hidup adalah rata-rata kesempatan atau waktu hidup yang tersisa. Usia harapan hidup bisa diartikan pula dengan banyaknya tahun yang ditempuh penduduk yang masih hidup sampai umur tertentu.
	Sumber data
	Dinas kesehatan dan badan pusat statistik
	Cara Menghitung

	Jumlah Umur orang meninggal (2.500 thn) UHH = = 50 thn jumlah orang meninggal (50)
	Unit bertanggung jawab
	Dinas Kesehatan
	Penanggung Jawab Data
	Dinas Kesehatan
S.S.7	Meningkatnya tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing
I.K.7.1	Tingkat Pengangguran Terbuka
	Diskripsi
	Tingkat pengangguran terbuka merupakan penduduk usia kerja yang tidak bekerja, sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan suatu usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tiak mungkin mendapatkan pekerjaan, sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Tingkat penganguran terbuka dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja
	Sumber data
	Buku Kota Bontang Dalam Angka
	Cara Menghitung
	$TPT = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100$
	Unit bertanggung jawab
	Dinas Tenaga Kerja dan Badan Pusat Statistik
	Penanggung Jawab Data
	Dinas Tenaga Kerja dan Badan Pusat Statistik
S.S.8	Meningkatnya pemberdayaan sosial
I.K.8.1	Angka Kemiskinan
	Diskripsi
	Penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu prioritas pembangunan Indonesia. Hal ini sejalan dengan komitmen pertama tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals (SDGs), yakni menurunkan kemiskinan dan kelaparan. Tersedianya angka kemiskina yang akurat di setiap wilayah merupakan syarat mutlak dalam penyusunan kebijakan penanggulangan kemiskinan
	Sumber data
	Data survei sosial ekonomi nasional (susenas)
	Cara Menghitung
	GK=GKM+GKNM GK = Garis kemiskinan GKM = Garis kemiskinan makanan GKNM = Garis Kemiskinan Non Makanan
	Unit bertanggung jawab
	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
	Penanggung Jawab Data
	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Wali Kota Bontang,



BASRI RASE



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : BASRI RASE

Jabatan : WALI KOTA BONTANG

Berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Bontang, 2 Januari 2025

Wali Kota Bontang




Basri Rase, S. IP, M.Si

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 PEMERINTAH KOTA BONTANG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target
1	2	3		4	5
1	Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif	1	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	BB (72,41)
		2	Nilai LPPD	Predikat	Tinggi (4,00)
		3	Opini BPK	Predikat	WTP
2.	Meningkatnya kondusifitas wilayah	4	Jumlah konflik	Kasus	6
		5	Persentase Penyelesaian Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum	Persen	100
3.	Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang maju	6	Indeks kualitas perkotaan	Indeks	72,98
4.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan tata ruang	7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	66,82
5.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi non migas	8	Laju Pertumbuhan Ekonomi Non Migas	Persen	4,41-5,3
6.	Meningkatnya akses layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas	9	Angka harapan lama sekolah	Tahun	13,54
		10	Rata-rata lama sekolah	Tahun	11,64
		11	Usia harapan hidup	Tahun	74,85
7.	Meningkatnya tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing	12	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	7,35
8.	Meningkatnya pemberdayaan sosial	13	Angka Kemiskinan	Persen	3,90

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/(outcome))	Pagu	Perangkat daerah penanggung jawab
Misi 1: Kota Bontang yang HARMONI melalui pemantapan dan sinergi, kolaborasi pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan			
Tujuan 1.1 : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang harmonis, bersih, adil, amanah, dan bertanggung jawab	Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah		
Sasaran 1.1.1 : Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif	Indek Reformasi Birokrasi		
	Nilai LPPD		
	Opini BPK		
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tingkat Realisasi Kinerja perencanaan pembangunan daerah	5.955.708.912	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Perencanaan
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Implementasi perencanaan dalam penganggaran	3.295.960.547	
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase tindak lanjut hasil kelitbangan	3.598.502.155,00	
	Persentase keberlanjutan inovasi daerah		
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	724.571.666	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Statistik
	Persentase OPD yang menggunakan data statistic dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah		
Program Pengelolaan Arsip	persentase Perangkat Daerah yang telah melakukan pengelolaan arsip secara baik	2.187.415.097,00	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Kearsipan

Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Persentase perlindungan dan penyelamatan arsip	18.358.000,00	
Program Perizinan Penggunaan Arsip	Persentase daftar arsip dan SOP arsip yang disusun	6.700.000,00	
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Tingkat kesesuaian tahapan penyusunan APBD	14.495.292.441	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Keuangan
	Jumlah Perangkat Daerah yang menyajikan laporan keuangan dengan baik		
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kesesuaian data rincian BMD dengan Aktiva Tetap di neraca Pemerintah Kota	3.297.460.200,00	
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian PAD	5.184.371.567,00	
Program Kepegawaian Daerah	Persentase kinerja layanan kepegawaian	4.155.176.974,00	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Kepegawaian
	Persentase ASN berkinerja minimal bernilai baik		
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase peningkatan kompetensi minimal 20 JP per tahun	4.044.648.964,00	
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Cakupan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berbasis risiko	1.631.925.800,00	Perangkat Daerah Penanggung Jawab urusan Kepengawasan
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase kebijakan pembinaan dan pengawasan yang telah ditetapkan	2.040.272.212	
	Persentase Perangkat daerah yang telah dilakukan pendampingan		
Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan Program Prioritas pemerintah dan pemerintah Daerah Kota	8.685.569.007,00	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Komunikasi dan Informatika
Program Aplikasi Informatika	Persentase Layanan Publik yang diselenggrakan secara online dan terintegrasi	35.470.696.079	

	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo		
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Tingkat keamanan informasi pemerintah	3.287.197.616,00	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Persandian
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM Perangkat Daerah	1.230.265.538.049	Sekretariat Daerah
	Presentase implementasi kebijakan reformasi birokrasi		
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik yang dilaksanakan sesuai SOP	5.769.814.776	Kecamatan Bontang Selatan
	Cakupan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan		
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintah umum	3.382.678.313,00	
Program Pendaftaran Penduduk	Rasio penduduk berKTP per satuan Penduduk	774.748.782,00	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Pencatatan Sipil	Rasio bayi berakte kelahiran	964.619.195	
	Rasio pasangan berakte nikah		
	Cakupan kepemilikan akta perceraian		
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase implementasi kebijakan bidang pemerintahan	54.566.293.598	Sekretariat Daerah
	Persentase implementasi kebijakan bidang kesejahteraan rakyat		
Program Perekonomian Dan Pembangunan	Presentase implementasi kebijakan bidang perekonomian	5.027.219.491	
	Presentase implementasi kebijakan bidang pembangunan		
Sasaran 1.1.2 : Meningkatnya Kondusifitas wilayah	Jumlah Konflik		

	Persentase Penanganan Gangguan Keamanan dan Keteriban Umum		
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	1.246.649.100	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan		
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Tingkat penanganan gangguan Trantibum	2.942.067.340,00	Kecamatan
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Prosentase masyarakat yang mengikuti penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	19.037.447.822,00	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Pemerintahan Umum
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase peran partai politik dan lembaga pendidikan dalam pendidikan politik	1.138.398.275,00	
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	2.298.784.985,00	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Pemerintahan Umum
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase Peningkatan pembinaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	11.244.412.648,00	
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase Penanganan Konflik	871.710.000,00	
Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Pengaduan Sengketa tanah yang ditangani	999.338.730,00	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Pertanahan
Misi 2: Kota Bontang BERKELANJUTAN yang layak huni, cerdas dan berwawasan lingkungan melalui pemantapan ekonomi, sosial budaya, dan infrastruktur serta pelestarian lingkungan hidup			

Tujuan 2.1 : Terwujudnya pembangunan perkotaan yang layak huni, cerdas dan berwawasan lingkungan	Indeks Kota Berwawasan Lingkungan (IKBL)		
Sasaran 2.1.1 : Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang maju tangguh	Indeks Kualitas Perkotaan		
Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yg ditangani	10.374.590.484,00	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Pengembangan Perumahan	Persentase Fasilitas Penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana kabupaten/kota	7.969.332.777	
	Persentase fasiltasi penyediaan rumah bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah		
Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase rumah tidak layak huni di luar kawasan kumuh	2.418.229.500,00	
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Persentase kapasitas unit air tanah/air baku	189.603.016.636	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Persentase kapasitas aliran sungai		
	Persentase daya tampung danau/folder/kolam retensi		
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase penduduk berakses air minum layak	39.121.181.996,00	
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yg memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	6.793.972.565,00	
Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan sampah	8.210.669.198,00	

Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase kapasitas TPA/TPST/SPA/ TPS-3R/TPS	3.244.784.000,00	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase perkotaan dalam kondisi baik	272.736.740.910,00	
Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan dalam kondisi mantap	115.390.625.709	
	Persentase drainase jalan dalam kondisi baik		
Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase sempadan sungai yang tertata	499.937.000,00	
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik	35.887.762.619	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik		
	Persentase ketersediaan sarana prasarana TPU		
Program Penanggulangan Bencana	Persentase warga negara di kawasan rawan bencana dan menjadi korban bencana yang memperoleh layanan kebencanaan	4.204.958.007,00	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Sub Urusan Penanggulangan Bencana
Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam/sosial yang terlayani	1.073.031.390,00	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Sub Urusan Sosial
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase sarana prasarana lalu lintas jalan yang layak fungsi	28.652.968.439,00	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Sub Urusan Perhubungan
Program Pengelolaan Pelayaran	Cakupan pemenuhan standar fasilitas pelayaran	4.707.902.534,00	
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Capaian Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	22.068.931.126,00	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Sub Urusan Pemadam Kebakaran

Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung yg memenuhi persyaratan teknis	27.145.900.694,00	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sasaran 2.1.2 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan tata ruang yang lestari	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		
Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Tingkat ketaatan usaha/ kegiatan terhadap izin lingkungan atau PPLH	14.806.000,00	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Lingkungan Hidup
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Cakupan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	1.176.283.509,00	
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Cakupan penghargaan lingkungan hidup	407.080.995,00	
Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase pengendalian limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)	15.561.712,00	
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Cakupan penanganan kasus	57.993.000,00	
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Cakupan kapasitas diklat dan penyuluhan	437.744.607,00	
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup	452.461.160,00	
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Cakupan pengelolaan Kehati	7.897.301.351	

	Cakupan pengelola taman kota		
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase kesesuaian tata ruang	1.574.999.922,00	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Pengelolaan Tanah Kosong	Persentase tanah kosong yang dimanfaatkan	528.399.469,00	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Pertanahan
Tujuan 2.2 : Terwujudnya inklusiivitas dan keseimbangan ekonomi daerah berbasis potensi ekonomi lokal dan keragaman sosial budaya masyarakat	Indeks Gini		
Sasaran 2.2.1 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Non Migas	Laju Pertumbuhan Ekonomi Non Migas		
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase penataan sarana distribusi perdagangan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Perdagangan
Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase penerapan standardisasi dan perlindungan konsumen	625.358.894,00	
Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase perusahaan yang terdaftar dan memenuhi regulasi perijinan	104.761.625,00	
Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase produk dalam negeri yang difasilitasi dalam promosi dan pemasaran	248.824.129,00	
Program Pengembangan Ekspor	Persentase pertumbuhan nilai ekspor migas dan non migas	415.005.000,00	
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase IKM yang memanfaatkan SIINAS	105.139.314,00	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Industri

Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase IKM yang memiliki izin usaha	48.216.991,00	
Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase pertumbuhan Industri kecil menengah	1.669.471.897	
	Pesentase IKM yang menerapkan sistem manajemen produk		
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Pertumbuhan Jumlah Pelaku Usaha Mikro	5.689.591.844,00	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Program Pengembangan Umkm	Pertumbuhan Jumlah Pelaku Usaha Mikro	1.609.179.555,00	
Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Pertumbuhan KSP/USP yang mempunyai izin usaha simpan pinjam	10.969.000,00	
Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koprasi yang patuh terhadap regulasi perkoperasian	29.156.888,00	
Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usk Koperasi	Persentase jumlah KSP/USP yang dinilai kesehatannya	15.232.058,00	
Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase kapasitas SDM koperasi	585.287.569,00	
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Presentase objek daya tarik wisata yang representatif	8.702.880.270,00	
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase pengembangan dan perlindungan pelaku ekonomi kreatif	2.504.917.864,00	
Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisata	1.707.879.641,00	
Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase pelestarian budaya	11.232.299.736,00	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Kebudayaan
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase peningkatan penyelenggaraan kegiatan kesenian	1.336.639.515,00	
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap	1.784.365.692,00	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Perikanan

Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi perikanan budidaya	1.318.646.210,00	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Pertanian
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase peningkatan produktifitas pengelolaan hasil perikanan	1.092.893.382,00	
Program Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan pertanian	961.355.625,00	
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase pemenuhan sarana pertanian	1.313.362.357,00	
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentse pemenuhan prasarana pertanian unit pelayanan	3.011.837.811,00	
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Cakupan wilayah pengendalian kesehatan hewan	498.167.570	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Penanaman Modal
	Cakupan pembinaan pelaku usaha olahan peternakan		
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Cakupan wilayah yang terkendali dari bencana pertanian	138.311.065,00	
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Nilai Realisasi Investasi	1.565.202.268,00	
Program Promosi Penanaman Modal	Peningkatan Jumlah Investor	6.387.299.901,00	
Program Pelayanan Penanaman Modal	Nilai IKM	2.488.243.345,00	
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Prosentase Ketaatan Perusahaan Terhadap Aturan Penanaman Modal	876.031.867,00	
Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Persentase luas APL yang diberikan izin penguasaan	35.392.000,00	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Pertanahan
Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang diselesaikan	123.556.000,00	
Program Penatagunaan Tanah	Persentase penyediaan tanah untuk fasilitas publik	402.502.356,00	
Program Perekonomian Dan Pembangunan	Presentase implementasi kebijakan bidang perekonomian	5.027.219.491	

	Presentase implementasi kebijakan bidang pembangunan		
Misi 3: Kota Bontang yang BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia			
Tujuan 3.1 :Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan sejahtera	Indek Pembangunan Manusia (IPM)		
Sasaran 3.1.1 : Meningkatkan akses layanan Pendidikan dan kesehatan yang berkualitas	Angka harapan lama sekolah		
	Rata-rata lama sekolah		
	Usia harapan hidup		
Program Pengelolaan Pendidikan	APK SD (Paket setara SD)	222.870.645.667	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Pendidikan
	APK SMP (Paket setara SMP)		
	APK PAUD		
Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Rasio guru/murid	33.281.706.136,00	
Program Pengembangan Kurikulum	Persentase sekolah yang menerapkan kurikulum muatan lokal	1.412.088.904,00	
Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase Pendidikan dasar, PAUD dan non formal yang memiliki izin	417.137.089,00	
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase implementasi kebijakan bidang pemerintahan	54.566.293.598	Sekretariat Daerah
	Persentase implementasi kebijakan bidang kesejahteraan rakyat		
Program Pembinaan Perpustakaan	Jumlah pemustaka perpusta	4.325.292.597,00	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Perpustakaan
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka kematian ibu	203.466.819.590	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Kesehatan
	Cakupan kepesertaan JKN		
	Ketersediaan obat esensial (%)		
	Angka kematian bayi		

Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase sarana Produksi Obat, Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Berizin	552.745.679,00	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga Kesehatan berizin (Dinkes)	1.538.359.320,00	
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Penerapan 5 kluster kebijakan GERMAS di Kelurahan (Peningkatan Aktivitas Fisik, Peningkatan PHBS, Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi, Peningkatan Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit, Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup)	2.124.845.532,00	
Program Pengendalian Penduduk	Rata-rata jumlah anak per keluarga	1.002.233.504,00	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana
Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Rasio Akseptor KB	2.188.457.314,00	
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Persentase pemberdayaan kelompok kegiatan bangsa kencana	2.585.659.952,00	
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Nilai Pola Pangan Harapan (PPH Konsumsi)	2.606.667.276,00	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Pangan
	Ketersediaan Energi dan Protein		
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase ketersediaan energi dan protein perkapita	171.169.480,00	
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan segar asal tumbuhan	215.589.437,00	
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase ketersediaan informasi dan barang kebutuhan pokok/barang penting	493.350.610,00	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Perdagangan
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Presentase pembinaan dan pengembangan kapasitas daya saing organisasi kepemudaan (OKP)	11.597.744.132,00	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase atlet yang berprestasi	28.877.253.657,00	

Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan	2.711.084.989,00	
Program Perlindungan Perempuan	Persentase tertanganinya Kasus Kekerasan terhadap Perempuan	1.639.233.310,00	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Layanan Pembelajaran Keluarga	321.176.101,00	
Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Predikat Kota Layak Anak	746.226.900,00	
Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Layanan Anak yang memerlukan perlindungan khusus	1.264.197.141,00	
Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Cakupan data gender dan anak terpadu	10.403.952,00	
Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	1.138.356.662	
	Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja langsung APBD		
Sasaran 3.1.2 : Meningkatnya tenaga kerja berkualitas dan berdaya saing	Tingkat Pengangguran Terbuka		
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat	2.771.269.958,00	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase produktifitas tenaga kerja	11.739.250.571,00	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan ketenaga kerjaan
	Persentase pencari kerja yang dilatih		
Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	576.833.363,00	
Program Hubungan Industrial	Angka sengketa pengusaha pekerja pertahun	8.889.485.429,00	
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Presentase Sumber daya pariwisata yang di kembangkan	23.154.539.609	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Pariwisata

	Presentase Sumber daya Ekraf yang di kembangkan		
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkh)	Persentase usaha mikro yang menjalin kemitraan usaha	5.689.591.844,00	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Sasaran 3.1.3 : Meningkatnya pemberdayaan sosial	Angka Kemiskinan		
Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	1.212.324.942,00	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Sosial
Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan rehabilitasi sosial	4.922.768.714,00	
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	1.950.773.245	
	Tingkat validitas data penduduk miskin (indikator daerah)		
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase LKK dan LAK yang aktif	2.537.340.124,00	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat.	106.295.769.618,00	Kecamatan



WALI KOTA BONTANG

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Neni Moernaeni
Jabatan : Wali Kota Bontang

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Bontang, 01 Oktober 2025



Wali Kota Bontang

Neni Moernaeni



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
PEMERINTAH KOTA BONTANG

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
RPJMD 2021-2026				
1.	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang harmoni, bersih, adil, Amanah, dan Bertanggung Jawab		Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah	85
1.1		Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif	Indeks Reformasi Birokrasi	A-(82,32)
			Nilai LPPD	Tinggi (4,20)
			Opini BPK	WTP
1.2		Meningkatnya kondusifitas wilayah	Jumlah konflik	5
			Persentase Penyelesaian Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum	100
2.	Mewujudkan pembangunan perkotaan yang layak huni, cerdas dan berwawasan lingkungan		Indeks Kota Berwawasan Lingkungan (IKBL)	71,78
2.1		Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang maju tangguh	Indeks kualitas perkotaan	76,61
2.2		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan tata ruang yang lestari	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73,38
3.	Mewujudkan inklusivitas dan keseimbangan ekonomi daerah berbasis potensi ekonomi lokal dan keragaman sosial budaya masyarakat		Indeks Gini	0,300
3.1		Meningkatnya pertumbuhan ekonomi non migas	Laju Pertumbuhan Ekonomi Non Migas	5,00
4.	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan sejahtera		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	82,49
4.1		Meningkatnya akses layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas	Angka harapan lama sekolah	13,73
			Rata-rata lama sekolah	11,02
			Usia harapan hidup	75,23
4.2		Meningkatnya tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,65

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
4.3		Meningkatnya pemberdayaan sosial	Angka Kemiskinan	3,31-3,73
RPJMD 2025-2029				
1.	Terwujudnya Kota Bontang yang maju		Laju Pertumbuhan Ekonomi	1,00-1,15
			Laju Pertumbuhan Ekonomi Non Migas	5,00
1.1		Meningkatnya Nilai Investasi	Pertumbuhan Nilai Investasi	3,00
1.2		Meningkatnya produktivitas sektor ekonomi lokal	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Perikanan dan Perkebunan	1,36
			Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	3,75
			Kontribusi PDRB Sektor Jasa	4,51
			Kontribusi PDRB Sektor Pariwisata	0,72
1.3		Meningkatnya Produktivitas Sektor Industri Pengolahan	Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	0,22
1.4		Meningkatnya kualitas infrastruktur yang maju dan merata	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	77,00
1.5		Terwujudnya Stabilitas harga	Indeks Perkembangan Harga	1,1± 1
1.6		Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat	Indeks Ketahanan Pangan	89,14
1.7		Meningkatnya Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	3,62
2.	Terwujudnya Kota Bontang yang sejahtera		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	82,83–83,18
2.1		Meningkatnya kualitas dan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan	Indeks Pendidikan	0,76
			Indeks Kesehatan	0,85
			Tingkat Kemiskinan	3,73-3,40
2.2		Meningkatnya Perlindungan Sosial yang Adaptif	Persentase Keluarga Miskin Penerima Perlindungan Sosial yang tergraduasi dari Kemiskinan	8,44
2.3		Meningkatnya Ketahanan Keluarga	Indeks pembangunan keluarga	74,80
			Indeks Gini	0,330-0,300

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
2.4		Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran terbuka	6,78-6,65
3.	Terwujudnya Kota Bontang yang Berkelanjutan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	73,38
3.1		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan kota	Penurunan Intensitas Emisi GRK	15,89
			Indeks Risiko Bencana	115,57-114,57
4.			Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	82,32
4.1	Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	70,90
			Opini BPK	WTP
4.2		Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Digitalisasi Pemerintahan yang Inovatif	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,32
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90,85
			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) / Indeks Pemerintahan Digital (Pemdi)	3,59

No.	Program	Pagu Anggaran
1	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	22.019.457.415,00
2	Program Hubungan Industrial	8.098.919.093,00
3	Program Kawasan Permukiman	9.786.700.020,00
4	Program Kepegawaian Daerah	2.671.242.111,00
5	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.739.623.286,00
6	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.654.703.579,00
7	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	14.450.630.001,00
8	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	7.657.000,00
9	Program Pelayanan Penanaman Modal	1.897.015.886,00
10	Program Pemasaran Pariwisata	1.909.578.860,00
11	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1.090.234.431,00
12	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1.990.736.849,00
13	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	37.500.000,00
14	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	2.253.841.698,00
15	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	7.548.603.866,00
16	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	108.632.583.548,00
17	Program Pemberdayaan Sosial	1.085.165.076,00
18	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	5.544.940.957,00
19	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	9.970.502,00
20	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	28.501.129.722,00
21	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	2.304.988.003,00
22	Program Pembinaan Perpustakaan	9.406.193.078,00
23	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	517.312.539,00
24	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	229.815.209.491,00
25	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	74.279.846.715,00
26	Program Penanganan Bencana	1.056.812.080,00
27	Program Penanganan Kerawanan Pangan	95.998.173,00
28	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	31.937.000,00
29	Program Penanggulangan Bencana	2.542.313.109,00
30	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	252.407.000,00
31	Program Penataan Bangunan Gedung	29.793.577.604,00
32	Program Penatagunaan Tanah	304.200.956,00
33	Program Pencatatan Sipil	419.820.000,00

No.	Program	Pagu Anggaran
34	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	21.163.791.638,00
35	Program Pendaftaran Penduduk	1.160.788.035,00
36	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	33.048.171.536,00
37	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	149.989.549,00
38	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	3.228.438.309,00
39	Program Penempatan Tenaga Kerja	467.798.018,00
40	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	825.955.685,00
41	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	16.360.327,00
42	Program Pengawasan Keamanan Pangan	157.784.550,00
43	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	28.649.518.377,00
44	Program Pengelolaan Arsip	1.084.051.430,00
45	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.004.554.214,00
46	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	6.114.821.144,00
47	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	301.450.385.807,00
48	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	39.730.730.176,00
49	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	3.458.610.626,00
50	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.762.926.690,00
51	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	8.795.019.663,00
52	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	18.760.000,00
53	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	9.028.674.192,00
54	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	11.714.595.507,00
55	Program Pengelolaan Pelayaran	233.260.568,00
56	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	4.835.673.746,00
57	Program Pengelolaan Pendidikan	247.305.321.231,00
58	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.631.109.306,00
59	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1.669.274.051,00
60	Program Pengelolaan Persampahan	8.503.957.036,00
61	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	3.114.860,00
62	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	80.389.674,00
63	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	69.063.574,00
64	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	254.946.129.652,00
65	Program Pengelolaan Tanah Kosong	897.837.177,00
66	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	1.966.300.590,00
67	Program Pengembangan Ekspor	164.229.000,00
68	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	2.602.778.882,00
69	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	2.022.160.125,00

No.	Program	Pagu Anggaran
70	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	28.014.063.838,00
71	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	7.387.187.250,00
72	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	2.227.278.332,00
73	Program Pengembangan Kebudayaan	9.777.602.491,00
74	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	739.228.600,00
75	Program Pengembangan Kurikulum	372.746.294,00
76	Program Pengembangan Perumahan	8.566.932.733,00
77	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	3.387.611.520,00
78	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.791.115.336,00
79	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	11.016.625.452,00
80	Program Pengembangan UMKM	1.092.461.891,00
81	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	70.514.232,00
82	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	92.755.509,00
83	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	33.055.055,00
84	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	350.002.103,00
85	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1.129.688.865,00
86	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.149.926.136,00
87	Program Pengendalian Penduduk	703.882.818,00
88	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	277.190.639,00
89	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	137.222.129,00
90	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	396.953.246,00
91	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1.028.914.391,00
92	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	3.382.478.560,00
93	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	12.119.249,00
94	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	8.706.281.801,00
95	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.676.781.156,00
96	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	879.659.320,00
97	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	769.540.800,00
98	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	1.221.021.600,00
99	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	245.861.292,00

No.	Program	Pagu Anggaran
100	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	255.418.829,00
101	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1.257.473.050,00
102	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	38.721.829.882,00
103	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	9.077.777.152,00
104	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.203.764.658.200,26
105	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	3.083.179.832,00
106	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.235.047.581,00
107	Program Penyelenggaraan Jalan	173.544.486.534,00
108	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	22.843.595.967,00
109	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	5.429.964.890,00
110	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.624.300.733,00
111	Program Penyelenggaraan Pengawasan	871.774.000,00
112	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	2.940.005.589,00
113	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	396.536.597,00
114	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	2.397.861.867,00
115	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	34.663.000,00
116	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	633.626.662,00
117	Program Penyuluhan Pertanian	741.325.463,00
118	Program Perekonomian dan Pembangunan	4.755.311.269,00
119	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	2.533.002.233,00
120	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	280.275.370,00
121	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	3.508.043.564,00
122	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	65.282.625,00
123	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	2.533.261.624,00
124	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	7.847.000,00
125	Program Perlindungan Khusus Anak	1.320.729.498,00
126	Program Perlindungan Perempuan	1.277.896.861,00
127	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	2.685.585.000,00
128	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1.150.766.024,00
129	Program Promosi Penanaman Modal	7.188.673.700,00
130	Program Rehabilitasi Sosial	4.083.350.459,00
131	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	339.360.279,00

No.	Program	Pagu Anggaran
132	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	271.305.010,00
133	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	817.925.091,00



Bontang, 01 Oktober 2025

Wali Kota Bontang

Neni Moernaeni





WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 100.3.3.3/515/BAPPERIDA/2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA BONTANG TAHUN
2025-2029

WALI KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Wali Kota wajib menetapkan indikator kinerja utama pemerintah kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bontang Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bontang Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Pemerintah Kota Bontang untuk:
- a. menetapkan rencana kerja tahunan;
 - b. menyampaikan rencana kerja dan anggaran;
 - c. menyusun dokumen penetapan kinerja;
 - d. menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan
 - e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis Pemerintah Kota Bontang;
- KETIGA : Pada saat Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku, Keputusan Wali Kota Bontang Nomor 188.45/04/BAPELITBANG TAHUN 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bontang Tahun 2021-2026 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Wali Kota Bontang Nomor 188.45/307/BAPELITBANG/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Nomor 188.45/04/BAPELITBANG TAHUN 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bontang Tahun 2021-2026, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 28 Oktober 2025

WALI KOTA BONTANG,



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Daerah
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 100.3.3.3/515/BAPPERIDA/2025
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KOTA BONTANG
TAHUN 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA BONTANG
TAHUN 2025-2029

- 1. Organisasi : Pemerintah Kota Bontang
- 2. Tugas :
 - a. memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
 - b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
 - c. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 - d. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD, dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD terhadap DPRD untuk dibahas bersama;
 - e. mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Indikator Kinerja Utama

a. Tujuan 1:

Kode	Indikator Kinerja Utama/Uraian
T1	Terwujudnya Kota Bontang yang Maju
IT1.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
	Deskripsi
	LPE mengukur perkembangan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian pada tahun tertentu terhadap nilai tahun sebelumnya (atas dasar harga konstan).
	Formulasi Perhitungan
	$LPE = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$
	t = tahun berjalan (atas dasar harga konstan)
	t-1 = tahun sebelum tahun berjalan (atas dasar harga konstan)

Kode	Indikator Kinerja Utama/Uraian
	Produsen Data
	Badan Pusat Statistik Kota Bontang
	Sumber Data
	Publikasi Kota Bontang dalam angka
	Unit Bertanggung Jawab
	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah
IT1.2	LPE Nonmigas
	Deskripsi
	LPE Nonmigas mengukur perkembangan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian selain sektor minyak dan gas bumi, pada tahun tertentu terhadap nilai tahun sebelumnya (atas dasar harga konstan).
	Formulasi Perhitungan
	$LPE\ Nonmigas = \frac{PDRB\ Nonmigas_t - PDRB\ Nonmigas_{t-1}}{PDRB\ Nonmigas_{t-1}} \times 100\%$
	t = tahun berjalan (atas dasar harga konstan)
	t-1 = tahun sebelum tahun berjalan (atas dasar harga konstan)
	Produsen Data
	Badan Pusat Statistik Kota Bontang
	Sumber Data
	Publikasi Kota Bontang dalam angka
	Unit Bertanggung Jawab
	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah

b. Sasaran Tujuan 1:

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja Utama/Uraian
S1	Meningkatnya Nilai Investasi
IS1	Pertumbuhan Nilai investasi
	Deskripsi
	Pertumbuhan nilai investasi menunjukkan perkembangan nilai investasi yang masuk ke suatu daerah dalam periode tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya.
	Formulasi Perhitungan
	$Pertumbuhan\ Nilai\ Investasi = \frac{Nilai\ Investasi_t - Nilai\ Investasi_{t-1}}{Nilai\ Investasi_{t-1}} \times 100\%$
	t = nilai investasi tahun terakhir
	t-1 = nilai investasi tahun sebelumnya
	Produsen Data
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Sumber Data
	Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Provinsi Kalimantan Timur
	Unit Bertanggung Jawab
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
S2	Meningkatnya Produktivitas Sektor Ekonomi Lokal
IS2.1	Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Pertanian, Perikanan, dan Perkebunan
IS2.2	Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja Utama/Uraian
	Deskripsi
	Persentase nilai tambah/pengeluaran pada sektor yang terkait perdagangan seperti perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor terhadap total PDRB suatu wilayah dalam periode tertentu (atas dasar harga berlaku).
	Formulasi Perhitungan
	$\frac{PDRB \text{ Sektor Perdagangan}}{PDRB} \times 100\%$
	Produsen Data
	Badan Pusat Statistik Kota Bontang
	Sumber Data
	Publikasi Kota Bontang dalam angka
	Unit Bertanggung Jawab
	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah
IS2.3	Kontribusi PDRB Sektor Jasa
	Deskripsi
	Persentase nilai tambah/pengeluaran pada sektor jasa seperti jasa keuangan dan asuransi, jasa perusahaan, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, serta jasa lainnya terhadap total PDRB suatu wilayah dalam periode tertentu (atas dasar harga berlaku).
	Formulasi Perhitungan
	$\frac{PDRB \text{ Sektor Jasa}}{PDRB} \times 100\%$
	Produsen Data
	Badan Pusat Statistik Kota Bontang
	Sumber Data
	Publikasi Kota Bontang dalam angka
	Unit Bertanggung Jawab
	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah
IS2.4	Kontribusi PDRB Sektor Pariwisata
	Deskripsi
	Persentase nilai tambah/pengeluaran pada sektor yang terkait dengan pariwisata seperti penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap total PDRB suatu wilayah dalam periode tertentu (atas dasar harga berlaku).
	Formulasi Perhitungan
	$\frac{PDRB \text{ Sektor Akomodasi} + PDRB \text{ Sektor Makan Minum}}{PDRB} \times 100\%$
	Produsen Data
	Badan Pusat Statistik Kota Bontang
	Sumber Data
	Publikasi Kota Bontang dalam angka
	Unit Bertanggung Jawab
	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah
S3	Meningkatnya Produktivitas Sektor Industri Pengolahan
IS3	Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan
	Deskripsi
	Perkembangan PDRB yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan pada tahun tertentu terhadap nilai tahun sebelumnya (atas dasar harga konstan).

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja Utama/Uraian
	Formulasi Perhitungan
	$\frac{PDRB \text{ Sektor Industri Pengolahan } t - PDRB \text{ Sektor Industri Pengolahan } t-1}{PDRB \text{ Sektor Industri Pengolahan } t-1} \times 100\%$
	t = tahun berjalan (atas dasar harga konstan)
	t-1 = tahun sebelum tahun berjalan (atas dasar harga konstan)
	Produsen Data
	Badan Pusat Statistik Kota Bontang
	Sumber Data
	Publikasi Kota Bontang dalam angka
	Unit Bertanggung Jawab
	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah
S4	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur yang Maju dan Merata
IS4	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)
	Deskripsi
	Indikator untuk mengukur ketersediaan dan kualitas layanan infrastruktur dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
	Formulasi Perhitungan
	IKLI diperoleh melalui perhitungan komposit indeks infrastruktur pekerjaan umum (bobot 30% [tiga puluh persen]), indeks kinerja pengelolaan sampah (bobot 18% [delapan belas persen]), indeks infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman (bobot 20% [dua puluh persen]), indeks infrastruktur perhubungan (bobot 17% [tujuh belas persen]), serta indeks pelayanan kebakaran dan penyelamatan (bobot 15% [lima belas persen]). Perolehan IKLI tersebut dijabarkan sebagai berikut:
	1. Indeks infrastruktur pekerjaan umum (bobot 30% [tiga puluh persen]) mengukur ketersediaan dan kualitas layanan infrastruktur pekerjaan umum, dengan perhitungan komposit dari tingkat pelayanan air minum (bobot 15% [lima belas persen]), tingkat pelayanan air limbah (bobot 10% [sepuluh persen]), tingkat kapasitas prasarana persampahan (bobot 9% [sembilan persen]), tingkat pelayanan sumber daya air (bobot 15% [lima belas persen]), tingkat pelayanan drainase perkotaan (bobot 12% [dua belas persen]), tingkat pelayanan jalan umum (bobot 12% [dua belas persen]), tingkat pelayanan bangunan gedung (bobot 12% [dua belas persen]), kesesuaian tata ruang (bobot 10% [sepuluh persen]), dan tingkat kapasitas tenaga kerja konstruksi (bobot 5% [lima persen]);
	2. Indeks kinerja pengelolaan sampah (bobot 18% [delapan belas persen]) merupakan penilaian oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai ukuran keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola sampah;
	3. Indeks infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman (bobot 20% [dua puluh persen]) mengukur ketersediaan dan kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman, dengan perhitungan komposit dari fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program pemerintah kota (bobot 40% [empat puluh persen]) dan tingkat kualitas permukiman (bobot 60% [enam puluh persen]);

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja Utama/Uraian
	4. Indeks infrastruktur perhubungan (bobot 17% [tujuh belas persen]) mengukur ketersediaan dan kualitas layanan infrastruktur perhubungan, dengan perhitungan komposit dari tingkat pelayanan transportasi umum (bobot 40% [empat puluh persen]) dan tingkat keselamatan transportasi (bobot 60% [enam puluh persen]); dan
	5. Indeks pelayanan kebakaran dan penyelamatan (bobot 15% [lima belas persen]) mengukur kualitas pelayanan kebakaran dan penyelamatan, dengan perhitungan komposit dari tingkat pelayanan pemadaman kebakaran (bobot 40% [empat puluh persen]) dan tingkat pelayanan penyelamatan dan evakuasi pada kejadian kebakaran dan nonkebakaran (bobot 60% [enam puluh persen]).
	Produsen Data
	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah
	Sumber Data
	Laporan capaian kota berkelanjutan
	Unit Bertanggung Jawab
	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah
S5	Terwujudnya Stabilitas Harga
IS5	Indeks Perkembangan Harga (IPH)
	Deskripsi
	Indeks yang mengukur perubahan harga-harga komoditas pangan bahan pokok dan penting yang memiliki bobot besar dalam Indeks Harga Konsumen (IHK) dan dapat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah daerah.
	Formulasi Perhitungan
	Per komoditas $IPH_{i,t} = \frac{P_{i,t} - P_{i,t-1}}{P_{i,t-1}} \times 100\%$ $IPH_{i,t}$ = Indeks Perkembangan Harga komoditas i pada waktu t $P_{i,t}$ = Harga komoditas i pada waktu t $P_{i,t-1}$ = Harga komoditas i pada periode sebelumnya Agregasi wilayah (semua komoditas) $IPH_t = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n IPH_{i,t}$ IPH_t = IPH rata-rata wilayah pada waktu t n = jumlah komoditas pangan pokok yang dipantau
	Produsen Data
	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan
	Sumber Data
	Instagram Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan
	Unit Bertanggung Jawab
	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan
S6	Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat
IS6	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja Utama/Uraian
	Deskripsi
	Ukuran komposit yang menggambarkan kondisi ketahanan pangan suatu wilayah (kabupaten/kota/provinsi) berdasarkan beberapa indikator yang mewakili aspek ketersediaan pangan, akses (keterjangkauan) pangan, dan pemanfaatan pangan.
	Formulasi Perhitungan
	1. Standardisasi indikator (normalisasi)
	Setiap indikator X_{ij} (indikator ke- i di wilayah j) dinormalisasi ke skala yang sama. - z-score: $z_{ij} = \frac{X_{ij} - \mu_i}{\sigma_i}$
	2. Pemberian bobot dan agregasi
	Setiap indikator dinormalisasi kemudian dikalikan bobot Kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan skor IKP wilayah j :
	$Y_j = \sum_{i=1}^n a_i X'_{ij}$ Y_j : skor IKP wilayah j a_i : bobot indikator i X'_{ij} : nilai indikator i di wilayah j setelah normalisasi
	3. Pengelompokan / klasifikasi wilayah berdasarkan rentang IKP (<i>cut-off</i>)
	Setelah skor IKP terhitung, wilayah diklasifikasikan ke dalam 6 (enam) kelompok (prioritas 1 [satu] sampai 6 [enam]) berdasarkan rentang (<i>cut-off</i>) skor.
	Produsen Data
	Badan Pangan Nasional
	Sumber Data
	Publikasi IKP kabupaten/kota
	Unit Bertanggung jawab
	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, dan Pertanian
S7	Meningkatnya Daya Saing Daerah
IS7	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)
	Deskripsi
	IDSD adalah instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang merefleksikan kemampuan daerah dalam mengoptimalkan potensi lokal melalui produktivitas, inovasi, dan persaingan, baik antar daerah maupun secara nasional dan internasional.
	Formulasi Perhitungan
	Komponen IDSD terdiri dari 4 (empat) aspek/komponen (lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi) yang dijabarkan dalam 12 (dua belas) pilar yaitu institusi, infrastruktur, adopsi teknologi informasi dan komunikasi, stabilitas ekonomi makro, kesehatan, keterampilan, pasar produk, pasar tenaga kerja, sistem keuangan, ukuran pasar, dinamika bisnis, dan kapabilitas inovasi.

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja Utama/Uraian
	$IDSD_j = \sum_{c=1}^4 w_c \cdot C_{cj}$ dengan • C_{cj} = skor komponen c di daerah j • w_c = bobot komponen ke-c Atau lebih rinci via pilar: $IDSD_j = \sum_{k=1}^{12} w_k \cdot P_{kj}$ dengan • P_{kj} = skor pilar ke-k di daerah j • w_k = bobot pilar ke-k
	Produsen Data
	Badan Riset dan Inovasi Nasional
	Sumber Data
	Publikasi IDSD kabupaten/kota
	Unit Bertanggung Jawab
	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah
	Deskripsi
	Persentase nilai tambah/pengeluaran pada sektor/subsektor pertanian, perikanan, dan perkebunan terhadap total PDRB suatu wilayah dalam periode tertentu (atas dasar harga berlaku).
	Formulasi Perhitungan
	$\frac{PDRB \text{ Sektor Pertanian, Perikanan, Perkebunan}}{PDRB} \times 100\%$
	Produsen Data
	Badan Pusat Statistik Kota Bontang
	Sumber Data
	Publikasi Kota Bontang dalam angka
	Unit Bertanggung jawab
	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah

c. Tujuan 2:

Kode	Indikator Kinerja Utama/Uraian
T2	Terwujudnya Kota Bontang yang Sejahtera
IT2.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
	Deskripsi
	Indeks yang mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup.
	Formulasi Perhitungan
	$Indeks \text{ Pembangunan Manusia} = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$
	IPM dihitung menggunakan rata-rata geometrik dari indeks Indeks Kesehatan (UHH), indeks pendidikan (rata-rata dari indeks HLS dan RLS), dan indeks pengeluaran
	Produsen Data
	Badan Pusat Statistik Kota Bontang
	Sumber Data
	Publikasi Kota Bontang dalam angka
	Unit Bertanggung Jawab
	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah

Kode	Indikator Kinerja Utama/Uraian
IT2.2	Tingkat Kemiskinan
	Deskripsi Indikator yang mengukur proporsi masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya (baik makanan maupun nonmakanan) berdasarkan standar minimum yang telah ditetapkan.
	Formulasi Perhitungan $Tingkat\ Kemiskinan = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^a$ Keterangan : a = 0 z = garis kemiskinan yi = rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan (i=1,2,3,...,q), yi<z q = banyaknya penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan n = jumlah penduduk Produsen Data Badan Pusat Statistik Kota Bontang Sumber data Publikasi Kota Bontang Dalam Angka Unit Bertanggung Jawab Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
IT2.2	Indeks Gini
	Deskripsi Indeks Gini (<i>Gini Ratio</i>) adalah ukuran ketimpangan distribusi pendapatan atau pengeluaran penduduk. Nilainya berada pada rentang 0–1: 1. Nilai 0 (nol) menunjukkan pemerataan sempurna (semua orang memiliki pendapatan/pengeluaran yang sama). 2. Nilai 1 (satu) menunjukkan ketimpangan sempurna (seluruh pendapatan/pengeluaran hanya dikuasai oleh satu orang/rumah tangga). Formulasi Perhitungan $Rasio\ Gini = \sum_{i=1}^n f_{pi} (f_{ci} + f_{ci-1})$ Keterangan : n = jumlah observasi fpi = frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i fci = frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-1 fci-1 = frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke (i-1) Produsen Data Badan Pusat Statistik Kota Bontang Sumber data Publikasi Kota Bontang dalam angka Unit Bertanggung Jawab Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah

d. Sasaran Tujuan 2:

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja Utama/Uraian
S8	Meningkatnya Kualitas dan Akses Terhadap Layanan Pendidikan dan Kesehatan
IS8.1	Indeks Pendidikan
	Deskripsi Ukuran capaian pembangunan manusia dari aspek akses dan kualitas pendidikan, yang dihitung berdasarkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). 1. RLS = rata-rata jumlah tahun yang telah dijalani penduduk usia 25 (dua puluh lima) tahun ke atas dalam menempuh pendidikan formal. 2. HLS = perkiraan lamanya sekolah (dalam tahun) yang akan dijalani oleh anak pada usia 7 (tujuh) tahun jika mengikuti pola pendidikan saat ini. Formulasi Perhitungan $\text{Indeks RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{max} - RLS_{min}}$ $\text{Indeks HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{max} - HLS_{min}}$ $\text{Indeks Pendidikan} = \frac{\text{Indeks RLS} + \text{Indeks HLS}}{2}$ Nilai minimum RLS = 0 (nol) tahun, maksimum = 15 (lima belas) tahun Nilai minimum HLS = 0 (nol) tahun, maksimum = 18 (delapan belas) tahun Produsen Data Badan Pusat Statistik Kota Bontang Sumber data Publikasi Kota Bontang dalam angka Unit Bertanggung Jawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
IS8.2	Indeks Kesehatan
	Deskripsi Ukuran capaian pembangunan manusia dari aspek derajat kesehatan, yang dihitung menggunakan indikator Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH). Dimana AHH merupakan rata-rata perkiraan jumlah tahun yang dapat dijalani seseorang sejak lahir jika mengalami pola mortalitas yang berlaku pada suatu waktu. Formulasi Perhitungan $\text{Indeks Kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{max} - AHH_{min}}$ Standar UNDP: 1. AHHmin = 20 (dua puluh) tahun 2. AHHmaks = 85 (delapan puluh lima) tahun Produsen Data Badan Pusat Statistik Kota Bontang Sumber Data Publikasi Kota Bontang dalam angka Unit Bertanggung Jawab Dinas Kesehatan
S9	Meningkatnya Perlindungan Sosial yang Adaptif
IS9	Persentase Keluarga Miskin Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja Utama/Uraian
	Deskripsi
	Indikator ini mengukur efektivitas program perlindungan sosial dalam membantu keluarga mencapai kemandirian ekonomi dan keluar dari garis kemiskinan. Graduasi dalam konteks ini merujuk pada kondisi keluarga yang tidak lagi memenuhi kriteria kemiskinan, baik karena peningkatan pendapatan, pemberdayaan usaha, maupun faktor lain yang mendukung kemandirian ekonomi. Ini penting untuk mengevaluasi apakah program yang berjalan telah berhasil mengentaskan kemiskinan atau hanya bersifat sementara.
	Formulasi Perhitungan
	$\frac{\text{Jumlah keluarga tergraduasi}}{\text{Total keluarga penerima manfaat}} \times 100\%$
	Produsen Data
	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
	Sumber Data
	Portal Satu Data Indonesia Kota Bontang
	Unit Bertanggung Jawab
	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
S10	Meningkatnya Ketahanan Keluarga
IS10	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)
	Deskripsi
	iBangga merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketenteraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia.
	Formulasi Perhitungan
	$iBangga = \frac{I_{ketenteraman} + I_{kemandirian} + I_{kebahagiaan}}{3} \times 100\%$
	Nilai komposit dari 3 (tiga) dimensi dengan mempertimbangkan bobot tertentu, yaitu:
	1. Dimensi Ketenteraman dengan indikator antara lain: a. kegiatan ibadah; b. legalitas keluarga; c. jaminan kesehatan; d. jaminan keuangan; dan e. keharmonisan keluarga.
	2. Dimensi Kemandirian dengan indikator antara lain: a. pemenuhan kebutuhan dasar; b. keberlangsungan pendidikan; c. kesehatan keluarga; dan d. akses informasi.
	3. Dimensi Kebahagiaan dengan indikator antara lain: a. interaksi keluarga; dan b. interaksi sosial.
	Produsen Data
	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
	Sumber Data
	Sistem Informasi Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
	Unit Bertanggung Jawab
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja Utama/Uraian
S11	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja
IS11	Tingkat Pengangguran Terbuka
	Deskripsi
	Tingkat pengangguran terbuka adalah ukuran yang menunjukkan perbandingan antara jumlah pencari kerja dengan jumlah angkatan kerja.
	Formulasi Perhitungan
	$\text{Tingkat Pengangguran Terbuka} = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$
	Keterangan : 1. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, serta (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. 2. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran.
	Produsen Data
	Badan Pusat Statistik Kota Bontang
	Sumber Data
	Publikasi Kota Bontang dalam angka
	Unit Bertanggung Jawab
	Dinas Ketenagakerjaan

e. Tujuan 3:

Kode	Indikator Kinerja Utama/Uraian
T3	Terwujudnya Kota Bontang yang Berkelanjutan
IT3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
	Deskripsi
	Nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL).
	Formulasi Perhitungan
	Perhitungan IKLH kabupaten/kota yang tidak memiliki Gambut adalah (PermenLHK No.27/2021): $\text{IKLH} = (0,376 \times \text{IKA}) + (0,405 \times \text{IKU}) + (0,219 \times \text{IKL})$
	Produsen Data
	Kementerian Lingkungan Hidup
	Sumber Data
	Surat hasil nilai IKLH provinsi dan kabupaten/kota
	Unit Bertanggung Jawab
	Dinas Lingkungan Hidup

f. Sasaran Tujuan 3:

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja Utama/Uraian
S12	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Kota
S12.1	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
	Deskripsi
	GRK adalah perbandingan antara emisi gas rumah kaca yang terlepas ke atmosfer terhadap produk domestik regional bruto yang dihasilkan pada tahun tersebut. Penurunan intensitas emisi GRK untuk memperlihatkan sinergitas antara upaya penurunan emisi dengan pertumbuhan ekonomi.
	Formulasi Perhitungan
	Intesitas Emisi GRK (ton CO2e/2010 IDR)
	$IE_t = \frac{TE_t}{PDRB_t}$
	t = tahun berkenaan
	IE = Intensitas Emisi GRK (ton CO2e/2010 IDR miliar)
	TE = total tingkat emisi GRK (ton CO2e)
	PDRB = Produk Domestik Regional Bruto (2010 IDR miliar)
	Penurunan Intensitas Emisi GRK
	$\%IE_t = \frac{IE_t - IEB_t}{IEB_t}$
	t = tahun berkenaan
	%IE = Persentase Intensitas emisi GRK (ton CO2e/2010 IDR miliar)
	IE = Intensitas Emisi GRK (ton CO2e/2010 IDR miliar)
	IEBt = Intensitas Emisi GRK <i>baseline</i> tahun t (ton CO2e/2010 IDR miliar)
	Produsen Data
	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah
	Sumber Data
	Laporan capaian kota berkelanjutan
	Unit Bertanggung Jawab
	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah
IS12.2	Indeks Risiko Bencana
	Deskripsi
	Indeks Risiko Bencana adalah ukuran komposit yang digunakan untuk menggambarkan tingkat risiko bencana suatu wilayah (provinsi/kabupaten/kota) berdasarkan kombinasi dari ancaman bahaya (<i>hazard</i>), kerentanan (<i>vulnerability</i>), dan kapasitas (<i>capacity</i>).
	Formulasi Perhitungan
	$\text{Risiko} = \text{Bahaya (hazard)} \times \frac{\text{kerentanan (vulnerability)}}{\text{kapasitas (capacity)}}$
	Keterangan
	1. Bahaya (<i>hazard</i>) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (<i>magnitude</i>) dari suatu fenomena alam seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya.
	2. Kerentanan (<i>vulnerability</i>) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan.

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja Utama/Uraian
	3. Kapasitas (<i>capacity</i>) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu: a. perkuatan kebijakan dan kelembagaan; b. pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; c. pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; d. penanganan tematik kawasan rawan bencana; e. peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; f. perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan g. pengembangan sistem pemulihan bencana.
	Produsen Data
	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
	Sumber Data
	Surat Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang penyampaian Indek Ketahanan Daerah dan Indeks Risiko Bencana
	Unit Bertanggung Jawab
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

g. Tujuan 4:

Kode	Indikator Kinerja Utama/Uraian
T4	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
IT4	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)
	Deskripsi
	IRB adalah indeks yang digunakan untuk mengukur keberhasilan reformasi birokrasi pada suatu instansi pemerintah yang menunjukkan tingkat efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan profesionalitas birokrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>).
	Formulasi Perhitungan
	IRB dinilai berdasarkan 2 komponen penilaian yaitu : 1. Reformasi Birokrasi (RB) General mengukur capaian birokrasi secara menyeluruh; dan 2. RB Tematik mengukur pada pelaksanaan reformasi yang berdampak langsung terhadap pembangunan nasional atau prioritas tematik (misalnya pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi pemerintahan).
	$Indeks\ RB = \frac{(Nilai\ RB\ General \times w_G) + (Nilai\ RB\ Tematik \times w_T)}{w_G + w_T}$
	WG = bobot untuk RB General
	WT = bobot untuk RB Tematik
	Nilai RB General = skor yang diperoleh dalam komponen general
	Nilai RB Tematik = skor yang diperoleh dalam komponen tematik
	Produsen Data
	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
	Sumber Data
	Laporan hasil evaluasi reformasi birokrasi

Kode	Indikator Kinerja Utama/Uraian
	Unit Bertanggung Jawab
	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

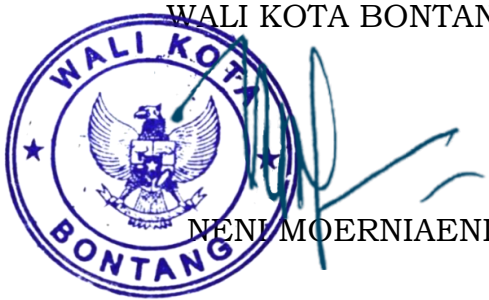
h. Sasaran Tujuan 4:

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja Utama/Uraian
S13	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
IS13.1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
	Deskripsi
	Nilai SAKIP merupakan indikator yang digunakan untuk penilaian rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
	Formulasi Perhitungan
	$\text{Nilai SAKIP} = (\text{Bobot Perencanaan} \times \text{Nilai Perencanaan}) + (\text{Bobot Pengukuran} \times \text{Nilai Pengukuran}) + (\text{Bobot Pelaporan} \times \text{Nilai Pelaporan}) + (\text{Bobot Evaluasi} \times \text{Nilai Evaluasi})$
	Produsen Data
	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
	Sumber Data
	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP kabupaten/kota
	Unit Bertanggung Jawab
	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
IS13.2	Opini Badan Pemeriksa Keuangan
	Deskripsi
	Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan ukuran yang menyatakan laporan keuangan yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas sesuai prinsip akuntansi. Opini laporan keuangan disusun dengan pertimbangan kesesuaian antara akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.
	Formulasi Perhitungan
	Melalui pemeriksaan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, serta catatan dan laporan keuangan.
	Produsen Data
	Badan Pemeriksa Keuangan
	Sumber Data
	Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan
	Unit Bertanggung Jawab
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja Utama/Uraian
S14	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Digitalisasi Pemerintah..ah yang Inovatif
IS14.1	Indeks Pelayanan Publik (IPP)
	Deskripsi
	IPP adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan 6 aspek yaitu: 1. Aspek kebijakan pelayanan; 2. Aspek profesionalisme sumber daya manusia; 3. Aspek sarana prasarana; 4. Aspek sistem informasi pelayanan publik; 5. Aspek konsultasi dan pengaduan; dan 6. Aspek inovasi.
	Formulasi Perhitungan
	$\text{Indeks Pelayanan Publik} = \sum_{k=1}^6 w_k \times A_k$
	Ak = skor aspek ke-k setelah dinormalisasi atau diskor, dengan k=1,2,...,6
	wk = bobot aspek ke-k (jumlah semua bobot = 1 [satu])
	Produsen Data
	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
	Sumber Data
	Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik
	Unit Bertanggung Jawab
	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
IS14.2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
	Deskripsi
	IKM adalah hasil pengukuran dari kegiatan survei kepuasan masyarakat yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.
	Formulasi Perhitungan
	$IKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$
	Produsen Data
	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
	Sumber Data
	Hasil survei kepuasan masyarakat
	Unit Bertanggung Jawab
	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
IS14.3	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)/Indeks Pemerintahan Digital (Pemdi)
	Deskripsi
	Indeks SPBE adalah ukuran capaian pelaksanaan SPBE pada instansi pusat dan pemerintah daerah yang menggambarkan tingkat kematangan (<i>maturity level</i>) penyelenggaraan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Nilai ini mencerminkan sejauh mana aspek kebijakan, tata kelola, manajemen, dan layanan berbasis elektronik telah diimplementasikan secara integratif dan efektif.

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja Utama/Uraian
	Formulasi Perhitungan
	$Indeks\ SPBE = \frac{\sum_{j=1}^n (ND_j \times BD_j)}{BD_j}$
	NDj = nilai domain j (nilai kematangan domain j)
	BDj = bobot domain j
	n = jumlah domain yang digunakan dalam evaluasi SPBE
	Produsen Data
	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
	Sumber Data
	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SPBE
	Unit Bertanggung Jawab
	Dinas Komunikasi dan Informatika

WALI KOTA BONTANG,



NENI MOERNIAENI



WALI KOTA BONTANG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Neni Moernaeni
Jabatan : Wali Kota Bontang

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Bontang, 05 Januari 2026



Wali Kota Bontang

Neni Moernaeni



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
PEMERINTAH KOTA BONTANG

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya kota bontang yang maju		Laju Pertumbuhan Ekonomi	1,15-2,00
			Laju Pertumbuhan Ekonomi Non Migas	5,50
1.1		Meningkatnya Nilai Investasi	Pertumbuhan Nilai Investasi	10
1.2		Meningkatnya produktivitas sektor ekonomi lokal	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Perikanan dan Perkebunan	1,51
			Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	3,80
			Kontribusi PDRB Sektor Jasa	4,64
			Kontribusi PDRB Sektor Pariwisata	0,77
1.3		Meningkatnya Produktivitas Sektor Industri Pengolahan	Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	0,44
1.4		Meningkatnya kualitas infrastruktur yang maju dan merata	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	79,64
1.5		Terwujudnya Stabilitas harga	Indeks Perkembangan Harga	1,1± 1
1.6		Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat	Indeks Ketahanan Pangan	89,39
1.7		Meningkatnya Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	3,65
2.	Terwujudnya kota bontang yang sejahtera		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	83,19-83,53
2.1		Meningkatnya kualitas dan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan	Indeks Pendidikan	0,76
			Indeks Kesehatan	0,85
			Tingkat Kemiskinan	3,40 – 3,15
2.2		Meningkatnya Perlindungan Sosial yang Adaptif	Persentase Keluarga Miskin Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	16,88
2.3		Meningkatnya Ketahanan Keluarga	Indeks pembangunan keluarga	75,60
			Indeks Gini	0,323-0,310

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
2.4		Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran terbuka	6,65-6,05
3.	Terwujudnya Kota Bontang yang Berkelanjutan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	73,54
3.1		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan kota	Penurunan Intensitas Emisi GRK	28,45
			Indeks Risiko Bencana	113,57-112,57
4.	Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik		Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	83,89
4.1		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	73,00
			Opini BPK	WTP
4.2		Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Digitalisasi Pemerintahan yang Inovatif	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,35
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91,00
			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) / Indeks Pemerintahan Digital (Pemdi)	1,70-2,00

No.	Program	Pagu Anggaran
1	Program Kepegawaian Daerah	1.064.599.300,00
2	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.633.619.340,00
3	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	153.000.000,00
4	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	33.192.611.363,00
5	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	999.950.000,00
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	3.330.000,00
7	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	736.995.000,00
8	Program Penanggulangan Bencana	278.751.190,00
9	Badan Pendapatan Daerah	19.472.298.840,00
10	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	799.380.530,00
11	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	389.497.800,00
12	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	6.818.242.239,00
13	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	567.409.214,00
14	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	798.263.473,00
15	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	331.593.879,00
16	Program Riset Dan Inovasi Daerah	21.880.000,00
17	Program Pencatatan Sipil	69.945.000,00
18	Program Pendaftaran Penduduk	186.938.300,00
19	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	365.819.166,00
20	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	4.114.800,00
21	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.658.926.900,00
22	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	226.340.369.830,00
23	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.153.854.720,00
24	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	144.717.020,00
25	Program Penanganan Kerawanan Pangan	24.946.750,00
26	Program Pengawasan Keamanan Pangan	45.930.540,00
27	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	2.374.032.876,00
28	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	2.431.749.371,00
29	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	277.032.361,00
30	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	150.000.120,00

No.	Program	Pagu Anggaran
31	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	233.872.896,00
32	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	260.296.557,00
33	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.274.981.400,00
34	Program Penyuluhan Pertanian	76.512.645,00
35	Program Hubungan Industrial	535.377.446,00
36	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	4.119.824.000,00
37	Program Penempatan Tenaga Kerja	161.459.272,00
38	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	13.297.963.200,00
39	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	7.900.180.000,00
40	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	449.939.300,00
41	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	49.998.000,00
42	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	670.000,00
43	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	8.040.000,00
44	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umk)	656.727.070,00
45	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	15.396.780,00
46	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	4.355.000,00
47	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	1.792.251,00
48	Program Pengembangan Ekspor	30.877.000,00
49	Program Pengembangan Umkm	8.107.000,00
50	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	1.364.502,00
51	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	2.064.000,00
52	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	670.000,00
53	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	515.270.917,00
54	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	1.702.939.479,00
55	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	19.110.000,00
56	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	65.024.600,00
57	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	61.616.287,00
58	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	936.753,00
59	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	31.431.000,00
60	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	750.000.000,00
61	Program Pengelolaan Persampahan	1.540.450.059,00

No.	Program	Pagu Anggaran
62	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	16.685.904,00
63	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	218.334.740,00
64	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	152.265.207,00
65	Program Penataan Bangunan Gedung	26.454.720.000,00
66	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1.100.000.000,00
67	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	108.527.978.625,00
68	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1.458.899.154,00
69	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	168.718.932.575,00
70	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	25.008.000,00
71	Program Penyelenggaraan Jalan	46.537.496.000,00
72	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.000.000.000,00
73	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	3.027.720.120,00
74	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	14.636.653.536,00
75	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	672.580.034,00
76	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	525.554.168,00
77	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	53.463.800,00
78	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	671.782.017,00
79	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	5.609.292,00
80	Program Pengendalian Penduduk	342.688.000,00
81	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	24.630.478,00
82	Program Perlindungan Khusus Anak	523.691.769,00
83	Program Perlindungan Perempuan	182.228.810,00
84	Program Pemasaran Pariwisata	39.204.000,00
85	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	532.976.393,00
86	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	30.798.780.769,00
87	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.148.412.963,00
88	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	496.746.390,00
89	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	2.754.862.953,00
90	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.015.167.870,00

No.	Program	Pagu Anggaran
91	Program Pelayanan Penanaman Modal	271.652.560,00
92	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	233.064.560,00
93	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	364.432.000,00
94	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	160.019.952,00
95	Program Promosi Penanaman Modal	3.458.702.518,00
96	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	33.537.129.024,00
97	Program Pengelolaan Pendidikan	124.928.700.067,00
98	Program Pengembangan Kebudayaan	1.347.742.936,00
99	Program Pengembangan Kurikulum	21.970.636,00
100	Program Pengelolaan Pelayaran	748.819.400,00
101	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	17.622.095.461,00
102	Program Pembinaan Perpustakaan	501.136.932,00
103	Program Pengelolaan Arsip	387.593.163,00
104	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	13.129.360,00
105	Program Kawasan Permukiman	1.171.070.730,00
106	Program Pengelolaan Tanah Kosong	496.071.355,00
107	Program Pengembangan Perumahan	4.385.574.845,00
108	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	24.599.871.265,00
109	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	120.068.000,00
110	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	500.000.000,00
111	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	2.870.515.541,00
112	Program Pemberdayaan Sosial	60.120.000,00
113	Program Penanganan Bencana	142.825.270,00
114	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	14.075.451.104,00
115	Program Rehabilitasi Sosial	75.076.494,00
116	Program Penyelenggaraan Pengawasan	939.513.800,00
117	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	914.391.203,00
118	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	1.986.637.024,00
119	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	115.972.780.656,00
120	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1.084.903.236,00
121	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	949.676.013,00
122	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	714.930.652,00

No.	Program	Pagu Anggaran
123	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	54.741.925.164,00
124	Program Perekonomian Dan Pembangunan	2.025.295.862,00
125	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	21.636.886.275,00
126	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	950.893.138.836,00

Bontang, 05 Januari 2025

Wali Kota Bontang



Neni Moernaeni





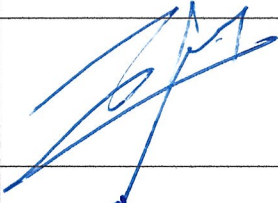
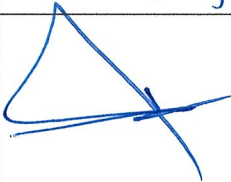
PEMERINTAH KOTA BONTANG
SEKRETARIAT DAERAH

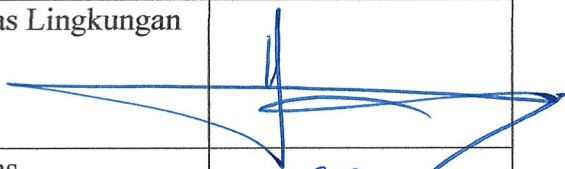
Jalan Moch Roem Nomor 1, Bontang Lestari, Bontang, Kalimantan Timur 75325
Telepon (0548) 3030303 Faksimile (0548) 3030313
Laman setda.bontangkota.go.id, Pos-el setda.ppid@gmail.com

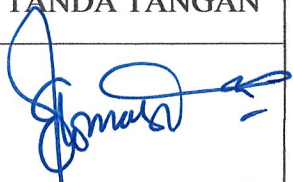
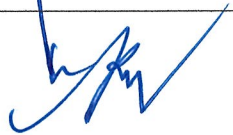
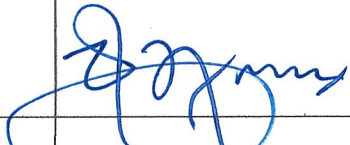
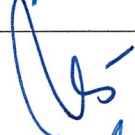
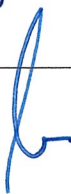
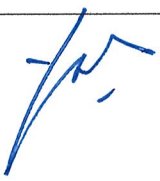
BERITA ACARA
KESEPAKATAN PERUBAHAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA
TAHUN 2025
Nomor : 000.8.6.3/ 257 /ORG/2026

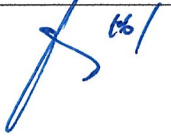
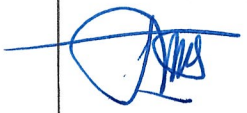
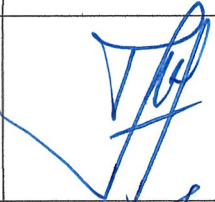
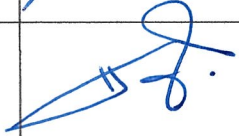
Pada hari ini Rabu tanggal Delapan Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bahwa seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bontang pada kegiatan *Virtual Zoom Meeting* pendampingan penyusunan *draft* Laporan Kinerja Tahun 2025 telah melakukan kesepakatan menyetujui Perubahan Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja tahun 2025 yang juga digunakan sebagai bahan perubahan Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang (sistematika penyusunan Laporan Kinerja tahun 2025 terlampir).

Disepakati Oleh :

No.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Drs. Akhmad Suharto, M.Si	Sekretaris Daerah	
2	Yessy Waspo Prasetyo, S.E	Sekretaris DPRD	
3	Enik Ruswati, SE. MM.Ak, CA., CRA., CGCAE., CFrA., CGRE	Inspektur Daerah	
4	Drs. H. Abdu Safa Muha	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

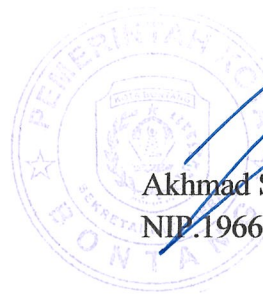
No.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
5	Bahtiar Mabe, S.Sos, M.Kes	Kepala Dinas Kesehatan	
6	H.Much Cholis Edy Prabowo, ST.,M.Si	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
7	Drs. Usman, M.Pd	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
8	Drs. H.Amiluddin, M.Si NURBAENA. SE	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
9	drg. Toetoeck Pribadi Ekowati, M. Kes Muhtar. SE	Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	
10	Drs. H. Muhammad Aspiannur	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
11	Drs. Asdar Ibrahim, M. Si. an. Muh. Rusdi, S.Sos, M.Si PLt. Sekretaris	Kepala Dinas Ketenagakerjaan	
12	Heru Triatmojo, SP, M.Si	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	
13	H. Budiman, S.Sos, M.A.P	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
14	M. Taupan Kurnia S, S.Si Rismawati. S	Kepala Dinas Perhubungan	
15	Andi Hasanuddin Akmal, S.Pi. M.Si Yasni Asyuri	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kasubag Perencanaan	

No.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
16	Eko Mashudi, ST	Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata	
17	Eko Arisandi, S.T, M.Si., CFrA, CGCAE, IPM, ASEAN Eng	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	
18	Ir. Retno Febriaryanti, M.M	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
19	H. Ahmad Aznem, SE, M.Si <i>Supriatni. AS</i>	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	
20	Eddy Forestwanto, SSTP, M.Si <i>M. Samsuddin</i>	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	
21	H.Ahmad Yani Y,S,Sos,M.Si <i>Pangkajene</i>	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	
22	Drs. Sudi Priyanto, M.Si	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
23	Syahrudin, SE, M.A,M.Eng	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	
24	Natalia Trisnawati, S.Pi, M.Si	Kepala Badan Pendapatan Daerah	
25	Muhammad Syahbirin, ST <i>Stap Mohd. Rudyamur</i>	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
26	Deddy Haryanto SE., M.Si <i>Sapta Pambejkar</i>	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

No.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
27	Usman H M, ST, M.Si <i>an. Zulfandi M.</i>	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
28	Muhammad Nur, ST <i>An. Kurnia Prima</i>	Camat Bontang Utara	
29	Ahmad Effa Yuliansyah, ST <i>An. HENI IDRIS</i>	Plt. Camat Bontang Selatan / SEKERTARIS	
30	Hj. Ida Idris, SE	Camat Bontang Barat	
31	Atifah Hanum Adhawiyarti, SSTP	Plt. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Bontang	
32	Mikhael Edy Salamba, S.H, M,H	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Bontang	
33	Syahrial Trianda, S.E, M.Sa	Plt. Inspektur Pembantu 1 Inspektorat Daerah	
33	Toto Julinawansyah, SH	Tim Pengelola SAKIP Kota Bontang	
34	Diny Prathiwi, S.STP	Tim Pengelola SAKIP Kota Bontang	
35	Silverawaty, SE, CRMO, CGP	Tim Pengelola SAKIP Kota Bontang	
36	Meutia Hanum, SE	Tim Evaluator Inspektorat Daerah Kota Bontang	

No.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
37	Indrawati, S.Kom	Tim Evaluator Inspektorat Daerah Kota Bontang	

Mengetahui,
Pj. Sekretaris Daerah



Akhmad Suharto
NIP.196609101986091001

Lampiran 1

Nomor : 000.8.6.3/257 /ORG/2026

Sistematika Laporan kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Bab I - Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Tugas dan Fungsi
- 1.3. Struktur Organisasi
- 1.4. Isu Strategis
- 1.5. Sistematika Penulisan Laporan

2. Bab II – Perencanaan Kinerja

- 2.1. Uraian Singkat Renstra
 - 2.1.1. Uraian perubahan Renstra
- 2.2. Definisi Operasional Indikator
- 2.3. Penetapan Kinerja
 - 2.3.1. Uraian Perubahan PK

3. Bab III - Capaian Kinerja

3.1. Kondisi Lama

Narasi Tabel Capaian

- 3.1.1. Tujuan 1
 - 3.1.1.1. Sasaran 1.1
 - Indikator 1.1.1
 - Perbandingan target dengan realisasi tahun ini
 - Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
 - Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
 - Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar internasional/nasional/regional (jika ada);
 - Indikator 1.1.2
 - Perbandingan target dengan realisasi tahun ini
 - Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
 - Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
 - Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar internasional/nasional/regional (jika ada);

3.1.2 Tujuan 2

3.1.2... Sasaran

- Indikator 1.2...

3.2. Kondisi Baru

Narasi dan Tabel Capaian

3.2.1. Tujuan 1

3.2.1.1. Sasaran 1.1

- Indikator 1.1.1
 - Perbandingan target dengan realisasi tahun ini;
 - Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
 - Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
 - Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar internasional/nasional/regional (jika ada);
 - Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
 - Termasuk indikator yang tidak tercapai/ tidak teridentifikasi (N/A);
 - Indikator yang tercapai ekstrim >150%);
 - Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
 - Disajikan metode cara perhitungan efisiensi
 - Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).
- Indikator 1.1.2

3.2.2.

3.3. Capaian Kinerja Anggaran

4. Bab IV - Penutup

4.1. Hambatan

4.2. Strategi Ke Depan

4.3. LHE dan Tindak Lanjut

4.4. Penilaian Kinerja Organisasi

5. Lampiran